

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, cita-cita utama penyelenggaraan pemerintah daerah dengan prinsip otonomi ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan amanat konstitusi tersebut, maka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dijalankan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan pada hakikatnya bertujuan untuk mempercepat kemajuan pembangunan di daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara dalam bingkai sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Supaya arah pembangunan di daerah terarah dan tersinkronisasi dengan arah pembangunan nasional, maka diperlukan suatu instrumen perencanaan pembangunan yang dapat memastikan hal tersebut, yang salah satunya berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) .

RPJPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan di daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat yang disusun dengan mempertimbangkan input-input yang berasal dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*), baik di tingkat nasional, tingkat regional maupun di tingkat lokal. Selanjutnya, RPJPD ini akan menjadi acuan dalam pembentukan dokumen perencanaan pembangunan lainnya di daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta dokumen perencanaan lainnya.

Peraturan Daerah ini memuat materi mengenai Program RPJPD, Sistematika RPJPD, Pengendalian dan Evaluasi, serta Perubahan RPJPD. Adapun dokumen RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025-2045



Pemerintah Kabupaten
Bandung Barat



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Barat

Tahun 2025 – 2045



Pemerintah Kabupaten
Bandung Barat
Provinsi Jawa Barat

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Bandung Barat

Tahun 2025-2045

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	4
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	8
1.3.1 Keterkaitan RPJPD Kabupaten Bandung Barat dengan RPJPN 2025-2045 ...	10
1.3.2 Keterkaitan RPJPD Kabupaten Bandung Barat dengan RTRW Kabupaten Bandung Barat.....	13
1.3.3 Keterkaitan RPJPD Kabupaten Bandung Barat dengan KLHS RPJPD tahun 2025-2045.....	14
1.4 Maksud dan Tujuan	20
1.5 Sistematika Penulisan.....	21
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	23
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	23
2.1.1 Aspek Geografi	23
2.1.2 Aspek Demografi	58
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	62
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi.....	62
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya.....	77
2.3 Aspek Daya Saing	87
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah.....	88
2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia	97
2.3.3 Daya Saing Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	110
2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi.....	114
2.4 Aspek Pelayanan Umum	119
2.4.1 Reformasi Birokrasi.....	119
2.4.2 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	120

2.4.3	Pelayanan Publik	120
2.4.4	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	121
2.4.5	Inovasi Daerah	121
2.5	Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025	122
2.5.1	Pembangunan Manusia	123
2.5.2	Pertumbuhan Ekonomi	125
2.5.3	Kemiskinan.....	127
2.5.4	Ketimpangan.....	130
2.5.5	Pengangguran	132
2.5.6	PDRB Per Kapita	135
2.6	Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik ..	136
2.6.1	Proyeksi Demografi.....	138
2.6.2	Proyeksi Penduduk.....	141
2.6.3	Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana	154
2.6.4	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan.....	164
2.6.5	Proyeksi Kebutuhan Guru dan Fasilitas Pendidikan	167
2.7	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	172
2.7.1	Kebijakan Pembangunan Kewilayahan.....	173
2.7.2	Rencana Struktur Ruang	178
2.7.3	Rencana Pola Ruang	225
2.7.4	Pengembangan Kawasan Strategis	258
2.7.5	Kebijakan Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Provinsi Jawa Barat dan Nasional	263
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	269
3.1	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	269
3.1.1	Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia	270
3.1.2	Permasalahan Pembangunan Ekonomi	272
3.1.3	Permasalahan Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.....	272
3.1.4	Permasalahan Pembangunan Lingkungan Hidup.....	273
3.1.5	Permasalahan Pembangunan Aspek Dukungan Infrastruktur	274
3.2	Isu Nasional	274
3.2.1	Produktivitas Rendah.....	275

3.2.2	IPTEKIN dan riset lemah.....	276
3.2.3	Deindustrialisasi dini dan produktivitas pertanian rendah.....	276
3.2.4	Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata.....	277
3.2.5	Ekonomi laut belum optimal.....	278
3.2.6	Kontribusi UMKM dan koperasi kecil	278
3.2.7	Infrastruktur dan literasi digital rendah	279
3.2.8	Pembangunan belum berkelanjutan.....	279
3.2.9	Integrasi domestik masih terbatas	280
3.2.10	Kualitas SDM yang masih rendah	281
3.2.11	Tata kelola pemerintahan belum optimal	282
3.2.12	Kepastian dan penegakan hukum masih lemah	283
3.2.13	Demokratisasi belum optimal.....	284
3.2.14	Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa	284
3.3	Isu Regional	284
3.3.1	Isu Pengembangan Wilayah Pulau Jawa.....	285
3.3.2	Isu Provinsi Jawa Barat	287
3.4	Isu Pembangunan Berkelanjutan (KLHS)	290
3.5	Isu Strategis Daerah.....	292
BAB IV	VISI DAN MISI DAERAH	301
4.1	Visi Daerah.....	301
4.2	Misi Daerah.....	309
Misi 1: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan		
Berdaya Saing	310	
Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Mandiri Berbasis		
Sektor Unggulan	311	
Misi 3: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Adaptif, dan		
Kolaboratif	312	
Misi 4: Mewujudkan Kondusivitas dan Stabilitas Daerah	313	
Misi 5: Mewujudkan Masyarakat yang Berakhhlak dan Berkarakter	314	
Misi 6: Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah	315	
Misi 7: Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar	316	

Misi 8: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan	316
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH	319
5.1 Arah Kebijakan Daerah.....	319
5.1.1 Arah Kebijakan Periode 2025-2029.....	323
5.1.2 Arah Kebijakan Periode 2030-2034.....	327
5.1.3 Arah Kebijakan Periode 2035-2039.....	331
5.1.4 Arah Kebijakan Periode 2040-2045.....	334
5.2 Sasaran Pokok.....	339
5.2.1 Arah Pembangunan Daerah	340
5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Bandung Barat.....	343
5.2.3 Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Bandung Barat	353
BAB VI PENUTUP	391
6.1 Kaidah Pelaksanaan	392
6.2 Pembiayaan Pembangunan	394
6.3 Manajemen Risiko	395

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Alternatif Skenario dan Rekomendasi KLHS RPJPD Kabupaten Bandung Barat	
Tahun 2025-2045	15
Tabel 2. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Bandung Barat	24
Tabel 2. 2 Potensi Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan	
di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023.....	34
Tabel 2. 3 Potensi Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Hortikultura	
di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023	35
Tabel 2. 4 Potensi Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Perkebunan	
di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019-2023	37
Tabel 2. 5 Data Potensi Populasi Ternak Besar Menurut Kecamatan Kabupaten Bandung Barat	
Tahun 2019-2023	39
Tabel 2. 6 Rekapitulasi Populasi Ternak Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023	39
Tabel 2. 7 Data Potensi Populasi Ternak Unggas Menurut Kecamatan Kabupaten Bandung Barat	
Tahun 2019-2023	40
Tabel 2. 8 Rekapitulasi Populasi Ternak Unggas Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023.....	41
Tabel 2. 9 Potensi Komoditas Peternakan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023	41
Tabel 2. 10 Potensi Budidaya Perikanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat	
Tahun 2019 – 2023	42
Tabel 2. 11 Data Produksi Ikan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023	42
Tabel 2. 12 Produksi Komoditas Perikanan Unggulan Kabupaten Bandung Barat	
Tahun 2019-2023	43
Tabel 2. 13 Potensi Wisata Alam di Kabupaten Bandung Barat	45
Tabel 2. 14 Daya Dukung Penyedia Air Bersih di Kabupaten Bandung Barat.....	48
Tabel 2. 15 Skenario Proyeksi Daya Dukung Penyedia Air Bersih di Kabupaten Bandung Barat.....	49
Tabel 2. 16 Luas Daya Dukung Pangan (Beras) di Kabupaten Bandung Barat.....	50
Tabel 2. 17 Skenario Proyeksi Daya Dukung Penyedia Pangan di Kabupaten Bandung Barat.....	51
Tabel 2. 18 Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran dan Banjir	55
Tabel 2. 19 Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana.....	56
Tabel 2. 20 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk	
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023	59

Tabel 2. 21 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 - 2023 Kabupaten Bandung Barat	63
Tabel 2. 22 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2019-2023	64
Tabel 2. 23 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 - 2023 Kabupaten Bandung Barat	65
Tabel 2. 24 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2019-2023.....	66
Tabel 2. 25 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2010 Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 - 2023 (persen).....	67
Tabel 2. 26 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2019-2023.....	68
Tabel 2. 27 Inflasi Y to Y Kota di Jawa Barat Tahun 2023.....	69
Tabel 2. 28 Persentase Penduduk Miskin, Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 - 2023	70
Tabel 2. 29 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2019-2023 (Persen).....	71
Tabel 2. 30 Indeks Kedalaman Kemiskinan Dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 - 2023	72
Tabel 2. 31 Data Kemiskinan Ekstrem Berdasarkan Data P3KE di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023	73
Tabel 2. 32 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 - 2023.....	78
Tabel 2. 33 Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota di Jawa Barat Barat Tahun 2023.....	80
Tabel 2. 34 Potensi Keragaman Budaya Kabupaten Bandung Barat 2019 - 2023	84
Tabel 2. 35 Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Kabupaten Bandung Barat 2021 - 2023	85
Tabel 2. 36 Indikator Kinerja Pemuda dan Olahraga Di Kabupaten Bandung Barat 2019 - 2023.....	85
Tabel 2. 37 Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 - 2023 (persen).....	89
Tabel 2. 38 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 - 2023.....	91
Tabel 2. 39 Pengeluaran per Kapita Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2029-2023 (Rp.000/kapita/tahun).....	93
Tabel 2. 40 PDRB Hijau Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2022	95
Tabel 2. 41 PDRB Hijau Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2022	96

Tabel 2. 42 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023 (Tahun).....	102
Tabel 2. 43 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2019-2023.....	103
Tabel 2. 44 Umur Harapan Hidup Kab/Kota di Jawa Barat Tahun 2019-2023 (Tahun).....	105
Tabel 2. 45 Rasio Ketergantungan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 - 2023	106
Tabel 2. 46 Kondisi ASN Kabupaten Bandung Barat Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2019 – 2023	108
Tabel 2. 47 Data Kondisi Jalan di Kab. Bandung Barat Tahun 2019 - 2023.....	111
Tabel 2. 48 Data Jumlah Angkutan Barang di Kab. Bandung Barat Tahun 2019 - 2023.....	112
Tabel 2. 49 Aksebilitas Kendaraan Umum di Kab. Bandung Barat Tahun 2019 – 2023	112
Tabel 2. 50 Data Infrastruktur Fasilitas Kegiatan Ekonomi di Kab. Bandung Barat Tahun 2019-2023	114
Tabel 2. 51 Indeks Rasa Aman Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023	115
Tabel 2. 52 Persentase Jumlah Izin yang Terbit Sesuai SOP di Kab. Bandung Barat Tahun 2023	117
Tabel 2. 53 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023	118
Tabel 2. 54 Capaian Indikator Aspek Pelayanan Umum Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 - 2023.....	119
Tabel 2. 55 Proyeksi Indikator Fertilitas dan Mortalitas Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 dan 2035	140
Tabel 2. 56 Proyeksi Jumlah Penduduk di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2045	141
Tabel 2. 57 Proyeksi Penduduk Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Jenis Kelamin	142
Tabel 2. 58 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Bandung Barat Tahun 2020-2045	144
Tabel 2. 59 Komposisi Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2045.....	146
Tabel 2. 60 Proyeksi Sebaran Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 - 2045.....	148
Tabel 2. 61 Proyeksi Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2045.....	149
Tabel 2. 62 Proyeksi Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 - 2045	150
Tabel 2. 63 Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Bandung Barat, 2020–2035	153
Tabel 2. 64 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045	155
Tabel 2. 65 Standar Kebutuhan Air Bersih	156
Tabel 2. 66 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 s/d 2045	157
Tabel 2. 67 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 s/d 2045	159

Tabel 2. 68 Standar Acuan Timbulan Sampah	161
Tabel 2. 69 Proyeksi Volume Timbulan Sampah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045	162
Tabel 2. 70 Standar Kebutuhan Prasarana Persampahan	163
Tabel 2. 71 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045.....	164
Tabel 2. 72 Proyeksi Jumlah Murid Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045	168
Tabel 2. 73 Proyeksi Jumlah Kebutuhan Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045.....	170
Tabel 2. 74 Proyeksi Jumlah Kebutuhan Gedung Sekolah di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045	171
Tabel 2. 75 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kab. Bandung Barat 2024-2044.....	174
Tabel 2. 76 Indikasi Program RTRW Perwujudan Sistem Pusat Permukiman Kab. Bandung Barat ..	182
Tabel 2. 77 Indikasi Program RTRW Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Kab. Bandung Barat ..	197
Tabel 2. 78 Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Bandung Barat	226
Tabel 2. 79 Perwujudan Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Bandung Barat	228
Tabel 2. 80 Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten Bandung Barat	259
Tabel 2. 81 Sistem Perkotaan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya	264
 Tabel 3. 1 Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia	271
Tabel 3. 2 Permasalahan Pembangunan Ekonomi	272
Tabel 3. 3 Permasalahan Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.....	273
Tabel 3. 4 Permasalahan Pembangunan Lingkungan Hidup	273
Tabel 3. 5 Permasalahan Pembangunan Aspek Dukungan Infrastruktur	274
Tabel 3. 6 Isu Pengembangan Wilayah Pulau Jawa.....	285
Tabel 3. 7 Tabulasi Silang Isu Strategis Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045.....	293
 Tabel 4. 1 Perumusan Visi RPJPD Kabupaten Bandung Barat	302
Tabel 4. 2 Penjelasan Pokok-pokok Visi RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045.....	303
Tabel 4. 3 Persandingan Visi Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia	304
Tabel 4. 4 Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045.....	305
Tabel 4. 5 Penyelarasan Sasaran dan Indikator Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Bandung Barat, RPJPD Provinsi Jawa Barat, dan RPJPN Tahun 2025-2045	307
Tabel 4. 6 Rumusan Misi RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045	309
Tabel 4. 7 Persandingan Misi Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia	318

Tabel 5. 1 Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045.....	321
Tabel 5. 2 Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Bandung Barat, RPJPD Provinsi Jawa Barat, dan RPJPN Tahun 2025-2045	341
Tabel 5. 3 Arah Kebijakan Transformatif RPJPD Kabupaten Bandung Barat 2025-2045	343
Tabel 5. 4 Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Bandung Barat 2025-2045 hasil Penyelarasan dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045.....	354
Tabel 5. 5 Perumusan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bandung Barat 2025-2045	366

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor lainnya.....	9
Gambar 1. 2 Integrasi muatan KLHS RPJPD ke dalam RPJPD	15
Gambar 2. 1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Bandung Barat.....	25
Gambar 2. 2 Peta Batas Wilayah Kabupaten Bandung Barat dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya	26
Gambar 2. 3 Kabupaten Bandung Barat sebagai Pintu Masuk dan Bagian dari KSN Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.....	27
Gambar 2. 4 Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Bandung Barat.....	57
Gambar 2. 5 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023	58
Gambar 2. 6 Piramida Penduduk Kabupaten Bandung Barat Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020.....	60
Gambar 2. 7 Grafik Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023	74
Gambar 2. 8 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat 2019-2023.....	75
Gambar 2. 9 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023	76
Gambar 2. 10 Perbandingan IPM Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023	79
Gambar 2. 11 Capaian Indeks Pemberdayaan dan Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023	81
Gambar 2. 12 Capaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023 ..	88
Gambar 2. 13 Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023	92
Gambar 2. 14 Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kab. Bandung Barat, Tahun 2019-2023	98
Gambar 2. 15 APK Menurut Jenjang Pendidikan di Kab. Bandung Barat Tahun 2019 - 2023.....	99
Gambar 2. 16 APM Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 - 2023.....	100
Gambar 2. 17 APS Menurut Jenjang Pendidikan di Kab. Bandung Barat Tahun 2019 - 2023.....	101

Gambar 2. 18 Umur Harapan Hidup Saat Lahir di Kabupaten Bandung Barat	
Tahun 2019 – 2023	104
Gambar 2. 19 Piramida Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023	106
Gambar 2. 20 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen) Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Bandung Barat 2019 – 2023.....	109
Gambar 2. 21 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan 2017-2023 (persen).....	109
Gambar 2. 22 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Kabupaten Bandung Barat, 2023	110
Gambar 2. 23 Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023.....	113
Gambar 2. 24 Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 - 2023.....	116
Gambar 2. 25 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 - 2022.....	124
Gambar 2. 26 Perbandingan IPM Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022	125
Gambar 2. 27 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 - 2022.....	126
Gambar 2. 28 Presentase Kemiskinan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 - 2022.....	128
Gambar 2. 29 Presentase Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 - 2023.....	129
Gambar 2. 30 Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 – 2022.....	130
Gambar 2. 31 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 - 2022.....	133
Gambar 2. 32 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022	134
Gambar 2. 33 PDRB Per Kapita Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008-2022	135
Gambar 2. 34 Piramida Penduduk Kabupaten Bandung Barat.....	145
Gambar 2. 35 Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk di Bandung Barat Tahun 2020-2035.....	152
Gambar 2. 36 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Bandung Barat.....	179
Gambar 2. 37 Peta Sistem Pusat Permukiman di Kabupaten Bandung Barat	180
Gambar 2. 38 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bandung Barat	225
Gambar 2. 39 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Bandung Barat.....	259
Gambar 5. 1 Tema Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045.....	320

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini memuat beberapa hal yang menjadi pendahuluan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045, diantaranya adalah latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, telaah hubungan antar dokumen, maksud beserta tujuan penyusunan, serta sistematika kepenulisan. Bab ini menjadi pengantar bagi bagian-bagian selanjutnya yang termuat dalam bab-bab ke depan.

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Barat tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan jangka panjang di tingkat daerah yang perlu disusun, mengingat dokumen RPJPD Kabupaten Bandung Barat tahun 2005-2025 akan berakhir. Dokumen RPJPD disusun sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, merupakan penjabaran visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Barat dan Rencana Tata Ruang Wilayah. Dokumen RPJPD Kabupaten Bandung Barat tahun 2025-2045 memuat beberapa hal yang menjadi inti dari pembangunan daerah jangka panjang selama dua puluh tahun ke depan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 yang memuat: gambaran umum kondisi Kabupaten Bandung Barat; pemetaan masalah dan/atau potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung Barat; visi dan misi jangka panjang daerah; arah kebijakan; dan sasaran pokok beserta indikator sasaran pokok perencanaan jangka panjang Kabupaten Bandung Barat.

Dokumen RPJPD Kabupaten Bandung Barat disusun dengan berorientasi pada proses menggunakan pendekatan, diantaranya:

- a. Pendekatan teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- b. Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- c. Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD untuk dijadikan acuan dan pedoman Calon Kepala Daerah yang dibahas bersama dengan DPRD;
- d. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan.

Serta dengan mengedepankan aspek tematik, holistik, integratif dan sinergis yang berorientasi pada substansi, yaitu:

- a. Pendekatan holistik-tematik, dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bag/keg pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- b. Pendekatan integrative, dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
- c. Pendekatan spasial, dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Perpaduan pendekatan dan aspek metode perencanaan ini diharapkan dapat membuat RPJPD Kabupaten Bandung Barat menjadi dokumen perencanaan yang berkualitas sesuai dengan standar akademik dan peraturan yang berlaku, sehingga dapat mendukung terwujudnya **Bandung Barat Sejahtera Maju dan Berkelanjutan** sebagai salah satu upaya mendukung pencapaian **Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia dan Berkelanjutan** serta lebih jauh juga untuk mendukung upaya cita-cita **Indonesia Emas 2045**.

Dokumen RPJPD Kabupaten Bandung Barat tahun 2025-2045 memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah secara umum. Dokumen RPJPD ini disusun sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan turunannya, yaitu dokumen perencanaan jangka menengah maupun dokumen perencanaan jangka pendek. Visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok, dan indikator sasaran pokok yang dituangkan dalam RPJPD ini perlu dikawal dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek untuk menjamin aspek sinergitas antar dokumen perencanaan. RPJPD akan dioperasionalkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga Bupati Bandung Barat yang terpilih harus memedomani RPJPD sesuai dengan arah pembangunan dan sasaran pokok per 5 (lima) tahunan pada periode Bupati yang bersangkutan.

Dalam rangka menjaga keberlangsungan dan kesinambungan pembangunan, RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045 kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahunan. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) untuk selanjutnya diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Bappenas tentang Penyelarasan RPJPD dan RPJPN Tahun 2025-2045 serta diselaraskan dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat tentang Penyelarasan RPJPD Kab/Kota dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 sehingga sinergitas dan keselarasan perencanaan pembangunan merupakan kunci keberhasilan pembangunan baik di daerah maupun nasional.

Perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung Barat tahun 2025-2045 juga disusun dengan mengedepankan semangat nilai-nilai yang terkandung di dalam konsep pembangunan berkelanjutan yang memastikan bahwa bukan hanya pembangunan yang didorong maju, namun juga kelestarian lingkungan yang juga tetap dipertahankan.

Dokumen RPJPD Bandung Barat tahun 2025-2045 merupakan dokumen milik daerah secara umum, sehingga seluruh pihak (masyarakat, swasta, pemerintah dan seluruh stakeholders) berpartisipasi aktif dalam penyusunan dokumen RPJPD ini. Keterlibatan stakeholders ini mengedepankan semangat nilai-nilai inklusivitas dan berkelanjutan dalam proses perencanaan pembangunan daerah secara umum, dengan memberikan ruang yang besar dan seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasi berupa masalah dan harapan bagi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung Barat pada periode 2025-2045.

RPJPD Kabupaten Bandung Barat tahun 2025-2045 ini dapat digunakan sebagai panduan untuk menjalankan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Bandung Barat yang memiliki potensi yang sangat besar berupa sumber daya manusia, ekonomi dan lingkungan dengan dukungan tata kelola pemerintahan dan infrastruktur daerah yang ada demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat dengan menempatkan manusia atau masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan manusia/masyarakat sebagai penikmat dan pelaku pembangunan.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045 mempertimbangkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);
 14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 5 seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 3 seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

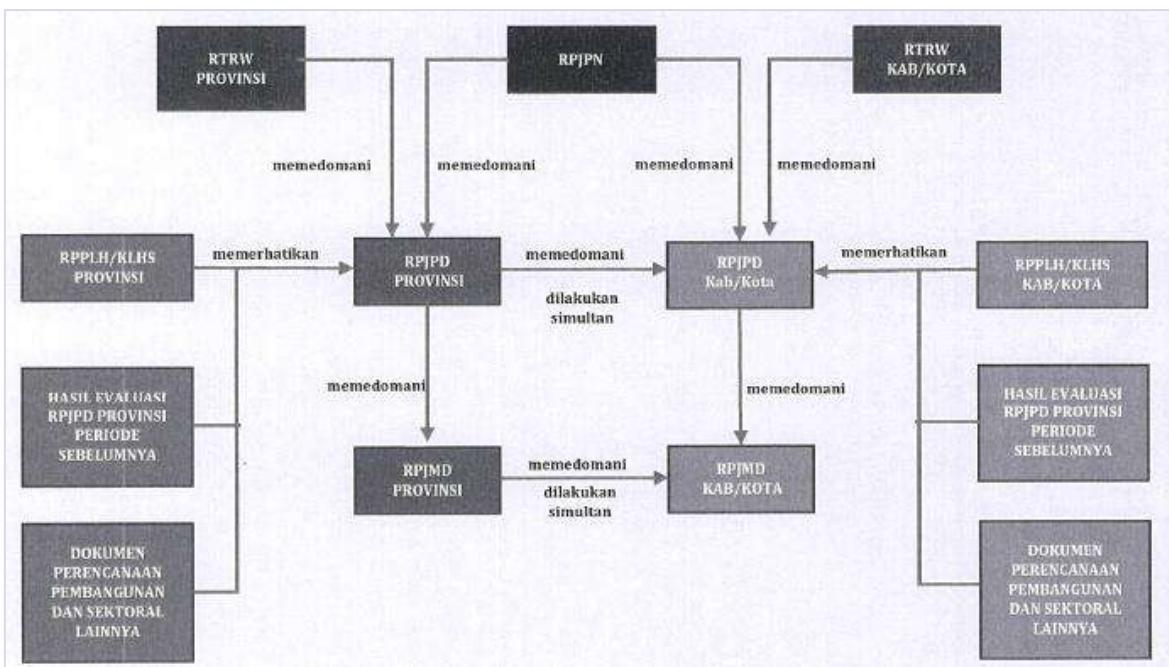
Sistem perencanaan pembangunan daerah adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan yang menghasilkan rencana pembangunan dalam berbagai jangka waktu, mulai dari jangka panjang, menengah, hingga tahunan. Berbagai rencana yang telah ditetapkan tersebut diimplementasikan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat, mulai dari yang berada di tingkat pusat hingga daerah.

RPJPD tingkat daerah Kabupaten/Kota disusun dengan tetap memperhatikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi. RPJPD yang disusun oleh kabupaten/kota kemudian dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah dalam waktu lima tahun, yakni dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perencanaan yang telah termuat dalam RPJMD kemudian dijabarkan secara lebih lanjut dalam ke dalam dokumen rencana tahunan, yakni Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dalam menjaga sinergitas antara pusat dengan daerah, perencanaan pembangunan memiliki hierarki yang menjadi arah acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Kabupaten Bandung Barat dalam merumuskan perencanaan pembangunan juga diharuskan mengacu pada hierarki perencanaan pembangunan nasional, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa secara hierarkis, perencanaan Kabupaten/Kota diharuskan untuk mengacu perencanaan tingkat provinsi dan nasional, oleh karena itu penyusunan RPJPD Kabupaten Bandung Barat tahun 2025-2045 merujuk pada arah pembangunan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional tahun 2025-2045 melalui penyelarasan antara visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang.

Keterkaitan antara RPJPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, digambarkan secara sistematis pada gambar 1.1 berikut:

Gambar 1. 1 Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor lainnya



Sumber: Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024

Gambar 1.1 di atas terkait hubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- Penyusunan RPJPD Kab/Kota berpedoman dan diselaraskan dengan RPJPD Provinsi.
- Penyusunan RPJPD memperhatikan hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya dalam rangka kesinambungan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Penyusunan RPJPD untuk memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

- Penyusunan RPJPD diselaraskan dengan arah kebijakan kewilayahan dan sarana prasarana sebagaimana tertuang pada dokumen RTRW dan dokumen perencanaan pembangunan sektor lainnya.
- RPJPD dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka wakti 5 (lima) tahun.

1.3.1 Keterkaitan RPJPD Kabupaten Bandung Barat dengan RPJPN 2025-2045

Dokumen RPJPN memuat rencana pembangunan jangka panjang nasional yang berahir pada tahun 2045 bertepatan dengan 100 tahun Indonesia merdeka. Indonesia memiliki visi besar untuk mewujudkan Indonesia emas. Visi Indonesia yang dirumuskan dalam dokumen RPJPN adalah "**Indonesia Emas 2045: NKRI Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan**". Visi tersebut memiliki lima sasaran utama yaitu 1) Pendapatan per kapita setara dengan negara maju; 2) Kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang; 3) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; 4) Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan 5) Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menurun menuju net zero emission. Keselarasan RPJPD dengan RPJPN menjadi sangat penting guna memastikan substansi yang diatur sejak Rancangan Awal RPJPD hingga dokumen RPJPD mengacu dan selaras dengan RPJPN.

Visi dan sasaran utama dalam dokumen RPJPD akan dicapai melalui pelaksanaan 8 misi atau agenda pembangunan yang memiliki gagasan besar untuk mewujudkan transformasi Indonesia. Delapan misi tersebut antara lain adalah:



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2023 (diolah)

Misi atau agenda pembangunan yang membawa arah besar transformasi tersebut memiliki beberapa upaya super prioritas untuk mewujudkannya sebagai berikut:

1. Transformasi sosial:

- Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
- Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas, termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan.
- Restrukturisasi kewenangan pengelolaan pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan.
- Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan, terutama tuberkulosis dan kusta.
- Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.

2. Tranformasi Ekonomi:

- Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri.
- Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor.
- Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau.
- Superplatform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital.
- Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi.
- Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola:

- Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, manajemen ASN (terutama *single salary* dan sistem pensiun), serta pemberantasan korupsi.
- Penguatan integritas partai politik.

4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia:

- Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *advocat general*.
- Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan value chain industri nasional.
- Transformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko, penerapan aturan fiskal adaptif, reformasi APBN, serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal.

- Reformasi subsidi, terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi:

- Penguatan karakter dan jatidiri bangsa.
- Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
- Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*Food, Energy, Water*).

Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu daerah di Jawa Barat memiliki potensi sumber daya alam yang meliputi pertanian, perkebunan dan pariwisata yang menjanjikan. Kebijakan kewilayahan ini diwujudkan melalui optimalisasi potensi unggulan dan potensial. RPJPD Kabupaten Bandung Barat harus mampu menjabarkan dan mendukung keberhasilan transformasi Indonesia emas 2045 melalui transformasi ekonomi, yang inklusif dan berkelanjutan didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan tata kelola yang inovatif serta kualitas infrastruktur yang memadai.

1.3.2 Keterkaitan RPJPD Kabupaten Bandung Barat dengan RTRW Kabupaten Bandung Barat

Penyusunan RPJPD Kabupaten Bandung Barat tahun 2025-2045 mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Barat tahun 2024-2044. Periode RTRW Kabupaten Bandung Barat memiliki irisan yang cukup panjang dan sejalan dengan periode RPJPD. Kesesuaian RPJPD dengan RTRW menjadi bagian yang cukup vital mengingat Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi pengembangan wilayah yang cukup dinamis.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 tujuan penataan ruang Kabupaten Bandung Barat adalah **“Mewujudkan Kabupaten Bandung Barat sebagai Kabupaten Agroindustri dan Wisata Ramah Lingkungan untuk Mendukung Perkembangan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya”**.

Wujud ruang wilayah yang memiliki potensi besar dalam hal agroindustri dan wisata ramah lingkungan diharapkan dapat meningkatkan minat investasi di Kabupaten Bandung Barat serta mendukung perkembangan PKN kawasan perkotaan Bandung Raya. Hal tersebut diharapkan mampu memicu perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat.

Hal ini perlu ditopang dengan pengaturan ruang serta aspek pendukung lainnya, terutama aspek sarana prasarana serta manajerialnya. Guna menjamin terwujudnya tujuan tersebut, maka berbagai kebijakan dan strategi penataan ruang perlu diintegrasikan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045.

1.3.3 Keterkaitan RPJPD Kabupaten Bandung Barat dengan KLHS RPJPD tahun 2025-2045

KLHS menjadi rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif, untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka panjang atau RPJPD Kabupaten Bandung Barat. Percepatan pembangunan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan tanpa mempertimbangkan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sosial akan menjadi sumber bencana dan ancaman bagi kesejahteraan masyarakat. Prinsip pembangunan berkelanjutan memastikan bahwa perencanaan pembangunan harus dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta kualitas kehidupan manusia.

Gambar 1. 2 Integrasi muatan KLHS RPJPD ke dalam RPJPD



Sumber: Analisis Data, 2024

Prinsip pengintegrasian memberikan jaminan KLHS menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan kebijakan rencana program. Integrasi memastikan bahwa perencanaan dalam dokumen RPJPD tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi, namun juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan analisis isu pembangunan berkelanjutan dirumuskan alternatif skenario dan rekomendasi KLHS RPJPD sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Alternatif Skenario dan Rekomendasi KLHS RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045

Isu Strategis	Alternatif Skenario	Outcomes
<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan Kurangnya keterampilan/Skill Setiap Individu Rendahnya lamanya usia pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat Peningkatan lapangan kerja Peningkatan keterampilan Perlindungan sosial Menjaga stabilitas ekonomi 	Penurunan jumlah masyarakat yang hidup miskin dan terwujudnya masyarakat yang sejahtera
<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya akses pengelolaan air minum pada beberapa wilayah tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan layanan air minum yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat 	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak

Isu Strategis	Alternatif Skenario	Outcomes
<ul style="list-style-type: none"> • Kendala pada aspek geografis (topografi; terutama pemenuhan kebutuhan air melalui sistem pengelolaan air minum perpipaan, serta keterbatasan anggaran yang ada. • Masih adanya masyarakat miskin; yang mempengaruhi keterbatasan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan air minum 	<ul style="list-style-type: none"> • melalui pengelolaan air minum. • Menyusun rencana induk pengelolaan jaringan air bersih/air minum • Pengembangan embung untuk kebutuhan air baku • Pengembangan teknologi pengolahan air minum • Peningkatan kualitas air minum • Pengembangan dan pengelolaan sarana pengairan, pengembangan kinerja pengelolaan air minum 	
<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan kehidupan lingkungan sehat • Masih terdapatnya masyarakat miskin • Persentase capaian akses sanitasi layak 74,35% (GAP 25,65%) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penuntasan Buang air besar sembarangan (BABS) dan peningkatan desa ODF • Peningkatan sarana dan prasarana Penunjang Akses Sanitasi Layak • Penanggulangan penyakit yang disebabkan kurang baiknya sanitasi dan perilaku BABS • Peningkatan sarana pengelolaan air limbah 	Meningkatnya akses sanitasi yang memadai dan merata bagi semua
<ul style="list-style-type: none"> • Masalah kemiskinan: yang disebabkan menurunnya daya beli masyarakat terhadap pangan • Alih fungsi lahan: mengakibatkan berkurangnya pangan • Meningkatnya jumlah penduduk sehingga meningkatnya jumlah konsumsi • Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya gizi seimbang 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pangan • Peningkatan dan pemantauan distribusi Pangan • Stabilisasi harga untuk peningkatan daya beli pangan 	Meningkatkan Daya Dukung Pangan
<ul style="list-style-type: none"> • Masalah kemiskinan: yang disebabkan menurunnya daya beli masyarakat terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan akses pemenuhan gizi termasuk akses mengenai informasi 	Terpenuhinya Kebutuhan Pangan

Isu Strategis	Alternatif Skenario	Outcomes
<p>pangan, kurangnya produktifitas tanaman pangan karena masalah perubahan iklim, serta kurangnya suplay air</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya gizi seimbang 	<p>asupan gizi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi mengenai gizi seimbang • Peningkatan pemenuhan pangan dengan kebutuhan gizi yang sesuai bagi balita, anak-anak, ibu hamil, dan manula. • Pemerataan akses dan distribusi pangan 	
<ul style="list-style-type: none"> • Masalah kemiskinan: yang disebabkan menurunnya daya beli masyarakat terhadap pangan • Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya gizi seimbang 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan akses pemenuhan gizi termasuk akses mengenai informasi asupan gizi • Sosialisasi mengenai gizi seimbang • Peningkatan pemenuhan pangan dengan kebutuhan gizi yang sesuai bagi balita, anak-anak, ibu hamil, dan manula. • Pemerataan akses dan distribusi ikan sebagai sumber pangan 	Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya jangkauan layanan kesehatan pada wilayah tertentu • Masalah kemiskinan • Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya persalinan di fasilitas kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan di setiap wilayah • Penguatan Puskesmas dan Jaringannya • Sosialisasi konseling serta pemberdayaan perempuan dan pasangannya 	Meningkatkan proses melahirkan di fasilitas kesehatan
<ul style="list-style-type: none"> • Adanya perilaku hubungan bebas • Penggunaan Narkoba • Kurangnya jangkauan layanan kesehatan pada wilayah tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan fasilitas dan pelayanan Kesehatan terhadap Pengidap HIV • Meningkatkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang merata • Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV 	Menghilangkan indisendi HIV

Isu Strategis	Alternatif Skenario	Outcomes
Kurangnya jangkauan layanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan di setiap wilayah • Penguatan Puskesmas dan Jaringannya • Sosialisasi konseling serta pemberdayaan perempuan dan pasangannya 	Terwujudnya Kesejahteraan Keluarga Berencana
<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Layanan Jaminan Kesehatan Nasional • Kurangnya sosialisasi yang menjangkau setiap pelosok wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan mutu layanan Jaminan Kesehatan Nasional • Larangan menarik biaya kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional • Edukasi mengenai jaminan kesehatan Nasional • Kewajiban kerjasama seluruh rumah sakit dengan BPJS 	Meningkatnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya timbulan sampah yang belum terkelola • Masalah adanya masyarakat miskin 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan sampah dari sumber • Peningkatan Kesadaran masyarakat • Peningkatan infrastuktur, sarana dan prasarana persampahan • Partisipasi masyarakat pada Bank Sampah 	Pengelolaan sampah yang terpadu
<ul style="list-style-type: none"> • Intensitas curah hujan yang tinggi • Faktor fisik alami seperti kemiringan lereng dan topografi serta jenis tanah yang rawan longsor • Pemanfaatan tanah untuk budidaya seperti hortikultur pada kemiringan lereng yang tinggi • Pembangunan sekitar sempadan sungai 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan kapasitas di tingkat daerah dan masyarakat untuk menghadapi dan melakukan upaya penanggulangan bencana (Aspek Kondisi Sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat) • Kearifan lokal berkaitan dengan budaya dan adat istiadat yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana 	Terjaminnya akses bagi semua terhadap perumahan yang layak dan terjangkau

Isu Strategis	Alternatif Skenario	Outcomes
<ul style="list-style-type: none"> Terjadi kerusakan lahan bekas tambang Masih adanya terbatasnya kemampuan masyarakat dalam pemenuhan hunian layak Masalah adanya masyarakat miskin 	<ul style="list-style-type: none"> Pengentasan masalah kemiskinan Peningkatan pendapatan masyarakat Bantuan Penyediaan Perumahan Pemberian Subsidi Pembiayaan Perumahan 	Terjaminnya akses bagi semua terhadap perumahan yang layak dan terjangkau
<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang layanan pendidikan Belum optimalnya pendidikan karakter pada anak Masalah adanya masyarakat miskin 	<ul style="list-style-type: none"> Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pendidikan Peningkatan pendidikan karakter pada anak Peningkatan Kompetensi guru Pemberian Subsidi Pembiayaan Perumahan 	Terjaminnya Pendidikan yang Berkualitas bagi semua
<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya kualitas sumber daya manusia; keterbatasan masyarakat yang pendidikan tinggi atau perguruan tinggi Masih adanya kemiskinan sehingga terbatasnya kemampuan masyarakat dalam meneruskan jenjang yang pendidikan yang lebih tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja Peningkatan kualitas pendidikan, dan lama usia belajar Peningkatan pendapatan masyarakat 	Menghilangkan Pengangguran
<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya daya saing daerah Kurang terciptanya lapangan pekerjaan Masih adanya kemiskinan sehingga terbatasnya kemampuan masyarakat dalam meneruskan jenjang yang pendidikan yang lebih tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Pertanian dan Agro Industri Pengembangan Sektor sektor lain secara seimbang Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja 	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Sumber: KLHS RPJPD Tahun 2025-2045

1.4 Maksud dan Tujuan

RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045 disusun dalam rangka menentukan dan memberikan arah pembangunan daerah di Kabupaten Bandung Barat dalam waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045 secara lebih rinci memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman pembangunan jangka panjang daerah bagi semua pemangku kepentingan. Pedoman pembangunan memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Jawa Barat;
2. Menyajikan gambaran umum kondisi daerah saat ini dalam ruang lingkup regional dan nasional, sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai selama 20 (dua puluh) tahun mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara pusat dengan daerah;
4. Mengoptimalkan partisipasi elemen masyarakat secara umum dalam pembangunan daerah;
5. Memastikan terciptanya penggunaan sumber daya yang dimiliki daerah secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan RPJPD ini adalah untuk memberikan pedoman umum bagi pembangunan turunannya, yaitu pembangunan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang nantinya juga akan memuat visi, misi, strategi, arah kebijakan hingga program dari kepala daerah terpilih.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045 terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan terkait latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045.

BAB II: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisi penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi, demografi, serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diupayakan untuk selaras dan mendukung penyelesaian permasalahan pembangunan daerah, isu strategis, visi/misi daerah, tujuan, sasaran pokok, dan kebutuhan perumusan arah kebijakan. Bab ini juga memuat perihal proyeksi demografi dan kebutuhan sarana prasarana selama dua puluh tahun ke depan, serta indikasi kinerja pembangunan berdasarkan rencana tata ruang dan tata wilayah serta rencana sektoral lainnya yang ada.

BAB III: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Berisi penyajian analisis yang menjelaskan poin-poin penting mengenai permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah Kabupaten Bandung Barat dalam waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang.

BAB IV: VISI DAN MISI DAERAH

Bagian ini menyajikan visi dan misi dalam dokumen RPJPD Kabupaten Bandung Barat sehingga dapat menggambarkan keadaan atau cita-cita yang ingin dicapai dari hasil pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun yang akan datang.

BAB V: ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Bab ini menjelaskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang menjelaskan hubungan antara sasaran dengan sasaran pokok serta penahapan pembangunan yang akan dilakukan setiap lima tahun selama 4 (empat) periode.

BAB VI: PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merangkum isi dokumen RPJPD Kabupaten Bandung Barat 2025-2045.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum, aspek daya saing, hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Bandung Barat tahun 2005-2025, proyeksi demografi dan kebutuhan sarana prasarana, serta indikasi kinerja berdasarkan perencanaan kewilayahan dan sektoral yang terkait. Data dalam bab ini menjadi dasar bagi analisis permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan jangka panjang daerah di Bab III.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Untuk melihat gambaran dan kondisi Kabupaten Bandung Barat berdasarkan geografis menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam dan gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim serta gambaran aspek demografi yang menjelaskan karakteristik demografi daerah mencakup ukuran, struktur dan distribusi penduduk di Kabupaten Bandung Barat.

2.1.1 Aspek Geografi

Aspek geografi menggambarkan lokasi dan letak suatu daerah terhadap kondisi fisik dan administrasi kewilayahan. Aspek geografi berperan dalam pendekatan keruangan untuk perencanaan daerah yang melibatkan posisi dan karakteristik fisik dalam mengidentifikasi potensi sumberdaya alam Kabupaten Bandung Barat.

2.1.1.1 Luas, Batas dan Wilayah Administratif

Berdasarkan Karakteristik Lokasi dan Wilayah, secara Astronomis Kabupaten Bandung Barat terletak pada $06^{\circ} 3,73'$ - $07^{\circ} 1,031'$ Lintang Selatan dan $107^{\circ} 1,10'$ - $107^{\circ} 4,40'$ Bujur Timur dengan Luas wilayah sebesar 1.284,67 Km² atau 128.467 Ha, yang secara administratif terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 165 Desa, dengan rincian luas wilayah menurut administratif kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Bandung Barat

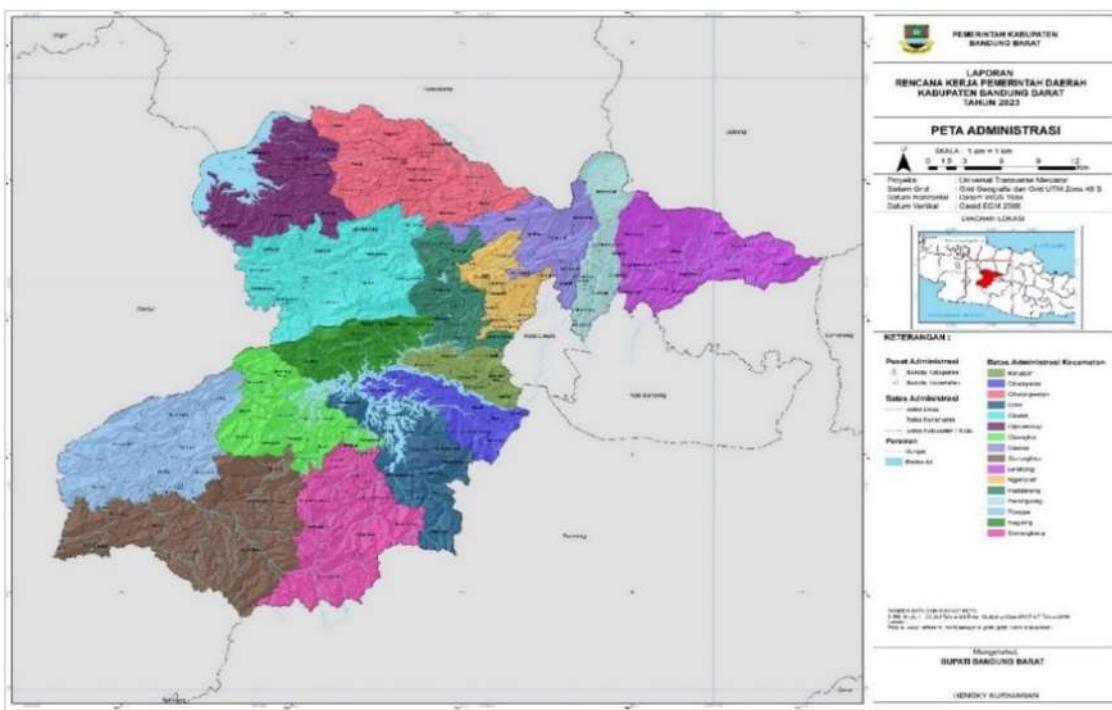
Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Desa
1. Rongga	112,64	8
2. Gununghalu	155,47	9
3. Sindangkerta	106,30	11
4. Cililin	77,83	11
5. Cihampelas	47,04	10
6. Cipongkor	80,16	14
7. Batujajar	31,11	7
8. Saguling	51,58	6
9. Cipatat	125,98	12
10. Padalarang	51,63	10
11. Ngamprah	35,65	11
12. Parongpong	45,02	7
13. Lembang	98,22	16
14. Cisarua	55,63	8
15. Cikalongwetan	110,94	13
16. Cipeundeuy	102,19	12
Kab. Bandung Barat	1.287,41	165

Sumber: RTRW KBB Tahun 2024-2044

Dari tabel diatas, Kecamatan Gununghalu merupakan wilayah terluas di Kabupaten Bandung Barat yaitu 155,08 Km² dan berturut-turut kecamatan dengan luas wilayah di atas 100 Km², yaitu Cipatat, Rongga, Cikalongwetan, Sindangkerta dan Cipendeuy. Sisanya memiliki luas wilayah di bawah 100 Km² dan Kecamatan Batujajar merupakan Kecamatan dengan luas wilayah terendah yaitu 31,06 Km².

Sedangkan jumlah desa terbanyak ada di kecamatan Lembang sebanyak 16 Desa dan Kecamatan Saguling merupakan Kecamatan dengan jumlah Desa paling sedikit yaitu 6 Desa, berikut peta wilayah administratif Kabupaten Bandung Barat:

Gambar 2. 1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Bandung Barat



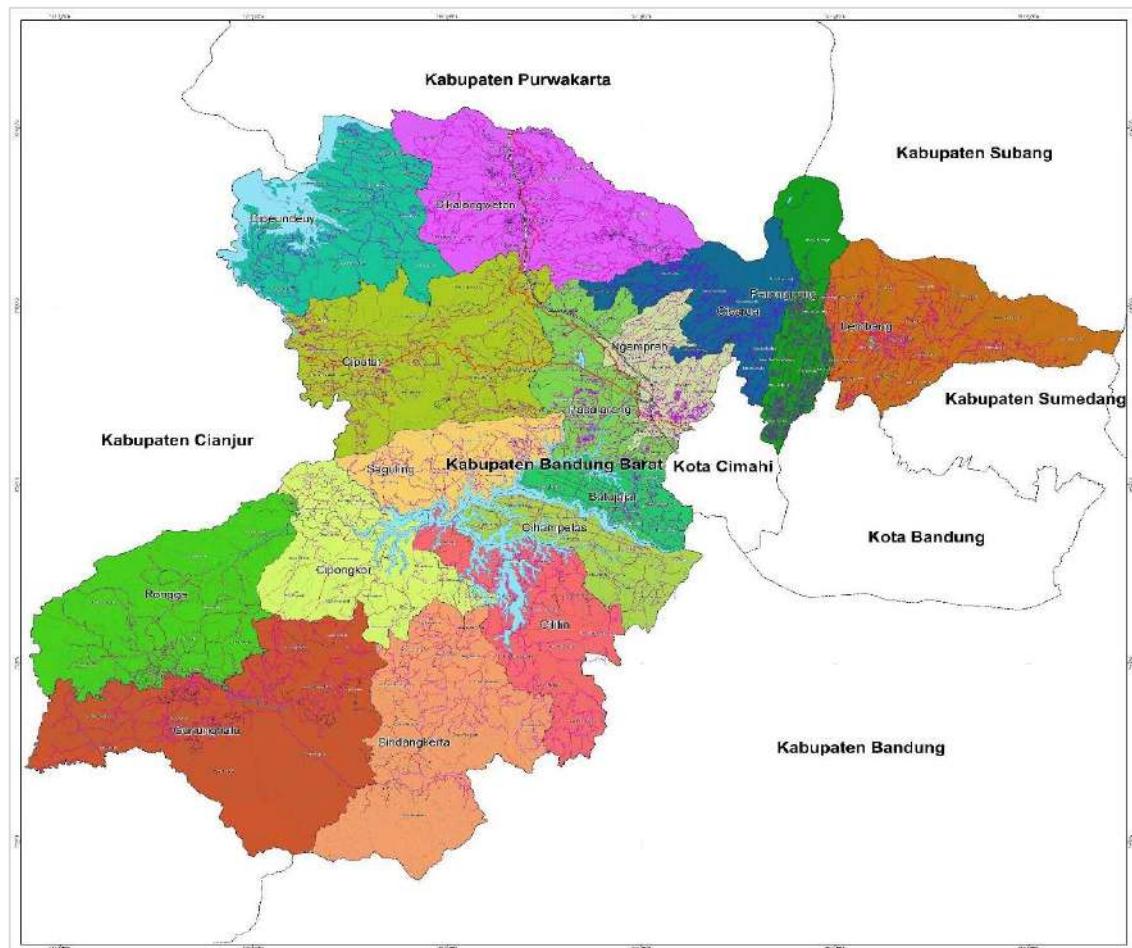
Sumber: RTRW KBB Tahun 2024-2044

Adapun Batas wilayah Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Permendagri No. 97 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 14 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 18 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Subang dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 75 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat dan Permendagri No. 76 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.
 - b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kab. Bandung, Kota Bandung dan Kota Cimahi
 - c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.
 - d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Purwakarta.

Berikut peta batas wilayah Kabupaten Bandung Barat dengan Kab/Kota Sekitarnya

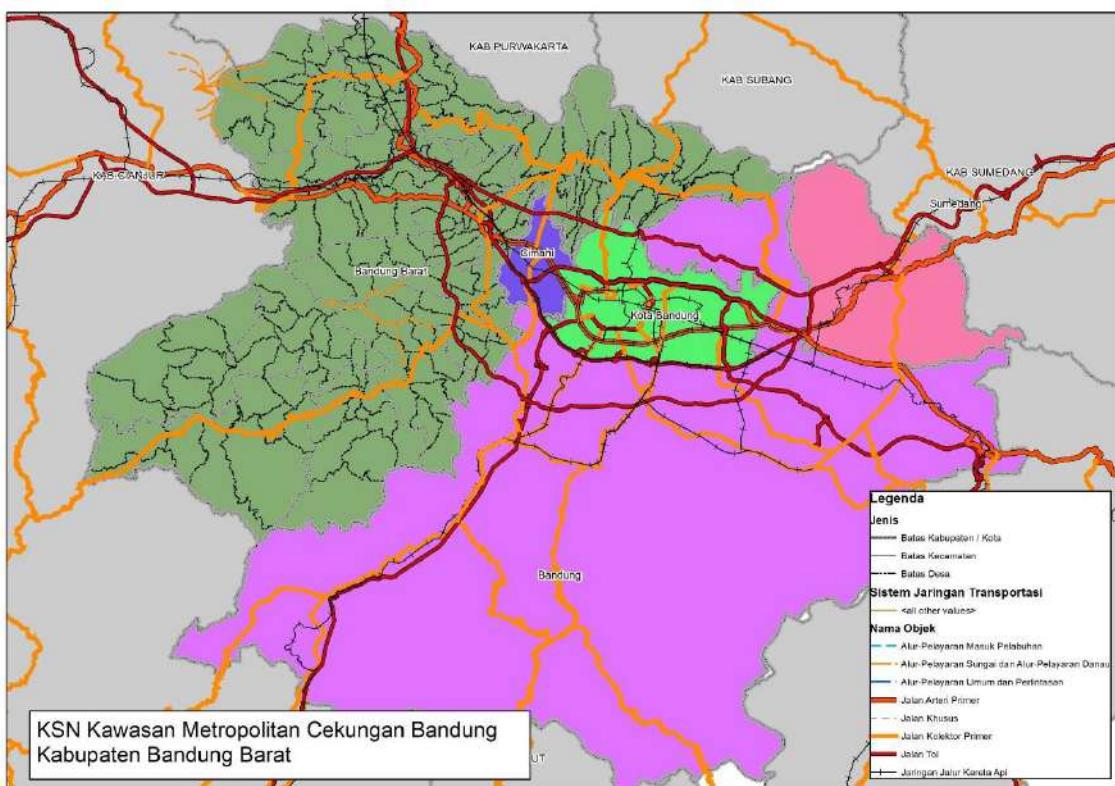
Gambar 2. 2 Peta Batas Wilayah Kabupaten Bandung Barat dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya



Sumber: RTRW KBB Tahun 2024-2044

Peta posisi strategis Kabupaten Bandung Barat yang merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung di Wilayah Jawa Barat, berdasarkan Perpres No 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dijelaskan dengan gambar berikut:

Gambar 2. 3 Kabupaten Bandung Barat sebagai Pintu Masuk dan Bagian dari KSN Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung



Perpres No 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung

Secara geografis, Kabupaten Bandung Barat (KBB) memiliki lokasi yang strategis dalam konstelasi nasional dan regional Jawa Barat. Kabupaten Bandung Barat merupakan pintu masuk ke wilayah Bandung Raya, menjadikan Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu pusat pertumbuhan di wilayah Jawa Barat serta dilalui jalur transportasi Barat-Timur berupa jalan tol Cipularang dan lintasan kereta Api Pulau Jawa serta Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Hal ini pula yang menjadikan Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu daerah yang masuk dalam Kawasan Perhatian Investasi (KPI).

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, Posisi Strategis Kabupaten Bandung Barat yang merupakan bagian dari rencana pengembangan sistem perkotaan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yaitu Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

Selain sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Kabupaten Bandung Barat juga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) yaitu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Hal ini diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung bahwa Kabupaten Bandung Barat di tetapkan sebagai KSN Perkotaan Cekungan Bandung.

Dalam konteks nasional, sebagai Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung diarahkan sebagai pusat kegiatan skala global yang berorientasi pada meningkatkan spesialisasi fungsi jasa pendidikan, teknologi sistem informasi, industri dan pariwisata perkotaan. Kabupaten Bandung Barat memiliki peranan penting karena beberapa proyek strategis nasional terdapat di wilayah ini. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional, dimana Proyek Strategis Nasional yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat diantaranya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dimana salah satu stasiun utamanya dalam bentuk Kawasan TOD (Transit Oriented Development) akan dibangun di wilayah administrasi Kabupaten Bandung Barat dan Proyek Pembangunan PLTA Cisokan telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593/Kep.52.PemUm/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593/Kep.1386/Pemum/2011 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Upper Cisokan Pumped Storage di Kabupaten Bandung Barat.

Dalam konstelasi Regional Jawa Barat, Kedudukan Kabupaten Bandung Barat sebagai sistem perkotaan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, yaitu mencakup wilayah Kecamatan Padalarang sebagai Kota Hierarki II serta Kecamatan Cililin, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Cisarua, dan Kecamatan Lembang.

Sebagai Kota Hierarki adalah sebagai wilayah yang mendukung pengembangan Kota Inti (Bandung-Cimahi), atau sebagai hinterland dari kota inti tersebut. Implikasinya, pembangunan di Kabupaten Bandung Barat sangat dipengaruhi oleh perkembangan wilayah sekitarnya. Hal ini didasari oleh perkembangan kegiatan perkotaan yang sangat pesat, terutama pada sektor industri, perdagangan dan jasa, serta pendidikan tinggi. Salah satu indikasi pesatnya perkembangan tersebut adalah tingginya alih fungsi lahan menuju kawasan perkotaan dan tingginya tingkat urbanisasi. Kabupaten Bandung Barat, diarahkan sebagai bagian dari PKN dengan kegiatan utama industri *non-polutif*, dan *non-ekstraktif* atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan, pertanian, industri kreatif dan teknologi tinggi dalam rangka percepatan perwujudan PKN Metropolitan Bandung Raya.

Di sisi lain, Kabupaten Bandung Barat juga termasuk ke dalam wilayah pengembangan Cekungan Bandung, yang diarahkan sebagai kawasan dengan perkembangan pesat yang memerlukan pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya pada kawasan yang berfungsi sebagai resapan air yaitu di Kawasan Bandung Utara (KBU). Sementara itu di KBU, sudah berkembang kegiatan pariwisata yang memiliki tingkat pelayanan bukan hanya regional dan nasional saja, bahkan sampai tingkat internasional. Dalam kaitannya sebagai *hinterland* dari kota inti (Bandung-Cimahi), keberadaan lahan pertanian juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan wilayah.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang ada di Kabupaten Bandung Barat cukup banyak dan beragam, mulai dari lahan pertanian, perbukitan/pegunungan dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hal ini apabila diolah dan dimanfaatkan akan menjadi sumber ekonomi yang dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

A. Potensi Flora

Di wilayah Kabupaten Bandung Barat masih terdapat berbagai jenis flora alami maupun flora budidaya yang terdiri dari tumbuhan berbatang keras atau pohon, semak, herba, sampai ke jenis *Ground Cover* (tumbuhan penutup tanah). Sedikitnya ditemukan sebanyak 339 jenis tumbuhan, dari data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa jumlah jenis flora terbanyak ditemukan di Kecamatan Cipeundeuy dengan 178 jenis, sedangkan Kecamatan dengan jumlah jenis paling sedikit adalah Kecamatan Ngamprah dengan 17 jenis flora. Flora alami di Kabupaten Bandung Barat terdapat pada ekosistem hutan sekunder, hutan sekunder tua, dan ekosistem karst yang terdapat di Kecamatan Cipatat.

Jenis flora pada ekosistem binaan (sawah, pekarangan, kebun, kebun talun, talun campuran) meliputi berbagai tipe habitus yaitu pohon, semak/herba, bambu, *palm* dan *ground cover*. Jenis flora dengan tipe habitus semak/herba merupakan yang terbanyak dengan 120 jenis, sedangkan flora yang termasuk kedalam tipe habitus ground cover merupakan yang paling sedikit dengan jumlah 4 jenis. Jenis yang paling dominan diukur dengan frekuensi kemunculannya di setiap kecamatan adalah spesies Nangka (*Artocarpus heterophyllus Lam*) dengan angka frekuensi relatif (dalam %) dan mutlak berturut-turut adalah 1,4 dan 15, tumbuhan *Jenjen/Albasiah* (*Albizia Crantz*) dan *Pisang* (*Musa Paradisiaca*) merupakan spesies paling dominan dengan angka kemunculan relatif 1,34 atau angka kemunculan di setiap kecamatan sebanyak 14 kali.

Dari jenis bambu, bambu gombong (*Gigantochloa Verticillata*) merupakan yang terdominan dengan frekuensi relatif 1,05 atau 11 kali kemunculan. Flora di Kabupaten Bandung Barat memiliki fungsi dan kegunaan yang dapat bermanfaat bagi manusia. Dari 339 jenis tumbuhan yang tersebar di 16 Kecamatan dapat dikelompokkan menjadi 161 spesies yang dikategorikan memiliki fungsi sebagai tanaman konsumsi, 94 tanaman hias, 38 jenis tumbuhan industri, 18 jenis tumbuhan pelindung, 8 jenis tumbuhan obat, dan 20 jenis lain-lain.

Beberapa jenis flora yang memiliki fungsi sebagai tanaman konsumsi yang juga memiliki nilai ekonomis tinggi adalah beberapa jenis buah-buahan seperti nangka dan mangga. Sedangkan yang dikonsumsi sebagai makanan pokok adalah padi. Varietas padi yang dominan adalah varietas Ciherang, Pandan Wangi dan Rojolele. Selain jenis yang disebut diatas, pisang juga termasuk jenis yang dominan dan memiliki nilai ekonomis tinggi karena dapat dimanfaatkan buah dan daunnya. Beberapa varietas pisang yang mudah ditemui di Kabupaten Bandung Barat adalah pisang ambon, pisang manggala dan pisang raja.

Flora yang berfungsi sebagai tanaman hias biasanya mudah ditemui pada ekosistem pekarangan. Beberapa diantaranya yang dominan adalah Puring, Anak nakal Teh-tehan, Hanjuang, dan Mahkota duri dari kategori semak. Dari kategori kecubung, Kembang merak, dan Pohon waru menjadi spesies yang mudah ditemukan. Beberapa di antara flora yang berfungsi sebagai tanaman hias, ada juga yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti anturium dan anggrek. Beberapa jenis flora yang memiliki fungsi sebagai tanaman industri diantaranya Albasiah/Jengjen, Sobsis, Rasamala, Puspa, Pasang, Jati dan Kayu Putih yang biasanya digunakan sebagai bahan bangunan. Tanaman yang khas dari kategori ini adalah aren yang digunakan sebagai bahan baku pembuat gula aren. Gula aren dari wilayah Kecamatan Sindangkerta bahkan digunakan sebagai bahan baku pembuatan makanan wajit khas Cililin.

Beberapa jenis flora yang memiliki fungsi sebagai tanaman pelindung diantaranya Kisabun, Kihujan, Beringin, Angsana, Mahoni, dan Lamtoro. Jenis ini biasanya mudah ditemui di pinggiran jalan utama. Beberapa jenis flora yang memiliki fungsi sebagai tanaman obat diantaranya adalah Mengkudu, Kumis kucing, Salam, Sirih dan Katuk. Flora yang berpotensi menjadi identitas Kabupaten Bandung Barat adalah Albasiah (*Albiziafalcatoria*), Aren (*Arengapinnata*), dan Mahoni (*Sweteniamahagoni*).

B. Potensi Fauna

Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi keanekaragaman fauna yang tinggi. Secara umum, jumlah jenis fauna yang ditemukan di wilayah Kabupaten Bandung Barat sebanyak 144 jenis yang terdiri dari 78 jenis dari kelas aves, 31 dari kelas insecta, 16 dari kelas mammalia, 13 jenis dari kelas reptilia, 4 jenis dari kelas amphibia dan 2 jenis dari kelas gastropoda dan crustaceae. Setidaknya terdapat 78 jenis burung yang berasal dari 41 famili. 19 jenis diantaranya merupakan jenis yang dilindungi baik oleh perundang-undangan Republik Indonesia maupun perundang-undangan Internasional seperti IUCN (*International Union Conservation Nature*) an CITES (*Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna*)/kesepakatan Internasional yang mengatur perdagangan antar negara spesies fauna liar dan hidup tanaman liar yang terancam punah.

Terdapat 3 jenis burung pemangsa yaitu burung Sikep Madu Asia, Elang alap nipon dan Elang alap Cina, dimana burung tersebut termasuk ke dalam burung pendatang (*migran*). Burung pendatang tersebut setiap tahunnya menggunakan gugusan vegetasi pegunungan (*green belt*) di Kabupaten Bandung Barat khususnya Gugusan Gunung Sunda. Burangrang dan Tangkuban Parahu sebagai panduan (navigasi) dalam melakukan proses migrasi baik saat kedatangannya maupun saat kembali ke habitat asalnya (migrasi balik).

Keberadaan burung migran yang menggunakan gugusan jalur hijau (*green belt*) di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa habitat yang ada memiliki daya dukung yang baik sebagai habitat beristirahat dalam proses migrasi sekaligus menjadi panduan (navigasi) yang digunakan dalam peristiwa migrasi. Pada kawasan karst (kapur) di perbukitan Pawon dan Masigit dijumpai jenis burung pemangsa alap-alap sapi. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa kawasan tersebut memiliki daya dukung yang sehat karena mampu menyediakan kebutuhan hidup bagi burung yang menduduki puncak mata ranai dalam ekosistem (top predator).

Setidaknya ditemukan 3 jenis capung yaitu *Orthetrum sabina*, *Orthetrum testaceum* dan *Orthetrum pruinosa*. Jenis-jenis capung ini banyak dijumpai pada wilayah-wilayah yang berdekatan dengan derah berair. Keberadaan capung ini menjadi penting karena capung dapat dijadikan sebagai indikator perairan bersih dikarenakan sebagian besar siklus hidup capung dihabiskan di air. Dengan demikian keberadaan capung dapat memberikan informasi mengenai kualitas air yang berada di suatu wilayah.

Ditemukan setidaknya 27 jenis kupu-kupu dari 5 famili berbeda (*Palilionidae*, *Nymphalidae*, *Satyridae*, *Lycaenidae* dan *Pieridae*). Kupu-kupu terutama ditemukan di hutan alami dan pada pekarangan/kebun di daerah penghasil tanaman hias seperti Kecamatan Lembang. Kupu-kupu dapat menjadi indikator topografi, tingkat kelembapan daerah ataupun keanekaragaman bunga yang terdapat di suatu daerah.

Reptilia yang dijumpai merupakan jenis reptilia yang umum seperti kadal, biawak, cecak, tokek, ular sanca, ular pucuk, ular sawah, ular kadut dan ular air pelangi. Namun demikian diduga masih banyak jenis yang belum dapat diidentifikasi. Sementara jenis mamalia terdapat 16 jenis, lima jenis diantaranya merupakan fauna dilindungi mengingat populasinya yang semakin sedikit di habitat aslinya. Kelima jenis mamalia dilindungi tersebut adalah trenggiling, lutung, surili, landak dan pelanduk.

Sedangkan Jenis fauna dari kelas lainnya seperti *Gastropoda* (siput), *Crustacea* (kepiting) dan *Amphibia* adalah jenis-jenis yang umum dijumpai di setiap Kecamatan. Hal ini disebabkan karena kondisi ekosistem di setiap kecamatan yang tidak jauh berbeda. Diantara jenis fauna yang diamati, fauna budidaya merupakan fauna yang bernilai ekonomis serta dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Mulai dari daging, susu, tenaga, telur hingga kulitnya. Adapun jenis-jenis fauna yang dibudidayakan di wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah Sapi, kerbau, kuda, ayam, mentok, angsa, kambing dan domba. Sedangkan jenis fauna yang berpotensi menjadi identitas Kabupaten Bandung Barat adalah:

- a. Alap-alap sapi (*Falco moluccensis*);
- b. Cekakak Jawa (*Halcyon cyanoventris*);
- c. Serindit Jawa (*Loriculus pusillus*);
- d. Takur tulung tumpuk (*Megalaimajavensis*).

C. Potensi Pertanian

Pertanian di Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian. Hampir sebagian besar lahan di Kabupaten Bandung Barat digunakan untuk pertanian. Jika dilihat dari fungsi guna lahan yang ada Kabupaten Bandung Barat, didominasi oleh fungsi budidaya pertanian sebesar 78.446,15 ha atau 59,96% dari luasan total wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Sektor Pertanian sebagai salah satu potensi unggulan, memberikan kontribusi terhadap perekonomian di Kabupaten Bandung Barat dengan capaian selama 5 tahun terakhir berkontribusi antara 12,59 - 13,46 persen. Sektor pertanian tersebut menjadi salah satu komponen penting dalam pembangunan daerah terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan.

Potensi beberapa komoditas unggulan di bidang pertanian yaitu komoditas pertanian tanaman pangan berupa: padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang kedelai, dengan Potensi Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi tanaman pangan di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Potensi Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023

No	Tanaman Pangan	Luas Tanam (Ha)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Padi Sawah	45.754	46.291	42.217	44.735	39.229
2	Padi Ladang	1.451	858	1.035	415	56
3	Jagung	4.127	7.201	4.924	3.170	3.116
4	Ubi Kayu	1.760	1.663	1.673	1.601	1.941
5	Ubi Jalar	375	349	322	391	269
6	Kacang Kedelai	1.250	945	812	515	958
7	Kacang Tanah	287	310	172	167	155

No	Tanaman Pangan	Luas Panen (Ha)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Padi Sawah	48.023	46.247	43.199	45.807	39.754
2	Padi Ladang	3.558	1.186	1.055	416	551
3	Jagung	5.323	6.035	3.999	5.286	1.888
4	Ubi Kayu	2.236	1.850	1.484	1.954	1.659
5	Ubi Jalar	435	366	342	321	342
6	Kacang Kedelai	2.527	991	715	695	627
7	Kacang Tanah	285	378	190	185	134
No	Tanaman Pangan	Produksi (Ton)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Padi Sawah	304.365	299.139	279.990	297.093	258.451
2	Padi Ladang	14.271	4.654	3.355	1.635	2.162
3	Jagung	29.863	43.395	28.753	38.076	13.571
4	Ubi Kayu	39.284	33.593	28.416	34.443	29.190
5	Ubi Jalar	5.846	5.049	4.719	4.267	3.617
6	Kacang Kedelai	3.220	1.445	1.042	1.009	873
7	Kacang Tanah	362	485	243	237	193

Sumber Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2024

Selain komoditas unggulan tanaman pangan, Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi pertanian unggulan pada sektor komoditas pertanian tanaman hortikultura, berupa: tanaman sayuran, tanaman buah-buahan dan tanaman hias dengan Potensi Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi tanaman hortikultura di Kabupaten Bandung Barat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 3 Potensi Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Hortikultura di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023

No	Tanaman Holtikultura	Luas Tanam (Ha)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Cabe Besar	22.420	10.172	1.797	700	1.486
2	Cabe Rawit	10.605	9.974	1.355	1.020	1.798
3	Kentang	1.223	362	114	140	258
4	Tomat	10.783	11.671	1.501	940	1.668
5	Bawang Daun	1.602	874	750	330	860
6	Buncis	7.881	7.807	1.087	630	1.064
7	Ketimun	12.801	7.813	664	440	916
No	Tanaman Holtikultura	Luas Panen (Ha)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Cabe Besar	19.851	9.807	1.161	460	1.136
2	Cabe Rawit	7.852	9.716	885	560	1.390
3	Kentang	1.277	985	133	60	136

4	Tomat	9.032	10.596	754	580	1.946
5	Bawang Daun	3.054	3.092	416	300	300
6	Buncis	6.739	7.140	566	430	862
7	Ketimun	12.651	7.779	397	380	699
No	Tanaman Holtikultura	Produksi (Ton)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Cabe Besar	17.766	5.508	13.471	39.350	38.092
2	Cabe Rawit	6.790	6.060	8.504	41.170	43.488
3	Kentang	1.335	1.083	3.634	19.450	28.730
4	Tomat	8.671	6.573	10.223	90.820	118.080
5	Bawang Daun	2.837	2.018	2.296	21.500	25.568
6	Buncis	5.875	4.092	6.000	56.200	45.980
7	Ketimun	10.879	5.316	3.652	36.110	31.545

Sumber Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2024

D. Potensi Perkebunan

Komoditas perkebunan yang memberi paling banyak kontribusi produksi di 16 Kecamatan yaitu: teh, kelapa, karet dan kopi. Area perkebunan terluas berada di 3 Kecamatan yaitu: Cipatat, Cipeundeuy, dan Cikalongwetan. Komoditas perkebunan yang memberi paling banyak kontribusi produksi di 16 Kecamatan Kabupaten Bandung Barat antara lain:

- Perkebunan Teh yang berlokasi di Cikalong Wetan, Cisarua dan Sindangkerta
- Perkebunan Kelapa yang berlokasi di Kecamatan Sindangkerta, Gununghalu, Rongga, Cipongkor dan Cikalongwetan
- Perkebunan Karet yang berlokasi di Kecamatan Cipeundeuy dan Cipatat
- Perkebunan Kopi yang berlokasi di Kecamatan Gununghalu, Sindangkerta, Cililin, Cipongkor dan Cikalongwetan
- Perkebunan Aren di Kecamatan Sindangkerta, Gununghalu, Rongga, Cipongkor dan Cikalongwetan
- Perkebunan Cengkeh di Kecamatan Cikalongwetan, Cisarua dan Ngamprah

Potensi Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Perkebunan Unggulan di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Potensi Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019-2023

No	Tanaman Perkebunan	Luas Tanam (Ha)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Aren	501	504	504	503	362
2	Cengkeh	1.055	1.082	1.082	1.081	935
3	Kapok	33	33	33	32	19
4	Karet	368	253	253	253	225
5	Kelapa	1.340	1.328	1.328	1.318	1.146
6	Kemiri	41	41	41	41	26
7	Kopi Arabika	2.581	2.807	2.825	2.813	2.681
8	Kopi Robusta	499	574	574	573	559
9	Lada	29	31	32	32	21
10	Sereh Wangi	1.491	1.498	2.078	2.093	2.117
11	Teh	1.932	1.935	1.921	1.905	1.810
12	Tembakau	131	151	153	154	167
No	Tanaman Holtikultura	Luas Panen (Ha)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Aren	330	335	337	337	72
2	Cengkeh	535	581	588	589	491
3	Kapok	23	23	23	22	11
4	Karet	152	157	157	163	126
5	Kelapa	1.038	1.045	1.042	1.041	890
6	Kemiri	32	32	32	32	10
7	Kopi Arabika	1.331	1.488	1.557	1.549	1550
8	Kopi Robusta	333	354	355	352	349
9	Lada	17	17	17	18	14
10	Sereh Wangi	1.491	1.496	1.565	1.580	1.515
11	Teh	1.440	1.460	1.460	1.453	1.204
12	Tembakau	131	151	153	158	157
No	Tanaman Holtikultura	Produksi (Ton)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Aren	2.770	2.906	2.991	2.993	1.537
2	Cengkeh	267	303	310	313	274
3	Kapok	7	7	7	7	3
4	Karet	231	257	258	267	185
5	Kelapa	691	761	755	736	637
6	Kemiri	8	9	9	8	2
7	Kopi Arabika	825	986	1.156	1.148	712
8	Kopi Robusta	165	192	194	194	202
9	Lada	18	19	19	19	13
10	Sereh Wangi	580	658	661	663	636
11	Teh	2.722	2.805	2.791	2.782	2.125
12	Tembakau	121	140	143	147	145

Sumber Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2024

E. Potensi Peternakan

Sapi perah merupakan salah satu ternak unggulan Kabupaten Bandung Barat. Populasi ternak terbanyak terdapat di Kecamatan Lembang, Cisarua dan Parongpong. Selain faktor ketersediaan pakan, wilayah tersebut juga merupakan wilayah dataran tinggi dengan suhu yang sejuk dan cocok bagi perkembangan optimal sapi perah.

Sapi potong di Kabupaten Bandung Barat terdapat di 3 kecamatan, dimana lingkungan dan kondisi alamnya mendukung bagi pertumbuhan sapi potong. Populasi kerbau tersebar di 13 Kecamatan, sedangkan populasi tertinggi terdapat di Kecamatan Rongga.

Populasi kuda tersebar secara merata di 11 Kecamatan, kecuali di Kecamatan Ngamprah, Cisarua, dan Parongpong. Ternak domba tersebar di 16 Kecamatan. Hal ini dikarenakan ternak domba merupakan komoditi yang mudah beradaptasi dan hidup dimanapun, baik di dataran rendah dan tinggi. Kecamatan yang merupakan sentra domba diantaranya kecamatan: Rongga, Gununghalu dan Padalarang. Selanjutnya populasi kambing di Kabupaten Bandung Barat tersebar di 15 Kecamatan, kecuali di Kecamatan Cipatat, Cisarua, Ngamprah, Lembang dan Parongpong yang saat ini kontribusi ternaknya masih sangat kecil. Tetapi pemanfaatan daging kambing relatif kurang diminati untuk konsumsi, selama ini produksi ternak kambing dijual keluar Kabupaten Bandung Barat seperti ke Jakarta, Karawang, Bekasi dan daerah lainnya. Sentra populasi kambing terdapat di Kecamatan Clililin dan Cipongkor. Berikut data potensi populasi ternak besar di Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 2. 5 Data Potensi Populasi Ternak Besar Menurut Kecamatan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Populasi Ternak					
		Sapi Potong	Sapi Perah	Domba	Kambing	Kuda	Kerbau
1	Rongga	310	19.675	7.837	810	1.065	
2	Gununghalu	263	3.936	5.670	1.073	797	-
3	Sindangkerta	446	2.877	6.335	650	717	-
4	Cililin	900	-	21.776	944	144	83
5	Cihampelas	212	-	17.753	496	5	42
6	Cipongkor	137	415	9.613	820	44	33
7	Batujajar	422	-	12.409	2.167	37	112
8	Cipatat	162	-	12.030	1.175	151	11
9	Padalarang	338	-	19.181	577	125	44
10	Ngamprah	450	-	14.317	1.063	49	29
11	Parongpong	462	-	19.141	564	6	42
12	Lembang	326	-	18.187	1.607	-	330
13	Cisarua	882	-	17.730	1.838	2	220
14	Cikalongwetan	492	-	19.606	1.563	6	229
15	Cipeundeuy	792	13	18.188	1.833	3	288
16	Saguling	102	-	11.162	444	2	7
Jumlah 2023		6.594	26.916	219.773	17.180	3.151	1.463
Jumlah 2022		3.625	23.293	459.303	49.880	3.101	1.465
Jumlah 2021		6.643	38.996	461.750	35.221	3.126	1.462
Jumlah 2020		6.582	39.267	460.323	35.616	3.151	1.491
Jumlah 2019		6.527	39.222	461.026	35.579	3.411	3.192

Sumber Data : Dinas Perikanan & Peternakan, Kab. Bandung Barat, 2024

Tabel 2. 6 Rekapitulasi Populasi Ternak Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023

No	Ternak Besar	Populasi Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sapi Potong	6.527	6.582	6.643	3.625	6.594
2	Sapi Perah	39.222	39.267	38.996	23.293	26.916
3	Domba	461.026	460.323	461.750	459.303	219.773
4	Kambing	35.579	35.616	35.221	49.880	17.180
5	Kuda	3.411	3.151	3.126	3.101	3.151
6	Kerbau	3.192	1.491	1.462	1.465	1.463

Sumber Data : Dinas Perikanan & Peternakan, Kab. Bandung Barat, 2024

Selain potensi ternak besar di Kabupaten Bandung Barat, memiliki potensi pada bidang peternakan unggas diantarnya: ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur dan itik, dengan jumlah populasi terbanyak adalah ayam pedaging dan ayam buras.

Jumlah populasi terbanyak ayam buras terdapat di Kecamatan Rongga, Gununghalu dan Sindangkerta. Untuk populasi terbanyak ayam pedaging terdapat di Kecamatan Cihampelas, Cikalangwetan dan Cipongkor. Sedangkan populasi terbanyak ayam petelur terdapat di Kecamatan Cipatat serta populasi terbanyak ternak itik terdapat di Kecamatan Saguling dan Cipongkor. Berikut data potensi populasi ternak unggas di Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 2. 7 Data Potensi Populasi Ternak Unggas Menurut Kecamatan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Populasi Ternak			
		Ayam Buras	Ayam Ras Pedaging	Ayam Ras Petelur	Itik
1	Rongga	19.482	78.833	3.123	721
2	Gununghalu	19.975	10.681	1.738	151
3	Sindangkerta	56.375	150.905	267	8.522
4	Cililin	128.379	247.633	746	11.902
5	Cihampelas	136.948	102.019	35.943	15.251
6	Cipongkor	119.649	121.484	1.467	19.278
7	Batujajar	129.629	86.809	98.851	15.111
8	Cipatat	100.889	93.292	3.845	9.401
9	Padalarang	129.833	74.021	7.405	27.662
10	Ngamprah	119.566	278.693	8.693	25.503
11	Parongpong	124.871	44.634	1.577	12.953
12	Lembang	135.686	198.223	6.494	29.384
13	Cisarua	135.579	107.121	921	21.177
14	Cikalangwetan	133.316	89.451	3.294	9.992
15	Cipeundeuy	133.379	105.466	1.092	11.772
16	Saguling	84.897	199.954	5.963	29.535
Jumlah 2023		1.708.453	1.989.219	181.419	248.315
Jumlah 2022		1.707.975	1.903.203	181.166	248.101
Jumlah 2021		1.707.770	1.902.632	181.039	248.059
Jumlah 2020		1.709.993	1.907.018	182.022	247.487
Jumlah 2019		1.712.345	1.906.481	181.221	247.590

Sumber Data : Dinas Perikanan & Peternakan, Kab. Bandung Barat, 2024

**Tabel 2. 8 Rekapitulasi Populasi Ternak Unggas Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2019 – 2023**

No	Ternak Besar	Populasi Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Ayam Buras	1.712.345	1.709.993	1.707.770	1.707.975	1.708.453
2	Ayam Pedaging	1.906.481	1.907.018	1.902.632	1.903.203	1.989.219
3	Ayam Petelur	181.221	182.022	181.039	181.166	181.419
4	Itik	247.590	247.847	248.059	248.101	248.315

Sumber Data : Dinas Perikanan & Peternakan, Kab. Bandung Barat, 2024

Potensi komoditas peternakan di Kabupaten Bandung Barat, dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan di dalam daerah juga sebagian dijual ke daerah lain, dengan beberapa komoditas peternakan unggulan diantaranya: susu, daging ayam, daging sapi, telur ayam dan telur bebek, dengan jumlah potensi komoditas hasil peternakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Potensi Komoditas Peternakan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023

Komoditas	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Daging Sapi	2.487.000 kg/Tahun	5.667.360 kg/Tahun	5.488.866 kg/Tahun	5.512.777 Kg/Tahun	6.868.437 Kg/ Tahun
Daging Ayam	22.343.000 kg/Tahun	16.926.150 kg/Tahun	16.888.469 kg/Tahun	16.893.290 Kg/Tahun	17.570.618 Kg/Tahun
Susu	79.950.000 Liter/Tahun	95.099.514 Liter/Tahun	94.443.188 Liter/Tahun	57.992.138 Liter/tahun	67.012.252 Liter/tahun
Telur Ayam	665.250 Kg/Tahun	5.749.109 kg/Tahun	5.733.099 kg/Tahun	5.734.991 Kg/Tahun	5.738.910 Kg/Tahun
Telur Bebek	997.000 Kg/Tahun	2.217.302 kg/Tahun	2.216.806 kg/Tahun	2.217.070 Kg/Tahun	2.220.679 Kg/Tahun

Sumber Data : Dinas Perikanan & Peternakan, Kab. Bandung Barat, 2024

F. Potensi Perikanan

Kabupaten Bandung Barat yang memiliki 2 (dua) waduk besar yang memiliki potensi besar dalam usaha perikanan. Selama ini waduk tersebut dimanfaatkan sebagai tempat usaha budidaya ikan di Kolam Jaring Apung (KJA). Wilayah yang potensial penyumbang terbesar pada usaha KJA ini adalah Kecamatan Cipeundeuy dengan adanya Waduk Cirata yaitu sekitar 59% produksi total produksi KJA. Selain KJA, usaha perikanan lainnya yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat diantaranya usaha pemberian ikan, usaha budidaya ikan pada Kolam Air Tenang (KAT), minapadi, dan penangkapan ikan di perairan umum dengan rincian potensi budidaya perikanan adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 10 Potensi Budidaya Perikanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023

No	Kecamatan	Pembenihan (Ha)	KAT (Ha)	Mina Padi (Ha)	KJA (PtK)
1	Rongga	0,10	10,51		
2	Gununghalu	1,10	16,58		
3	Sindangkerta	0,98	15,92		
4	Cililin	1,50	17,75		
5	Cihampelas	1,00	19,52		
6	Cipongkor	0,67	11,82		
7	Batuujajar	0,85	14,61		
8	Cipatat	2,55	62,45		
9	Padalarang	-	8,23		
10	Ngamprah	0,25	9,69		
11	Parongpong	-	5,50		
12	Lembang	-	3,82		
13	Cisarua	-	4,90		
14	Cikalongwetan	0,10	15,25		
15	Cipeundeuy	2,45	49,70		
16	Saguling	-	10,01		
Jumlah 2023		11,55	276,26	-	-
Jumlah 2022		11,55	276,26	-	62.820,000
Jumlah 2021		11,52	275,82	-	62.820,000
Jumlah 2020		10,49	275,39	-	63.320,000
Jumlah 2019		10,49	275,14	-	66.650,00

Sumber Data : Dinas Perikanan & Peternakan, Kab. Bandung Barat, 2024

Produksi komoditas perikanan unggulan di Kabupaten Bandung Barat berkisar antara 42 ribu – 47 ribu ton/tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 11 Data Produksi Ikan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023

Produksi Ikan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi Ikan (Ton)	44.905	42.327	44.161	46.760	49.123

Sumber Data : Dinas Perikanan & Peternakan, Kab. Bandung Barat, 2024

Adapun jenis produk komoditas unggulan Kabupaten Bandung Barat diantaranya: Ikan Mas, Nila, Patin, Lele dan Gurame dengan komoditas terbesar adalah jenis komoditas ikan patin dan ikan mas, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 12 Produksi Komoditas Perikanan Unggulan Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2019-2023**

No	Komoditas Ikan	Produksi Ikan Tahun 2019	Produksi Ikan Tahun 2020	Produksi Ikan Tahun 2021	Produksi Ikan Tahun 2022	Produksi Ikan Tahun 2023
1	Ikan Mas	8.224,78	15.763,99	14.097,74	1.888,02	15.531,21
2	Ikan Nila	12.825,22	18.450,00	21.627,23	22.950,44	23.715,90
3	Ikan Patin	4.580,44	5.849,56	6.077,52	6.204,65	6.444,31
4	Ikan Lele	16.506,45	1.917,19	1.981,37	2.327,05	2.772,30
5	Ikan Gurame	2.748,26	345,98	377,57	390,16	659,03
Jumlah		44.905,15	42.326,72	44.161,43	46.760,32	49.122,75

Sumber: Dinas Perikanan dan Perikanan, diolah Bappelitbangda, 2024

G. Potensi Energi dan Mineral

Potensi Sumber daya air permukaan di Kabupaten Bandung Barat berupa Waduk/Danau Buatan yaitu Waduk Saguling dan Cirata selain berfungsi sebagai sumber daya air juga dimanfaatkan sebagai potensi energi tenaga listrik dan tenaga surya. Waduk Saguling terletak di sungai Citarum yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu di Kecamatan Cililin, Batujajar, dan Cipongkor. Waduk Saguling dengan kapasitas waduk direncanakan 1.000 juta m³ digunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Waduk Cirata terletak kearah hilir dari Waduk Saguling yang lokasinya berada di Kecamatan Cipeundeuy, volume direncanakan sekitar 2.000 juta m³, dengan ketinggian mukaair + 220 m/dpl. Waduk Cirata digunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Selain itu, akan dibangun pula pembangkit listrik lainnya dengan sistem *Pump Storage* yaitu PLTA Cisokan yang menggunakan aliran sungai Cisokan di Kecamatan Rongga dengan kapasitas 1.040 MW. Potensi energi yang dimiliki Kabupaten Bandung Barat, selain PLTA dan PLTS tersebut juga terdapat potensi energi berupa cadangan geothermal sebesar 190 MW yang berasal dari Gunung Tangkuban Perahu di Kecamatan Lembang serta Pengembangan Bioethanol dari Singkong di beberapa kawasan di Kabupaten Bandung Barat akan segera diintensifkan, yang merupakan sumber energi baru terbarukan.

H. Potensi Pariwisata Alam

Berdasarkan kondisi geografisnya, Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi pariwisata yang cukup banyak terutama wisata yang bertema alam. Dalam Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten Bandung Barat disebutkan bahwa rencana pembangunan kawasan wisata daerah diarahkan pada: ekowisata, wisata agro, desa wisata, wisata danau, wisata budaya. Lokasi ekowisata di Kabupaten Bandung Barat dibagi kedalam 3 (tiga jalur) utama, yaitu jalur utara yang meliputi lokasi Gunung Tangkubanparahu, Bumi Perkemahan Cikole, Penangkaran Buaya, Jayagiri (Lintas Hutan), Maribaya, Curug Omas, dan Taman Yunghun di Kecamatan Lembang, Situ Lembang, Taman Bunga Cihideung, dan Taman Wisata Berkuda di Kecamatan Parongpong, Curug Cimahi serta Curug Panganten di Kecamatan Cisarua.

Di jalur selatan terdapat lokasi ekowisata Curug Malela di Kecamatan Rongga, Bumi Perkemahan Curug Sawer, Situs Batu Payung, dan Situs Mundinglaya di Kecamatan Cililin. Sedangkan di jalur barat terdapat lokasi ekowisata Situ Ciburuy di Kecamatan Padalarang, Goa Pawon, Goa Terusan Air Sanghiang Tikoro, Pemandian Air Panas, dan Curug Jawa di Kecamatan Cipatat, Waduk Saguling, dan Air Panas Cibaligo di Kecamatan Ngamprah, Bumi Perkemahan Sela Gombong, dan Perkebunan Teh Panglejar di Kecamatan Cikalongwetan, serta Waduk Cirata di Kecamatan Cipeundeuy.

Sedangkan untuk Wisata Agro, dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu: wisata agro perkebunan dan budidaya tanaman perkebunan serta penataan kebun, wisata agro tanaman hias, buah-buahan, sayuran dan sejenisnya, wisata agro tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan dan wisata agro industri. Adapun potensinya berada di wilayah Kecamatan Cisarua, Cikalongwetan, Lembang, Gununghalu, Rongga dan Cililin.

Potensi wisata alam di Kabupaten Bandung Barat sebanyak 91 lokasi, yang tersebar di beberapa kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2. 13 Potensi Wisata Alam di Kabupaten Bandung Barat

No	Nama Objek Wisata	Lokasi		Tipe Objek Wisata Alam	Pengelola
		Kecamatan	Desa		
1	Situ Ciburuy, Kec. Padalarang	Padalarang	Ciburuy	Alam	Pemda
2	Wisata Hammock Gunung Hawu, Padalarang	Padalarang	Padalarang	Alam	Pokdarwis
3	Gua Pawon, Kec.Cipatat	Cipatat	Gunung Masigit	Alam	Pemda
4	Sanghyang Poek, Cipatat	Cipatat	Rajamandala Kulon	Alam	Pokdarwis
5	Sanghyang tikoro, Cipatat	Cipatat	Rajamandala Kulon	Alam	Pokdarwis
6	Arung Jeram Cisameng, Cipatat	Cipatat	Rajamandala	Alam	Pokdarwis
7	Stone Garden, Cipatat	Cipatat	Gunung Masigit	Alam	Pokdarwis
8	Kolam air panas Rajamandala, Cipatat	Cipatat	Rajamandala	Alam	Pokdarwis
9	Indiana Camp	Cipatat	Gunung Masigit	Alam	Swasta/Perorangan
10	Curug Cimahi/Curug Pelangi)/Rainbow Waterfall	Cisarua	Kertawangi	Alam	KPH Bandung Utara
11	Curug Putri Layung Kec. Cisarua	Cisarua	Kertawangi	Alam	KPH Bandung Utara
12	Curug Tilu Leuwi Opat, cisarua	Cisarua	Cihanjuang Rahayu	Alam	KPH Bandung Utara
13	Ciwangun Indah Camp, Cisarua	Cisarua	Cihanjuang Rahayu	Alam	Swasta
14	Natural Hill, Cisarua	Cisarua	Kertawangi	Alam	Swasta
15	Situ Lembang	Lembang	Cipada	Alam	Perhutani
16	Curug Buntu	cisarua	Kertawangi	Alam	Perhutani
17	Curug Bugbrug	cisarua	Kertawangi	Alam	Perhutani
18	Curug Panganten	cisarua	Padaasih	Alam	Perhutani
19	Curug Lalay	cisarua	Padaasih	Alam	Perhutani
20	Bumi perkemahan RSJ	cisarua	Jambudipa	Alam	Swasta
21	Curug cipalasari	cisarua	Tugu mukti	Alam	Perhutani
22	Batu korsi	cisarua		Alam	Pokdarwis
23	Agrowisata Bunga Cihideung	Parongpong	Cihideung	Alam	Masyarakat
24	Jendela Alam, Parongpong	Parongpong	Cihideung	Alam	Swasta
25	Pemandian air Panas Nagrak Parongpong	Parongpong	Sukajaya	Alam	Masyarakat
26	Desa wisata Cihanjuang rahayu	Parongpong	Cihanjuang Rahayu	Alam	Masyarakat
27	Objek Wisata Maribaya The Hotspring Resort	Lembang	Langeun Sari	Alam	PT. Akurasi Kuatmega
28	Lintas Hutan Indah Jaya Giri, Lembang	Lembang	Jaya Giri	Alam	Perum (BUMN)
29	Bumi Perkemahan Cikole Lembang	Lembang	Cikole	Alam	KPH Bandung Utara
30	Lembah Bougenville Resort, Lembang	Lembang	Cibodas	Alam	Swasta
31	Tangkuban Perahu, Lembang	Lembang	Cikole	Alam	Swasta
32	Kebun Begonia Glory'	Lembang	Langeun Sari	Alam	Swasta
33	Wana wisata Pasir ipis, Lembang	Lembang	Jaya Giri	Alam	Pokdarwis
34	Desa wisata Suntenjaya, lembang	Lembang	Sunten Jaya	Alam	Masyarakat
35	Pine Foret Camp, Lembang	Lembang	Suntenjaya	Alam	Swasta
36	Gunung putri Lembang	Lembang	Jayagiri	Alam	Masyarakat
37	Gunung Batu Lembang	Lembang	Langensari	Alam	Masyarakat
38	Curug Omas, desa langensari Lembang	Lembang	Langeun Sari	Alam	Perum Perhutani
39	Cibodas Agrowisata	Lembang	Cibodas	Alam	Masyarakat
40	Cibodas Alam Madani Park- D'Camp Lembang	Lembang	Cibodas	Alam	Swasta

No	Nama Objek Wisata	Lokasi		Tipe Objek Wisata Alam	Pengelola
		Kecamatan	Desa		
41	Ganesha H Equestrian (Taman lembah dewata)	Lembang	Cibogo	Alam	Swasta
42	Curug Keraton, Lembang	Lembang	Cibodas	Alam	Masyarakat
43	Batu Ngampar	Lembang	Suntenjaya	Alam	Masyarakat
44	Eurad High Land (puncak eurad)	Lembang	Wangun Harja	Alam	Swasta
45	Geger Bintang Matahari	Lembang	Cibogo	Alam	Swasta
46	Curug Malela,Desa Cicadas	Rongga	Cicadas	Alam	Pemda
47	Curug Mahayu desa bojongsalam	Rongga	Bojongsalam	Alam	Desa
48	Curug Tangkorak desa bojongsalam	Rongga	Bojongsalam	Alam	Desa
49	Curug Huis desa bojongsalam	Rongga	Bojongsalam	Alam	Desa
50	Curug Buana desa bojongsalam	Rongga	Bojongsalam	Alam	Desa
51	Upper cisokan desa sukaresmi	Rongga	Sukaresmi	Alam	BUMD
52	Curug Bambayang desa sukaresmi	Rongga	Sukaresmi	Alam	Desa
53	Curug Pancur desa sukaresmi	Rongga	Sukaresmi	Alam	Desa
54	Bumi perkemahan Hanca 20 desa Bojong	Rongga	Bojong	Alam	Desa
55	Wisata alam (Gunung) Desa Cinengah	Rongga	Cinengah	Alam	Desa
56	Wisata arung jeram Bolenglang desa cicadas	Rongga	Cicadas	Alam	Desa
57	Curug Sawer desa cicadas	Rongga	Cicadas	Alam	Desa
58	Curug Lanti Citiis desa cicadas	Rongga	Cicadas	Alam	Desa
59	Haol Cibitung Desa cibitung	Rongga	Cibitung	Alam	Swasta/Perorangan
60	Wisata air leuwi Gede desa cibedug	Rongga	Cibedug	Alam	Desa
61	Gunung Panenjoan desa sukamanah	Rongga	Sukamanah	Alam	Desa
62	Puspa Nangelang desa sukamanah	Rongga	Sukamanah	Alam	Desa
63	Panyawangan Puncak karamat	Sindangkerta	Cintakarya	Alam	Pokdarwis
64	Panyawangan curug panyandaan	Sindangkerta	Weninggalih	Alam	Karang Taruna
65	Gunung Padang	Sindangkerta	Wangunsari	Alam	Kuncen
66	Curug Gawang	Sindangkerta	Wangunsari	Alam	Desa wangunsari
67	Buper Tangsijaya	Sindangkerta	Tangsijaya	Alam	Pokdarwis
68	Curug Ngebul	Sindangkerta	Weninggalih	Alam	Karang Taruna
69	Desa Wisata Sirnajaya,Gununghalu	Gununghalu	Sirnajaya	Alam	Masyarakat
70	Datar Nangka	Gununghalu	Bunijaya	Alam	Masyarakat
71	Arung jeram	Gununghalu	Sirnajaya	Alam	Karang Taruna
72	Penenjoan	Gununghalu		Alam	PTPN VIII Montaya
73	Curug sodong	Gununghalu		Alam	Perhutani
74	Pasir Panineungan	Gununghalu		Alam	Desa
75	Curug Cilingga Payung	Gununghalu	Gununghalu	Alam	Perhutani
76	Wana Wisata Curug Sawer Kec.cililin	Cililin	Karangtanjung	Alam	Perum (BUMN)
77	Desa Wisata Mukapayung, Cililin	Cililin	Mukapayung	Alam	Masyarakat
78	Panjat Tebing Batu Saheng Kp. Gunung Hanyawong	Cililin	Mukapayung	Alam	Perhutani
79	Punis Manglid Mukti glid Desa Karya	Cililin		Alam	Perhutani
80	Desa Wisata Rende, Cikalangwetan	Cikalangwetan	Rende	Alam	Masyarakat
81	Bukit Senyum Cikalangwetan	Cikalangwetan	Cipada	Alam	Pokdarwis
82	Sindang Geulis Kahuripan, Cikalangwetan	Cikalangwetan	Ganjarsari	Alam	Pokdarwis
83	Wisata Alam Lembangdano Kec.Cikalangwetan	Cikalangwetan	Cipada	Alam	Pokdarwis
84	Wisata Junghill	Cikalangwetan	Bojongmekar	Alam	Desa
85	Sungai Cikahuripan Cipongkor	Cipongkor	Barongsiang	Alam	Pokdarwis
86	Agrowisata dan Sirkuit Motor Cross Kp. Ciselang	Cipongkor	Citalem	Alam	Pokdarwis
87	Agrowisata Pertanian RT. 04/05 Desa Sarinagen	Cipongkor	Sarinagen	Alam	Pokdarwis
88	Desa Wisata Junghil	Cipeundeuy	Bojongmekar	Alam	Desa
89	Sanghyang Heuleut, Saguling	Saguling	Rajamandala Kulon	Alam	Pokdarwis
90	Sanghyang Kenit	Saguling	Rajamandala Kulon	Alam	Pokdarwis
91	Waduk Saguling, Saguling	Saguling	Saguling	Alam	PT. Indonesia Power

Sumber: Dinas Pariwisata & Kebudayaan, Kabupaten Bandung Barat, 2024

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya, sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan, untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi.

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perkotaan Bandung Raya dan kesepakatan bersama di antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum bersama para pejabat berwenang Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah daerah terkait, ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Bandung Barat. Satu-satunya sumber air baku potensial dan berkapasitas besar di Kabupaten Bandung Barat adalah aliran Sungai Citarum yang dikenal sebagai Waduk Saguling. Belum atau tidak banyak dimanfaatkan karena sudah banyak tercemar limbah industri juga terpolusi limbah domestik baik di badan air itu sendiri maupun yang bersumber dari buangan 12 sungai-sungai yang berfungsi sebagai drainase induk kota telah pula bermuara Sungai Citarum ini.

Daya Dukung air di Kabupaten Bandung Barat diketahui berdasarkan pendekatan neraca air yaitu rasio antara pemanfaatan air untuk kebutuhan penduduk dibandingkan dengan potensi air permukaan yang dihasilkan dari PDAM. Potensi sumber mata air yang dimanfaatkan terdiri dari yang ada di beberapa lokasi, serta pemanfaatan air baku dari Waduk Saguling yang memiliki potensi yang baik. Daya dukung air sangat tergantung dari infrastruktur yang dibangun oleh PDAM sehingga air tersebut dapat dimanfaatkan oleh penduduk. Adapun sumber air tanah tidak dijadikan sebagai dasar perhitungan dengan asumsi kebutuhan saat ini merupakan upaya berdasarkan distribusi air permukaan.

Kebutuhan air tergolong besar ditemukan di Kecamatan Cikalangwetan, dan Gununghalu dengan nilai masing-masing mencapai 323 juta m³/tahun dan 295 juta m³/thn. Ketersediaan air di Kabupaten Bandung Barat dianalisis melalui pendekatan metode rasional dengan basis wilayah DAS sebagai tangakapan air dan jasa eksosistem penyedia air dalam sistem grid. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa ketersediaan air terbesar terdapat di Kecamatan Batujajar sebesar 915 juta m³/tahun. Selanjutnya perbandingan antara kebutuhan air total dan ketersediaan air bersih untuk masing-masing kecamatan di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada Tabel. Berdasarkan tabel tersebut ditemukan seluruh kecamatan secara total berada pada daya dukung air yang belum terlampaui.

Tabel 2. 14 Daya Dukung Penyedia Air Bersih di Kabupaten Bandung Barat

No	Kecamatan	Kebutuhan air m ³ /thn	Ketersediaan Air m ³ /thn	Selisih Ketersediaan-Kebutuhan	Status Daya Dukung Daya Tampung Air
1	Batujajar	114.920.000	915.021.765,83	800.101.765,83	Belum Terlampaui
2	Cihampelas	176.305.600	263.001.742,59	86.696.142,59	Belum Terlampaui
3	Cikalangwetan	323.084.800	499.767.924,86	176.683.124,86	Belum Terlampaui
4	Cililin	177.128.000	400.574.387,55	223.446.387,55	Belum Terlampaui
5	Cipatat	289.004.800	580.039.233,16	291.034.433,16	Belum Terlampaui
6	Cipeundeuy	185.041.600	602.046.421,27	417.004.821,27	Belum Terlampaui
7	Cipongkor	167.812.800	450.737.247,99	282.924.447,99	Belum Terlampaui
8	Cisarua	138.528.000	266.890.202,94	128.362.202,94	Belum Terlampaui
9	Gununghalu	295.366.400	633.991.371,92	338.624.971,92	Belum Terlampaui
10	Lembang	254.403.200	411.088.125,57	156.684.925,57	Belum Terlampaui
11	Ngamprah	111.564.800	325.607.800,64	214.043.000,64	Belum Terlampaui
12	Padalarang	178.100.800	507.977.608,95	329.876.808,95	Belum Terlampaui
13	Parongpong	107.875.200	179.548.756,80	71.673.556,80	Belum Terlampaui
14	Rongga	146.011.200	466.009.056,05	319.997.856,05	Belum Terlampaui
15	Saguling	178.254.400	799.321.938,59	621.067.538,59	Belum Terlampaui
16	Sindangkerta	149.654.400	406.795.914,93	257.141.514,93	Belum Terlampaui
Jumlah		2.993.056.000	7.708.419.499,63	4.715.363.499,63	Belum Terlampaui

Sumber: Hasil Analisis KLHS RPJPD, 2024

Daya dukung air bersih di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024 sesuai dengan hasil analisis ketersediaan air bersih ternyata masih dapat mencukupi kebutuhan air di seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan, skenario proyeksi kebutuhan air bersih dilakukan sampai dengan tahun 2030, kondisi ketersediaan air bersih di Kabupaten Bandung Barat serta proyeksi kebutuhan air berdasarkan proyeksi

penduduk menunjukkan kondisi yang telah terlampaui, sehingga perlu adanya skenario kebijakan yang tepat untuk dapat mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat Bandung Barat.

Tabel 2. 15 Skenario Proyeksi Daya Dukung Penyedia Air Bersih di Kabupaten Bandung Barat

Ta hun	Jumlah Penduduk	Kebutu han Air (m3/hari)	Total Kebutuhan Air (Demand) (m3/tahun)	Potensi Air Permukaan (m3/tahun)	Potensi Mata Air 2019 (m3/tahun)	Potensi Total (Supply) (m2/tahun)	Neraca Air (m3/tahun)	Ratio	Status Daya Dukung
2018	1,727,337	0.12	1,547,786,861	1,266,002,208	154,136,804	1,420,139,012	(127,647,848)	0.92	Telah Terlampaui
2019	1,739,911	0.12	1,548,337,602	1,266,002,208	154,136,804	1,420,139,012	(128,198,590)	0.92	Telah Terlampaui
2020	1,752,911	0.12	1,548,892,352	1,266,002,208	154,136,804	1,420,139,012	(128,753,340)	0.92	Telah Terlampaui
2021	1,765,242	0.12	1,549,447,102	1,266,002,208	154,136,804	1,420,139,012	(129,308,090)	0.92	Telah Terlampaui
2022	1,777,908	0.12	1,550,001,853	1,266,002,208	154,136,804	1,420,139,012	(129,862,840)	0.92	Telah Terlampaui
2023	1,790,573	0.12	1,550,556,603	1,266,002,208	154,136,804	1,420,139,012	(130,417,591)	0.92	Telah Terlampaui
2024	1,803,239	0.12	1,551,111,353	1,266,002,208	154,136,804	1,420,139,012	(130,972,341)	0.92	Telah Terlampaui
2025	1,815,904	0.12	1,551,666,103	1,266,002,208	154,136,804	1,420,139,012	(131,527,091)	0.92	Telah Terlampaui
2026	1,828,570	0.12	1,552,220,854	1,266,002,208	154,136,804	1,420,139,012	(132,081,841)	0.91	Telah Terlampaui
2027	1,841,235	0.12	1,552,775,604	1,266,002,208	154,136,804	1,420,139,012	(132,636,592)	0.91	Telah Terlampaui
2028	1,853,901	0.12	1,553,330,354	1,266,002,208	154,136,804	1,420,139,012	(133,191,342)	0.91	Telah Terlampaui
2029	1,866,566	0.12	1,553,885,105	1,266,002,208	154,136,804	1,420,139,012	(133,746,092)	0.91	Telah Terlampaui
2030	1,879,232	0.12	1,554,439,855	1,266,002,208	154,136,804	1,420,139,012	(134,300,843)	0.91	Telah Terlampaui

Sumber: Hasil Analisis KLHS RPJPD, 2024

Daya dukung pangan adalah kemampuan lahan dalam produksi pangan di Kabupaten Bandung Barat yang meliputi 12 komoditi, yaitu Beras, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Jagung, Pisang, Kacang Kedelai, Kacang Tanah, Durian, Pepaya, Mangga, Jambu, dan Nangka. Sebagian Besar sumber pangan di Kabupaten Bandung Barat adalah beras dengan produksi sebesar 333.457.699 Kg, berikutnya adalah ubi kayu

34.443.000 Kg, Jagung 38.075.000 kg, Pisang 28.264.700. Produksi pangan terkecil pepaya sebesar 142.600 kg.

Daya dukung pangan di Kabupaten Bandung ialah tingkat produksi beras dibagi kebutuhan Konsumsi beras penduduk, menghasilkan indeks daya dukung pangan, dengan kriteria Daya Dukung Pangan Tinggi = DD Pangan \geq 1 dan Daya Dukung Pangan Rendah = DD Pangan \leq 1. Secara umum Kabupaten Bandung Barat memiliki daya dukung pangan dengan indeks rasio 1,34 yaitu nilai produksi lebih besar dari konsumsi penduduk. Terdapat 5 kecamatan dengan status daya dukung pangan terlampaui dengan indeks ratio <1 , yaitu: Kecamatan Padalarang, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Parongpong, Kecamatan Lembang, dan Kecamatan Cisarua, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 16 Luas Daya Dukung Pangan (Beras) di Kabupaten Bandung Barat

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2022	AKG per kapita/hari (kkal)	Konsumsi KBI (kkal)	Jumlah Produksi (Kkal)	Selisih Daya Dukung	Ratio	Status Daya Dukung
1	Rongga	62.579	2.150	49.108.870.250	173.104.233.880	123.995.363.630	3,52	Belum terlampaui
2	Gununghalu	81.392	2.150	63.872.372.000	72.895.806.120	9.023.434.120	1,14	Belum terlampaui
3	Sindangkerta	76.033	2.150	59.666.899.750	120.279.596.680	60.612.696.930	2,02	Belum terlampaui
4	Cililin	98.680	2.150	77.439.130.000	90.112.179.380	12.673.049.380	2,16	Belum terlampaui
5	Cihampelas	139.364	2.150	109.365.899.000	88.179.043.440	(21.186.855.560)	0,81	Belum terlampaui
6	Cipongkor	103.891	2.150	81.528.462.250	163.082.169.440	81.553.707.190	2,00	Belum terlampaui
7	Batujajar	112.352	2.150	88.168.232.000	76.077.078.720	(12.091.153.280)	0,86	Belum terlampaui
8	Saguling	35.237	2.150	27.652.235.750	60.064.667.840	32.412.432.090	2,17	Belum terlampaui
9	Cipatat	144.673	2.150	113.532.136.750	146.790.190.400	33.258.053.650	1,29	Belum terlampaui
10	Padalarang	186.724	2.150	146.531.659.000	67.269.387.180	(79.262.271.820)	0,46	Telah Melampaui
11	Ngamprah	182.536	2.150	143.245.126.000	48.958.697.040	(94.286.428.960)	0,34	Telah Melampaui
12	Parongpong	116.161	2.150	91.157.344.750	504.182.600	(90.653.162.150)	0,01	Telah Melampaui
13	Lembang	202.603	2.150	158.992.704.250	2.500.038.300	(156.492.665.950)	0,02	Telah Melampaui
14	Cisarua	81.744	2.150	64.148.604.000	8.956.965.680	(55.191.638.320)	0,14	Telah Melampaui
15	Cikalongwetan	132.220	2.150	103.759.645.000	168.998.911.400	65.239.266.400	1,63	Belum terlampaui
16	Cipeundeuy	90.780	2.150	71.239.605.000	146.211.400.260	74.971.795.260	2,05	Belum terlampaui
Jumlah		1.430.260		1.449.408.925.750	1.433.984.548.360	(15.424.377.390)	0,99	Terlampaui

Sumber: Hasil Analisis KLHS RPJPD, 2024

Secara umum Kabupaten Bandung Barat memiliki daya dukung pangan dengan indeks ratio 1,23 yaitu nilai produksi lebih besar dari konsumsi penduduk. Terdapat 5 kecamatan dengan status daya dukung pangan terlampaui dengan indeks ratio <1, yaitu: Kecamatan Padalarang, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Parongpong, Kecamatan Lembang, dan Kecamatan Cisarua, Cihampelas, dan Batujajar.

Daya dukung pangan akan terus menurun seiring dengan pertambahan penduduk dan perubahan lahan pertanian menjadi lahan terbangun, maka berdampak terhadap kurangnya produksi pangan di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk Kabupaten Bandung Barat, berikut ditampilkan kondisi ketersedian pangan dibandingkan dengan proyeksi kebutuhan pangan sampai dengan tahun 2045.

Tabel 2. 17 Skenario Proyeksi Daya Dukung Penyedia Pangan di Kabupaten Bandung Barat

Tahun	Produksi Pangan (Kkal)	Konsumsi Pangan (Kkal)	Selisih Daya Dukung (Kkal)	Rasio Daya Dukung Pangan (Kkal)	Status Daya Dukung
2020	1,404,421,582,120	964,536,225,000	439,885,357,120	1.46	Belum Terlampaui
2021	1,404,421,582,120	971,316,465,000	433,105,117,120	1.45	Belum Terlampaui
2022	1,404,421,582,120	978,096,705,000	426,324,877,120	1.44	Belum Terlampaui
2023	1,404,421,582,120	984,876,945,000	419,544,637,120	1.43	Belum Terlampaui
2024	1,404,421,582,120	991,657,185,000	412,764,397,120	1.42	Belum Terlampaui
2025	1,404,421,582,120	998,437,425,000	405,984,157,120	1.41	Belum Terlampaui
2026	1,404,421,582,120	1,005,217,665,000	399,203,917,120	1.40	Belum Terlampaui
2027	1,404,421,582,120	1,011,997,905,000	392,423,677,120	1.39	Belum Terlampaui
2028	1,404,421,582,120	1,018,778,145,000	385,643,437,120	1.38	Belum Terlampaui
2029	1,404,421,582,120	1,025,558,385,000	378,863,197,120	1.37	Belum Terlampaui
2030	1,404,421,582,120	1,032,338,625,000	372,082,957,120	1.36	Belum Terlampaui

Tahun	Produksi Pangan (Kkal)	Konsumsi Pangan (Kkal)	Selisih Daya Dukung (Kkal)	Rasio Daya Dukung Pangan (Kkal)	Status Daya Dukung
2031	1,404,421,582,120	1,039,118,865,000	365,302,717,120	1.35	Belum Terlampaui
2032	1,404,421,582,120	1,045,899,105,000	358,522,477,120	1.34	Belum Terlampaui
2033	1,404,421,582,120	1,052,679,345,000	351,742,237,120	1.33	Belum Terlampaui
2034	1,404,421,582,120	1,059,459,585,000	344,961,997,120	1.33	Belum Terlampaui
2035	1,404,421,582,120	1,066,239,825,000	338,181,757,120	1.32	Belum Terlampaui
2036	1,404,421,582,120	1,073,020,065,000	331,401,517,120	1.31	Belum Terlampaui
2037	1,404,421,582,120	1,079,800,305,000	324,621,277,120	1.30	Belum Terlampaui
2038	1,404,421,582,120	1,086,580,545,000	317,841,037,120	1.29	Belum Terlampaui
2039	1,404,421,582,120	1,093,360,785,000	311,060,797,120	1.28	Belum Terlampaui
2040	1,404,421,582,120	1,147,602,705,000	256,818,877,120	1.22	Belum Terlampaui
2041	1,404,421,582,120	1,154,382,945,000	250,038,637,120	1.22	Belum Terlampaui
2042	1,404,421,582,120	1,161,163,185,000	243,258,397,120	1.21	Belum Terlampaui
2043	1,404,421,582,120	1,167,943,425,000	236,478,157,120	1.20	Belum Terlampaui
2044	1,404,421,582,120	1,174,723,665,000	229,697,917,120	1.20	Belum Terlampaui
2045	1,404,421,582,120	1,181,503,905,000	222,917,677,120	1.19	Belum Terlampaui

Sumber: Hasil Analisis KLHS RPJPD, 2024

Daya Dukung pangan di Kabupaten Bandung Barat dengan indikator beras menunjukkan bahwa daya dukung pangan pada 2022 memiliki ratio sebesar 1,11, yakni ketersediaan beras masih lebih besar dari konsumsi beras. Diproyeksikan pada tahun 2045 daya dukung pangan menjadi 0,83 atau status terlampaui. Dengan demikian untuk kebutuhan pangan diperlukan suplay stok pangan dari kabupaten lain yang memiliki daya dukung pangan yang tinggi. (asumsi : Jumlah penduduk meningkat, Tutupan lahan tetap hingga tahun 2045).

2.1.1.4 Perubahan Iklim dan Ketahanan Bencana

Berdasarkan data sistem informasi data indeks kerentanan (SIDIK) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjelaskan bahwa secara umum tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim di Kabupaten Bandung Barat seluruh desa berada pada tingkat "Kerentanan 3 atau agak rentan" dengan warna Kuning, serta tidak ada desa yang memiliki status sangat rentan. Rendahnya curah hujan menimbulkan kekeringan serta mempengaruhi produksi tanaman padi sawah dan hortikultura maupun perkebunan. Curah hujan yang lebih lebat yang menimbulkan genangan dan kekeringan menyebabkan risiko terjadinya penurunan produksi tanaman pertanian dan perkebunan. Curah hujan yang lebat dapat menyebabkan berlebihnya kadar air atau tergenangnya sawah atau pertanian secara berlebihan serta masa curah hujan dengan kurangnya fotosintesis yang mengakibatkan pembusukan tanaman pertanian.

Bencana kekeringan akibat cuaca ekstrem berdampak terhadap kurangnya debit air pada sungai dan saluran irigasi sehingga tidak mampu mengairi pertanian secara optimal terutama pada lahan beririgasi. Sedangkan pada lahan pertanian tada hujan dengan tingginya suhu udara dari temperatur normal mengakibatkan terjadinya kekeringan pada lahan pertanian maupun perkebunan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam penanganan masalah kekeringan adalah dengan peningkatan sistem irigasi, serta peningkatan kualitas lahan pada daerah aliran sungai.

Berdasarkan kondisi aktual, iklim yang ada di Kabupaten Bandung Barat tidak jauh berbeda dengan keadaan iklim yang ada di Indonesia pada umumnya. Kabupaten Bandung Barat memiliki 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau dengan curah hujan rata-rata 172 mm dan temperatur berkisar antara 21°C-34°C. 69.183,78 hektar area di Kabupaten Bandung Barat diklasifikasikan sebagai area dengan jasa ekosistem Pengatur Iklim sangat tinggi, 25.431,36 hektar diklasifikasikan sebagai area dengan jasa ekosistem Pengatur Iklim tinggi sementara 15.325,03 hektar area diklasifikasikan sebagai area dengan jasa ekosistem Pengatur Iklim sedang.

Untuk jasa ekosistem Pengatur Iklim kelas rendah dan sangat rendah masing-masing memiliki luasan sebesar 12.590,39 hektar dan 5.937,24 hektar. Perubahan iklim dapat mempengaruhi aspek kebencanaan, diantaranya terkait dengan bencana kekeringan yang dapat melanda di Kabupaten Bandung Barat. Kondisi bentang alam Kabupaten Bandung Barat yang merupakan dataran tinggi dan berbentuk cekungan menjadi muara bagi anak-anak sungai. Hal ini mengakibatkan Kabupaten Bandung Barat rentan terhadap bencana alam baik berupa banjir, longsor, erosi, dan bencana lainnya.

Cara untuk mengidentifikasi kapasitas wilayah dalam menghadapi kerawanan bencana, salah satunya dapat diketahui melalui tingkat indeks jasa lingkungan/ekosistem dalam pencegahan dan perlindungan terhadap bencana. Jenis jasa ekosistem ini merupakan infrastruktur dari alam yang bertujuan untuk melindungi dan mencegah kejadian bencana, diantaranya: jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir dan jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana.

Jasa ekosistem pengaturan pengendalian dan pencegahan bencana alam berkaitan dengan kemampuan suatu daerah melindungi dan memberikan upaya perlindungan sekitar dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami. Jasa ekosistem pengaturan pengendalian dan pencegahan bencana alam 68.126,04 hektar area (53%) di Kabupaten Bandung Barat diklasifikasikan sebagai area dengan jasa ekosistem Pengatur Mitigasi Bencana Alam sangat tinggi, 24.937,99 hektar (19,14%) diklasifikasikan sebagai area dengan jasa ekosistem Pengatur Mitigasi Bencana Alam kelas sedang 8.005,35 hektar area (6,23%) diklasifikasikan sebagai area dengan jasa lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Alam sedang. Untuk jasa ekosistem Pengatur Mitigasi Bencana Alam kelas rendah dan sangat rendah masing-masing memiliki luasan sebesar 16.906,52 hektar dan 10.491,53 hektar. Dari perhitungan 5 (lima) kelas diketahui bahwa luasan terbesar jasa ekosistem Pengatur Mitigasi Bencana Alam adalah Kelas Sangat Tinggi (53,03%).

Jasa lingkungan/ekosistem pengaturan tata air dan banjir di Kabupaten Bandung Barat didominasi Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi. Kedua kelas ini meliputi 50% luas wilayah Kabupaten Bandung, dengan rincian sebagai berikut:

- Kategori Sangat Tinggi dengan luas 35.107 Ha atau 27% sebagian besar di Kecamatan Cipatat, selanjutnya Kecamatan Cihampelas, Kecamatan Cikalangwetan, dan Cipeundeuy.
- Kategori Tinggi sebagian besar 29.904 Ha atau 23% Sebagian besar berada di Kecamatan Gununghalu, selanjutnya Kecamatan Cisarua, Cipongkor, dan Kecamatan Cipeundeuy.
- Kategori Sedang merupakan Sebagian besar seluas 40.292 Ha atau 31% yang berada di Kecamatan Rongga, Kecamatan Gununghalu, Kecamatan Saguling, Kecamatan Cihampelas.
- Kategori Rendah dengan luas 2.342 Ha atau 2 % menyebar sebagian kecil di beberapa kecamatan.
- Kategori Sangat Rendah dengan luas 23.551 Ha atau dengan persentase 18% tersebar di sebagian besar Kecamatan Cipatat, Gununghalu dan Kecamatan Lembang. Pada kategori sangat rendah memiliki dampak terhadap gangguan tata aliran dan banjir

Tabel 2. 18 Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran dan Banjir

No	Indikator	Luas Ha	%	Kecamatan
1	Sangat Rendah	23.551	18	Sebagian besar Cipatat, Gununghalu, Lembang
2	Rendah	2.342	2	Menyebar sebagian kecil di beberapa Kecamatan
3	Sedang	40.292	31	Bagian besar Rongga, Gununghalu, Saguling, Cihampelas
4	Tinggi	29.904	23	Sebagian besar Gunung Halu, berikut Cisarua, Cipongkor, Cipeundeuy
5	Sangat Tinggi	35.107	27	Sebagian besar Cipatat, Selanjutnya Cihampelas Cikalangwetan, Cipeundeuy
Total		131.195	100	

Sumber: Pengolahan Peta Tahun 2020, D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem, 3EJ – KLHK

Indikator jasa lingkungan/ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana dapat memberikan kita perlindungan dan pencegahan dari kejadian bencana baik bencana erosi, longsor, pergerakan tanah dan kebakaran lahan. Jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana di Kabupaten Bandung Barat, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

- Kategori Sangat Tinggi (ST) seluas 21% atau 27.000 Ha berada di sebagian besar Kecamatan Cipatat dan Kecamatan Cihampelas
- Kategori Tinggi (T) seluas 15% atau 2.3478 Ha berada di sebagian besar di Kecamatan Cikalongwetan, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cipatat, Kecamatan Cipeundeuy, dan Kecamatan Lembang
- Kategori Sedang seluas 45.710 Ha atau 35% berada di sebagian besar Kecamatan Gununghalu, Rongga, selanjutnya Kecamatan Cipongkor dan Kecamatan Saguling
- Kategori Lahan kelas Rendah seluas 14.171 Ha atau 11% yang sebagian kecil menyebar di beberapa kecamatan
- Kategori kelas Sangat Rendah seluas 20.835 Ha sebesar 16% sebagian besar di Kecamatan Cipatat, Kecamatan Cipokongkor, Kecamatan Cipeundeuy.

Gabungan Kelas Sangat Tinggi dan Kelas Tinggi mencapai 39% jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan dari kejadian bencana alam. Dengan kondisi demikian menunjukkan bahwa kemampuan pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana di Kabupaten Bandung Barat relatif rendah.

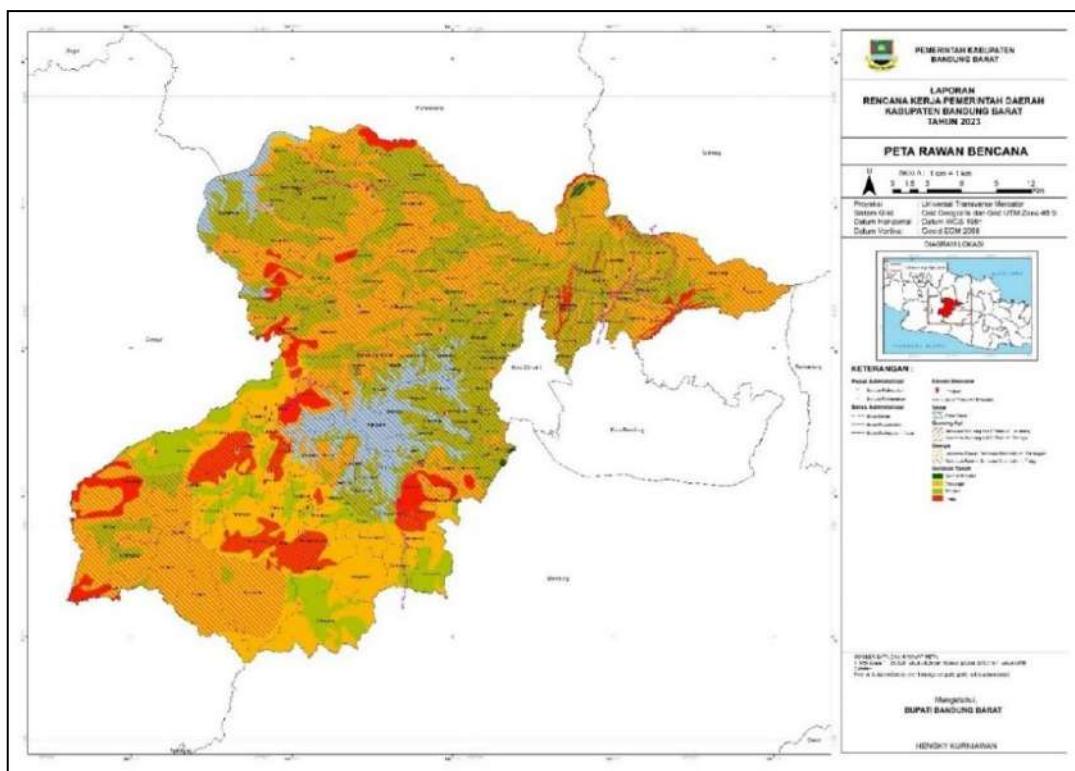
Tabel 2. 19 Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana

No	Indikator	Luas Ha	%	Kecamatan
1	Sangat Rendah	20.835	16	Sebagian besar Cipatat, Cipokongkor, Cipeundeuy
2	Rendah	14.171	11	menyebar sebagian kecil
3	Sedang	45.710	35	Bagian besar Gununghalu, Rongga, selanjutnya Cipongkor, Saguling
4	Tinggi	23.478	18	Sebagian besar Cikalongwetan, Cisarua, Cipatat, Cipeundeuy, Lembang
5	Sangat Tinggi	27.000	21	Sebagian besar Cipatat dan Cihampelas
Total		131.195	100	

Sumber: Pengolahan Peta Tahun 2020, D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem, 3EJ - KLHK

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat, peristiwa bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Bandung Barat terdiri dari bencana banjir, gempa bumi, kekeringan, tanah longsor, pergerakan tanah, gunung meletus, kebakaran hutan dan lahan serta angin puting beliung. Peristiwa bencana alam di Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh kejadian gempa bumi, tanah longsor dan pergerakan tanah.

Gambar 2. 4 Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Bandung Barat



Sumber: RTRW KBB Tahun 2024-2044

Kawasan rawan bencana longsor dan pergerakan tanah secara umum menyebar di bagian utara dan selatan Kabupaten Bandung Barat, yaitu terdapat di Kecamatan Lembang, Parongpong, Cikalongwetan, Cipatat, Batujajar, Cililin, Rongga, Gununghalu dan kawasan rawan bencana letusan gunung berapi terdapat di Kecamatan Lembang, Parongpong, dan Cisarua, dengan sebaran kawasan rawan bencana.

2.1.2 Aspek Demografi

2.1.2.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan, Komposisi dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hasil (SP2020), jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat selama 5 tahun terakhir terus bertambah setiap tahunnya, berturut turut jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2019 sebanyak 1.739.911 jiwa, tahun 2020 sebanyak 1.788.336 jiwa, tahun 2021 sebanyak 1.814.226 jiwa, tahun 2022 sebanyak 1.846.969 jiwa dan meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 1.859.636 jiwa.

Pada tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat sebanyak 1.859.636 jiwa dengan komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah penduduk laki-laki sebesar 948.045 jiwa (50,98 persen) dan penduduk perempuan sebesar 911.591 jiwa (49,02 persen) dengan sex ratio sebesar 104,00 yang berarti setiap 1.000 perempuan berbanding dengan 1.040 laki-laki. Jumlah penduduk, komposisi penduduk dan kepadatan penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 secara rinci menurut kecamatan adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 5 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023



Sumber : KBBDA, 2019-2024, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah.

**Tabel 2. 20 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023**

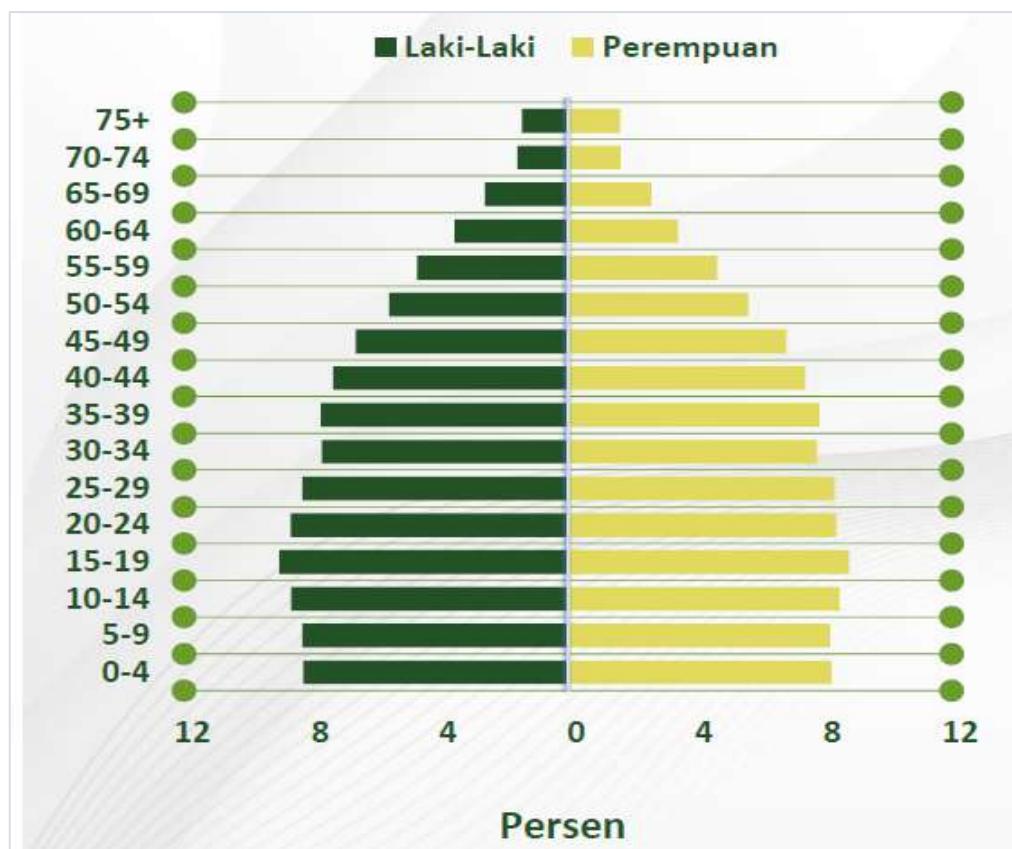
No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk
		Perempuan	Laki-Laki			
1	Rongga	30.495	32.474	62.969	112,64	559
2	Gununghalu	39.745	42.014	81.759	155,47	526
3	Sindangkerta	37.750	38.887	76.637	106,30	721
4	Cililin	48.399	50.997	99.396	77,83	1.277
5	Cihampelas	69.124	72.395	141.519	47,04	3.008
6	Cipongkor	51.321	53.594	104.915	80,16	1.309
7	Batujajar	56.024	57.593	113.617	31,11	3.652
8	Saguling	17.490	18.144	35.634	51,58	691
9	Cipatat	71.326	74.222	145.548	125,98	1.155
10	Padalarang	92.294	95.416	187.710	51,63	3.636
11	Ngamprah	90.165	93.129	183.294	35,65	5.141
12	Parongpong	57.467	59.213	116.680	45,02	2.592
13	Lembang	99.696	103.536	203.232	98,22	2.069
14	Cisarua	40.438	41.862	82.300	55,63	1.479
15	Cikalangwetan	65.185	67.896	133.081	110,94	1.200
16	Cipeundeuy	44.672	46.673	91.345	102,19	894
Kab. Bandung Barat		911.591	948.045	1.859.636	1.287,41	1.445

Sumber: Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka, BPS, 2023

Pada tahun 2023 kepadatan penduduk Kabupaten Bandung Barat adalah 1.445 jiwa per Km² dengan wilayah terpadat berada di Kecamatan Ngamprah dengan kepadatan 5.141 jiwa per Km² dan kepadatan terendah berada di Kecamatan Gununghalu dengan kepadatan 526 jiwa per Km². Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 adalah sebesar 1,43% dengan laju pertumbuhan penduduk terbesar berada di Kecamatan Cihampelas sebesar 2,38% sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Lembang sebanyak 1,02%.

Komposisi penduduk yang digambarkan oleh Piramida Kabupaten Bandung Barat pada Gambar 2.28 memperlihatkan tingkat fertilitas yang menurun di periode 10 tahun terakhir. Ini dapat terjadi karena kesadaran dari masyarakat mengenai keluarga kecil sejahtera disamping berjalannya program pemerintah dalam pengendalian jumlah penduduk dari sisi kelahiran.

**Gambar 2. 6 Piramida Penduduk Kabupaten Bandung Barat
Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020**



Sumber : BPS, Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 (diolah)

2.1.2.2 Masyarakat Adat

Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki sejarah asal-usul dan menempati wilayah adat secara turun-temurun. Masyarakat adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial-budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat sebagai komunitas adat, di Kabupaten Bandung Barat terdapat masyarakat adat yang masih menjunjung adat istiadat dan budaya yang perlu dilestarikan seiring dengan pelaksanaan pembangunan, diantaranya:

1. Warga Desa Nyalindung, Kecamatan Cipatat memiliki warisan budaya 'Hajat Arwah'. Hajat Arwah ini merupakan warisan budaya yang turun-temurun dengan pola memanjangkan doa secara bersama-sama untuk para leluhur mereka di makam-makam para tokoh yang memiliki peran penting bagi masyarakat Desa Nyalindung. Hajat Arwah ini, biasa digelar pada tanggal 17 Ruwah. Mengawali acara, warga berkumpul di sebuah rumah tokoh adat,

mereka berpawai dengan diiringi sholawat bersama-sama menuju sebuah makam leluhur mereka. Pawai itu juga berbekal sebuah kendi yang di dalamnya terdapat tanaman hanjuang. Sesampainya di depan makam, rombongan duduk dan mulai memanjatkan doa yang dipimpin oleh Pemangku Adat. Warisan budaya ini direkomendasikan untuk menjadi warisan budaya tak benda, yang nantinya menjadi ciri khas bagi warga Desa Nyalindung tersendiri atas bentuk konsistensinya dalam mempertahankan ritus ini.

2. Warga Kampung Cikurutug, Desa Tagogapu, Kecamatan Padalarang terhadap sumber daya alam yang telah tersedia di sana dituangkan dalam ritual Mikul Lodong. Upacara Mikul Lodong ini dilakukan secara beramai-ramai menyisir bukit kemudian berjalan di pematang sawah sembari memikul air dengan gelongan bambu atau yang mereka sebut lodong. Sesampainya di lokasi, rombongan kemudian memanjatkan doa dan ungkapan syukur kepada Sang Pencipta. Doa-doa yang dipanjatkan berisi ucapan syukur atas air dan sumber daya alam lain yang diberikan untuk menghidupi warga Kampung Cikurutug.
3. Warga Dusun Kancah, Kampung Panyairan, Desa Cihideung, Kecamatan Parongpong, memiliki adat istiadat tersendiri untuk menjaga lingkungan. Lewat upacara adat irung-irung masyarakat desa, menjaga kelestarian mata air dan saluran air. Masyarakat berkumpul di Padepokan Kamuning kemudian berjalan ke arah irung-irung atau yang dikenal dengan sebuah kolam mata air sembari diiringi kesenian sasapian warga mengarak kambing melewati pematang sawah yang sudah ditanami sayur-sayuran. Lalu menyusuri selokan yang mengarah ke kolam mata air yang sudah dibersihkan oleh warga dari jauh-jauh hari. setelah sampai di tempat ritus, warga menyembelih kambing yang menjadi arak-arakan tadi. kemudian, upacara adat dilakukan dengan menyeburkan diri ke kolam dan melakukan perang air diiringi kesenian sasapian. Ritus ini dilakukan setahun sekali untuk memelihara sumber air masyarakat setempat, agar dapat menghidupi tanaman, kesuburan, serta meminta keselamatan.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga.

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, diantaranya:

2.2.1.1 Struktur Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan diwilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu menggunakan pendekatan produksi/sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya/pengeluaran.

PDRB menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksi barang dan jasa yang disusun berdasarkan harga pada periode perhitungan/tahun berjalan.

Pada periode tahun 2019-2023 PDRB Kabupaten Bandung Barat atas dasar harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 47.180,08 miliar Rupiah (2019); 46.478,90 miliar Rupiah (2020); 48.764,31 miliar Rupiah (2021); 52.921,29 miliar Rupiah (2022) dan 56.945,18 miliar Rupiah (2023). Peningkatan pada periode 2019-2023 ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume.

**Tabel 2. 21 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2010 Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2019 - 2023 Kabupaten Bandung Barat**

No	Sektor	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.362,86	6.173,59	6.140,22	6.812,50	7.247,21
2	Pertambangan dan Penggalian	476,90	476,31	506,84	517,68	535,90
3	Industri Pengolahan	18.816,07	18.744,16	20.188,77	22.012,92	23.440,63
4	Listrik dan Gas	390,49	375,83	418,08	441,35	463,10
5	Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah daur ulang	17,78	19,68	21,60	23,85	24,50
6	Konstruksi	3.613,70	3.421,28	3.683,20	3.878,19	4.184,36
7	Perdagangan besar dan eceran	6.404,98	5.991,72	6.188,06	6.535,27	7.060,70
8	Transportasi dan pergudangan	2.503,97	2.436,30	2.511,57	2.905,25	3.409,12
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	2.436,39	2.401,86	2.417,65	2.783,85	3.063,80
10	Informasi dan komunikasi	786,49	999,36	1.069,96	1.120,75	1.191,52
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	414,20	418,93	455,56	490,38	516,24
12	Real Estate	853,13	855,11	939,98	1.016,14	1.096,94
13	Jasa Perusahaan	212,59	192,79	218,83	253,49	283,21
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1.365,49	1.269,76	1.242,43	1.201,45	1.247,80
15	Jasa Pendidikan	1.742,81	1.942,60	1.983,84	2.078,60	2.248,48
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	259,85	258,02	274,36	290,83	316,87
17	Jasa lainnya	522,36	501,60	503,35	558,78	614,81
PDRB ADHB		47.180,08	46.478,90	48.764,31	52.921,29	56.945,18

Sumber : PDRB KBB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023, BPS.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi). Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut.

Bila dilihat dari sisi pengeluaran, Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan dan penurunan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Bandung Barat pada periode 2019-2023 dapat dilihat dari Tabel 1 berikut ini:

Tabel 2. 22 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2019-2023

Komponen Pengeluaran/<i>Expenditure item</i>	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	31.000,87	31.260,37	32.262,77	35.585,57	38.762,46
2. Konsumsi LNPRT/ <i>NPISH Consumption</i>	455,23	443,14	455,28	486,47	556,40
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	2.894,60	2.948,57	3.078,08	3.080,70	3.204,43
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	9.938,40	9.354,54	10.540,03	11.216,89	12.110,42
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of Inventory</i>	1.844,99	661,74	-387,66	58,65	50,86
6. Net kspor/ <i>NettExport</i> (Ekspor-Impor)	1.045,98	1.810,54	2.815,82	2.493,01	2.260,61
PDRB / GRDP	47.180,08	46.478,90	48.764,31	52.921,29	56.945,18

Sumber : PDRB KBB Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023, BPS.

Berdasarkan tabel diatas, berputarnya aktivitas ekonomi di berbagai sektor disertai dengan peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran.

PDRB menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksi barang dan jasa yang disusun berdasarkan harga pada tahun dasar. PDRB Atas Dasar Harga Konstan terus meningkat dalam lima tahun terakhir, pada tahun 2019 nilai PDRB ADHK sebesar 31.398,35 miliar tetapi akibat adanya pandemi covid-19 di awal tahun 2020, angka PDRB ADHK mengalami penurunan menjadi 30.640,41 miliar rupiah pada tahun 2020.

Tetapi pada tahun 2021, 2022, 2023 secara nominal PDRB ADHK Kabupaten Bandung Barat menunjukkan peningkatan menjadi 31.701,79 miliar pada tahun 2021, 33.393,29 miliar pada tahun 2022 dan 35.062,19 miliar pada tahun 2023, perkembangannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel gambar dan tabel berikut:

Tabel 2. 23 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 - 2023 Kabupaten Bandung Barat

No	Sektor	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.734,13	3.711,11	3.672,82	3.823,82	3.884,46
2	Pertambangan dan Penggalian	329,67	322,49	342,68	342,29	344,65
3	Industri Pengolahan	12.826,82	12.516,78	13.126,08	13.970,00	14.710,29
4	Listrik dan Gas	237,13	229,82	254,96	266,93	273,12
5	Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah daur ulang	11,50	12,68	13,89	14,95	15,28
6	Konstruksi	2.349,05	2.214,82	2.378,25	2.419,98	2.528,35
7	Perdagangan besar dan eceran	4.382,11	4.024,97	4.142,79	4.305,72	4.479,13
8	Transportasi dan pergudangan	1.605,32	1.544,01	1.561,04	1.716,34	1.894,38
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1.645,77	1.568,89	1.553,41	1.709,15	1.866,42
10	Informasi dan komunikasi	799,67	1.015,82	1.094,91	1.155,96	1.228,47
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	259,49	263,15	277,91	274,48	284,16
12	Real Estate	615,11	616,38	677,19	731,75	777,36
13	Jasa Perusahaan	154,16	135,50	146,31	161,89	173,66
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib	764,96	706,20	688,15	666,91	683,00
15	Jasa Pendidikan	1.165,30	1.241,42	1.241,87	1.272,15	1.322,48
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	172,96	172,47	182,98	192,58	203,64
17	Jasa lainnya	345,21	343,91	346,54	368,39	393,35
PDRB ADHK		31.398,35	30.640,41	31.701,79	33.393,29	35.062,19

Sumber : PDRB KBB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023, BPS.

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divaluasi dengan harga tahun 2010.

Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Bandung Barat pada periode 2019-2023 dapat dilihat dari Tabel 2 dan Grafik 2 berikut ini:

Tabel 2. 24 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2019-2023

Komponen Pengeluaran/<i>Expenditure item</i>	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	19.946,78	19.770,88	20.033,77	20.909,97	21.921,28
2. Konsumsi LNPRT	315,27	300,82	305,53	314,86	347,42
3. Konsumsi Pemerintah/	1.769,78	1.770,07	1.806,28	1.765,63	1.817,98
4. Pembentukan Modal Tetap	6.963,87	6.529,16	7.009,19	7.050,77	7.371,64
5. Perubahan Inventori	1.046,84	374,39	-208,71	31,57	26,59
6. Net Ekspor (Ekspor-Impor)	1.355,80	1.895,07	2.755,71	3.320,49	3.577,28
PDRB / GRDP	31.398,35	30.640,41	31.701,78	33.393,29	35.062,19

Sumber : PDRB KBB Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023, BPS.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah, hal ini berguna untuk mengetahui apakah suatu wilayah tersebut mengalami peningkatan secara terus menerus atau sebaliknya yaitu mengalami penurunan. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pada tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,46 persen meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 pada saat terjadi pandemi covid-19 yang mengalami kontraksi/pertumbuhan negatif sebesar 2,41 persen. Pada tahun 2022 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,34 persen meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan terakhir tahun 2023 pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 5,00 persen. Laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan 2010 Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 25 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2010 Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 - 2023 (persen)

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,24	-0,62	-1,03	4,11	1,59
B	Pertambangan dan Penggalian	-1,29	-2,18	6,26	-0,11	0,69
C	Industri Pengolahan	6,26	-2,42	4,87	6,43	5,30
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,17	-3,08	10,94	4,70	2,32
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,94	10,21	9,58	7,61	2,23
F	Konstruksi/Construction	7,38	-5,71	7,38	1,75	4,48
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,84	-8,15	2,93	3,93	4,03
H	Transportasi dan Pergudangan	4,43	-3,82	1,10	9,95	10,37
I	Penyediaan Akomodasi & Mamin	6,33	-4,67	-0,99	10,03	9,20
J	Informasi dan Komunikasi/	8,39	27,03	7,79	5,58	6,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,44	1,41	5,61	-1,24	3,53
L	Real Estat	8,58	0,21	9,86	8,06	6,23
M,N	Jasa Perusahaan	7,58	-12,11	7,98	10,65	7,27
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-0,03	-7,68	-2,56	-3,09	2,41
P	Jasa Pendidikan	4,76	6,53	0,04	2,44	3,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,55	-0,28	6,09	5,25	5,74
R,S,T,U	Jasa Lainnya	6,45	-0,38	0,76	6,30	6,78
Produk Domestik Regional Bruto		5,05	-2,41	3,46	5,34	5,00

Sumber : PDRB KBB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023, BPS.

Pada tahun 2023, Kabupaten Bandung Barat mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,00 persen. Hal ini terlihat dari peningkatan aktivitas produksi di semua lapangan usaha dengan percepatan pertumbuhan ekonomi terbesar terdapat pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 10,37 persen dan perceptan pertumbuhan ekonomi paling kecil ada pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 0,69 persen.

Sedangkan dari sisi pengeluaran, agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB ADHK adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah, sebagaimana terlihat dari Tabel berikut:

Tabel 2. 26 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2019-2023

Komponen	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/	5,13	-0,88	1,33	4,37	4,84
2. Konsumsi LNPRT/	3,24	-4,58	1,57	3,05	10,34
3. Konsumsi Pemerintah/	3,26	0,02	2,05	-2,25	2,96
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/	5,70	-6,24	7,35	0,59	4,55
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of Inventory</i>					
6. Net Ekspor/ <i>Nett Export</i> (Ekspor- Impor)					
PDRB / GRDP	5,05	-2,41	3,46	5,34	5,00

Sumber : PDRB KBB Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023, BPS.

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa.

Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori

2.2.1.2 Tingkat Inflasi

Secara teoritis, laju inflasi berperan dalam mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang tergolong rendah akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang positif (meskipun pertumbuhan tersebut dapat saja bersifat menurun). Apabila sisi permintaan di dalam perekonomian lebih kuat dibandingkan dengan sisi penawarannya, maka secara teoritis penurunan laju inflasi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, demikian sebaliknya.

Kabupaten Bandung Barat bukan termasuk Kabupaten/Kota yang dihitung nilai inflasinya. Bagi kabupaten yang tidak dihitung maka ada kota rujukan inflasi, dimana kota inflasi tersebut memiliki karakteristik ekonomi yang tidak jauh berbeda dan atau memiliki kedekatan secara geografis. Berikut ditampilkan inflasi Kota Bandung, dengan pertimbangan secara geografis Kota Bandung merupakan kota yang menjadi acuan perhitungan inflasi Kabupaten Bandung Barat, serta sebagian wilayah Kabupaten Bandung Barat berbelanja dan memiliki pola konsumsi yang mengarah ke Kota Bandung. Perkembangan inflasi tahunan 7 Kota di Jawa Barat, termasuk inflasi Kota Bandung selama 5 tahun terakhir sebagai rujukan inflasi di Kabupaten Bandung Barat:

Tabel 2. 27 Inflasi Y to Y Kota di Jawa Barat Tahun 2023

Kota	2019	2020	2021	2022	2023*
Kota Bogor	3,02	2,18	1,93	5,82	3,36
Kota Sukabumi	2,33	1,84	1,71	5,45	2,72
Kota Bandung	2,78	1,75	1,65	7,45	0,63
Kota Cirebon	2,00	1,16	1,81	4,86	3,22
Kota Bekasi	4,28	2,81	1,61	5,37	3,14
Kota Depok	3,29	1,78	1,81	6,06	2,49
Kota Tasikmalaya	1,72	1,61	1,17	6,65	2,84
Jawa Barat	3,21	2,18	1,69	6,04	2,48

Sumber: Indikator Statistik Terkini Prov. Jabar, BPS Prov. Jabar, Des 2023

2.2.1.3 Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

Kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya, yang antara lain mencakup Kebutuhan pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, sehingga tidak mampu mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Menurut BPS, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, yaitu sebesar 2,5 dolar AS PPP per kapita per hari.

Bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik yang mendesak dan memerlukan langkah penanganan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, sehingga diperlukan langkah penanggulangan kemiskinan di Kab. Bandung Barat yang didukung oleh data yang akurat, strategi dan arah kebijakan yang tepat sasaran. Kemiskinan sebagai indikator yang dihasilkan dari perbedaan pengeluaran/pendapatan masyarakat, suatu penduduk dikatakan merupakan penduduk miskin ketika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan merupakan suatu representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan. Perkembangan tingkat kemiskinan, penduduk miskin dan garis kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 - 2023 dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 2. 28 Persentase Penduduk Miskin, Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 - 2023

Persentase Penduduk Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	
		(rupiah/kapita/bulan)	Miskin (persen)
2019	341.307	159,03	9,38
2020	362.212	179,46	10,49
2021	374.470	190,77	11,30
2022	393.956	183,70	10,82
2023	426.355	179,43	10,52

Sumber : KBBDA, 2020-2023, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah.

Dalam proses penghitungan, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan. Batasan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama kurun waktu 5 tahun dari Tahun 2019 –2023, Garis Kemiskinan naik sebesar Rp.85.048,- dari Rp.341.307,- per kapita per bulan pada Tahun 2019 menjadi Rp.426.355,- per kapita per bulan pada Tahun 2023. Bila dilihat dari skala nasional, kemiskinan Kab. Bandung Barat masih di atas nasional dan dalam skala regional tingkat kemiskinan Kab. Bandung Barat masih tinggi yaitu berada pada peringkat 22 dari 27 Kab/Kota di Jabar.

**Tabel 2. 29 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Tahun 2019-2023 (Persen)**

Peringkat	Kabupaten / Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kota Depok	2.07	2.45	2.58	2.53	2.38
2	Kota Bandung	3.38	3.99	4.37	4.25	3.96
3	Kota Bekasi	3.81	4.38	4.74	4.43	4.10
4	Kota Cimahi	4.39	5.11	5.35	5.11	4.66
5	Bekasi	4.01	4.82	5.21	5.01	4.93
6	Kota Banjar	5.50	6.09	7.11	6.73	6.14
7	Bandung	5.94	6.91	7.15	6.80	6.40
8	Kota Bogor	5.77	6.68	7.24	7.10	6.67
9	Sukabumi	6.22	7.09	7.70	7.34	7.01
10	Ciamis	6.65	7.62	7.97	7.72	7.42
11	Bogor	6.66	7.69	8.13	7.73	7.27
12	Kota Sukabumi	6.67	7.70	8.25	8.02	7.50
13	Karawang	7.39	8.26	8.95	8.44	7.87
14	Purwakarta	7.48	8.27	8.83	8.70	8.46
15	Pangandaran	7.71	8.99	9.65	9.32	8.98
16	Kota Cirebon	8.41	9.52	10.03	9.82	9.16
18	Sumedang	9.05	10.26	10.71	10.14	9.36
17	Subang	8.12	9.31	10.03	9.75	9.52
19	Garut	8.98	9.98	10.65	10.42	9.77
20	Cianjur	9.15	10.36	11.18	10.55	10.22
21	Tasikmalaya	9.12	10.34	11.15	10.73	10.28
22	Bandung Barat	9.38	10.49	11.30	10.82	10.52
23	Cirebon	9.94	11.24	12.30	12.01	11.20
24	Majalengka	10.06	11.43	12.33	11.94	11.21
25	Kota Tasikmalaya	11.60	12.97	13.13	12.72	11.53
26	Kuningan	11.41	12.82	13.10	12.76	12.12
27	Indramayu	11.11	12.70	13.04	12.77	12.13
Provinsi Jawa Barat		6.91	7.88	8.40	8.06	7.62
Nasional		9.22	10.19	9.71	9.57	9.36

Sumber : Data Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2019-2023, diolah.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin kecil nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1), semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program.

Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel 2. 30 Indeks Kedalaman Kemiskinan Dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 - 2023

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2019	1,54	0,33
2020	1,40	0,25
2021	1,62	0,32
2022	1,56	0,31
2023	1,54	0,34

Sumber : KBBDA, 2020-2024, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi kesejahteraan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan ekstrem, yaitu setara dengan USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity) yang oleh Bank Dunia dihitung dengan membandingkan berbagai komoditas antar negara. Seiring dengan perkembangan kebijakan nasional, maka perlu disajikan data kemiskinan ekstrem.

Berdasarkan Kepmen Menko Bidang PMK Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024 bahwa Kab. Bandung Barat merupakan salah satu prioritas lokasi prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem dari 212 Kab/Kota. Tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Bandung Barat terus mengalami penurunan dari 2,91 persen tahun 2020 meningkat menjadi 1,82 persen pada tahun 2022 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 31 Data Kemiskinan Ekstrem Berdasarkan Data P3KE di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023

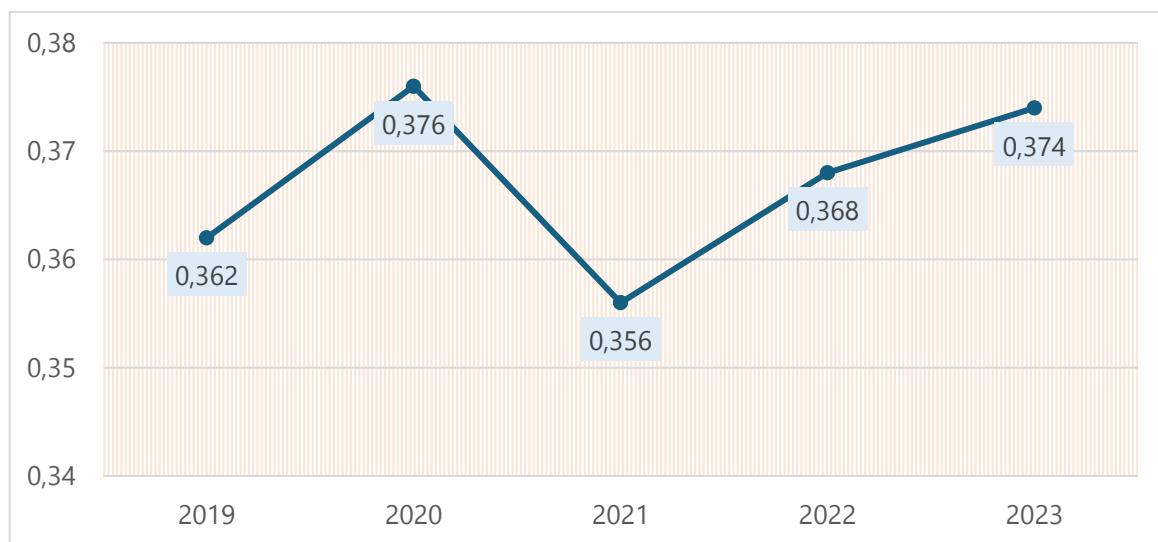
No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem				Persen Penduduk Miskin Ekstrem			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Bogor	63,497	107,250	146,120	47,220	1.17	1.77	2.38	0.76
2	Sukabumi	30,525	24,610	19,900	24,050	1.12	0.98	0.78	0.94
3	Cianjur	94,891	57,040	36,160	11,890	3.83	2.45	1.55	0.51
4	Bandung	89,145	66,960	56,430	46,810	2.46	1.78	1.48	1.22
5	Garut	50,937	30,320	82,170	9,550	1.97	1.15	3.10	0.36
6	Tasikmalaya	23,315	28,240	15,740	27,120	1.25	1.57	0.87	1.49
7	Ciamis	20,280	5,510	17,900	1,320	1.65	0.45	1.47	0.11
8	Kuningan	73,564	24,030	31,890	15,700	6.30	2.20	2.90	1.42
9	Cirebon	74,930	64,440	81,890	36,640	3.30	2.92	3.70	1.65
10	Majalengka	39,164	43,840	24,130	10,640	3.00	3.58	1.96	0.86
11	Sumedang	57,510	31,710	36,820	6,370	4.99	2.69	3.11	0.53
12	Indramayu	110,433	75,820	53,050	38,550	6.02	4.32	3.01	2.18
13	Subang	59,825	57,510	35,440	34,610	3.75	3.63	2.23	2.16
14	Purwakarta	29,437	18,580	16,930	10,190	2.95	1.95	1.76	1.06
15	Karawang	110,003	28,220	64,020	17,890	4.51	1.20	2.70	0.75
16	Bekasi	71,288	56,000	25,820	19,820	2.29	1.44	0.64	0.48
17	Bandung Barat	52,041	28,250	33,590	15,040	2.91	1.67	1.98	0.88
18	Pangandaran	17,413	5,610	5,930	2,650	4.11	1.38	1.46	0.65
19	Kota Bogor	28,789	13,590	14,450	4,930	2.76	1.23	1.30	0.44
20	Kota Sukabumi	10,875	9,980	4,490	2,540	3.14	3.03	1.35	0.76
21	Kota Bandung	41,795	24,790	25,370	9,140	1.71	0.96	0.98	0.35
22	Kota Cirebon	17,732	13,060	5,320	1,090	5.32	4.10	1.66	0.34
23	Kota Bekasi	31,796	33,250	61,750	-	1.25	1.09	1.99	-
24	Kota Depok	50,380	9,440	17,570	-	2.45	0.38	0.69	-
25	Kota Cimahi	11,027	8,340	2,630	2,980	1.94	1.37	0.43	0.49
26	Kota Tasikmalaya	30,365	27,170	23,880	6,590	4.24	3.99	3.49	0.96
27	Kota Banjar	2,894	2,080	2,490	80	1.44	1.10	1.32	0.04
Provinsi Jawa Barat		1,293,850	895,640	941,860	403,380	2.68	1.79	1.86	0.79
Nasional						4.00	2.14	1.74	1.12

Sumber : Data P3KE, Kemenko PMK, 2024.

Indikator pertama yang digunakan untuk mendapatkan gambaran ketimpangan pendapatan suatu wilayah yaitu gini rasio. Secara umum perkembangan nilai Gini Ratio Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 - 2023 berfluktuatif namun cenderung selalu berada pada level ketimpangan rendah (<0,4).

Nilai indeks pada grafik berikut, menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan wilayah Kabupaten Bandung Barat termasuk kategori dengan ketimpangan rendah karena nilainya masih di bawah 0,4. Tetapi Pemerintah Daerah harus bertindak cepat walaupun masih kategori rendah namun jaraknya cukup dekat dengan kategori sedang.

Gambar 2. 7 Grafik Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023



Sumber : KBBDA, 2020-2024, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

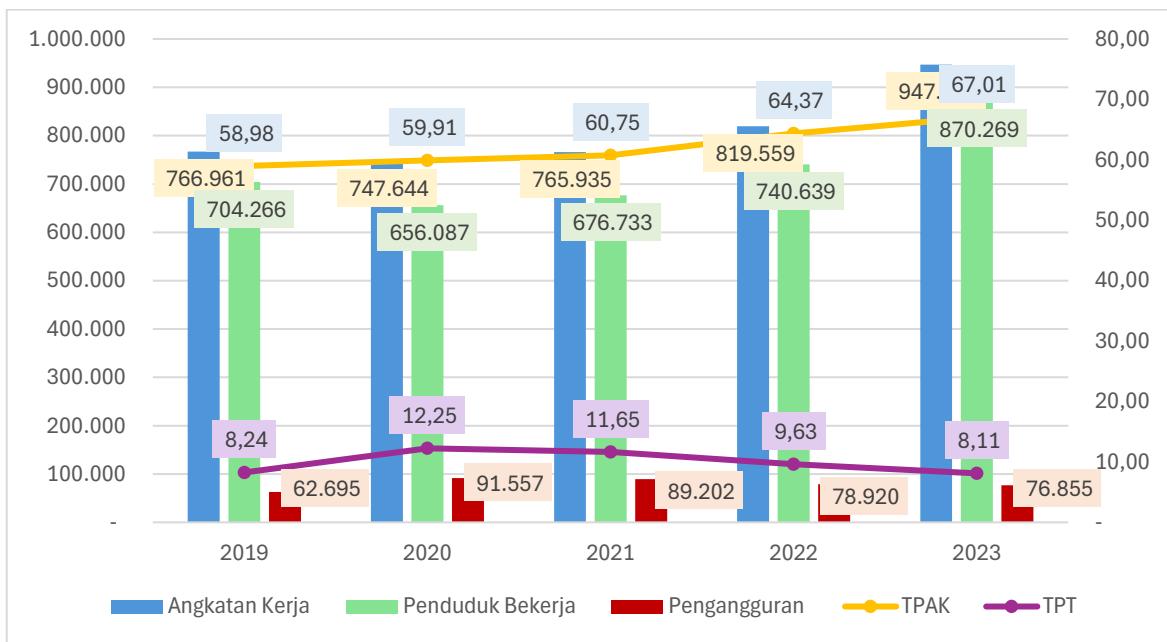
2.2.1.4 Tingkat Pengangguran

Ketenagakerjaan tidak dapat terlepas dari pertumbuhan ekonomi, tumbuhnya ekonomi diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Penduduk angkatan kerja yang terdiri dari komposisi penduduk bekerja dan mencari pekerjaan pada dasarnya merupakan bagian dari penduduk yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan perekonomian di suatu wilayah.

Indikator ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat dilihat berdasarkan jumlah Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat pengangguran Terbuka (TPT).

Dari gambar berikut, selama 5 (lima) tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja, dari 767 ribu pada tahun 2019 menjadi 947 ribu pada tahun 2023, dengan penjelasan kondisi ketenagakerjaan selama tahun 2019- 2023 dijelaskan pada gambar berikut:

Gambar 2. 8 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat 2019-2023



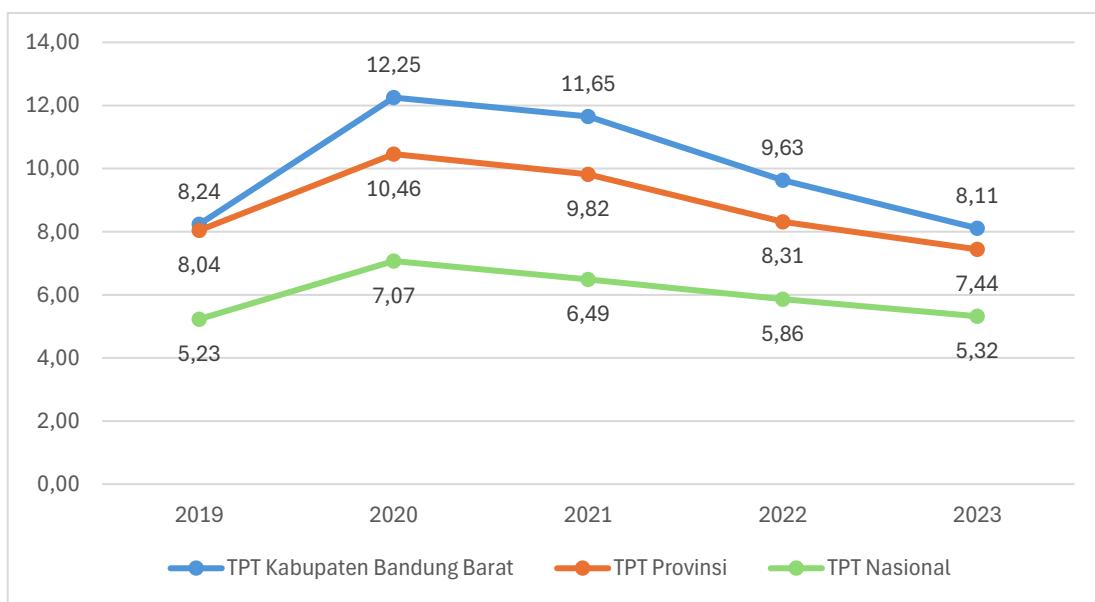
Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS Tahun 2019-2023, diolah.

Tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik jika pertumbuhan angkatan kerja yang terserap/terakomodasi oleh lapangan kerja dapat mengimbangi pengangguran yang terjadi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bandung Barat dari 2019 sampai 2020 mengalami peningkatan dari 8,24% menjadi 12,25%, pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup melonjak hal ini disebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan terhentinya kegiatan usaha akibat pandemi cukup tinggi, namun sebagian dari mereka mencoba memasuki dunia kerja dengan mencari kerja melalui melamar pekerjaan atau coba memulai mempersiapkan usaha.

Pada Tahun 2021 s.d 2023 di Kabupaten Bandung Barat tingkat pengangguran terbuka (TPT) kembali menurun seiring berangsur-angsurnya pergerakan manusia karena pandemi mulai mereda, TPT pada tahun 2021 sebesar 11,65 persen, tahun 2022 sebesar 9,63 persen dan tahun 2023 turun kembali menjadi 8,11 persen.

Permasalahan ketenagakerjaan berkorelasi kuat dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja. Pada tahun 2020 dan 2021 dampak pandemi COVID-19 masih memberikan tekanan besar kepada sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat, hal ini terlihat dari capaian target tingkat pengangguran terbuka selalu lebih rendah dibanding target yang telah di tetapkan pada RPJMD Kabupaten Bandung Barat tahun 2018-2023. Begitu pun pula kondisi tingkat pengangguran di Kab. Bandung Barat masih tinggi bila dibandingkan dengan capaian TPT Jawa Barat dan nasional. Kondisi ini menandakan laju pertumbuhan angkatan kerja di Kabupaten Bandung Barat lebih cepat dibanding pertumbuhan lapangan kerja, sehingga angkatan kerja yang tersedia tidak seluruhnya terserap pasar kerja, untuk lebih jelasnya digambarkan berikut:

Gambar 2. 9 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023



Sumber : KBBDA, 2020-2024, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

Pada skala regional Jawa Barat, pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19 menyebabkan angka pengangguran di Jawa Barat semakin tinggi. Hal ini tidak terlepas dari keadaan ketenagakerjaan di 27 Kab/Kota, pada tahun 2020 di Jawa Barat terdapat 14 (empat belas) Kab/Kota yang memiliki angka pengangguran lebih dari 2 (dua) digit (>10 persen) termasuk Kabupaten Bandung Barat. Pada tahun 2022 dan 2023 tingkat pengangguran di Kabupaten Bandung Barat turun menjadi 1 (satu) digit menjadi 9,63 persen ditahun 2022 dan 8,11 di tahun 2023.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator capaian pembangunan manusia, pembangunan gender dan pemberdayaan gender, kualitas keluarga, pembangunan pemuda dan olahraga serta pembangunan seni dan kebudayaan.

2.2.2.1 Pembangunan Manusia

Tujuan utama pembangunan manusia adalah untuk memastikan bahwa manusia dapat memperluas pilihan-pilihan yang dimiliki. Hal ini tentunya dapat terwujud apabila manusia berumur panjang dan sehat, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta dapat memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya dalam kegiatan yang produktif. Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh suatu daerah. Capaian pembangunan manusia di Kab. Bandung Barat tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 32 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 - 2023

No	Komponen	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Umur Harapan Hidup (Tahun)	72,18	72,34	72,52	72,79	73,10
2.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,86	11,87	11,88	11,89	11,91
3.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,18	8,19	8,20	8,22	8,23
4.	Pengeluaran Perkapita (ribu Rupiah)	8.684	8.455	8.546	9.044	9.392
IPM		68,27	68,81	69,03	69,82	70,33

Sumber : KBBDA, 2020-2024, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah.

Berdasarkan tabel di atas, IPM Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2023 sebesar 73,10. Angka IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Setiap dimensi diwakili oleh indikator.

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Sementara itu, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Terakhir, dimensi standar hidup layak Indonesia diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Berdasarkan data pada tahun 2023, umur harapan hidup saat lahir di Kabupaten Bandung Barat sudah mencapai 73,10 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa hidup bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 73,10 tahun. Dari sisi pendidikan, penduduk Bandung Barat yang berusia 25 tahun ke atas rata-rata sudah menempuh 8,23 tahun masa sekolah atau berada di kelas VIII. Selain itu, rata-rata anak usia 7 tahun yang mulai bersekolah, diperkirakan dapat mengenyam pendidikan hingga 11,91 tahun atau setara dengan Kelas XI atau sampai SMA kelas 2. Pada aspek ekonomi, pengeluaran per kapita sudah mencapai 9,392 juta rupiah per kapita per tahun.

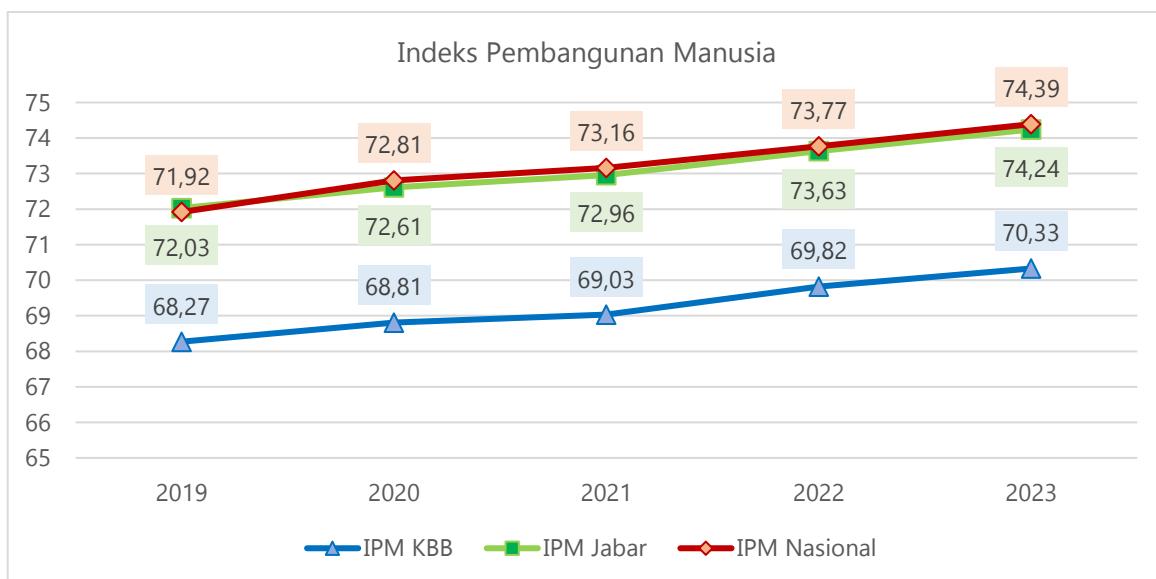
Selain pertumbuhan, status pembangunan manusia juga menjadi salah satu indikator untuk melihat kemajuan pembangunan manusia. Berubahnya status pembangunan manusia dapat dijadikan indikator dalam membaca perkembangan pembangunan manusia. BPS mengelompokkan status pembangunan manusia bedasarkan IPM menjadi 4 kelompok dengan kriteria sebagai berikut.

- Sangat Tinggi : $IPM \geq 80$
- Tinggi : $70 \leq IPM < 80$
- Sedang : $60 \leq IPM < 70$
- Rendah : $IPM < 60$

Bila mengacu pada klasifikasi pembagian status IPM di atas, maka IPM Kabupaten Bandung Barat selama 5 tahun terakhir termasuk dalam kategori "Kelompok sedang", yakni kelompok daerah dengan nilai IPM berkisar antara 60 hingga 70 dan telah mencapai "kelompok Tinggi" di tahun 2023.

Status indeks kesehatan termasuk dalam kategori "Kelompok Tinggi" (dengan capaian antara 70-80), status indeks pendidikan dan indeks daya beli masih dalam kategori "Kelompok Sedang" (dengan capaian antara 60-70). Ketiga komponen IPM secara simultan meningkatkan pencapaian IPM setiap tahun. Hal ini mengindikasikan terjadinya perbaikan kualitas pembangunan manusia dari sisi kesehatan, pendidikan dan hidup layak penduduk beberapa tahun terakhir. Hal yang paling harus diperhatikan adalah tingkat pendidikan yang masih tergolong sedang. Posisi IPM Kabupaten Bandung Barat masih berada di bawah IPM Provinsi Jawa Barat dan Nasional, namun secara tren sama-sama menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam lima tahun terakhir dengan capaian pada tahun 2023 sudah masuk dalam kategori IPM tinggi.

Gambar 2. 10 Perbandingan IPM Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023



Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat diolah Bappelitbangda, 2024

Dalam konstelasi regional Jawa Barat capaian IPM Kab/Kota menunjukkan adanya disparitas pembangunan sumber daya manusia, seperti terlihat pada tabel berikut. Perbedaan level pertumbuhan menunjukkan kinerja pembangunan manusia dalam kurun Tahun 2021- 2023, semakin cepat laju pertumbuhannya semakin cepat pula peningkatan IPM-nya.

Tabel 2. 33 Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota di Jawa Barat Barat Tahun 2023

Kab/Kota	UHH	HLS	RLS	Pengeluaran per Kapita	IPM
Bogor	74,67	12.64	8.37	11 153,00	73,02
Sukabumi	74,65	12.38	7.33	9 482,00	69,71
Cianjur	74,61	12.03	7.22	8 626,00	68,18
Bandung	74,92	12.73	9.10	11 018,00	74,03
Garut	74,66	12.16	7.84	8 685,00	69,22
Tasikmalaya	73,87	12.63	7.96	8 562,00	69,38
Ciamis	74,96	14.29	8.09	9 750,00	73,12
Kuningan	74,91	12.26	7.89	10 011,00	70,99
Cirebon	74,71	12.41	7.64	11 128,00	71,81
Majalengka	74,73	12.26	7.52	10 340,00	70,76
Sumedang	75,04	13.01	8.73	11 136,00	74,02
Indramayu	74,61	12.29	6.94	10 580,00	70,19
Subang	74,87	11.91	7.45	11 537,00	71,42
Purwakarta	74,67	12.18	8.13	12 619,00	73,43
Karawang	74,90	12.20	8.04	12 392,00	73,25
Bekasi	75,09	13.17	9.57	12 123,00	76,13
Bandung Barat	74,78	11.91	8.23	9 392,00	70,33
Pangandaran	74,88	12.30	8.04	9 406,00	70,57
Kota Bogor	75,52	13.45	10.64	12 656,00	78,36
Kota Sukabumi	74,89	13.60	10.37	11 799,00	77,16
Kota Bandung	75,53	14.24	11.06	18 236,00	83,29
Kota Cirebon	75,17	13.16	10.37	12 506,00	77,45
Kota Bekasi	75,86	14.12	11.66	16 479,00	83,06
Kota Depok	75,53	13.96	11.58	16 279,00	82,53
Kota Cimahi	75,27	13.84	11.39	12 883,00	79,69
Kota Tasikmalaya	75,08	13.49	9.54	11 063,00	75,47
Kota Banjar	74,77	13.27	8.79	11 356,00	74,45
Provinsi Jawa Barat	74,91	12.68	8.83	11 695,00	74,24
Nasional	73,93	13,15	8,77	11 899,00	74,39

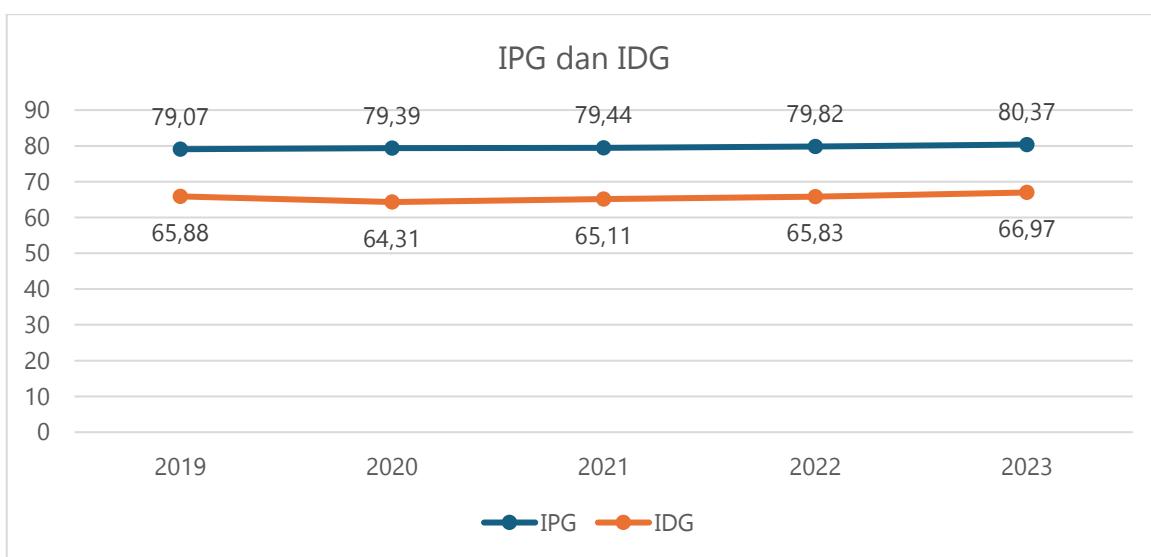
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

2.2.2.2 Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Pada tahun 2023 nilai IDG Kabupaten Bandung Barat sebesar 66,97 poin angka ini meningkat dari kondisi tahun 2019 yang masih berada pada angka 65,88 poin artinya terjadi peningkatan aktivitas perempuan dalam ekonomi dan politik dalam lima tahun terakhir sebesar 1,09 poin. IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki, dimana semakin mendekati 100, maka semakin rendah capaian kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Berikut capaian pembangunan gender dan pemberdayaan gender di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023.

Gambar 2. 11 Capaian Indeks Pemberdayaan dan Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024, diolah

Selama periode lima tahun terakhir, capaian IPG Kabupaten Bandung Barat mengalami tren yang positif. Pada tahun 2023 nilai IPG Kabupaten Bandung Barat sebesar 80,37 poin, angka ini meningkat sebesar 1,30 poin dari tahun 2019 dengan capaian 79,07 poin. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan pada aspek pembangunan gender di Kabupaten Bandung Barat.

2.2.2.3 Kualitas Keluarga

Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara konseptual, definisi keluarga berkualitas di atas berkaitan erat dengan definisi ketahanan dan kesejahteraan keluarga, yaitu kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, memiliki kemampuan fisik dan materil guna hidup mandiri, serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Capaian indek Kualitas Keluarga Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 adalah sebesar 70,82 point.

2.2.2.4 Kualitas Anak

ANAK adalah generasi penerus yang akan menentukan masa depan suatu bangsa, sehingga harus dijaga dan dilindungi dengan baik demi kemajuan suatu Negara/Daerah. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dini agar menjadi generasi unggul. Kualitas anak masa kini merupakan penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa yang akan datang. Pembangunan manusia massa depan di mulai dengan pembinaan anak masa sekarang. Untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas di masa yang akan datang maka anak perlu dipersiapkan agar anak bisa tumbuh dan berkembang sesuai kemampuannya (TANUWIDJAYA, 2012).

Kabupaten Bandung Barat yang memiliki jumlah penduduk usia anak sebesar 25,86 persen tentunya juga tidak dapat lepas dari upaya untuk melindungi dan memenuhi hak anak. Upaya ini direfleksikan dengan Indeks Perlindungan Anak (IPA), yang terdiri dari 5 (lima) klaster pengukur, meliputi: 1) hak sipil dan kebebasan; 2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 3) kesehatan dasar dan kesejahteraan; 4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan 5) perlindungan khusus. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, menunjukkan bahwa capaian Indeks Perlindungan anak Kabupaten Bandung Barat belum cukup baik yaitu sebesar 60,23 point dan tahun 2022 sebesar 60,48 persen. Sedangkan capaian Indeks Pemenuhan Anak (IPHA) Kab. Bandung Barat Tahun 2021 sebesar 55,20 point dan capaian 2022 sebesar 55,39 point.

2.2.2.5 Pembangunan Seni dan Budaya

Tolok ukur kinerja pemerintah dalam aspek kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah keberhasilan pelestarian seni dan budaya. Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan kebudayaan dalam rangka pemajuan dan pelestarian nilai dan objek budaya lokal.

Upaya dan tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan terhadap objek pemajuan kebudayaan, yang meliputi: tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, dan ritus. Data potensi keragaman seni dan budaya di Kabupaten Bandung Barat, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 34 Potensi Keragaman Budaya Kabupaten Bandung Barat 2019 - 2023

No	Seni Budaya	Jumlah Tahun					Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Seni Karawitan	50	50	50	48	51	Degung, Karawitan, Aneka Seni Sunda, Domyak, Karinding
2	Seni Teater	1	3	3	3	3	Lawak, Drama
3	Seni Pedalangan	6	6	6	8	9	Wayang Golek, Wayang Piling
4	Seni Lukis	-	-	6	1	1	-
5	Seni Pertunjukan	40	56	58	121	124	Calung, Qosidah, Singa Depok, Tagonian, Terbangan, Calung, Kacapi, Kuda Lumping, Orkes Melayu, Reog, Kaulinan Barudak
6	Seni Tari	83	88	88	120	369	Jaipong, Pencak Silat
7	Kontemporer	8	8	8	1	1	Elektone, Organ Tunggal, Campur Sari
8	Seni Rupa		-	-	1	1	Wayang
9	Seni Sastra		1	1	0	0	-
10	Adat Budaya	36	40	55	55	40	Ritual, Upacara tradisional/adat, Cerita Rakyat, Permainan Rakyat
Jumlah		224	252	275	358	599	

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2024.

Jumlah Nilai budaya lokal dan objek pemajuan budaya yang di lestarikan di Kabupaten Bandung Barat semakin meningkat tiap tahunnya melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan pada tahun 2019 terdapat 224 keragaman budaya yang dilestarikan meningkat s.d tahun 2023 menjadi 599 keragaman budaya.

2.2.2.6 Pembangunan Pemuda dan Olahraga

Parameter keberhasilan pembangunan olahraga bukan hanya dilihat dari segi prestasi yang diraih oleh suatu daerah, akan tetapi parameter keberhasilan pembangunan olahraga dapat dilihat dari segi pencapaian 4 aspek pembangunan keolahragaan atau Indeks Pembangunan Olahraga (IPO). IPO merupakan indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan olahraga didasari oleh empat dimensi dasar yaitu ruang terbuka yang tersedia untuk olahraga, sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam keolahragaan, serta partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan berolahraga secara langsung maupun tidak langsung dalam memperoleh derajat kebugaran jasmani pada masyarakat.

Capaian Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) di Kabupaten Bandung Barat terus meningkat, pada tahun 2021 sebesar 0,41 dan tahun 2022 sebesar 0,42 meningkat kembali di tahun 2023 sebesar 0,44 tetapi capaian masih pada kategori rendah.

Tabel 2. 35 Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Kabupaten Bandung Barat 2021 - 2023

Jenis Indeks	2021	2022	2023
Indeks ruang terbuka	0.59	0.58	0.66
Indeks SDM keolahragaan	0.33	0.33	0.29
Indeks partisipasi masyarakat	0.30	0.34	0.37
IPO	0.41	0.42	0.44

Sumber: Dispora Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024.

Prestasi olahraga di Kabupaten Bandung Barat didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana olahraga, pelaku olahraga yang terlibat dan klub/perkumpulan olahraga sebagai wadah untuk berlatihnya atlet dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga.

Sedangkan peran serta pemuda dalam pembangunan diukur melalui capaian kapasitas layanan kepemudaan dengan capaian di tahun 2023 sebesar 7,83 persen dan presentase pemuda yang aktif di organisasi kepramukaan capaian 2023 sebesar 2,86 persen, dengan indikator capaian sebagai berikut:

Tabel 2. 36 Indikator Kinerja Pemuda dan Olahraga Di Kabupaten Bandung Barat 2019 - 2023

Uraian	Tahun					Keterangan
	2019	2020	2021	2022	2023	
Jumlah Klub/Perkumpulan olahraga	404	411	428	431	442	Olahraga Prestasi, Olahraga Pelajar, Olahraga Rekreasi, Olahraga Disabilitas
Jumlah Atlet	1.678	1.984	2.475	2.542	2.744	
Jumlah Pelatih	487	545	572	616	703	
Jumlah Atlet Berprestasi	41	0	38	471	791	PORDA 2018, PON 2021, SEAGAMES 2019, POPWILDA 2019, KEJURNAS 2019, Porprov 2022, Peparda 2022

Uraian	Tahun					Keterangan
	2019	2020	2021	2022	2023	
Jumlah Sarana dan Prasarana olahraga	1.527	2.562	2.667	2.712	2.956	Tersebar di 16 Kecamatan dengan status Milik Pribadi, Milik Desa, Milik Swasta, Milik Pemda, Milik Yayasan, Milik Sekolah Swasta, Milik Sekolah Negeri & Milik BUMN
Jumlah Organisasi Kepemudaan (OKP)	85	79	88	92	92	90 Organisasi Pemuda bernaung di KNPI, 1 FOBB (Forum Osis Bandung Barat), 1 KEMBARA (Keluarga Mahasiswa Bandung Barat)
Presentase Kapasitas Layanan Kepemudaan	8,19	5,84	9,20	7,83	10,24	Layanan Kepemudaan mencakup Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Kepemimpinan, Kewirausahaan serta Kepeloporan
Presentase pemuda yg aktif pada organisasi kepramukaan	1,3	1,1	1,5	1,5	3,21	Pramuka Peserta Didik sebanyak 11.155 anggota dan Pramuka Dewasa Sebanyak 2.696 anggota

Sumber Data : Dispora Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024.

Potensi pelaku olahraga Atlet dan Pelatih dari olahraga di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan peningkatan dari sisi kuantitas selama kurun waktu 5 tahun dengan jumlah atlet di tahun 2019 sebanyak 1.678 orang atlet meningkat sebesar 38,85 persen menjadi 2.744 atlet di tahun 2023 dengan melibatkan 703 pelatih sampai dengan tahun 2023.

Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Bandung Barat baik berupa gedung dan lapang olahraga sebagai pusat aktivitas atlet dan masyarakat untuk melaksanakan aktivitas olahraga pada tahun 2023 terdapat 2.956 lokasi sarana dan prasarana olahraga, artinya proporsi ketersediaan sarana olahraga di Kabupaten Bandung Barat per 1.000 penduduk dari total penduduk tahun 2023 sebanyak 1.859.636 jiwa adalah sebesar 0,16 persen atau setiap 1 lokasi prasarana olahraga digunakan oleh 629 orang.

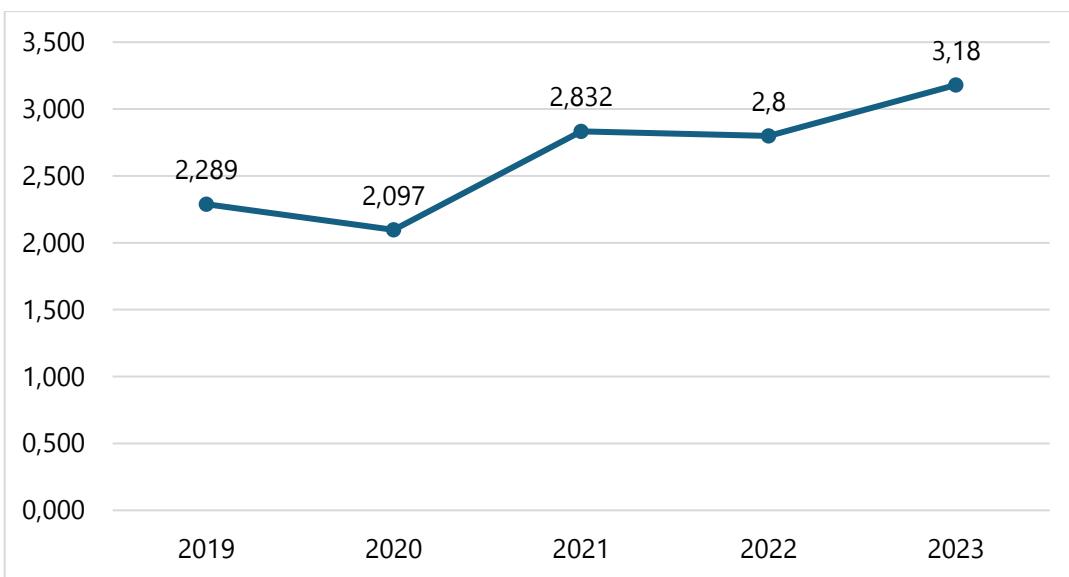
Bila dilihat dari prestasi olahraga, keikutsertaan atlet-atlet Kab. Bandung Barat pada event POPDA XIII Bogor tahun 2018 dengan raihan 40 emas, 52 perak dan 111 perunggu berada pada peringkat 6 se Jawa Barat dan event PEPARDA V Bogor tahun 2018 dengan raihan prestasi 11 emas, 3 perak dan 1 perunggu. Pada tahun 2019, 7 atlet Kab. Bandung Barat memperoleh raihan medali 11 emas, 3 perak dan 1 perunggu. Pada tahun 2021 melalui event PON XX Papua Kab. Bandung Barat mengirimkan 48 atlet untuk mewakili Kontingen Jawa Barat dengan raihan prestasi medali 18 emas, 12 perak dan 7 perunggu, berkontribusi untuk mengantarkan kontingen Jawa Barat menjadi juara umum PON XX Papua. Terakhir pada tahun 2022, Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu tuan rumah Porprov XIV Jabar tahun 2022 dengan raihan prestasi memperoleh 49 emas, 72 perak dan 104 perunggu berada pada peringkat 8 se-Jawa Barat dan event PEPARDA VI Bekasi tahun 2022 dengan raihan prestasi 18 emas, 25 perak dan 32 perunggu berada pada peringkat 8 se-Jawa Barat.

2.3 Aspek Daya Saing

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Berdasarkan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dilakukan oleh Kemenristek BRIN tahun 2019, bahwa Kabupaten Bandung Barat masuk pada kategori Daya Saing "Tinggi" dengan nilai indeks sebesar 2,289 dan sampai dengan tahun 2023 dengan capaian IDSD sebesar 3,180.

**Gambar 2. 12 Capaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2019 – 2023**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024, diolah

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam konteks daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah ada dan menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi. Kondisi daya saing daerah Kabupaten Bandung Barat terkait dengan kemampuan ekonomi daerah diantaranya berdasarkan sektor lapangan usaha unggulan dan potensial, PDRB per Kapita, pengeluaran per Kapita dan PDRB Hijau.

2.3.1.1 Lapangan Usaha Unggulan

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha bertujuan untuk melihat struktur ekonomi, besarnya peranan berbagai lapangan usaha dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Selama lima tahun terakhir (2019-2022) struktur perekonomian Bandung Barat didominasi oleh 6 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Sementara peranan lapangan usaha- lapangan usaha lainnya masing-masing masih berada di bawah 5 (lima) persen, distribusi peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 37 Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 - 2023 (persen)

No	Sektor	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13,49	13,28	12,59	12,87	12,73
2	Pertambangan dan Penggalian	1,01	1,02	1,04	0,98	0,94
3	Industri Pengolahan	39,88	40,33	41,40	41,60	41,66
4	Listrik dan Gas	0,83	0,81	0,86	0,83	0,81
5	Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah daur ulang	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04
6	Konstruksi	7,66	7,36	7,55	7,33	7,35
7	Perdagangan besar dan eceran	13,58	12,89	12,69	12,35	12,40
8	Transportasi dan pergudangan	5,31	5,24	5,15	5,49	5,99
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	5,16	5,17	4,96	5,26	5,38
10	Informasi dan komunikasi	1,67	2,15	2,19	2,12	2,09
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,88	0,90	0,93	0,93	0,91
12	Real Estate	1,81	1,84	1,93	1,92	1,93
13	Jasa Perusahaan	0,45	0,41	0,45	0,48	0,50
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	2,89	2,73	2,55	2,27	2,19
15	Jasa Pendidikan	3,69	4,18	4,07	3,93	3,95
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	0,55	0,56	0,56	0,55	0,56
17	Jasa lainnya	1,11	1,08	1,03	1,06	1,08
PDRB ADHB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: PDRB KBB Menurut Lapangan Usaha 2019 – 2023, BPS 2024.

1. Industri Pengolahan

Industri pengolahan merupakan sektor lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Bandung Barat dibanding sektor lainnya, dengan capaian selama 5 tahun terakhir berkontribusi antar 39,96 - 41,66 persen dari total PDRB.

2. Perdagangan Besar dan Eceran

Sektor Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi terbesar ke dua setelah Industri Pengolahan dengan capaian selama 5 tahun terakhir berkontribusi antar 12,35 - 13,58 persen dari total PDRB. Pada saat pandemi covid-19 sektor ini sangat terpengaruh dengan adanya pembatasan aktifitas manusia atau barang sehingga kontribusinya melambat dibanding saat kondisi normal sebelum adanya covid-19 tetapi berangsur-angsur pulih kembali di tahun 2022 dan 2023.

3. Pertanian

Lingkup lapangan usaha ini meliputi Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian; Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Perikanan. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dengan capaian selama 5 tahun terakhir berkontribusi antar 12,59 - 13,49 persen dari total PDRB. Khusus di tahun 2020 pada saat awal terjadi pandemi covid-19, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ada pergeseran dimana lapangan usaha pertanian menjadi urutan kedua melampaui pencapaian lapangan usaha perdagangan. Ini terjadi karena dampak Pandemi Covid-19, lapangan usaha pertanian walaupun sama mengalami hantaman karena covid namun tidak sebesar lapangan usaha perdagangan.

4. Konstruksi

Kegiatan ekonomi pada lapangan usaha konstruksi memberikan andil terhadap PDRB dengan capaian selama 5 tahun terakhir berkontribusi antar 7,33 - 7,66 persen dari total PDRB. Kegiatan ekonomi utama pada lapangan usaha ini mencakup konstruksi pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prefabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Proyek pembangunan infrastruktur strategis di Bandung Barat jangka menengah seperti Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung serta Proyek perbaikan dan pembukaan ruas jalan di wilayah selatan Kabupaten Bandung Barat memberikan kontribusi pada perekonomian di sektor ini.

5. Transportasi dan Pergudangan

Kegiatan ekonomi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan pada tahun 2018 - 2022 memberikan andil 5,15 - 5,99 persen terhadap PDRB Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ekonomi utama pada lapangan usaha sektor transportasi dan pergudangan didorong oleh perdagangan, industri pengolahan, pertambangan, dan konstruksi serta juga dipengaruhi oleh peningkatan volume ekspor dan impor.

6. Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman

Kegiatan ekonomi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makanan minuman pada tahun 2019 - 2023 memberikan andil 4,96 - 5,38 persen terhadap PDRB Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ekonomi utama pada lapangan usaha ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi.

2.3.1.2 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Tabel 2. 38 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 - 2023

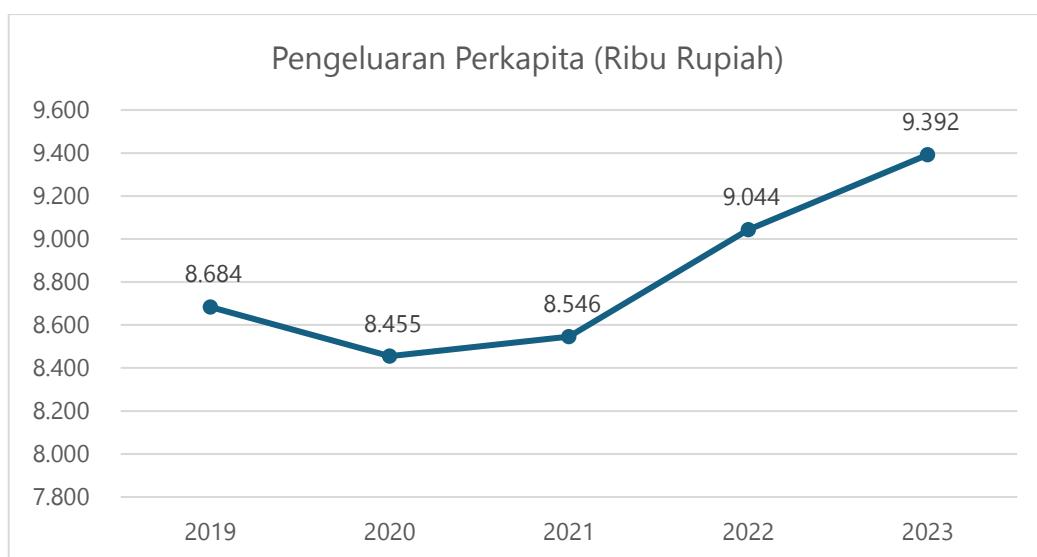
PDRB per Kapita (Juta Rupiah)					
	2019	2020	2021	2022*	2023**
- ADHB	28,21	26,09	26,97	28,85	30,62
- ADHK	18,77	17,20	17,53	18,21	18,85
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	4,42	-8,38	1,93	3,85	3,56

Sumber : KBBDA, 2019-2023, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

2.3.1.3 Pengeluaran Per Kapita

Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari kesejahteraan. Dimensi ini dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Indikator ini menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat selama periode tertentu. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kabupaten Bandung Barat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2020, perkembangannya seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 13 Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023



Sumber: KBBDA, 2020-2024, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita Kabupaten Bandung Barat menurun menjadi sebesar Rp.8.455.000,- atau mengalami kontraksi sebesar 0,28% dibandingkan tahun 2019. Hal ini merupakan dampak terjadinya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020. Namun dengan mulai menurunnya kasus Covid-19 pada tahun 2021 sehingga keadaan perekonomian mulai membaik, pengeluaran per kapita Kabupaten Bandung Barat terus meningkat menjadi sebesar Rp.9.392.000,- atau naik sebesar 8,15% pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2019.

Pada skala regional Jawa Barat (terlihat pada tabel 2.32), pengeluaran per kapita merupakan komponen IPM yang terdampak cukup parah akibat pandemi COVID-19. Semua kabupaten/kota di Jawa Barat termasuk di Kabupaten Bandung Barat mengalami penurunan nilai pengeluaran per kapita pada tahun 2020.

Tetapi di tahun 2021 - 2023 seiring dengan kondisi perekonomian yang mulai menunjukkan pemulihan, seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat mengalami peningkatan nilai pengeluaran per kapita dibandingkan tahun sebelumnya termasuk di Kabupaten Bandung Barat dengan capaian di tahun 2022 sebesar Rp.9.044.000,- dan terus meningkat di tahun 2023 menjadi sebesar Rp.9.392.000,-

Tabel 2. 39 Pengeluaran per Kapita Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2029-2023
(Rp.000/kapita/tahun)

No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bogor	10.683	10.317	10.410	10.860	11.153
2	Sukabumi	8.973	8.823	8.850	9.210	9.482
3	Cianjur	8.290	7.980	8.052	8.244	8.626
4	Bandung	10.502	10.201	10.307	10.588	11.018
5	Garut	8.099	7.876	7.961	8.227	8.685
6	Tasikmalaya	8.092	7.852	7.829	8.177	8.562
7	Ciamis	9.557	9.288	9.259	9.428	9.750
8	Kuningan	9.673	9.459	9.409	9.620	10.011
9	Cirebon	10.670	10.342	10.368	10.791	11.128
10	Majalengka	9.822	9.521	9.591	9.950	10.340
11	Sumedang	10.406	10.217	10.262	10.776	11.136
12	Indramayu	10.090	8.959	9.810	10.166	10.580
13	Subang	11.012	10.790	10.854	11.294	11.537
14	Purwakarta	11.819	11.614	11.669	12.193	12.619
15	Karawang	11.856	11.315	11.522	11.927	12.392
16	Bekasi	11.610	11.241	11.341	11.757	12.123
17	Bandung Barat	8.684	8.455	8.546	9.044	9.392
18	Pangandaran	9.423	9.084	9.065	9.389	9.406
19	Kota Bogor	11.825	11.564	11.716	12.058	12.656
20	Kota Sukabumi	11.204	10.999	10.942	11.229	11.799
21	Kota Bandung	17.254	16.887	16.996	17.639	18.236
22	Kota Cirebon	11.930	11.800	11.810	12.087	12.506
23	Kota Bekasi	16.157	15.776	15.903	16.239	16.479
24	Kota Depok	15.696	15.281	15.420	15.926	16.279
25	Kota Cimahi	12.448	12.025	12.019	12.500	12.883
26	Kota Tasikmalaya	10.414	10.263	10.213	10.578	11.063
27	Kota Banjar	10.705	10.535	10.476	10.967	11.356
	Provinsi Jawa Barat	11.152	10.845	10.934	11.277	11.695

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

2.3.1.4 PDRB Hijau

Dalam kontek pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis lingkungan hidup atau yang dikenal dengan konsep green economy, merupakan suatu konsep yang mencerminkan kepedulian dan komitmen daerah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan yang indikator kinerjanya tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto Lingkungan Hidup (PDRB Hijau). PDRB Hijau memperhitungkan nilai deplesi dan degradasi, yang merupakan penyusutan sumber daya alam dan lingkungan. Deplesi sumber daya alam adalah berkurangnya sumber daya alam yang tersedia, sedangkan degradasi adalah menurunnya kemampuan lingkungan untuk menyediakan barang dan jasa.

Tujuan PDRB Hijau adalah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang menjamin generasi saat ini dan generasi masa depan. Pihak yang memanfaatkan sumber daya alam harus membayar penyusutan tersebut kepada masyarakat melalui pemerintah daerah.

Tabel berikut memperlihatkan estimasi perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Hijau dimana Produk Domestik Regional Bruto sebelumnya telah dikurangi dengan besaran nilai Deplesi dan Degradasi Sumberdaya Alam dari beberapa sektor lapangan usaha. Berikut ini adalah tabel mengenai besaran estimasi Produk Domestik Regional Bruto Hijau atas dasar harga berlaku menurut Lapangan usaha di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2022.

**Tabel 2. 40 PDRB Hijau Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2022**

LAPANGAN USAHA		2020	TAHUN 2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.173,59	6.032,92	6.032,92
B	Pertambangan dan Penggalian	476,31	387,75	368,51
C	Industri Pengolahan	18.738,19	19.941,30	18.564,22
D	Pengadaan Listrik dan Gas	375,83	286,56	286,56
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19,68	17,04	17,04
F	Konstruksi	3.421,28	3.487,43	3.488,43
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.997,68	6.097,42	6.097,42
H	Transportasi dan Pergudangan	2.436,30	2.426,60	2.427,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.401,86	2.367,89	2.367,89
J	Informasi dan Komunikasi	999,36	382,76	382,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	418,93	415,37	415,37
L	Real Estat	855,11	852,46	852,46
M,N	Jasa Perusahaan	192,79	202,44	202,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.269,76	1.265,09	1.265,09
P	Jasa Pendidikan	1.942,60	1.809,01	1.810,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	258,02	249,46	249,46
R,S,T,U	Jasa Lainnya	501,60	500,24	490,40
PDRB		46.478,90	46.721,72	45.318,56

Sumber : Kajian PDRB Hijau Kab. Bandung Barat, Litbang Bappelitbangda

Tabel berikut memperlihatkan estimasi perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Hijau dimana Produk Domestik Regional Bruto sebelumnya telah dikurangi dengan besaran nilai Deplesi dan Degradasi Sumberdaya Alam dari beberapa sektor lapangan usaha. Berikut ini adalah tabel mengenai besaran estimasi Produk Domestik Regional Bruto Hijau atas dasar harga konstan menurut Lapangan usaha di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2022.

**Tabel 2. 41 PDRB Hijau Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2022**

LAPANGAN USAHA		2020	TAHUN 2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.711,11	3.658,35	3.658,35
B	Pertambangan dan Penggalian	322,49	223,59	216,97
C	Industri Pengolahan	12.517,13	12.977,40	12.427,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	229,82	141,85	141,85
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,68	10,46	10,46
F	Konstruksi	2.214,82	2.275,63	2.276,63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.024,97	4.167,02	4.167,02
H	Transportasi dan Pergudangan	1.544,01	1.552,15	1.553,15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.568,89	1.558,21	1.558,21
J	Informasi dan Komunikasi	1.015,82	390,44	390,44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	263,15	263,08	263,08
L	Real Estat	616,03	617,52	617,52
M,N	Jasa Perusahaan	135,50	142,07	142,07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	706,20	720,45	720,45
P	Jasa Pendidikan	1.241,42	1.186,30	1.187,30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	172,47	165,72	165,72
R,S,T,U	Jasa Lainnya	343,91	343,43	334,12
PDRB		30.640,41	30.393,65	29.830,63

Sumber : Kajian PDRB Hijau Kab. Bandung Barat, Litbang Bappelitbangda

Akibat COVID-19, pada tahun 2020 PDRB HB mengalami Pertumbuhan negatif (negative growth) yang cukup tinggi yaitu sebesar (1,49%) atau mengalami perlambatan sebesar (9,19%) dibandingkan dengan tahun 2019. Namun demikian, secara rata-rata per tahun menunjukkan perkembangan yang cukup baik dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun mencapai 5,72%. Laju pertumbuhan ekonomi riil (PDRB HK) rata-rata per tahun sebesar 3,36 %, dengan 4 sektor penggerak utama, yakni:

- a. Sektor Perdagangan Besardan Ecera, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan Laju sebesar 13,85%;
- b. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 12,30%;
- c. Sektor Konstruksi 7,35%;
- d. Sektor Transportasi dan Pergudangan 5,09%;
- e. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman sebesar 5,08%.

Terdapat 8 sektor atau lapangan usaha di Kabupaten Bandung Barat yang masuk ke dalam kategori sebagai sektor basis dengan $LQ > 1$, yaitu; Sektor D (Pengadaan Listrik dan Gas); Sektor I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum); Sektor A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan); Sektor L (Informasi dan Komunikasi); Sektor P (Jasa Pendidikan); Sektor O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib); Sektor MN (Jasa Perusahaan) dan Sektor H (Transportasi dan Pergudangan).

Mengingat Lebih dari 80% pembentukan PDRB disumbang dari 3 sektor/Lapangan usaha, yaitu, Industri Pengolahan dengan share sebesar 48,63%; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 18,44%; dan Pedagang Besar dan Eceran sebesar 16,60%, maka penurunan sedikit saja kinerja ketiga sektor ini akan mempengaruhi kinerja PDRB secara keseluruhan. Oleh sebab itu sebaiknya segera dicari solusi agar peran 14 sektor Lainnya terhadap pembentukan PDRB KBB menjadi Lebih baik secara proporsional.

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

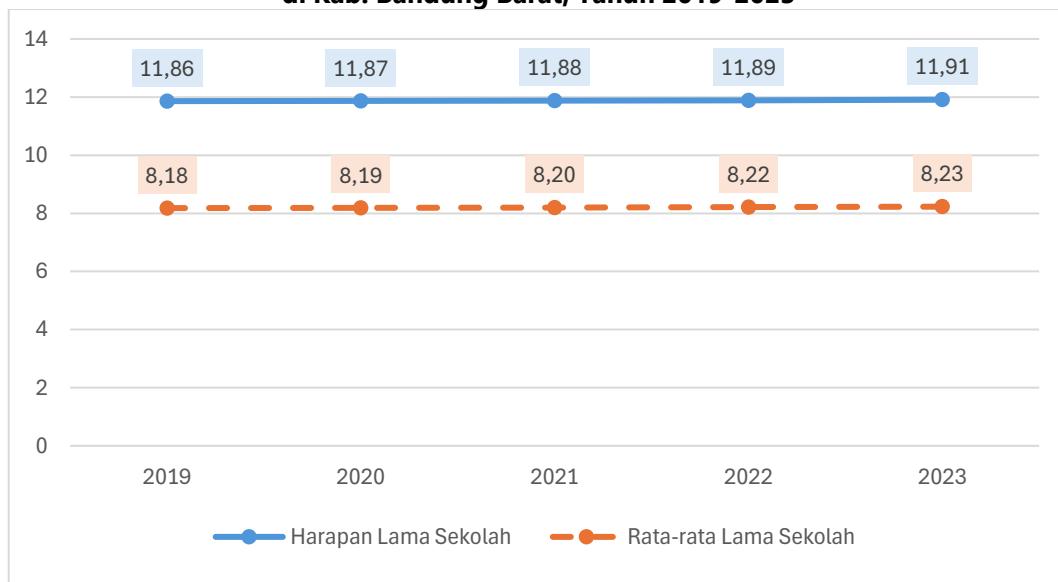
Analisis kinerja sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator pendidikan, kesehatan, rasio ketergantungan, kondisi PNS menurut pendidikan yang ditamatkan dan kualitas tenaga kerja berdasarkan penduduk usia produktif.

2.3.2.1 Pendidikan

Dalam penghitungan IPM, dimensi pengetahuan dibentuk dari dua indikator, yaitu harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah. Cakupan dalam menghitung harapan lama sekolah adalah pendidikan penduduk dari usia 7 tahun ke atas, sementara cakupan penduduk untuk menghitung rata-rata lama sekolah yaitu dari usia 25 tahun ke atas. Selama Periode 2019 hingga 2023, pengetahuan masyarakat Kabupaten Bandung Barat menunjukkan tren meningkat. Hal ini sejalan dengan indikator HLS dan RLS yang menunjukkan peningkatan. Meskipun demikian, rata-rata lama sekolah cenderung tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan harapan lama sekolah.

Hal ini wajar karena rata-rata lama sekolah menggambarkan indikator keluaran pembangunan jangka panjang, sedangkan harapan lama sekolah menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7 tahun ke atas. Indikator ini merupakan indikator proses pembangunan sebagai ukuran keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek. Lebih jauh, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dapat memberikan gambaran tentang capaian (*stock*) dan penambahan (*flow*) sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah.

Gambar 2. 14 Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kab. Bandung Barat, Tahun 2019-2023

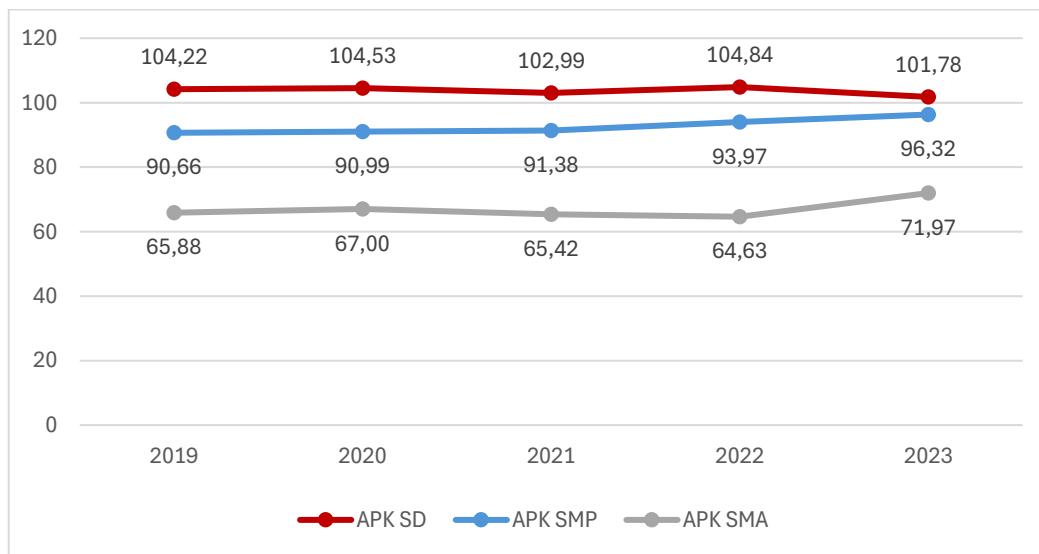


Sumber: KBBDA, 2020-2024, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan tren yang meningkat selama periode 2019 hingga 2023. Secara rata-rata, harapan lama sekolah usia 7 tahun tumbuh sebesar 0,01 persen per tahun selama tahun 2019-2023. Sementara itu, rata-rata lama sekolah tumbuh sebesar 0,01 persen per tahun dalam kurun waktu yang sama. Walau HLS dan RLS menunjukkan peningkatan tetapi peningkatannya lambat, sehingga sektor pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah, biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapa pun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

**Gambar 2. 15 APK Menurut Jenjang Pendidikan di Kab. Bandung Barat
Tahun 2019 - 2023**



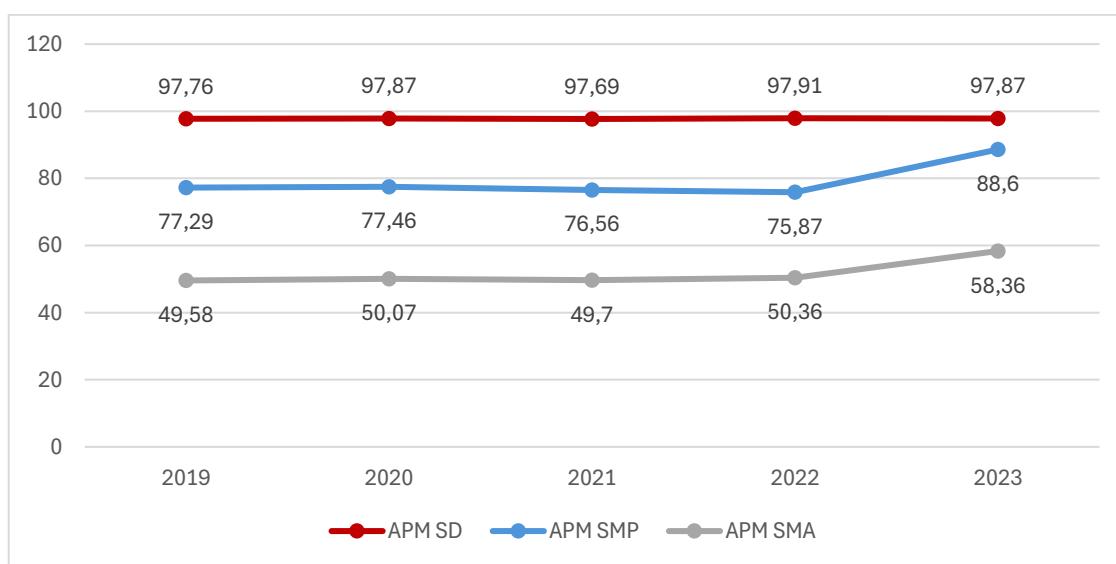
Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 - 2023, diolah

Nilai APK bisa lebih dari 100 persen, hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia di atas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD.

Pada Gambar 2.15 terlihat bahwa APK SD di Kabupaten Bandung Barat lebih dari 100 persen. Artinya terdapat siswa, baik lembaga maupun lembaga tua, yang berusia di luar batasan usia sekolah dasar (kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun). Hal ini dimungkinkan banyak masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung Barat menyekolahkan anaknya ke Sekolah Dasar pada usia 5-6 tahun, disisi lain di daerah pedesaan masih banyak anak yang usianya di atas 12 tahun, tetapi masih duduk dibangku SD.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. APM yang mendekati nilai 100 menunjukkan bahwa hampir semua penduduk bersekolah tepat waktu, sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikannya. APM SD di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2023 adalah sebesar 97,87 persen, artinya 97,87 persen penduduk usia sekolah SD bersekolah tepat waktu, sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikannya.

Gambar 2. 16 APM Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 - 2023

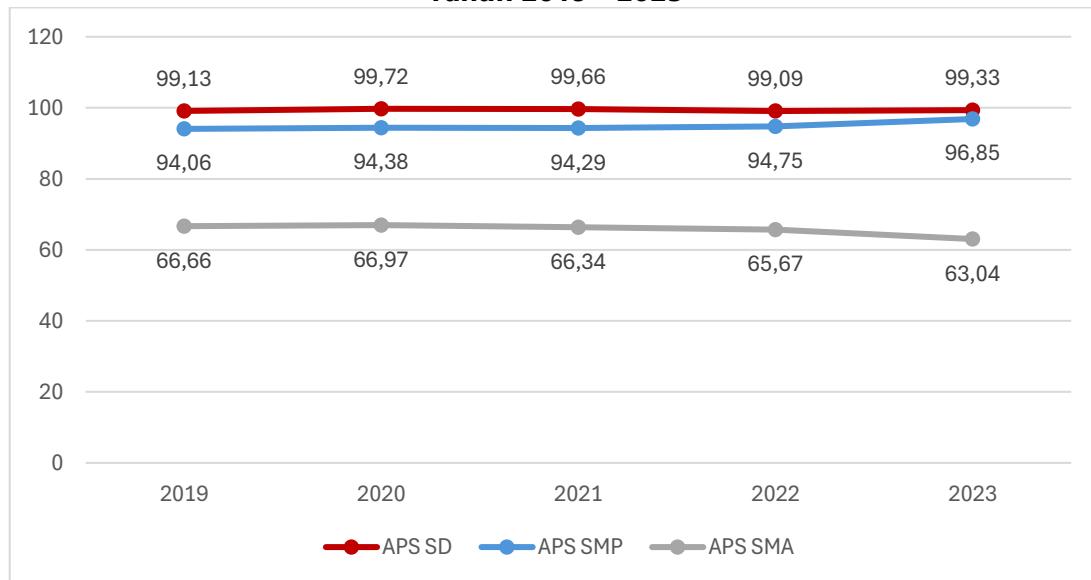


Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 - 2023, diolah

Besarnya persentase APM SD ini masih berhubungan dengan gencarnya program wajib belajar yang dilakukan di Kabupaten Bandung Barat. APM SD penduduk laki-laki tampaknya lebih tinggi dibandingkan dengan APM SD penduduk perempuan. Angka Partisipasi Sekolah atau APS merupakan perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai.

Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Nilai ideal APS = 100 % dan tidak akan terjadi lebih besar dari 100 %, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah.

**Gambar 2. 17 APS Menurut Jenjang Pendidikan di Kab. Bandung Barat
Tahun 2019 - 2023**



Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023, diolah

Kegiatan bersekolah tidak saja bersekolah di jalur formal akan tetapi juga termasuk bersekolah di jalur non formal seperti Paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTS dan Paket C setara SMA/MA. Gambar 2.14 memperlihatkan APS penduduk Kabupaten Bandung Barat, dimana pada semua jenjang pendidikan tidak menunjukkan perbedaan yang besar antara angka partisipasi sekolah antara penduduk laki-laki dan perempuan.

Angka ini menunjukkan bahwa, tidak ada perlakuan yang berbeda dalam menyekolahkan anak baik itu anak laki- laki maupun anak perempuan. Harapan Lama Sekolah merupakan indikator proses pembangunan yang menggambarkan ukuran keberhasilan program pendidikan dalam jangka pendek. Dalam konstelasi regional Jawa Barat, HLS Kabupaten Bandung Barat termasuk rendah dibanding Kab/Kota lainnya di Jawa Barat. Hal ini memberikan gambaran bahwa jumlah tahun yang diharapkan akan dijalani individu berusia 7 (tujuh) tahun untuk menempuh pendidikan Kab/Kota lain lebih lama dibandingkan di Kab. Bandung Barat.

Tabel 2. 42 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023 (Tahun)

No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bogor	12,47	12,48	12,49	12,50	12,64
2	Sukabumi	12,22	12,23	12,24	12,25	12,38
3	Cianjur	11,98	11,99	12,00	12,01	12,03
4	Bandung	12,68	12,69	12,70	12,71	12,73
5	Garut	11,82	11,91	12,03	12,15	12,16
6	Tasikmalaya	12,52	12,53	12,54	12,59	12,63
7	Ciamis	13,78	14,06	14,20	14,28	14,29
8	Kuningan	12,10	12,22	12,23	12,24	12,26
9	Cirebon	12,24	12,25	12,27	12,28	12,41
10	Majalengka	12,21	12,22	12,23	12,24	12,26
11	Sumedang	12,69	12,97	12,98	12,99	13,01
12	Indramayu	12,24	12,25	12,26	12,27	12,29
13	Subang	11,69	11,70	11,71	11,78	11,91
14	Purwakarta	12,10	12,11	12,12	12,13	12,18
15	Karawang	12,08	12,09	12,10	12,19	12,20
16	Bekasi	13,08	13,09	13,10	13,11	13,17
17	Bandung Barat	11,86	11,87	11,88	11,89	11,91
18	Pangandaran	12,06	12,07	12,08	12,11	12,30
19	Kota Bogor	13,40	13,41	13,42	13,43	13,45
20	Kota Sukabumi	13,46	13,47	13,58	13,59	13,60
21	Kota Bandung	14,19	14,20	14,21	14,23	14,24
22	Kota Cirebon	13,11	13,12	13,13	13,14	13,16
23	Kota Bekasi	13,99	14,00	14,10	14,11	14,12
24	Kota Depok	13,91	13,92	13,93	13,94	13,96
25	Kota Cimahi	13,79	13,80	13,81	13,82	13,84
26	Kota Tasikmalaya	13,44	13,45	13,46	13,47	13,49
27	Kota Banjar	13,22	13,23	13,24	13,25	13,27
	Provinsi Jawa Barat	12,48	12,50	12,61	12,62	12,68

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

Sedangkan RLS menggambarkan indikator output pembangunan dalam jangka panjang, capaian RLS Kab. Bandung Barat 2019-2023 pada kisaran 8,18 - 8,23 tahun, bila dilihat pada skala regional Jawa Barat termasuk pada capaian RLS yang tinggi dibanding Kab/Kota lain di Jawa Barat.

Tabel 2. 43 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2019-2023

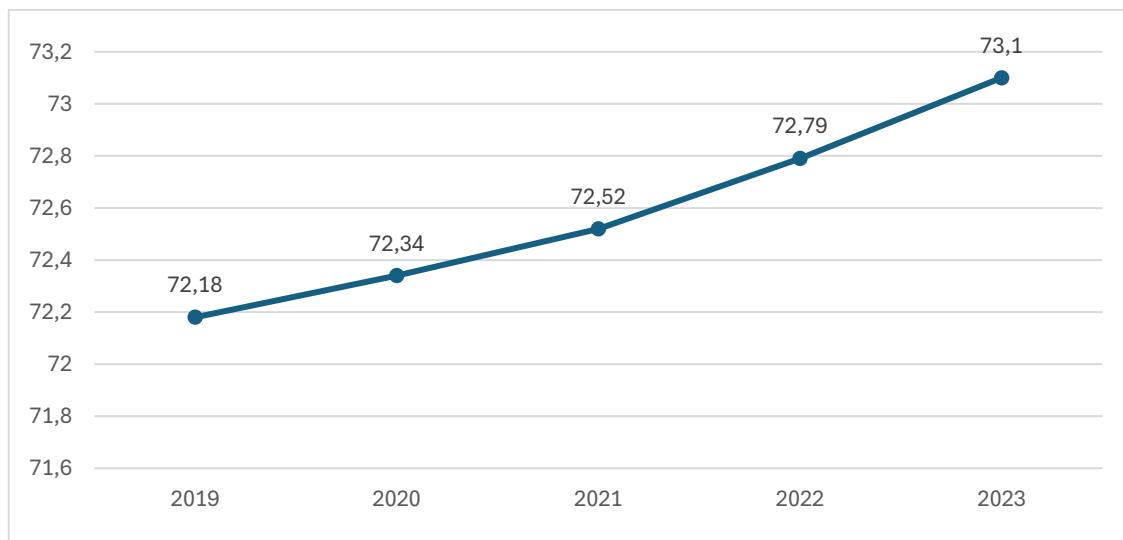
No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bogor	8,29	8,30	8,31	8,34	8,37
2	Sukabumi	7,02	7,07	7,10	7,11	7,33
3	Cianjur	6,97	7,18	7,19	7,20	7,22
4	Bandung	8,79	8,96	9,07	9,08	9,10
5	Garut	7,51	7,52	7,53	7,83	7,84
6	Tasikmalaya	7,17	7,35	7,48	7,73	7,96
7	Ciamis	7,69	7,70	7,90	8,00	8,09
8	Kuningan	7,38	7,57	7,80	7,88	7,89
9	Cirebon	6,71	6,92	7,10	7,40	7,64
10	Majalengka	7,09	7,27	7,31	7,49	7,52
11	Sumedang	8,27	8,51	8,52	8,72	8,73
12	Indramayu	5,99	6,30	6,52	6,83	6,94
13	Subang	6,85	7,10	7,11	7,20	7,45
14	Purwakarta	7,92	8,09	8,10	8,11	8,13
15	Karawang	7,65	7,77	7,78	7,96	8,04
16	Bekasi	8,84	9,12	9,30	9,53	9,57
17	Bandung Barat	8,18	8,19	8,20	8,22	8,23
18	Pangandaran	7,67	7,74	7,85	8,03	8,04
19	Kota Bogor	10,32	10,33	10,53	10,63	10,64
20	Kota Sukabumi	9,58	9,59	9,81	10,14	10,37
21	Kota Bandung	10,74	10,75	10,99	11,00	11,06
22	Kota Cirebon	9,90	9,91	10,12	10,33	10,37
23	Kota Bekasi	11,10	11,16	11,31	11,44	11,66
24	Kota Depok	11,00	11,28	11,46	11,47	11,58
25	Kota Cimahi	10,95	10,96	11,08	11,21	11,39
26	Kota Tasikmalaya	9,13	9,33	9,52	9,53	9,54
27	Kota Banjar	8,62	8,63	8,77	8,78	8,79
	Provinsi Jawa Barat	8,37	8,55	8,61	8,78	8,83

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

2.3.2.2 Kesehatan

Kondisi kesehatan masyarakat yang baik sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan maka perlu diperhatikan pelaksanaan pembangunan kesehatan. Keduanya ini harus berjalan seimbang agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Umur harapan hidup saat lahir yang diwakili dimensi umur panjang dan hidup sehat secara konsisten terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir mempunyai harapan untuk dapat menjalani hidup lebih panjang. Secara tidak langsung, hal ini mencerminkan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat.

**Gambar 2. 18 Umur Harapan Hidup Saat Lahir di Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2019 – 2023**



Sumber: KBBDA, 2019-2024, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

Indikator umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam penghitungan IPM. Umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Secara tidak langsung, peningkatan umur harapan hidup menunjukkan derajat kesehatan masyarakat semakin baik dalam semua aspek kesehatan. Umur harapan hidup saat lahir Kabupaten Bandung Barat terus menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023, usia harapan hidup meningkat dari 72,18 pada tahun 2019 menjadi 73,10 pada tahun 2023.

Hal ini menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup semakin besar. Secara tidak langsung, hal ini merupakan cerminan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat. Dalam skala regional Jawa Barat, perkembangan UHH di kabupaten/kota selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan tren yang positif. Selain semua kabupaten/kota mengalami peningkatan, disparitas antara daerah dengan capaian UHH tertinggi dengan yang terendah semakin mengecil, dalam hal ini capaian UHH Kabupaten Bandung Barat bila dibandingkan dengan Kab/Kota lain di Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 44 Umur Harapan Hidup Kab/Kota di Jawa Barat Tahun 2019-2023 (Tahun)

No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bogor	71.01	71,17	71,36	71,65	71.92
2	Sukabumi	70.73	70,97	71,21	71,54	71.83
3	Cianjur	69.91	70,13	70,32	70,58	70.79
4	Bandung	73.40	73,53	73,72	74,01	74.27
5	Garut	71.22	71,41	71,59	71,85	72.07
6	Tasikmalaya	69.21	69,47	69,67	69,95	70.19
7	Ciamis	71.57	71,83	72,02	72,30	72.57
8	Kuningan	73.35	73,59	73,78	74,03	74.29
9	Cirebon	71.82	71,99	72,18	72,47	72.76
10	Majalengka	69.97	70,27	70,46	70,76	71.05
11	Sumedang	72.29	72,43	72,62	72,91	73.19
12	Indramayu	71.37	71,63	71,84	72,15	72.46
13	Subang	72.13	72,35	72,58	72,92	73.24
14	Purwakarta	70.80	70,99	71,18	71,47	71.74
15	Karawang	71.98	72,15	72,33	72,62	72.90
16	Bekasi	73.56	73,68	73,81	74,04	74.30
17	Bandung Barat	72.18	72,34	72,52	72,79	73.10
18	Pangandaran	71.12	71,40	71,60	71,89	72.17
19	Kota Bogor	73.41	73,61	73,82	74,13	74.45
20	Kota Sukabumi	72.26	72,42	72,58	72,85	73.11
21	Kota Bandung	74.14	74,28	74,46	74,75	75.04
22	Kota Cirebon	72.13	72,26	72,44	72,74	73.08
23	Kota Bekasi	74.89	75,01	75,19	75,48	75.79
24	Kota Depok	74.31	74,44	74,62	74,92	75.23
25	Kota Cimahi	73.89	74,03	74,21	74,50	74.80
26	Kota Tasikmalaya	71.93	72,15	72,36	72,63	72.92
27	Kota Banjar	70.79	70,99	71,19	71,49	71.80
	Provinsi Jawa Barat	72.85	73,04	73,23	73,52	73.80

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

2.3.2.3 Ketergantungan Penduduk

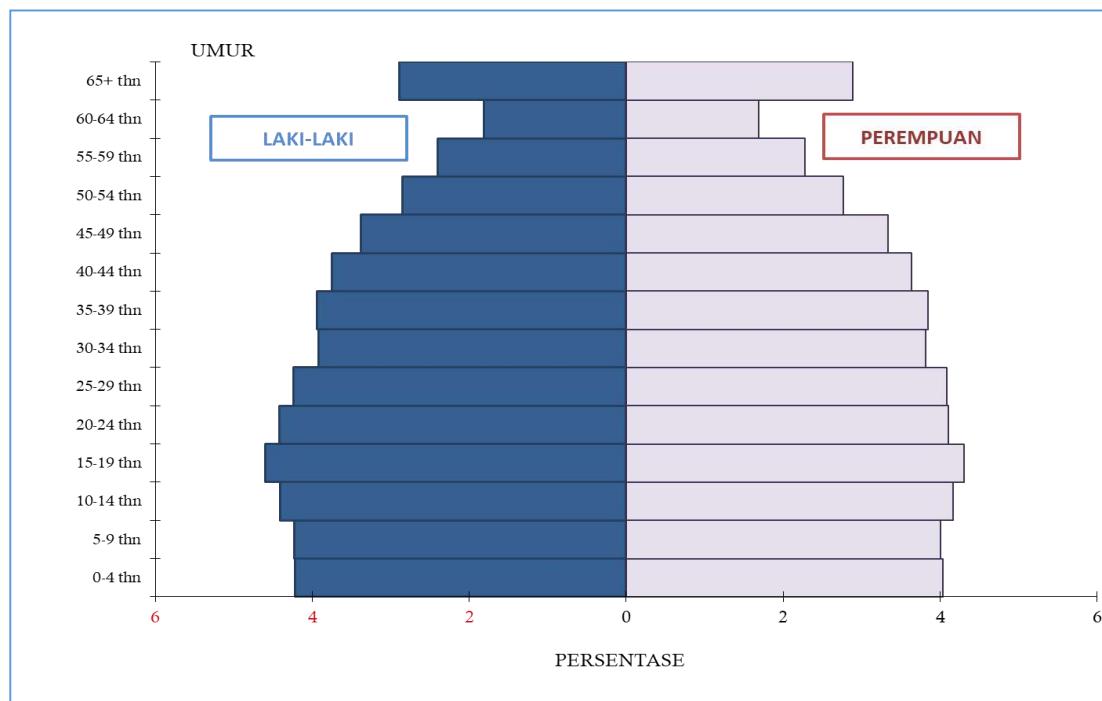
Komposisi penduduk Kabupaten Bandung Barat menurut kelompok umur salah satunya digunakan untuk menghitung rasio ketergantungan, yang dilihat berdasarkan tabel serta digambarkan oleh Piramida penduduk Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut:

Tabel 2. 45 Rasio Ketergantungan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 - 2023

Penduduk Kelompok Umur	2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk Usia < 15 Tahun	470.912	452.602	461.949	450.086	449.623
Penduduk Usia > 64 Tahun	87.151	103.373	104.824	118.923	120.583
Penduduk (< 15 Tahun dan > 64 Tahun)	558.063	555.975	566.733	569.009	570.206
Penduduk Usia Produktif (15-64)	1.181.848	1.232.361	1.250.977	1.277.960	1.289.430
Jumlah	1.739.911	1.788.336	1.817.770	1.846.969	1.859.636
Rasio Ketergantungan	47,22	45,11	45,31	44,59	44,22

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPS, 2023

Gambar 2. 19 Piramida Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023



Sumber : Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS Tahun 2023, diolah

Terlihat dari bentuk piramida penduduk Kabupaten Bandung Barat, persentase penduduk Kabupaten Bandung Barat pada kelompok umur di bawah 15 tahun terhitung di bawah 30 persen. Kondisi tersebut menunjukkan, bahwa penduduk Kabupaten Bandung Barat tergolong struktur penduduk tua, yang artinya perbandingan penduduk usia produktif lebih besar dari yang tidak produktif.

Angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) penduduk, yang merupakan perbandingan antara penduduk yang belum/tidak produktif (usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). *Dependency Ratio* Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 menunjukkan capaian sebesar 44.59. Angka ini berarti bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Bandung Barat harus menanggung 45 orang penduduk usia tidak produktif.

2.3.2.4 Kondisi ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Bila dilihat dari daya saing SDM berdasarkan kondisi ASN di Kabupaten Bandung Barat menurut pendidikan yang ditamatkan mayoritas berpendidikan terakhir S-1. Hal ini bermakna pegawai di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat secara umum telah memiliki: kemampuan mengingat informasi secara umum dan luas, dalam domain kognitif, kemampuan menerjemahkan dan mengubah informasi ke dalam berbagai bentuk media, kemampuan mengaplikasikan suatu informasi, konsep, teori atau metode memecahkan masalah.

Namun demikian dalam perspektif ke depan perlu terus ditingkatkan kualitas pendidikan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada jenjang S-2 dan S-3 untuk menghasilkan pegawai-pegawai yang ahli dalam penyelesaian persoalan-persoalan pembangunan yang terus berkembang dan bersifat multidimensi. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 46 Kondisi ASN Kabupaten Bandung Barat Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2019 – 2023

Tingkat Pendidikan	2019			2020			2021			2022			2023		
	L	P	Total												
Sampai dengan SD	52	-	52	39	2	41	38	0	38	21	0	21	21	0	21
SMP/ Sederajat	85	7	92	56	3	59	50	2	52	37	3	40	20	3	23
SMA/ Sederajat	379	236	615	472	159	631	402	114	516	286	55	341	249	51	300
Diploma I, II/ Akta I, II	32	14	46				119	124	243						
Diploma III/ Akta III/ Sarjana Muda	196	487	683	84	456	540	128	505	633	100	486	586	94	486	580
Tingkat Sarjana/ Doktor/Ph.D	2397	4057	6454	2967	3119	6086	2451	3304	5755	2412	3139	5551	2252	2803	5055
Jumlah/ Total	3141	4801	7942	3618	3739	7357	3188	4049	7237	2856	3683	6539	2636	3343	5979

Sumber : BKPSDM, 2024.

2.3.2.5 Angkatan Kerja

Untuk melihat kontribusi serta dinamika tenaga kerja dan pencari kerja dalam pasar kerja, para pembuat kebijakan dapat mencermati indikator ketenagakerjaan, di antaranya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Bandung Barat mengalami peningkatan dari tahun 2019 – 2023, terjadi peningkatan TPAK sebesar 8,03 persen di tahun 2023 menjadi 67,01 dibanding tahun 2019 dengan capaian 58,98. Secara empiris, selalu terdapat perbedaan jumlah angkatan kerja laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bandung Barat, terjadi disparitas antara angkatan kerja laki-laki dengan perempuan. TPAK laki-laki selalu selalu lebih besar dari TPAK perempuan.

Kondisi ini dinilai wajar karena norma-norma yang berlaku di masyarakat mengarahkan laki-laki untuk berperan sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga. TPAK laki-laki pada tahun 2021 sebesar 80,76 persen jauh lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang hanya 40,20 persen. Tetapi ada hal menarik dalam capaian TPAK pada tahun 2021 dibanding kondisi tahun 2020 dimana TPAK laki-laki mengalami penurunan sebesar 1,86 persen, sementara TPAK perempuan mengalami kenaikan sebesar 3,62 persen hal ini mungkin disebabkan karena proporsi perempuan yang bekerja di sektor formal lebih tinggi.

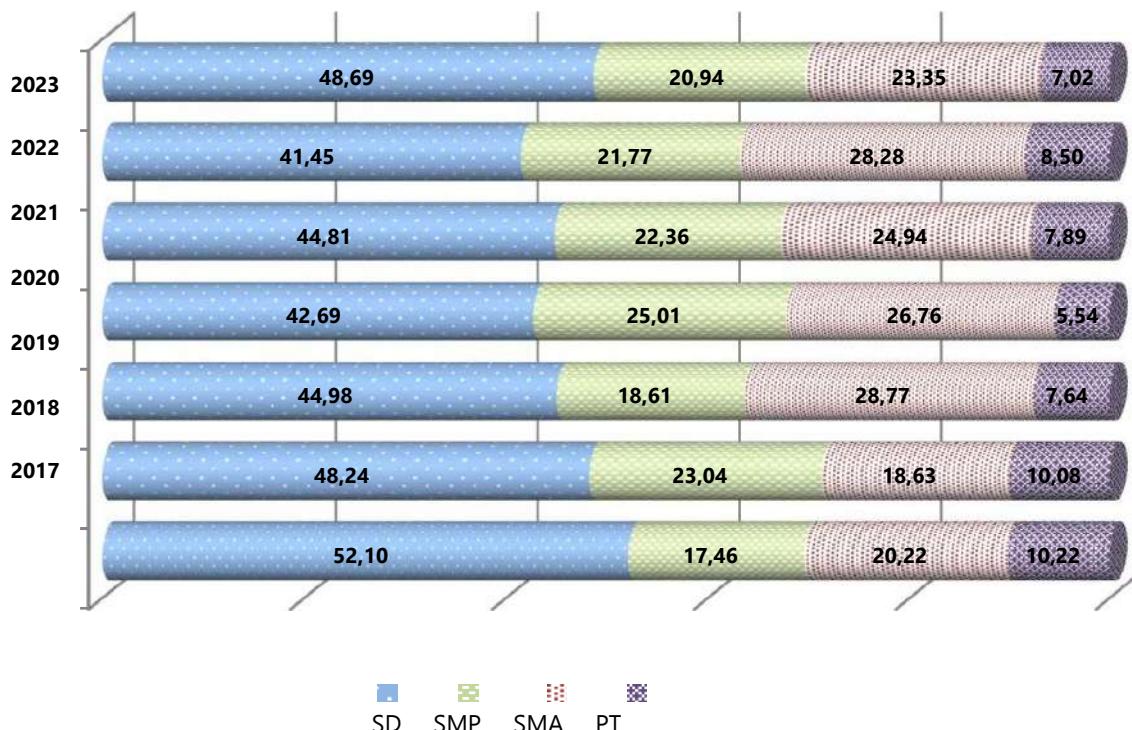
**Gambar 2. 20 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)
Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Bandung Barat 2019 – 2023**



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS Tahun 2019-2023

Kualitas tenaga kerja di Kabupaten Bandung Barat, pada Tahun 2019-2023 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SD ke bawah sebanyak 48,69 persen, SMP sebanyak 20,94 persen, dan SMA sebanyak 23,35 persen. Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 7,02 persen.

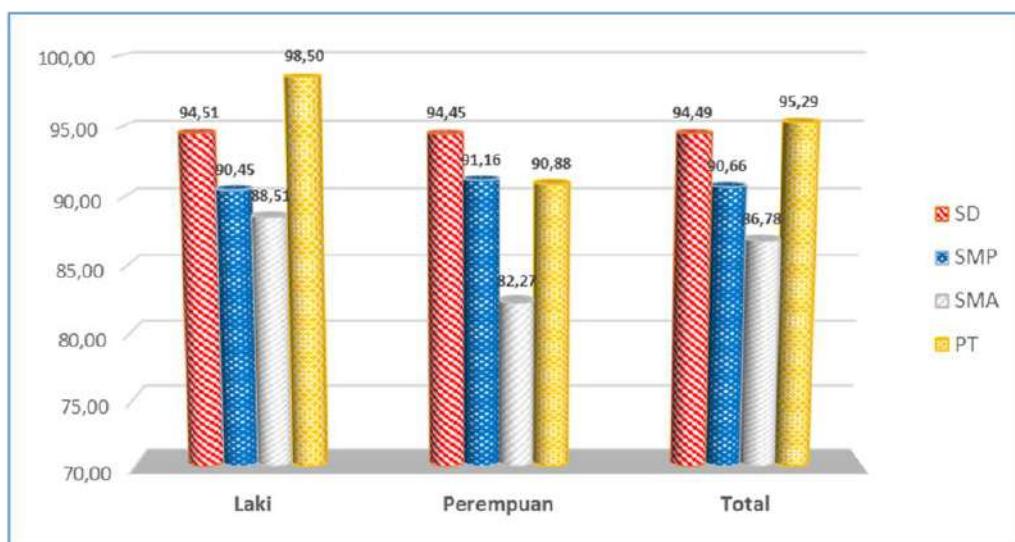
Gambar 2. 21 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan 2017-2023 (persen)



Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPS, 2023

Pada tahun 2023 penyerapan tenaga kerja untuk tingkat SD ke bawah dan perguruan tinggi (PT) relatif lebih besar. Penyerapan tenaga kerja pada jenjang Perguruan tinggi sebesar 95,29 persen sementara untuk penduduk yang pendidikan tertingginya sekolah dasar sebesar 94,49 persen. Penyerapan penduduk dalam dunia kerja untuk pendidikan SMP dan SMU relatif lebih kecil yaitu sebesar 90,66 dan 86,78 persen.

Gambar 2. 22 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Kabupaten Bandung Barat, 2023



Sumber: Analisis Data Ketenagakerjaan, BPS/Diskomifotik, 2023

2.3.3 Daya Saing Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Untuk meningkatkan Daya Saing Daerah, dibutuhkan kelancaran pendistribusian arus barang, mobilitas penumpang serta kemudahan akses terhadap prasarana transportasi lainnya. Pelayanan transportasi yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan jaringan pelayanan dan juga prasarana, diharapkan menjadi daya tarik yang kuat bagi masuknya investasi. Sarana infrastruktur aksesibilitas/transportasi, yang meliputi aksesibilitas jalan dan sarana transportasi berperan penting sebagai penunjang, pendorong dan penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.

Data kondisi jalan di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan SK Bupati Bandung Barat No: 188.45/Kep.219-DPUPR/2018 dengan total panjang jalan Kabupaten sepanjang 525,57 Km (s.d tahun 2022) sebanyak 108 ruas jalan dan pada tahun 2023 telah ditetapkan SK Bupati Bandung Barat No: 188.45/Kep.302-DPUPR/2023 dengan total panjang jalan Kabupaten sepanjang 648,06 Km sebanyak 152 ruas jalan, terdapat peningkatan panjang jalan Kabupaten sepanjang 122,49 Km dan peningkatan 44 ruas jalan.

Adapun kondisi jalan baik di Kabupaten Bandung Barat selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan dengan proporsi panjang jalan kondisi baik pada tahun 2019 sebesar 65,19 persen menjadi 70,91 persen di tahun 2022 dan kondisi jalan baik dengan mengacu pada SK jalan yang baru dengan penambahan sebanyak 44 ruas jalan, kondisi jalan baik baru mencapai 46,23 persen.

Tabel 2. 47 Data Kondisi Jalan di Kab. Bandung Barat Tahun 2019 - 2023

Kondisi Jalan	PANJANG JALAN (Km)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Baik	342.615	318.617	332.375	372.682	299.594
Sedang	37.765	88.695	57.340	61.738	73.082
Rusak Ringan	86.44	2.175	49.645	53.453	91.893
Rusak Berat	58.75	116.083	86.210	37.697	183.491
Total Panjang Jalan	525.57	525.57	525.57	525.57	648.06

Sumber : Dinas PUPR, Kab. Bandung Barat, 2023

Untuk mengetahui tingkat ketersediaan jalan yang dapat memberikan akses tiap kendaraan, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan data, panjang jalan di Kabupaten Bandung Barat sepanjang 525,57 km dengan jumlah rata-rata harian angkutan darat yang melintas berdasarkan data dari Dinas Perhubungan yaitu sebanyak 62.683 kendaraan/hari sehingga rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah sebesar 119,27 artinya per 1 km jalan melayani/dilalui oleh 119 kendaraan. Jumlah sarana angkutan umum dan angkutan barang serta layanan kendaraan umum berpenumpang di Kabupaten Bandung Barat sebagai sarana aksebilitas penunjang, pendorong dan penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 48 Data Jumlah Angkutan Barang di Kab. Bandung Barat Tahun 2019 - 2023

No	Kecamatan	Jumlah Unit Angkutan Barang				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Cililin	418	416	0	0	0
2	Cihampelas	444	444	444	4	4
3	Sindangkerta	146	46	0	0	0
4	Gununganlu	119	120	120	0	0
5	Rongga	70	70	70	32	32
6	Cipongkor	209	209	209	0	0
7	Batujajar	849	849	447	446	446
8	Lembang	3.186	3.184	3.184	3	3
9	Parongpong	849	1.213	1.213	112	112
10	Cisarua	760	757	757	973	975
11	Ngamprah	1.423	1.425	1.425	435	437
12	Padalarang	3.556	3.557	3.557	48	47
13	Cipatat	209	771	771	48	48
14	Cipeundeuy	579	579	577	42	41
15	Saguling	93	94	94	16	15
16	Cikalangwetan	604	605	605	92	90
JUMLAH		13.514	14.337	13.473	2.251	2.250

Sumber : Dishub, Kab. Bandung Barat, 2024

Tabel 2. 49 Aksebilitas Kendaraan Umum di Kab. Bandung Barat Tahun 2019 – 2023

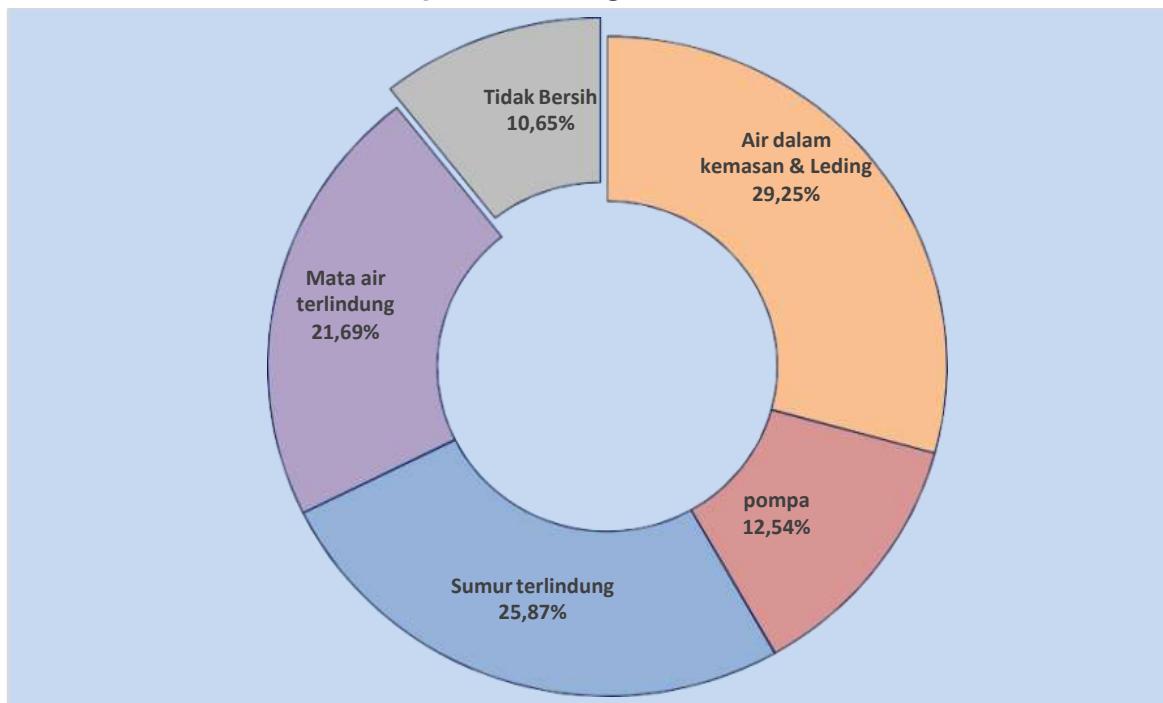
Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Angkutan Umum	956	614	965	600	459
Jumlah Penumpang yang melalui Terminal	697.445	746.618	777.966	577.299	463.774

Sumber : Dishub, Kab. Bandung Barat, 2024

Aksebilitas pergerakan manusia dan barang sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi daerah didukung oleh ketersediaan angkutan umum dan angkutan barang, dengan kondisi layanan angkutan barang tahun 2019 sebanyak 13.514 unit terus mengalami penurunan s.d tahun 2023 menjadi 2.250 unit. Begitu pun dengan pergerakan manusia yang dilayani oleh angkutan umum pada tahun 2019 sebanyak 697.445 penumpang terus semakin turun di tahun 2023 menjadi 463.774 penumpang.

Hal ini terjadi karena terdapat penurunan jumlah armada layanan angkutan umum berkurang menjadi 459 unit di tahun 2023 dan juga hal ini pun terdampak adanya angkutan umum berbasis online. Sedangkan untuk fasilitas infrastruktur air bersih, persentase rumah tangga yang mengonsumsi air minum bersih di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2023 telah mencapai lebih dari 89,35 persen. Proporsi pemakaian air minum menurut sumbernya dalam penggunaan air bersih di Kabupaten Bandung Barat, bahwa penggunaan sumber air minum dari air ledeng/air kemasan sebesar 29,25 persen diikuti oleh sumur terlindung sebesar 25,87 persen masih mendominasi terkait pemenuhan kebutuhan sumber air minum masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Untuk menjadi perhatian Pemerintah Daerah bahwa masih terdapat masyarakat yang memanfaatkan sumber air minum tidak bersih sebesar 10,65 persen.

Gambar 2. 23 Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023



Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPS, 2023

Indikator lain dari aspek daya saing daerah adalah ketersediaan energi terutama penggunaan listrik sebagai sumber penerangan. Sebanyak 43 desa (26,06%) sebagian besar jalannya telah diterangi listrik.

Ada 95 desa (57,58%) yang sebagian kecil jalannya telah diberi penerangan dan sebanyak 27 desa (16,36%) belum memiliki penerangan jalan. Diantara 138 desa yang memiliki penerangan jalan sebanyak 96 Desa (69,57%) menggunakan listrik yang diusahakan pemerintah dan sisanya sebanyak 42 desa (30,43%) listriknya non pemerintah. Aspek daya saing daerah fokus terhadap kondisi infrastruktur yang terkait dengan fasilitas kegiatan ekonomi diantaranya ketersediaan pasar, restoran, rumah/warung makan, hotel/penginapan, Bank/BPR di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Basis Data Pembangunan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 50 Data Infrastruktur Fasilitas Kegiatan Ekonomi di Kab. Bandung Barat Tahun 2019-2023

Jenis Infrastruktur	2019	2020	2021	2022	2023
Pasar Tradisional/Modern	388	306	309	309	303
Restoran, Rumah/Warung Makan, Cafe	1.738	1.436	1.606	1.748	1.881
Hotel/Penginapan	159	117	162	167	297
Bank/BPR	98	90	95	95	95
Penerangan Jalan	4.627	4.972	5.044	5.164	5.580

Sumber : Basis Data Pembangunan, BPS/Diskominfotik, 2023

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan kegiatan pembangunan perekonomian daerah. Beberapa faktor yang diindikasikan mempunyai pengaruh yang sangat berarti bagi tumbuhnya iklim investasi daerah, seperti indeks rasa aman, angka kriminalitas, jumlah demonstrasi dan pelayanan perijinan. Stabilitas keamanan menjadi salah satu aspek penting dalam berinvestasi. Daerah dengan tingkat keamanan dan ketertiban yang lebih baik akan memiliki daya saing iklim investasi yang lebih tinggi. Hal ini karena faktor keamanan menjadi prasyarat bagi dunia usaha dan masyarakat pada umumnya untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial. Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus terpenuhi.

Suatu kemustahilan apabila membicarakan tentang aspek daya saing dengan mengabaikan aspek keamanan. Investor tidak akan mungkin menanamkan investasinya apabila diusik oleh rasa ketakutan dan keresahan terhadap kemungkinan timbulnya ancaman dari lingkungan maupun ancaman terjadinya bencana. Indeks Rasa Aman di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 51 Indeks Rasa Aman Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023

No	Kecamatan	Ketersediaan Makanan	Rasa Aman dari bencana	Keamanan Lingkungan	Indeks Rasa Aman	Rangking
1	Rongga	94,17	46,67	71,67	70,83	13
2	Gununghalu	87,29	68,33	90,14	81,92	4
3	Sindangkerta	94,38	52,50	50,49	65,79	16
4	Cililin	87,50	73,33	69,86	76,90	6
5	Cihampelas	94,38	62,50	52,50	69,79	15
6	Cipongkor	88,98	70,34	58,83	72,72	10
7	Batujajar	98,13	65,00	49,51	70,88	12
8	Saguling	98,44	61,25	68,44	76,04	7
9	Cipatat	99,29	79,29	33,93	70,83	14
10	Padalarang	83,75	62,14	74,82	73,57	9
11	Ngamprah	98,16	80,90	84,68	87,91	2
12	Parongpong	97,92	91,67	78,68	89,42	1
13	Lembang	99,82	70,71	67,20	79,25	5
14	Cisarua	93,13	80,00	84,51	85,88	3
15	Cikalongwetan	86,04	72,53	59,51	72,70	11
16	Cipeundeuy	97,71	72,50	51,04	73,75	8
Bandung Barat		93,74	70,36	65,88	76,66	

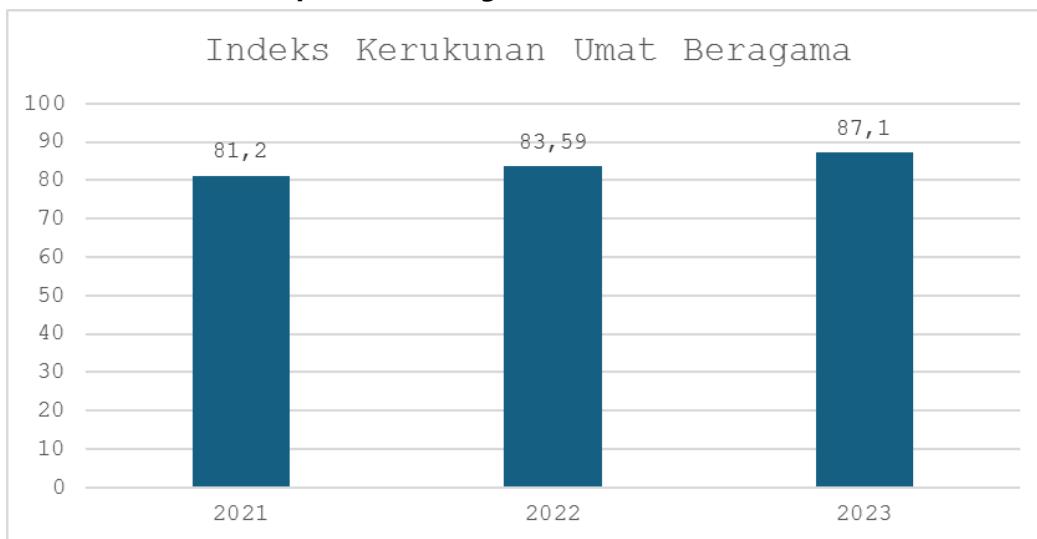
Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat, 2023

Berdasarkan Basis Data Pembangunan 2 (dua) tahun terakhir (2022-2023), jumlah kejahatan yang dilaporkan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Barat menunjukkan angka yang cenderung turun. Pada tahun 2022 jumlah kejahatan yang dilaporkan mencapai 446 kasus, sementara itu pada tahun 2023 berkurang menjadi 320 kasus dengan jenis kejahatan yang paling banyak adalah pencurian, perampokan dan penganiayaan.

Sedangkan jumlah kejadian demonstrasi/unjuk rasa di Kabupaten Bandung Barat, disebabkan karena adanya beberapa isu-isu seperti isu-isu pengupahan, pelaksanaan outsourcing, kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan BBM, dan sebagainya dengan angka kejadian pada tahun 2022 sebanyak 6 kejadian dan menurun di tahun 2023 menjadi 5 kejadian demonstrasi/unjuk rasa.

Dalam rangka menjaga kondusifitas untuk mendatangkan investasi, salah satu indikator yang harus diperhatikan adalah terkait indikator kerukunan umat beragama, yaitu suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945". Untuk memperoleh indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB), ini mengukur tiga indikator utama, yaitu: 1) Toleransi, 2) Kesetaraan, dan 3) Kerjasama. Jadi kerukunan umat beragama terwujud melalui tingginya tingkat toleransi, kesetaraan dan kerjasama, dalam rangka menciptakan kondusifitas daerah dalam menunjang iklim investasi di daerah. Adapun capaian Indeks kerukunan Umat beragama di Kab. Bandung Barat adalah:

Gambar 2. 24 Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 - 2023



Sumber: Litbang, Bappelitbangda, 2023, diolah.

Perijinan merupakan faktor yang sangat penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Kepastian sistem dan prosedur perijinan yang meliputi persyaratan, waktu dan biaya serta transparansi dan akuntabilitas proses perijinan merupakan komponen penting dalam pelayanan perijinan. Pelayanan perijinan yang berbasis digital terus dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi pemohon, meningkatkan efisiensi dan mengurangi terjadinya penyalahgunaan.

Tabel 2. 52 Persentase Jumlah Izin yang Terbit Sesuai SOP di Kab. Bandung Barat Tahun 2023

No	Izin	SOP (Hari)	Jumlah Izin Terbit Tidak Sesuai SOP	Jumlah Izin Terbit Sesuai SOP	Jumlah Izin Terbit	% SOP
1	PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)	28	0	547	547	100,00
2	SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)	28	0	62	62	100,00
3	PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG NON-BERUSAHA	30	85	87	172	50,58
4	IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN DASAR (SD & SMP)	12	20	14	34	41,18
5	IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR FORMAL	44	0	34	34	100,00
6	IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN JALUR NON FORMAL (KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN ANAK, PUSAT BELAJAR MASYARAKAT, LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN)	24	43	64	107	59,81
7	IZIN PRAKTIK DOKTER (MANDIRI & FASKES)	11	7	475	482	98,55
8	IZIN PRAKTIK PERAWAT	11	3	404	407	99,26
9	IZIN PRAKTIK BIDAN (MANDIRI & FASKES)	11	4	328	332	98,80
10	IZIN PRAKTIK APOTEKER	11	3	161	164	98,17
11	IZIN KERJA TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	11	0	156	156	100,00
12	IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS	11	1	5	6	83,33
13	IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA	11	0	1	1	100,00
14	IZIN KERJA RADIOGRAFER	11	1	19	20	95,00
15	IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN	11	0	9	9	100,00
16	SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL	11	2	10	12	83,33
17	IZIN PRAKTIK REKAM MEDIS	11	0	74	74	100,00
18	IZIN PRAKTIK ANALIS/ AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	11	0	79	79	100,00
19	IZIN PRAKTIK GIZI	11	1	42	43	97,67
20	IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT (MANDIRI & FASKES)	11	0	26	26	100,00
21	IZIN PRAKTIK TENAGA SANITARIAN	11	0	26	26	100,00
22	SURAT KETERANGAN TIDAK BERPRAKTIK DIKBB	11	2	745	747	99,73
23	PENCABUTAN SURAT IZIN PRAKTIK	11	0	201	201	100,00
24	IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME (PERMANEN & INSIDENTIL)	14	109	46	155	29,68
25	TANDA DAFTAR LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL	7	18	8	26	30,77
26	IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN DAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL	8	0	0	0	0,00
27	IZIN TRAYEK PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	10	84	19	103	18,45
28	IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN	11	0	1	1	100,00
29	IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN	11	0	0	0	0,00
30	IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN PELAYANAN INSEMINATOR KESEHATAN HEWAN	11	0	0	0	0,00
31	IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN	11	0	0	0	0,00
32	IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN TEKNIK REPRODUKSI	11	0	0	0	0,00
33	PENCABUTAN SURAT IZIN APOTEK	11	0	1	1	100,00
TOTAL		383	3644	4027	90,49	

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Bandung Barat, 2024

Indikator Prosedur perizinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi. Menyadari kondisi yang demikian berbagai upaya telah dilakukan supaya proses perizinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan waktu yang terukur dan murah. Pada tahun 2020 sampai dengan saat ini, dengan adanya aplikasi perijinan online, lamanya pengurusan perizinan bisa diperpendek, dengan ketentuan semua persyaratan perizinan terpenuhi. Mengingat peran investasi yang begitu penting maka Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus berupaya menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif guna menarik minat investor.

Capaian investasi di Kab. Bandung Barat terus mengalami kenaikan dari jumlah investasi PMDN pada tahun 2019 sebesar Rp.572 Miliar di tahun 2022 menjadi Rp.704 Miliar dan tahun 2023 naik signifikan menjadi Rp.2.730 Miliar. Capaian indikator yang mengalami penurunan kinerja, diantaranya persentase peningkatan promosi dan kerja sama investasi dari semula tahun 2019 sebesar 19,73 persen menjadi 16,67 persen di tahun 2023, sedangkan persentase waktu proses pelayanan perijinan sesuai SOP semakin membaik awalnya 2020 sebesar 68% menjadi 72,5% di tahun 2021 dan naik kembali di tahun 2022 menjadi 82,79% serta 2023 menjadi 90,49%. Hal ini dengan adanya dukungan aplikasi perijinan online. Berikut capaian indikator urusan Penanaman Modal di Kabupaten Bandung Barat s.d tahun 2023:

Tabel 2. 53 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023
Nilai investasi PMDN	Miliar	572	335	192,6	704	2.730
Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	Perusahaan	-	-	268	622	1.392
Jumlah penerbitan perijinan	jumlah	2.308	1.878	2.344	3.248	4.027
Persentase waktu proses pelayanan perizinan sesuai SOP	%	88	68	72,5	82,79	90,49

Sumber: DPMPTSP, diolah Bappelitbangda, 2024.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tabel 2. 54 Capaian Indikator Aspek Pelayanan Umum Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 - 2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Birokrasi	56,79 CC	57,60 CC	57,81 CC	60,97 B	72,27 BB
Indeks Merit	Skor 2	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 3
Nilai SAKIP	B	B	B	68,03 B	68,59 B
Opini BPK	WTP	WDP	WTP	WTP	
Indeks SPBE	2.41	3.17	2.85	2.65	3.32
Indeks Kepuasan Masyarakat	76.29	80.29	80.75	82.39	82,65

Sumber: Bappelitbangda, diolah Tahun 2024.

2.4.1 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Pelaksanaan reformasi birokrasi ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Nilai IRB Kab. Bandung Barat pada tahun 2019 masuk pada kategori CC (CUKUP) dengan nilai 56,79 sampai dengan tahun 2023 Nilai IRB Kab. Bandung Barat meningkat pada katagori BB dengan nilai sebesar 72,27.

2.4.2 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Salah satu fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Adapun capaian indikator SAKIP Kabupaten Bandung Barat pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan walaupun masih pada katagori "B" tetapi secara nilai mutu pada Tahun 2019 sebesar 66,00 terus mengalami kenaikan s.d tahun 2023 menjadi sebesar 68,59.

2.4.3 Pelayanan Publik

Untuk mencapai kualitas pelayanan publik, diperlukan penilaian atas pendapat masyarakat melalui penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Indikator kepemerintahan yang baik (good governance) adalah keikutsertaan (participation) masyarakat dalam menentukan kebijakan publik yang akan diambil oleh pemerintah sebagai fasilitator dan dinamisator/agen pembangunan. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menilai penerapan (implementation) kebijakan-kebijakan pelayanan publik yang diambil.

Pada tahun 2019 capaian IKM Kabupaten Bandung Barat sebesar 76,29 dengan nilai mutu pelayanan "C" (Kurang Baik), pada tahun 2020 capaian IKM sebesar 80,29 dengan nilai mutu pelayanan "B" (Baik), guna terus meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah Kabupaten Bandung Barat peningkatan capaian target nilai interval konversi IKM tahun 2023 meningkat menjadi 82,65 dengan nilai mutu pelayanan "B" (Baik).

2.4.4 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka penerapan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bandung Barat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien menunjukkan peningkatan dimana tahun 2019 dengan capaian indeks SPBE sebesar 2,41 poin terus meningkat s.d tahun 2023 menjadi 3,32 poin.

2.4.5 Inovasi Daerah

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri setiap tahun melaksanakan penilaian inovasi daerah dengan menggunakan indikator Indeks Inovasi Daerah (IID) serta memberikan penghargaan Innovative Government Award (IGA) kepada pemerintah daerah yang terinovatif. Pada tahun 2019 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bandung Barat sebesar 550 dan pada tahun 2020 menjadi 673. Tetapi mulai tahun 2023 perhitungan Indeks Inovasi Daerah Pada Tahun 2021 menggunakan metode yang berbeda dengan capaian tahun 2021 sebesar 47,39 dengan kategori inovatif, menduduki peringkat ke-120 dari 415 kabupaten. Pada tahun 2022 capaian IID sebesar 53,40 dengan katagori inovatif tetapi pada tahun 2023 capaian IID turun menjadi 39,07 tetapi masih pada katagori inovatif. Hingga saat ini, terdapat 50 inovasi unggulan yang dimiliki Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 11 inovasi tata kelola pemerintah daerah, 23 inovasi pelayanan publik, dan 16 inovasi daerah lainnya. Inovasi itu terbagi menjadi inovasi digital dan inovasi non- digital.

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Perkembangan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat sejak tahun 2007, berdasarkan Visi dan Misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 03 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007 – 2025 yang memiliki visi “KABUPATEN AGROINDUSTRI DAN WISATA RAMAH LINGKUNGAN”. Hal ini sejalan dengan pencapaian tujuan daerah, seperti tertuang dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Jawa Barat, yang merupakan momentum untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga membuka ruang dan potensi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Bandung Barat dan mempunyai korelasi yang signifikan dalam menunjang akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Barat khususnya, Provinsi Jawa Barat dan nasional pada umumnya.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD yang diterjemahkan dalam pembangunan lima tahunan pada dokumen RPJMD serta dioperasionalkan dalam pembangunan tahunan pada dokumen RKPD. Tahapan Pertama RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2005-2025 terbagi dalam 2 (dua) periode, periode tahun 2005-2007 merupakan periode perintisan terbentuknya Kabupaten Bandung Barat.

Periode 2007-2008 merupakan periode pembangunan fondasi berupa penataan birokrasi, pembentukan regulasi dan inventarisasi aset daerah. Tahap selanjutnya RPJPD dibagi menjadi RPJM Daerah Kedua (2008-2013), RPJM Daerah Ketiga (2013-2018), RPJM Daerah Keempat (2018-2023) dan RPJM Daerah Kelima (2023-2025). Capaian indikator kinerja makro pembangunan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat perlu di evaluasi secara periodik dalam rangka untuk mengetahui keberhasilan kinerja sekaligus sebagai bahan masukan bagi perencanaan periode selanjutnya.

Perkembangan pembangunan daerah di Kabupaten Bandung Barat sejak tahun 2007 telah menunjukkan kemajuan meskipun dalam perjalannya penuh dengan dinamika yang cukup kompleks sebagai dampak dari kondisi nasional dan global. Pencapaian ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam memajukan pembangunan daerah, namun masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di masa depan. Capaian pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat yang direfleksikan dengan indikator-indikator terpilih dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.5.1 Pembangunan Manusia

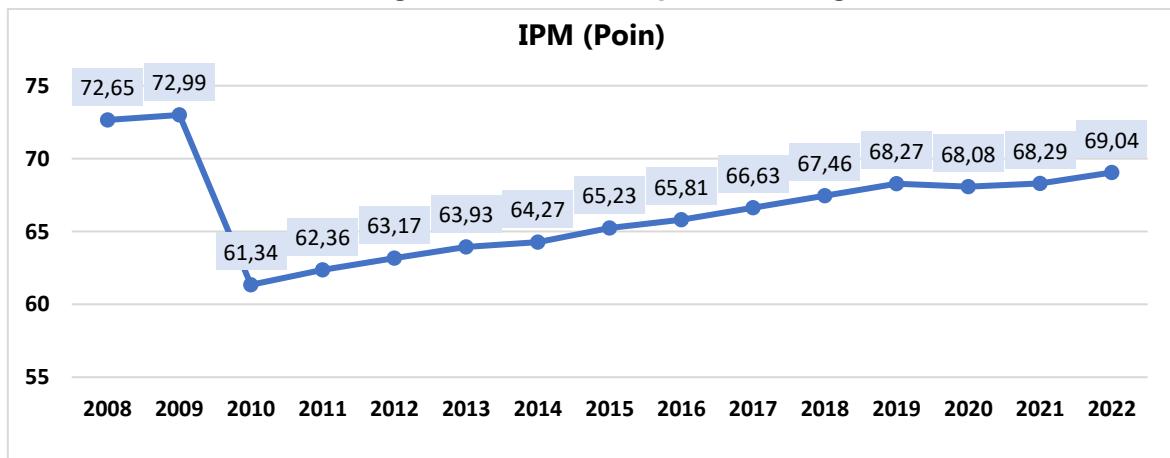
Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan aset kekayaan bangsa sekaligus sebagai modal dasar pembangunan. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, pendidikan dan kesehatan merupakan modal utama yang harus dimiliki manusia agar mampu meningkatkan potensinya dan berkontribusi dalam pembangunan. Tujuan utama pembangunan manusia adalah untuk memastikan bahwa manusia dapat memperluas pilihan-pilihan yang dimiliki. Hal ini tentunya dapat terwujud apabila manusia berumur panjang dan sehat, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta dapat memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya dalam kegiatan yang produktif.

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak

Pada umumnya, semakin tinggi kapabilitas dasar yang dimiliki suatu bangsa, semakin tinggi peluang untuk meningkatkan potensi bangsa itu. Metode penghitungan IPM yang digunakan mengacu pada metodologi yang digunakan UNDP. Sejak tahun 2015, BPS telah menggunakan penghitungan IPM yang terbaru dengan melakukan penyesuaian pada beberapa indikator.

Jika melihat capaian tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2022, capaian IPM Kabupaten Bandung Barat berada di akhir level **“Sedang”** berkisar $60 \leq \text{IPM} < 70$ sebagaimana terlihat sebagai berikut:

Gambar 2. 25 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 - 2022

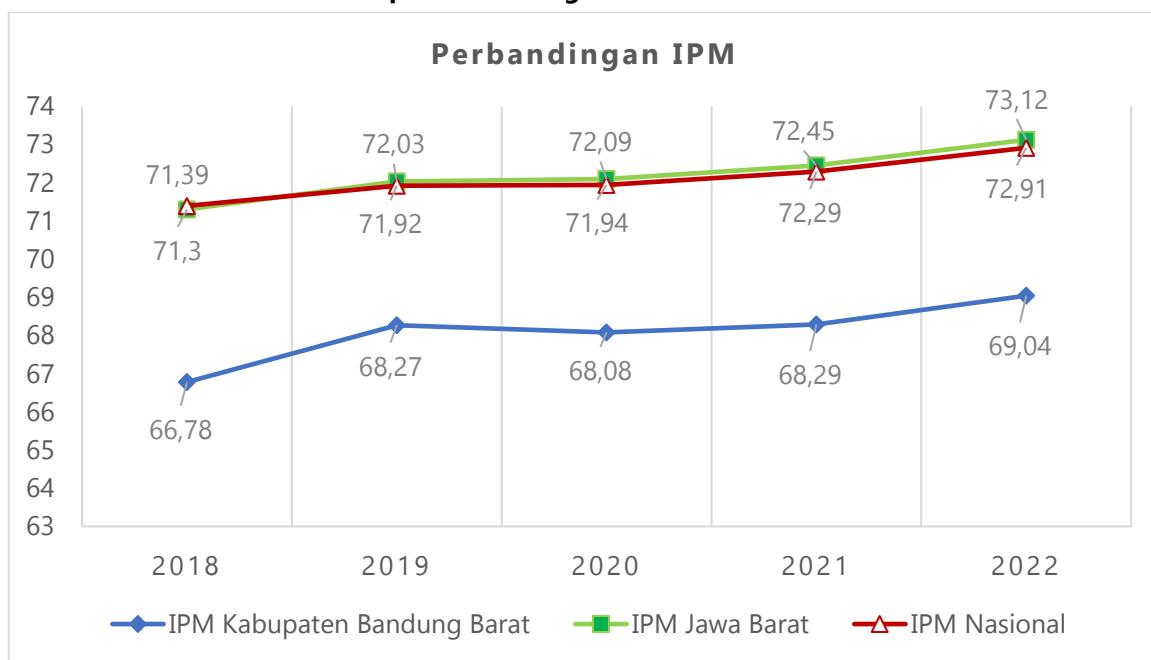


Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

IPM merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan peningkatan kualitas hidup masyarakat (masyarakat/penduduk). IPM juga dapat menentukan peringkat atau tingkat pembangunan suatu daerah/negara. Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2022, pembangunan manusia di Kabupaten Bandung Barat memperlihatkan perkembangan yang positif. Setiap tahun, IPM Kabupaten Bandung Barat meningkat rata-rata 0,32 persen per tahun. Dalam kurun waktu sepuluh tahun semenjak perhitungan IPM metode baru, telah terjadi kenaikan IPM sebesar 7,70 poin. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Kabupaten Bandung Barat. Dalam konstelasi regional Jawa Barat capaian IPM Kabupaten Bandung Barat masih berada di bawah IPM Provinsi Jawa Barat dan Nasional, namun secara tren sama-sama menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam lima tahun terakhir.

IPM Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 sudah masuk dalam kategori IPM tinggi sedangkan Kabupaten Bandung Barat masih masuk dalam kategori sedang seperti terlihat pada tabel grafik berikut:

Gambar 2. 26 Perbandingan IPM Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022



Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat diolah Bappelitbanda, 2023

Tantangan dalam meningkatkan pembangunan manusia di Kabupaten Bandung Barat yaitu tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah. Dengan mencermati perkembangan capaian IPM Kabupaten Bandung Barat, upaya untuk meningkatkan indikator-indikator kunci pembangunan manusia masih tetap diperlukan, dimana Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berharap dapat mencapai angka IPM “tinggi” berkisar pada $70 \leq \text{IPM} < 80$ pada tahun 2045.

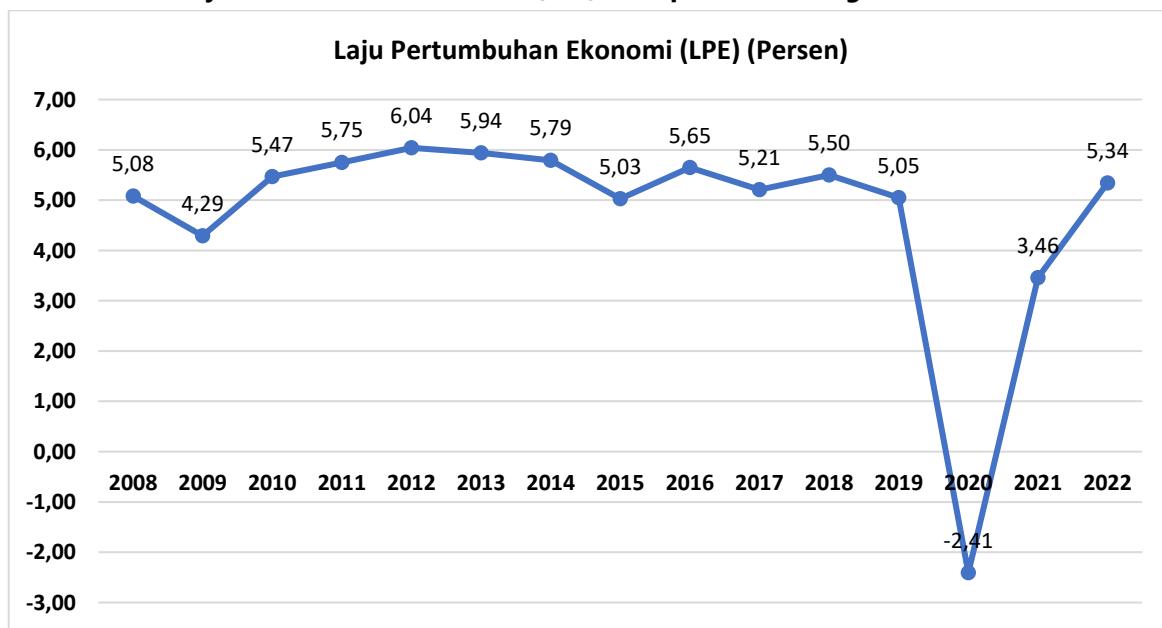
2.5.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah, hal ini berguna untuk mengetahui apakah suatu wilayah tersebut mengalami peningkatan secara terus menerus atau sebaliknya yaitu mengalami penurunan. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bandung Barat pada kurun waktu 2008 – 2022 secara umum memiliki LPE yang kompetitif dan berkontribusi penting dalam perekonomian nasional dan regional Jawa Barat dengan rata capaian berkisar antara 5 – 7 Persen kecuali pada tahun 2020 perekonomian Kabupaten Bandung Barat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,41 persen negatif dibanding tahun 2019. Sedangkan perekonomian Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2022-2023 masih berada pada fase pemulihan menuju penormalan, ditandai dengan kondisi pemulihan ekonomi yang semakin membaik di berbagai sektor lapangan usaha.

Gambar 2. 27 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 - 2022



Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha bertujuan untuk melihat struktur ekonomi, besarnya peranan berbagai lapangan usaha dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah.

Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha dapat menggambarkan dan menjadi tantangan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha atau yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah tersebut.

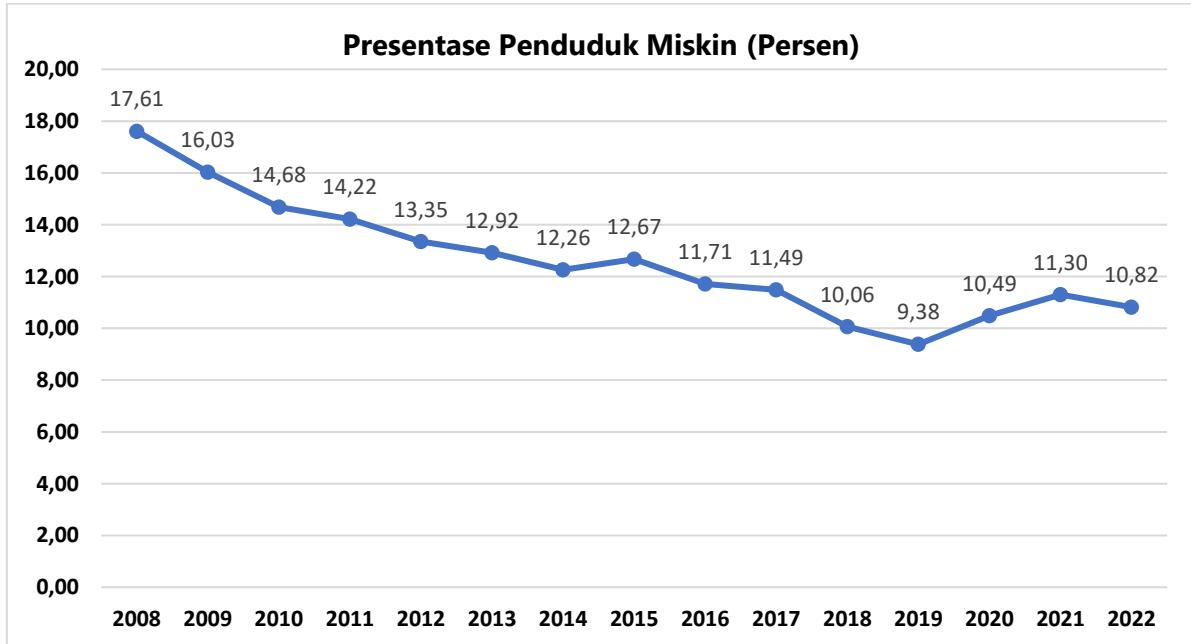
Selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Bandung Barat didominasi oleh 6 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Sementara peranan lapangan usaha- lapangan usaha lainnya masing- masing masih berada di bawah 5 (lima) persen untuk menjadi perhatian ke depannya dan perlu dilakukan upaya lebih lanjut dalam pengembangan dan diversifikasi sektor ekonomi serta peningkatan daya saing daerah.

2.5.3 Kemiskinan

Kemiskinan sebagai indikator yang dihasilkan dari perbedaan pengeluaran/pendapatan masyarakat, suatu penduduk dikatakan merupakan penduduk miskin ketika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan suatu representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan (2100 kilo kalori per kapita per hari). Paket komoditi kebutuhan dasar makanan itu diwakili oleh 52 jenis komoditi.

Sedang Garis Kemiskinan Non Makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2008 - 2022 dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

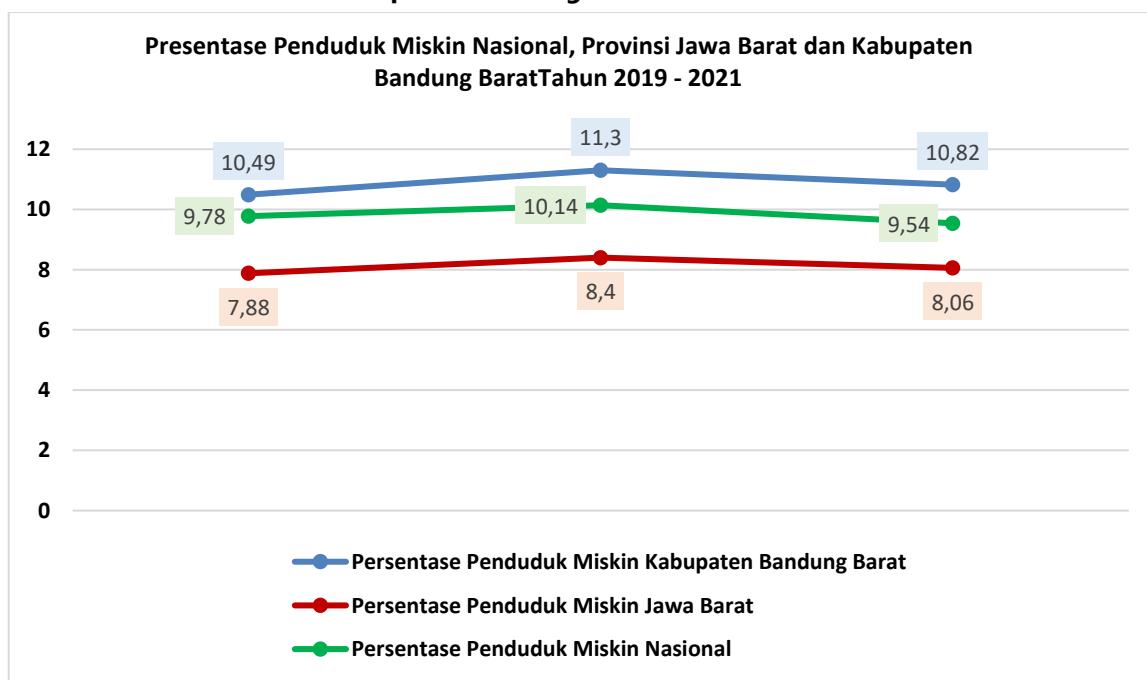
Gambar 2. 28 Presentase Kemiskinan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 - 2022



Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

Semenjak tahun 2008 s.d tahun 2022 angka kemiskinan di Kabupaten bandung Barat dapat di tekan sebesar 6,79% dari tahun 2008 sebesar 17,61% menjadi 10,82 persen di tahun 2022. Hal ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik, dalam arti pemerintah telah berhasil dalam program pengentasan kemiskinan walaupun bila dilihat dari tingkat regional Jawa Barat, perkembangan tingkat kemiskinan di 27 kabupaten/kota pada periode tahun 2020-2022 posisi Kabupaten Bandung Barat tingkat kemiskinannya masih tinggi termasuk 10 (sepuluh) kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan >10 persen.

Gambar 2. 29 Presentase Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 - 2023



Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat diolah Bappelitbanda, 2023

Aspek penting dalam mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah ketersediaan data kemiskinan yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang dapat diandalkan dapat menjadi alat yang efektif bagi para pembuat kebijakan untuk menarik perhatian terhadap kondisi kehidupan masyarakat miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan wilayah, dan menetapkan tujuan untuk memperbaiki situasi masyarakat miskin.

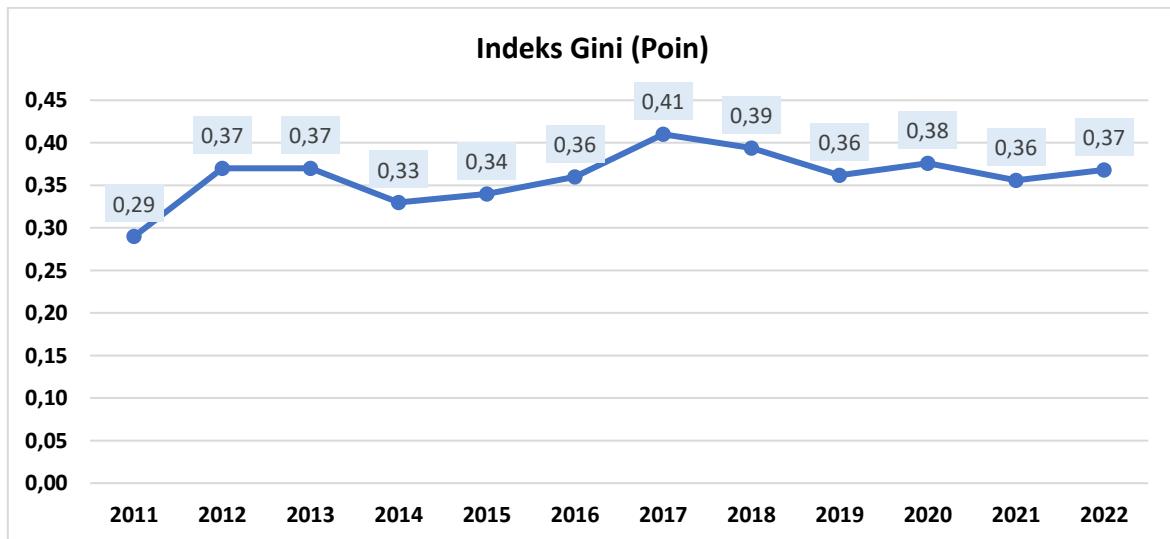
Tantangan untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat antara lain perlu diberikan perhatian terhadap golongan masyarakat yang rawan miskin dan berpotensi kembali miskin karena golongan inilah yang rentan menjadi miskin akibat adanya perubahan kondisi sosial dan kebijakan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan dasar serta pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu jalan untuk memutus rantai kemiskinan.

2.5.4 Ketimpangan

Indikator pertama yang digunakan untuk mendapatkan gambaran ketimpangan pendapatan suatu wilayah yaitu gini rasio. Secara umum perkembangan nilai Gini Ratio Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 - 2022 berfluktuatif namun cenderung selalu berada pada level ketimpangan rendah (<0,4). Selama lima tahun terakhir gini rasio cenderung meningkat, setelah pada tahun 2018 mencapai gini rasio tertinggi yaitu sebesar 0,394 pada tahun 2019 turun menjadi 0,362 atau turun sebesar 0,032 poin.

Tetapi Pada tahun 2020 gini rasio meningkat sebesar 0,014 menjadi 0,376 poin, peningkatan di tahun 2020 salah satunya adalah karena adanya dampak pandemi covid 19 di awal tahun 2020 tetapi melalui program bantuan sosial dan pemulihan ekonomi yang cukup efektif di tahun 2021 indeks gini kembali turun menjadi 0,356 tetapi naik kembali di tahun 2022 menjadi 0,368 poin.

Gambar 2. 30 Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 – 2022



Sumber : KBBDA, 2019-2023, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

Capaian Indeks Gini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan wilayah Kabupaten Bandung Barat termasuk kategori dengan ketimpangan rendah karena nilainya masih dibawah 0,4. Tetapi Pemerintah Daerah harus bertindak cepat walaupun masih kategori rendah namun jaraknya cukup dekat dengan kategori sedang.

Dalam rencana pembangunan Kabupaten Bandung Barat, tujuan peningkatan pendapatan dan penanggulangan kemiskinan selalu dikemukakan secara bersamaan. Distribusi pendapatan yang tidak merata akan menciptakan tidak sejahtera bagi masyarakat secara umum. Sistem distribusi yang tidak merata hanya menciptakan kekayaan bagi kelompok tertentu. Dampak yang dirasakan masyarakat adalah bertambahnya jumlah rumah tangga miskin di perdesaan dan perkotaan, rusaknya tatanan sosial akibat hilangnya lapangan pekerjaan dan hilangnya kebutuhan dasar (pendidikan, pelayanan kesehatan dasar, keluarga berencana, dan pelayanan sosial), dengan demikian distribusi pendapatan dan pembangunan yang adil saling berhubungan dan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi. Ketika kedua aspek ini bertentangan, kesejahteraan ekonomi pun terancam.

Peran pemerintah sangat penting dalam hal ini, agar pemerataan pendapatan dan pembangunan yang berkeadilan dapat berjalan dengan baik. Masalah distribusi pendapatan mempunyai dua aspek. Aspek yang pertama adalah bagaimana meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan, dan yang kedua adalah pemerataan pendapatan secara umum, karena perbedaan pendapatan antar penduduk atau rumah tangga dapat dikurangi. Keberhasilan dalam mengatasi aspek pertama masih terlihat pada berkurangnya proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pada saat yang sama, keberhasilan dalam meningkatkan distribusi pendapatan secara umum adalah ketika kecepatan pertumbuhan pendapatan masyarakat miskin lebih besar dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan pendapatan masyarakat kaya.

Tantangan Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan pemerataan dengan menurunkan Gini Rasio cukup penting. Daerah-daerah yang mulai memperoleh keuntungan melalui pertumbuhan ekonomi akan terkena dampak negatif berupa peningkatan Gini Rasio. Meningkatnya ketimpangan akibat pemanfaatan peluang pembangunan ekonomi tidak dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Hal ini akan meningkatkan Gini Rasio untuk sementara sebelum turun secara alami karena semakin banyak masyarakat yang memperoleh manfaat dari kegiatan ekonomi. Kondisi Gini Rasio yang meningkat secara alami tidak menghalangi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pemerataan.

2.5.5 Pengangguran

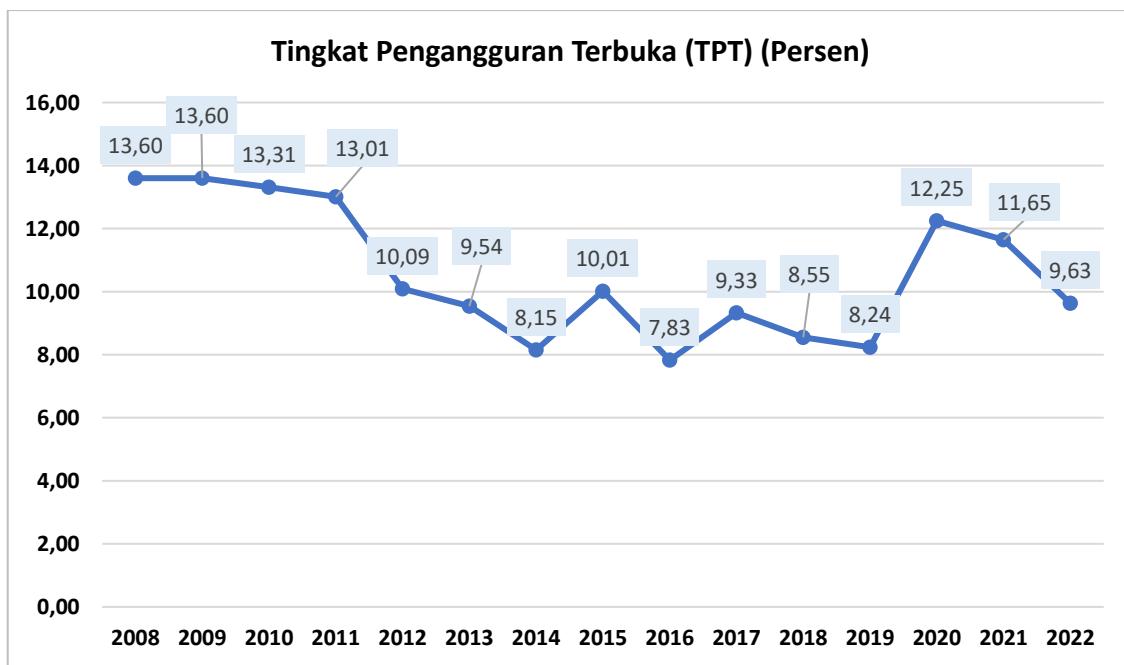
Ketenagakerjaan tidak dapat telepas dari pertumbuhan ekonomi. Tumbuhnya ekonomi diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun.

Penduduk angkatan kerja yang terdiri dari komposisi penduduk bekerja dan mencari pekerjaan pada dasarnya merupakan bagian dari penduduk yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan perekonomian di suatu wilayah.

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Persentase Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran Terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Mengetahui jumlah pengangguran terbuka sangat berguna sebagai acuan pemerintah dalam pembukaan lapangan kerja baru.

Disamping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun, seperti terlihat pada grafik berikut:

**Gambar 2. 31 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2008 - 2022**

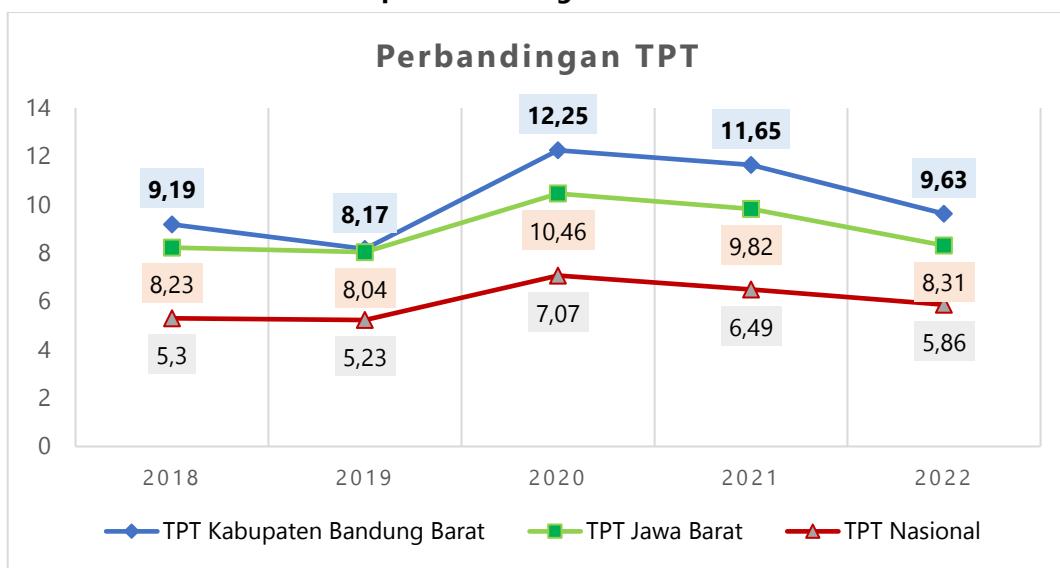


Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

Pada kurun waktu 2008 – 2022, Kabupaten Bandung Barat berhasil menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,97 persen dari tahun 2008 TPT sebesar 13,60 persen menjadi 9,63 persen di tahun 2022 tetapi pada kurun waktu 2019 - 2020 mengalami kenaikan menjadi dua digit tahun 2020 sebesar 12,25 persen dan tahun 2021 sebesar 11,65 persen. Hal ini dampak dari terjadi pandemic Covid-19 pada tahun 2020. Permasalahan ketenagakerjaan berkorelasi kuat dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja. Pada tahun 2020 dan 2021 dampak pandemi COVID-19 masih memberikan tekanan besar kepada sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat, hal ini terlihat dari capaian target tingkat pengangguran terbuka selalu lebih rendah dibanding target yang telah ditetapkan.

Begitupun pula kondisi tingkat pengangguran di Kab. Bandung Barat selama 3 (tiga) tahun terakhir masih tinggi bila dibandingkan dengan capaian TPT Jawa Barat dan nasional. Kondisi ini menandakan laju pertumbuhan angkatan kerja di Kabupaten Bandung Barat lebih cepat dibanding pertumbuhan lapangan kerja, sehingga angkatan kerja yang tersedia tidak seluruhnya terserap pasar kerja, untuk lebih jelasnya digambarkan berikut:

Gambar 2. 32 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022



Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat diolah Bappelitbanda, 2023

Pada skala regional Jawa Barat, pandemi COVID-19 menyebabkan angka pengangguran di Jawa Barat semakin tinggi. Hal ini tidak terlepas dari keadaan ketenagakerjaan di 27 Kabupaten/Kota, di Jawa Barat terdapat 14 (empat belas) Kabupaten/Kota yang memiliki angka pengangguran lebih dari 2 (dua) digit (>10 persen) termasuk Kabupaten Bandung Barat salah satunya dan di tahun 2021 masih terdapat 13 (tiga belas) kabupaten/kota dengan angka pengangguran (>10 persen), tetapi di tahun 2022 tingkat pengangguran di Kabupaten Bandung Barat turun menjadi 1 (satu) digit menjadi 9,63 persen.

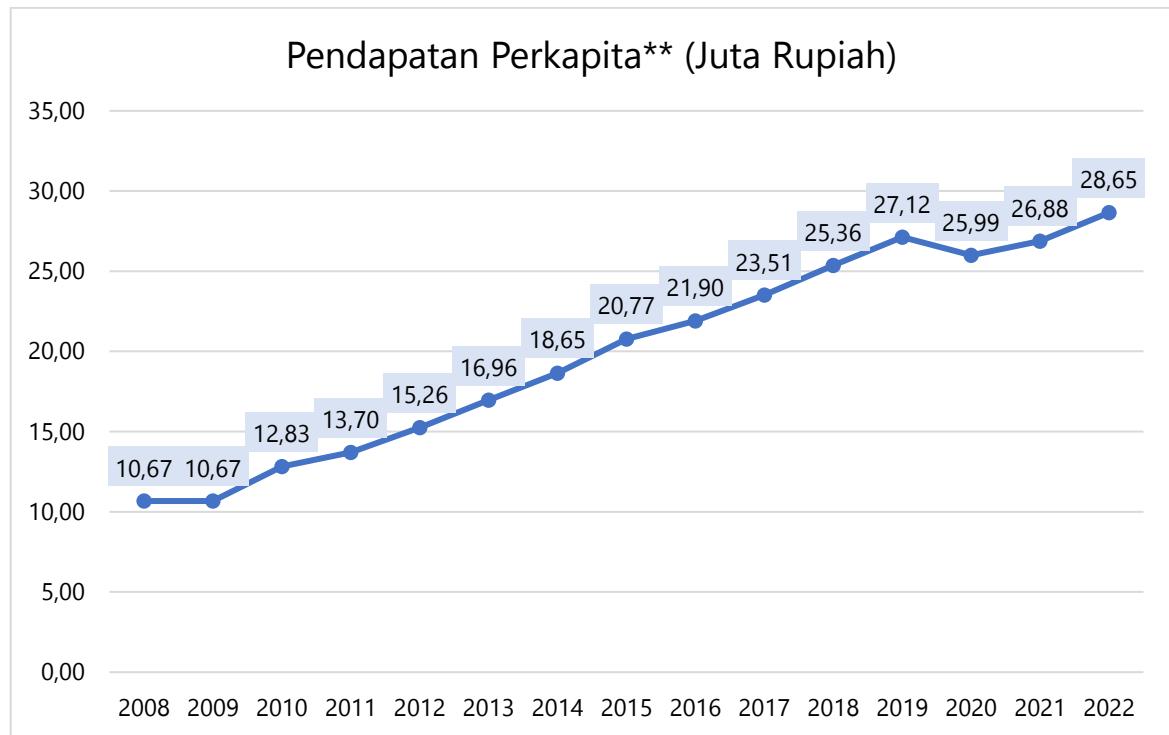
Indikator persentase kesempatan kerja merupakan komplemen dari persentase pengangguran terbuka. Kegunaan indikator ini adalah untuk mengukur seberapa besar persentase penyerapan tenaga kerja. Jika persentase kesempatan kerja semakin tinggi maka penyerapan terhadap angkatan kerja akan semakin baik, atau pemenuhan dan perluasan kesempatan kerja bagi daerah yang bersangkutan dapat dikategorikan berhasil. Sebaliknya jika persentase kesempatan kerja itu rendah maka pengangguran akan meningkat. Hal ini menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan disertai dengan produktifitas tenaga kerja yang berdaya saing.

2.5.6 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita. PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Perkembangan capaian PDRB per kapita di Kab. Bandung Barat menunjukkan trend meningkat dan selalu mencapai target kecuali capaian di tahun 2020, dari capain di tahun 2008 sebesar 10,67 juta rupiah menjadi 28,65 juta rupiah di tahun 2022.

Gambar 2. 33 PDRB Per Kapita Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008-2022



Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

Secara rata-rata, capaian PDRB per kapita Kabupaten Bandung Barat Barat masih di bawah atau lebih rendah dari capaian Provinsi Jawa Barat sebesar 45,19 juta rupiah dan Nasional sebesar 62,23 juta rupiah di tahun 2022.

Bila dibandingkan dengan capaian Kab/kota di Jabar, capaian PDRB per Kapita Kabupaten Bandung Barat yang berada diinterval PDRB per Kapita masih di bawah 30 juta. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan pendapatan masyarakatnya, di satu sisi dihadapkan pada tantangan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, sementara di sisi lain diperlukan upaya untuk meningkatkan nilai tambah output dari setiap sektor ekonomi.

Capaian beberapa indikator makro di atas menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Bandung Barat masih perlu memberikan perhatian yang besar terkait masalah pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan. Berbagai lapangan usaha diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang ada sehingga masyarakat dapat memiliki penghasilan dan penghidupan yang layak. Pengendalian tingkat pengangguran dan kemiskinan serta ketimpangan pendapatan diharapkan dapat mendorong pembangunan manusia yang diindikasikan dengan peningkatan IPM di Kabupaten Bandung Barat.

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Data kependudukan memiliki peran yang sangat penting untuk pembangunan. Perencanaan pembangunan perlu ditunjang dengan informasi terkait besaran dan komposisi kependudukan yang lengkap dan berkesinambungan. Hasil sensus, survei, dan data administratif menyediakan informasi penduduk untuk kondisi saat pendaatan tersebut dilakukan. Namun, penyusunan perencanaan dan kebijakan sesuai dinamika waktu di masa mendatang membutuhkan informasi proyeksi penduduk di masa depan. Proyeksi penduduk akan membantu pembuat kebijakan untuk memonitor dan mengevaluasi program, mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi, serta merancang kebijakan selanjutnya.

Perencanaan pembangunan harus didukung oleh data dan informasi yang akurat, termasuk data dan informasi kependudukan terkini serta prakiraannya pada masa yang akan datang sebagai dasar untuk mengevaluasi pembangunan yang telah berjalan dan menentukan kebijakan pembangunan di masa depan. Selain jumlah penduduk, informasi mengenai parameter demografi seperti struktur umur penduduk, angka kelahiran, angka kematian, dan umur harapan hidup saat lahir sangat menunjang untuk perencanaan pembangunan yang akurat. Informasi tersebut dapat dihitung melalui proyeksi penduduk.

Salah satu kebutuhan pembangunan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan adalah penyediaan sarana dan prasarana yang akan melayani penduduk sebagaimana karakteristik demografi yang ada. Penyediaan sarana dan prasarana mencakup pembangunan dan penyediaan fasilitas dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, rumah sakit, sekolah, dan transportasi umum. Kebutuhan akan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik memerlukan proyeksi demografi untuk dapat menangkap dinamika perkembangan kebutuhan yang perlu direncanakan pada masa-masa mendatang.

Aspek demografi serta kebutuhan akan sarana dan prasarana memiliki hubungan yang erat dan menjadi salah satu pemikiran dalam kebutuhan perumusan kebijakan dan rencana pembangunan. Kedua aspek ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi suatu negara atau wilayah, sebagaimana diuraikan berikut:

a. Manfaat Proyeksi Demografi, diantaranya:

- Dalam Perencanaan Ekonomi: Proyeksi demografi membantu pemerintah dan lembaga lainnya merencanakan kebijakan ekonomi jangka panjang. Dengan mengetahui perkiraan jumlah penduduk, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya ekonomi dengan lebih efisien.
- Dalam Perencanaan Pendidikan: Proyeksi demografi membantu dalam merencanakan kebutuhan pendidikan di masa depan. Hal ini membantu lembaga-lembaga pendidikan mempersiapkan diri untuk meningkatkan atau menurunkan kapasitas berdasarkan perkiraan jumlah siswa.

- Dalam Perencanaan Kesehatan: Proyeksi demografi dapat membantu sektor kesehatan merencanakan kapasitas fasilitas kesehatan, memperkirakan kebutuhan layanan kesehatan, dan mengidentifikasi kelompok-kelompok risiko.
 - Dalam Perencanaan Pasar Tenaga Kerja: Dengan memahami proyeksi demografi, perencanaan pasar tenaga kerja menjadi lebih efisien. Pemerintah dan bisnis dapat merencanakan pelatihan, pendidikan, dan kebijakan penyerapan tenaga kerja.
- b. Manfaat Pemenuhan Sarana Prasarana / Infrastruktur Publik, diantaranya:
- Peningkatan Kualitas Hidup: Infrastruktur yang memadai meningkatkan kualitas hidup penduduk. Akses mudah ke air bersih, sanitasi, pendidikan, dan layanan kesehatan mendasar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - Pendorong Pertumbuhan Ekonomi: Infrastruktur yang baik meningkatkan produktivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Jalan yang baik, transportasi umum, dan koneksi internet memudahkan perdagangan dan bisnis.
 - Peningkatan Aksesibilitas: Infrastruktur yang memadai meningkatkan aksesibilitas ke pasar, peluang pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan
 - Ketahanan Terhadap Bencana: Infrastruktur yang kuat dan tahan bencana membantu komunitas mengatasi dampak bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau badai dengan lebih baik.

2.6.1 Proyeksi Demografi

Penduduk suatu wilayah didefinisikan sebagai orang yang biasa (sehari-hari) tinggal di wilayah itu. Penduduk dalam satu wilayah menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan. Penduduk dapat menjadi modal pembangunan juga menjadi target pembangunan. Pengambilan kebijakan di suatu daerah akan sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran, serta kepadatan penduduk di wilayah tersebut.

Proyeksi penduduk memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi tertentu baik ketika mengikuti tren dari masa lalu maupun ketika ada kebijakan yang diterapkan. Proyeksi penduduk perlu dilakukan karena dinamika struktur penduduk yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan struktur penduduk umumnya terjadi pada distribusi usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, serta kondisi penduduk di perkotaan dan perdesaan.

Pemahaman terhadap dinamika struktur penduduk diharapkan dapat memberi masukan bagi kebutuhan penyediaan jenis layanan sarana dan prasarana suatu wilayah. Dari data proyeksi struktur penduduk dan proyeksi kebutuhan tersebut kemudian diharapkan dapat disusun suatu rencana yang dapat memenuhi kebutuhan sesuai dinamika kependudukan.

2.6.1.1 Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Jumlah Penduduk

Proyeksi penduduk dibuat dengan metode komponen kohort berdasarkan asumsi kecenderungan fertilitas, mortalitas, serta migrasi (migrasi internasional, migrasi internal antar provinsi dan migrasi internal antar kabupaten/kota) yang paling mungkin terjadi selama periode 30 (tiga puluh) tahun yang akan datang. Hasil proyeksi sangat ditentukan oleh asumsi yang digunakan. Oleh karena itu, penetapan asumsi merupakan kunci penghitungan proyeksi penduduk. Secara umum, asumsi mengenai kecenderungan angka kelahiran, angka kematian, serta perpindahan penduduk ditentukan oleh kecenderungan yang terjadi di masa lalu.

Perhitungan perkembangan penduduk baik dari segi jumlah dan penambahan dan/atau perubahan penduduk sesuai dengan faktor pengaruhnya menggunakan indikator masing-masing. Untuk angka kelahiran digunakan indikator Total Fertility Rate (TFR) dan angka kematian menggunakan indikator Infant Mortality Rate (IMR). Berdasarkan data hasil long form sensus penduduk Kabupaten Bandung Barat yang dilaksanakan oleh BPS, Fertilitas Kabupaten Bandung Barat menurun dalam sepuluh tahun terakhir.

Sensus Penduduk 2010 mencatat angka TFR sebesar 2,31 yang berarti seorang perempuan melahirkan sekitar 2-3 anak selama masa reproduksinya. Sementara Long Form SP2020 mencatat TFR sebesar 2,24 yang berarti hanya sekitar 2 anak yang dilahirkan perempuan selama masa reproduksinya. Penurunan fertilitas mengakibatkan proporsi anak-anak dalam populasi ikut menurun. Kondisi ini dapat mengakibatkan rasio ketergantungan menjadi lebih rendah dan menciptakan bonus demografi. Pada tahun 2022, tepat satu dekade bonus demografi Indonesia, tercatat TFR sebesar 2,24. Angka ini semakin mendekati tingkat Replacement Level (2,1), artinya setiap wanita digantikan oleh satu anak perempuannya untuk menjaga kelangsungan pergantian generasi.

Berdasarkan hasil Long Form SP2020 tercatat Angka Kematian Kasar yang terhitung adalah sebesar 4,82. Artinya, terdapat 4 sampai dengan 5 kematian untuk tiap 1.000 penduduk di Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan selama periode satu dekade bonus demografi yang dialami Indonesia, Angka Kematian Bayi (AKB) cenderung menurun dari 27 per 1000 kelahiran hidup pada Sensus Penduduk 2010 menjadi 14 per 1000 kelahiran hidup pada Long Form SP2020. Perbaikan sarana dan prasarana kesehatan serta meningkatnya kualitas hidup wanita Bandung Barat membuat anak yang baru lahir semakin mampu bertahan hidup.

**Tabel 2. 55 Proyeksi Indikator Fertilitas dan Mortalitas Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2020 dan 2035**

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Capaian		
			2020	2035	2045
1	2	3	4	5	6
	Aspek Kelahiran (Fertilitas)				
1	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	Angka	2,24	1,94	1,74*
	Aspek Kematian (Mortalitas)				
1	<i>Infant Mortality Rate (IMR)</i>	Angka	14,13	8,08	-

Sumber : Proyeksi Penduduk Kab/Kota Jabar 2020-2035, BPS, diolah

** Hasil proyeksi mandiri*

Berdasarkan data hasil long form SP2020 dan hasil proyeksi mandiri, maka diperoleh proyeksi dari indikator-indikator yang mempengaruhi perubahan penduduk menunjukkan angka *Total Fertility Rate* (TFR) yang diproyeksikan semakin menurun hingga tahun 2045 namun dengan penurunan pada *Infant Mortality Rate* (IMR) hingga tahun 2035.

2.6.2 Proyeksi Penduduk

Proyeksi penduduk Kabupaten Bandung Barat didasarkan pada data proyeksi yang dilakukan oleh BPS hingga tahun 2035, dan dilakukan proyeksi selanjutnya hingga tahun 2045 dengan basis data dari data kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang digunakan sebagai basis data proporsi bagi setiap kecamatan yang ada. Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2020 sebesar 1.782.190 jiwa dan diproyeksikan terus mengalami peningkatan atau pertumbuhan jumlah penduduk, hingga pada tahun 2045 jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat mencapai hingga 2.277.820 jiwa. Peningkatan ini tercatat sebesar 27,81 persen dibandingkan dengan angka penduduk pada tahun 2020.

**Tabel 2. 56 Proyeksi Jumlah Penduduk di Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2020-2045**

Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)
2020	1.782.190
2025	1.907.820
2030	2.020.290
2035	2.121.800
2040	2.207.780
2045	2.277.820

Sumber: Data olah, 2024

Penduduk berdasarkan jenis kelamin merupakan bentuk analisis dari sudut pandang gender. Informasi ini perlu disampaikan mengingat pembangunan sering kali memberikan manfaat yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki (AIPD, 2014).

Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pada tabel menunjukkan bahwa tren rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan sampai dengan Tahun 2045 cenderung menurun bahkan pada tahun tersebut jumlah rasio sebesar 99,02 persen yang artinya jumlah perempuan lebih besar dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Berikut merupakan proyeksi penduduk Kabupaten Bandung Barat berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 2. 57 Proyeksi Penduduk Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Tahun Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-Laki	948.045	1.025.725	1.073.805	1.073.805	1.113.680	1.145.480
Perempuan	911.591	994.567	1.047.990	1.047.990	1.094.100	1.132.340
Rasio	104,00	103,13	102,46	102,46	101,79	101,16

Sumber: Data olah, 2024

Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa tren rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan sampai dengan tahun 2045 cenderung menurun hingga angka 101,16. Berdasarkan kondisi penduduk tersebut, pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat harus memberikan kesetaraan aksesibilitas terhadap layanan dasar dan infrastruktur dasar bagi seluruh penduduk khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan, lansia, termasuk disabilitas dan anak-anak (*safety, security, health as human needs*). Analisis selanjutnya adalah proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur.

Pengelompokan usia penduduk salah satunya didasari oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2017) yang mengategorikan masyarakat ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu kelompok usia muda (<15 tahun), kelompok usia produktif (rentang usia 15-64 tahun), dan masyarakat usia non produktif (>65 tahun). Hal ini diperkuat oleh McKenzie dkk. (2006), dimana pada rentang usia 15-64 tahun tersebut banyak orang yang menyelesaikan pendidikan formalnya, mencari, membangun karier, membangun sebuah keluarga, aktif terlibat dalam pembangunan komunitas, dan sebagainya.

Dalam konsep ekonomi, usia produktif merupakan usia kerja yang bisa menghasilkan barang dan jasa. Berikut merupakan data mengenai proyeksi penduduk Kabupaten Bandung Barat berdasarkan kelompok umur:

Tabel 2. 58 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Bandung Barat Tahun 2020-2045

Kabupaten Bandung Barat	Tahun 2020 (SP 2020)			Tahun 2025			Tahun 2030			Tahun 2035			Tahun 2040			Tahun 2045		
	Kelompok Umur	LK	PR	L+P	LK	PR	L+P	LK	PR	L+P	LK	PR	L+P	LK	PR	L+P	LK	PR
0-4	75,16	71,89	147,06	79,36	76,17	155,53	77,36	74,23	151,59	75,14	72,07	147,22	71,86	68,66	140,52	68,20	65,07	133,27
5-9	75,46	71,47	146,93	75,73	72,18	147,91	79,97	76,47	156,44	78,05	74,60	152,65	80,59	77,25	157,84	80,87	77,63	158,50
10-14	78,65	74,19	152,84	76,19	72,01	148,19	76,40	72,65	149,05	80,79	77,06	157,85	82,81	79,76	162,58	84,25	81,84	166,09
15-19	82,02	76,67	158,69	79,10	74,55	153,66	76,58	72,33	148,90	76,89	73,05	149,93	72,65	69,22	141,87	69,51	66,55	136,05
20-24	78,80	73,25	152,05	82,31	76,66	158,98	79,31	74,48	153,79	76,91	72,38	149,29	74,35	69,71	144,06	71,39	66,82	138,21
25-29	75,54	72,76	148,30	79,63	73,80	153,44	82,99	77,06	160,05	80,16	75,11	155,27	83,53	77,10	160,63	84,13	77,07	161,21
30-34	69,93	68,04	137,97	76,80	73,91	150,72	80,81	74,77	155,58	84,45	78,32	162,77	86,34	80,39	166,73	87,64	82,07	169,71
35-39	70,19	68,50	138,69	70,75	68,58	139,32	77,55	74,40	151,95	81,81	75,44	157,25	85,50	77,55	163,05	88,56	79,25	167,81
40-44	66,77	64,77	131,54	70,48	68,53	139,00	70,96	68,57	139,53	77,93	74,53	152,46	77,81	74,44	152,25	79,50	75,71	155,21
45-49	60,31	59,54	119,86	66,23	64,56	130,79	69,86	68,31	138,17	70,47	68,47	138,95	73,09	71,59	144,68	75,19	73,30	148,49
50-54	50,84	49,26	100,09	59,18	58,99	118,16	65,00	64,01	129,00	68,69	67,84	136,53	70,63	69,02	139,65	71,86	69,88	141,74
55-59	42,82	40,64	83,46	49,30	48,44	97,73	57,45	58,10	115,55	63,25	63,17	126,41	70,07	71,86	141,93	75,95	78,46	154,41
60-64	32,31	30,06	62,37	40,32	39,46	79,78	46,53	47,19	93,71	54,39	56,77	111,16	60,99	64,53	125,52	67,06	72,00	139,06
65-69	23,63	22,60	46,23	29,05	28,43	57,48	36,41	37,54	73,95	42,21	45,11	87,32	48,19	52,23	100,42	53,72	58,93	112,65
70-74	14,34	14,42	28,76	19,78	20,14	39,91	24,50	25,63	50,12	30,93	34,14	65,07	35,46	38,88	74,33	40,16	44,41	84,57
75+	13,05	14,30	27,34	17,35	19,89	37,24	24,06	28,85	52,90	31,74	39,95	71,69	39,82	51,91	91,74	47,47	63,36	110,83
Jumlah	909,83	872,36	1.782,19	971,55	936,27	1.907,82	1.025,73	994,57	2.020,29	1.073,81	1.047,99	2.121,80	1.113,68	1.094,10	2.207,78	1.145,48	1.132,34	2.277,82

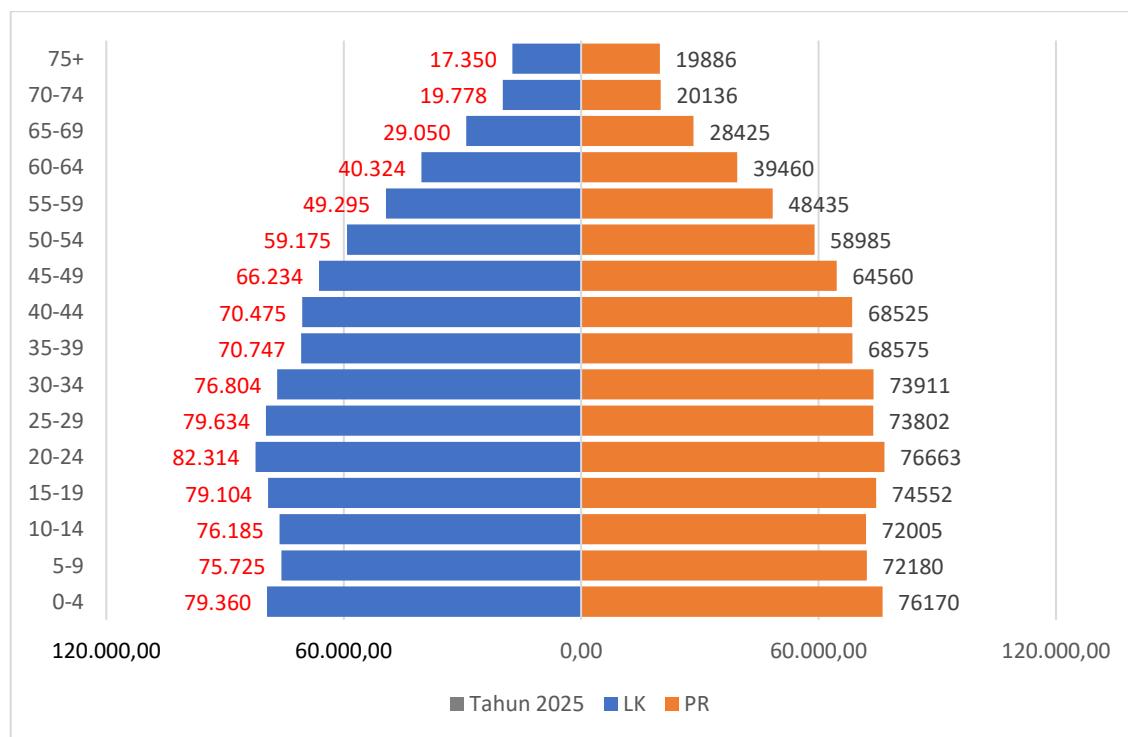
Sumber: Data olah, 2024

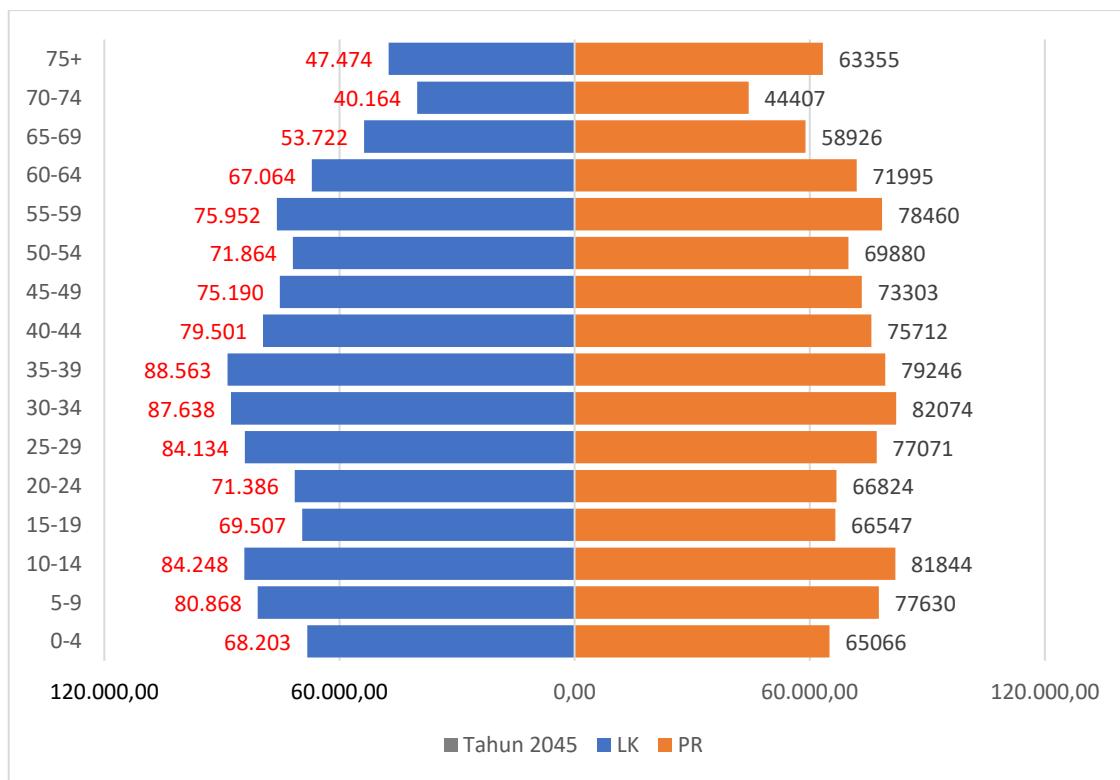
Proyeksi penduduk Kabupaten Bandung Barat berdasarkan kelompok usia menunjukkan tren komposisi penduduk yang menurun bagi kelompok penduduk usia muda dan usia produktif, serta tren yang meningkat bagi penduduk usia lanjut. Pembahasan lebih lanjut akan dijabarkan dalam bagian perkembangan struktur penduduk yang akan membahas piramida penduduk beserta komposisi penduduk berdasarkan persentase masing-masing kelompok umur.

2.6.2.1 Perkembangan Struktur Penduduk

Secara struktur penduduk, BPS telah memproyeksikan per 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2035, yang menunjukkan bahwa struktur penduduk Bandung Barat akan mengalami perubahan, terutama pada kelompok usia lanjut yang semakin melebar. Proyeksi mandiri dilakukan untuk mengetahui piramida penduduk hingga pada tahun 2045. Secara umum, komposisi penduduk Kabupaten Bandung Barat akan cukup banyak berubah dari berbagai kelompok umur. Berikut penggambaran lebih detail mengenai komposisi penduduk Kabupaten Bandung Barat yang divisualisasikan melalui piramida penduduk pada tahun 2025 dan 2045:

Gambar 2. 34 Piramida Penduduk Kabupaten Bandung Barat





Sumber: Data olah, 2024

Dilihat dari klasifikasi berdasarkan kelompok usia, maka proyeksi komposisi penduduk Bandung Barat pada Tahun 2045 akan didominasi oleh kelompok usia produktif yakni usia 15-64 tahun (66,37 persen), disusul oleh kelompok usia muda/belum produktif dengan rentang usia 0-14 tahun (20,1 persen), dan terakhir kelompok usia lanjut dan tidak produktif yakni usia 65 tahun ke atas (13,52 persen). Berikut perkembangan lebih detail mengenai komposisi penduduk di Kabupaten Bandung Barat dalam kurun waktu 2020 hingga tahun 2045:

Tabel 2. 59 Komposisi Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2045

Kelompok Umur	Tahun 2020	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Produktif dan Non Produktif (Persen)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Umur 0-14	25,07	23,67	22,62	21,57	20,88	20,10
Umur 15-64	69,19	69,27	68,62	67,87	67,05	66,38
Umur 65+	5,74	7,06	8,76	10,56	12,07	13,52
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Dependency Ratio	44,54	44,36	45,74	47,35	49,14	50,66

Sumber : Data olah, 2024

Perkembangan komposisi penduduk di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan tren penurunan dari persentase penduduk usia muda dan usia kerja serta tren peningkatan bagi penduduk usia lanjut. Perkembangan komposisi penduduk ini perlu diantisipasi oleh pemerintah, terkhusus perihal penurunan jumlah penduduk usia muda dan peningkatan jumlah penduduk usia lansia yang perlu direspon melalui berbagai kebijakan yang difokuskan kepada peningkatan jumlah penduduk usia muda dan usia kerja serta kebijakan perawatan penduduk lansia. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kondisi Kabupaten Bandung Barat yang berpotensi menjadi daerah dengan masyarakat renta (*aging society*) jika intervensi dalam bidang kependudukan tidak dilakukan segera.

2.6.2.2 Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Konsentrasi penduduk di suatu wilayah atau kepadatan penduduk kasar atau *crude population density* (CPD) adalah ukuran yang menggambarkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Luas wilayah yang dimaksud adalah luas seluruh daratan pada suatu wilayah administrasi. Pada tahun 2020 kepadatan penduduk Kabupaten Bandung Barat adalah 1.384 jiwa per km^2 dengan wilayah terpadat berada di Kecamatan Ngamprah dengan kepadatan 5,023 jiwa per km^2 dan kepadatan terendah berada di Kecamatan Gununghalu dengan kepadatan 494,1 jiwa per km^2 . Jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat diproyeksikan terus mengalami peningkatan atau pertumbuhan penduduk, hingga pada tahun proyeksi maksimum yaitu tahun 2045 mencapai 2.277.820 jiwa. Proyeksi sebaran penduduk di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel di bawah sebagai berikut:

Tabel 2. 60 Proyeksi Sebaran Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 - 2045

No	KECAMATAN	Tahun 2020 (Ribu jiwa)	Proyeksi Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Batujajar	108,36	115,52	122,07	128,05	133,06	136,68
2	Cihampelas	132,41	146,15	157,81	168,26	177,44	185,14
3	Cikalong Wetan	124,64	135,06	142,33	148,75	153,91	158,42
4	Cililin	95,76	103,86	110,74	117,12	122,65	127,35
5	Cipatat	142,36	151,10	158,88	165,56	171,35	176,12
6	Cipendeuy	87,60	93,37	99,30	104,61	109,06	113,05
7	Cipongkor	98,20	107,72	113,66	118,94	123,20	127,04
8	Cisarua	79,77	84,21	89,32	93,52	97,36	100,06
9	Gununghalu	76,81	84,06	89,20	93,74	97,56	100,94
10	Lembang	195,58	207,97	220,61	231,56	241,10	248,05
11	Ngamprah	179,07	184,30	191,11	197,39	202,80	206,37
12	Padalarang	185,17	193,89	201,67	209,30	215,58	219,61
13	Parongpong	111,94	117,21	124,48	130,93	136,29	140,77
14	Rongga	58,54	65,67	71,73	77,17	81,98	86,30
15	Saguling	33,97	38,28	42,67	47,07	50,84	54,49
16	Sindangkerta	72,03	79,47	84,73	89,83	93,62	97,43
KABUPATEN BANDUNG BARAT		1.782,19	1.907,82	2.020,29	2.121,80	2.207,78	2.277,82

Sumber: Data olah, 2024

Secara umum setiap kecamatan di Kabupaten Bandung Barat akan mengalami pertumbuhan penduduk, meskipun dengan laju pertumbuhan yang berbeda-beda. Kecamatan Lembang diproyeksikan akan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, sedangkan Kecamatan Saguling diproyeksikan akan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terendah. Pada tahun 2045 juga diproyeksikan hanya akan ada 3 wilayah dengan jumlah penduduk kurang dari 100.000 jiwa, diantaranya adalah Kecamatan Sindangkerta, Kecamatan Rongga, dan Kecamatan Saguling. Pertumbuhan penduduk di masing-masing kecamatan ini perlu diantisipasi oleh pemerintah, khususnya dalam hal penyediaan layanan dasar dan infrastruktur yang ada di masing-masing wilayah. Pertumbuhan penduduk ini perlu memperhatikan proyeksi kepadatan penduduk di Kabupaten Bandung Barat dari tahun 2020 - 2045. Kepadatan penduduk dihitung berdasarkan besaran jumlah penduduk terhadap luasan wilayah yang menghasilkan kepadatan kumulatif terhadap luasan wilayah Kab. Bandung Barat.

Tabel berikut memperlihatkan hasil proyeksi kepadatan sebagaimana dimaksud. Berikut merupakan proyeksi kepadatan penduduk di Kabupaten Bandung Barat dalam kurun waktu 2020 hingga 2045:

**Tabel 2. 61 Proyeksi Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2020-2045**

Tahun	Proyeksi Kepadatan Penduduk (Penduduk/km²)
2020	1.384
2025	1.482
2030	1.559
2035	1.648
2040	1.715
2045	1.769

Sumber : Proyeksi Penduduk Kab/Kota Jabar 2020-2035, BPS, diolah

Proyeksi kepadatan penduduk di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan hasil proyeksi yang akan selalu meningkat dari satu periode ke periode berikutnya. Peningkatan kepadatan penduduk ini terjadi sebesar 287 orang per km² atau peningkatan sebesar 19,37 persen dari angka pada tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk secara umum di Kabupaten Bandung Barat. Peningkatan kepadatan penduduk ini perlu direspon oleh pemerintah kedepannya melalui kebijakan yang menyasar kepada penyediaan ruang hunian bagi masyarakat dan sarana prasarana pendukungnya, terkhusus di wilayah-wilayah yang cenderung memiliki kepadatan yang lebih tinggi. Untuk mengetahui sebaran kepadatan wilayah-wilayah di Kabupaten Bandung Barat, berikut proyeksi kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Bandung Barat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 62 Proyeksi Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 - 2045

No	KECAMATAN	Luas Wilayah (Km2)	Tahun 2020 (Jiwa/Km2)	Proyeksi Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)				
				2025	2030	2035	2040	2045
1	Batujajar	31,11	3.483,0	3.713,2	3.923,8	4.116,0	4.277,0	4.393,5
2	Cihampelas	47,04	2.814,9	3.106,9	3.354,7	3.577,0	3.772,0	3.935,8
3	Cikalongwetan	110,94	1.123,5	1.217,4	1.282,9	1.340,8	1.387,3	1.428,0
4	Cililin	77,83	1.230,4	1.334,4	1.422,8	1.504,9	1.575,9	1.636,3
5	Cipatat	125,98	1.130,0	1.199,4	1.261,1	1.314,2	1.360,1	1.398,0
6	Cipendeuy	102,19	857,2	913,7	971,7	1.023,7	1.067,2	1.106,3
7	Cipongkor	80,16	1.225,0	1.343,9	1.418,0	1.483,8	1.536,9	1.584,8
8	Cisarua	55,63	1.434,0	1.513,7	1.605,5	1.681,0	1.750,2	1.798,6
9	Gununghalu	155,47	494,1	540,7	573,7	603,0	627,5	649,2
10	Lembang	98,22	1.991,2	2.117,3	2.246,1	2.357,6	2.454,6	2.525,4
11	Ngamprah	35,65	5.023,0	5.169,8	5.360,7	5.536,9	5.688,7	5.788,9
12	Padalarang	51,63	3.586,5	3.755,3	3.906,0	4.053,8	4.175,5	4.253,5
13	Parongpong	45,02	2.486,3	2.603,4	2.765,1	2.908,3	3.027,2	3.126,9
14	Rongga	112,64	519,7	583,0	636,8	685,1	727,8	766,2
15	Saguling	51,58	658,5	742,2	827,3	912,5	985,6	1.056,5
16	Sindangkerta	106,30	677,6	747,6	797,0	845,0	880,7	916,5
KABUPATEN BANDUNG BARAT		1287,39	1.384,0	1.482	1.569	1.648	1.715	1.769

Sumber: Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka, BPS, diolah

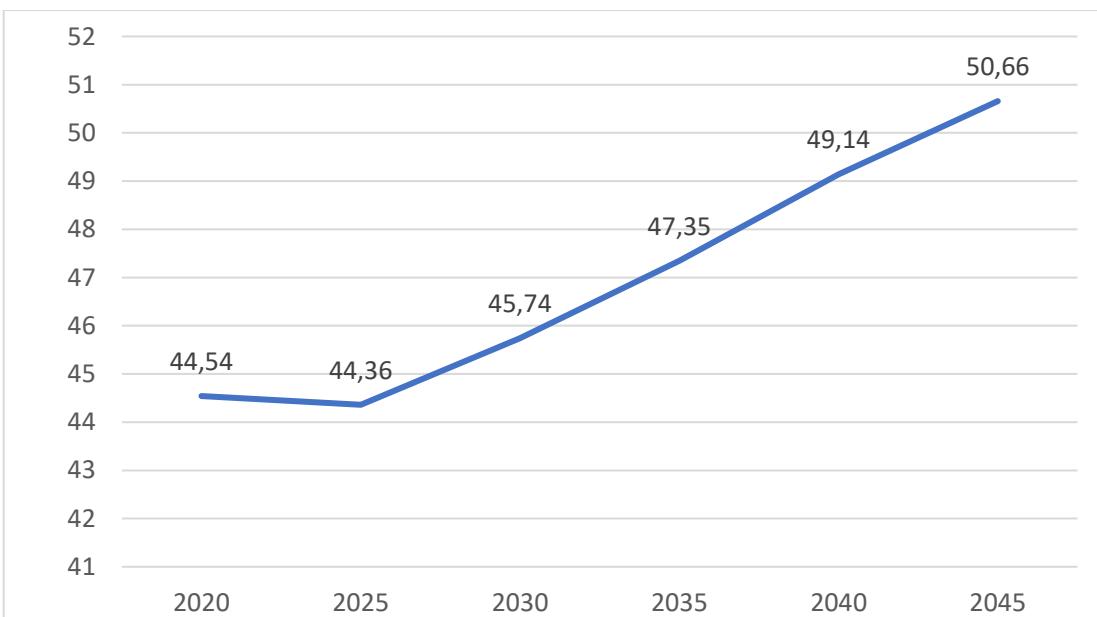
Proyeksi kepadatan penduduk per wilayah di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan secara umum seluruh wilayah akan mengalami peningkatan kepadatan penduduk pada tahun 2045. Kecamatan Ngamprah akan menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi dengan tingkat kepadatan sebesar 5.788,9 km² dan Kecamatan Gununghalu akan menjadi wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk terendah dengan angka sebesar 649,2 km². Proyeksi peningkatan kepadatan penduduk ini perlu diantisipasi oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan yang menyasar persiapan daerah dengan kepadatan penduduk yang tergolong tinggi melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan intensitas pelayanan yang lebih efisien dalam menyediakan pelayanan dasar kepada masyarakat.

2.6.2.3 Rasio Ketergantungan

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), rasio ketergantungan diartikan sebagai perbandingan jumlah penduduk usia 0-14 tahun dan >65 tahun dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Dalam bahasa Inggris, rasio ketergantungan dikenal dengan istilah *dependency ratio*. Rasio ketergantungan umumnya diartikan sebagai ukuran demografi dari rasio jumlah tanggungan terhadap total penduduk angkatan kerja di suatu wilayah atau negara. Dampak yang terjadi jika suatu wilayah memiliki rasio ketergantungan yang besar antara lain dapat mengurangi pertumbuhan produktivitas wilayah, karena banyaknya penduduk yang berada di luar usia angkatan kerja.

Selain itu, wilayah yang memiliki rasio ketergantungan tinggi akan sulit menjadi untuk berkembang, karena beban tanggungan terhadap penduduk yang tidak produktif juga tinggi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi jangka panjang cenderung lebih rendah. Di sisi lain, apabila suatu wilayah memiliki rasio ketergantungan yang rendah, maka beban ketergantungannya akan semakin rendah pula, dimana peluang untuk mengembangkan perekonomian wilayah semakin luas karena aktivitas produksi yang didukung angkatan kerja yang jumlahnya lebih optimal dan menunjukkan bahwa secara proporsional terdapat lebih banyak orang dewasa usia kerja yang dapat menyokong penduduk muda dan lanjut usia (ibid). Rasio ketergantungan ini dihitung dengan menambahkan jumlah penduduk berumur 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas dan dibagi dengan jumlah penduduk berumur 15–64 tahun, dikalikan 100. Sehingga, angka dari angka ketergantungan dapat dibaca sebagai jumlah penduduk usia non-produktif yang perlu ditanggung per 100 penduduk usia produktif.

**Gambar 2. 35 Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk di Bandung Barat
Tahun 2020-2035**



Sumber : Data olah, 2024

Dilihat dari data di atas dapat diketahui bahwa proyeksi rasio ketergantungan penduduk Bandung Barat hingga tahun 2045 akan mencapai angka 50,66. Angka ini dapat diartikan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif akan menanggung kurang lebih 51 orang penduduk usia produktif. Kondisi ini mengisyaratkan tren demografi Kabupaten Bandung Barat yang semakin menua, dimana penduduk usia tua semakin banyak dengan tidak disertainya tingkat kelahiran yang optimal. Peningkatan tren rasio ketergantungan ini perlu diantisipasi oleh pemerintah, khususnya perihal tanggungan penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk usia belum produktif dan tidak produktif yang semakin tinggi.

2.6.2.4 Bonus Demografi

Bonus Demografi diartikan sebagai potensi pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh pergeseran struktur usia penduduk, terutama ketika jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan jumlah penduduk non-usia kerja (14 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas) dan lebih tua (UNFPA/*United Nations Population Fund*).

Bonus demografi adalah peluang yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Di Indonesia, fenomena bonus demografi terjadi karena proses transisi yang berkembang sejak beberapa tahun lalu yang dipercepat oleh keberhasilan kebijakan kependudukan yang menurunkan tingkat fertilitas, meningkatkan kualitas kesehatan dan suksesnya program-program pembangunan.

Kondisi tersebut merupakan masa emas bagi suatu negara dimana provinsi yang berada didalamnya akan terdampak baik positif maupun negatif. Secara positif, bonus demografi akan sangat mendukung upaya untuk mencapai target generasi emas di tahun 2045 dengan Pilar Pembangunan Indonesia 2045. Di sisi lain, bonus ini dapat berubah menjadi bencana besar apabila tidak dipersiapkan dalam menghadapi tantangan dan isu permasalahan 20 (dua puluh) tahun kedepan, diantaranya Megatrend Dunia 2045 sebagai isu global, megathrust dan kemajuan teknologi serta geopolitik dan geoekonomi. Bonus demografi ini ditentukan oleh sejumlah indikator demografis yang mencerminkan distribusi usia penduduk suatu negara atau wilayah, berikut ini beberapa indikator kunci yang digunakan untuk mengukur bonus demografi meliputi: Persentase Penduduk Usia Produktif; Rasio Ketergantungan atau Dependency Ratio; Laju Pertumbuhan Penduduk; Usia Harapan Hidup (UHH); Fertilitas (Tingkat Kelahiran); dan Migrasi.

Tabel 2. 63 Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Bandung Barat, 2020–2035

Parameter	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Penduduk						
Laki-laki	909,83	971,55	1025,73	1073,81	1.113,68	1.145,48
Perempuan	872,36	936,27	994,57	1047,99	1.094,10	1.132,34
Total	1782,19	1907,82	2020,29	2121,8	2.207,78	2.277,82
<i>Sex Ratio</i>	104,3	103,77	103,13	102,46	101,79	101,16
Komposisi Umur						
0-14	25,07	23,67	22,62	21,57	20,88	20,10
15-64	69,19	69,27	68,62	67,87	67,05	66,38
65+	5,74	7,06	8,76	10,56	12,07	13,52
<i>Dependency Ratio</i>	44,54	44,36	45,74	47,35	49,14	50,66
Fertilitas						
<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	2,24	2,1	2,02	1,94	1,84	1,74
Mortalitas						
<i>Infant Mortality Rate (IMR)</i>	14,13	11,16	9,55	8,08	-	-

Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2020-2035, BPS; Olah data, 2024

Jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Bandung Barat akan mencapai puncaknya pada Tahun 2020-2035. Sedangkan jumlah penduduk Bandung Barat berdasarkan data proyeksi SP 2020 saat ini pada usia produktif antara 15-64 tahun lebih banyak dari usia tidak produktif, Kondisi dimana penduduk usia produktif akan lebih banyak pada suatu waktu mengindikasikan bahwa di waktu tertentu akan terdapat lebih besar kesempatan untuk meningkatkan perekonomian negara karena jumlah angkatan kerja lebih banyak. Kondisi bonus demografi ini didominasi oleh generasi milenial yang mana akan menjadi incaran tenaga produktif negara-negara maju yang kekurangan anak muda (usia kerja produktif) sehingga bisa menjadi peluang yang besar jika kita mampu merespon permintaan pasar tenaga kerja global. Berhasil tidaknya bonus demografi ini ditentukan oleh beberapa faktor yaitu pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan dan pertumbuhan penduduk. Penghitungan bonus demografi berkaitan erat dengan penghitungan rasio ketergantungan.

2.6.3 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Sarana Prasarana adalah infrastruktur atau fasilitas yang digunakan dalam pembangunan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Kebutuhan sarana dalam pembangunan dapat sangat bervariasi tergantung pada jenis proyek pembangunan, tujuan, dan konteks geografis. Disajikannya identifikasi kebutuhan Sarana dan Prasarana tentunya juga mempertimbangkan kondisi di Jawa Barat dan tentunya dengan isu global serta nasional yang memiliki pengaruh pada proyeksi ke depannya sehingga disampaikan bahwa proyeksi kebutuhan sarana prasarana memuat antara lain Kebutuhan Hunian, Air Bersih, Energi/Kelistrikan, Pengelolaan Persampahan, Infrastruktur Pendidikan, dan Infrastruktur Kesehatan. Hal ini juga memerlukan pemantauan dan penyesuaian berkelanjutan seiring berjalannya waktu untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Bandung Barat secara efektif.

Proyeksi kebutuhan sarana prasarana dalam perencanaan jangka panjang Kabupaten Bandung Barat merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik di Kabupaten Bandung Barat tentunya dengan melalui proses yang kompleks dan membutuhkan kolaborasi yang erat antar berbagai pemangku kepentingan. Sarana dan prasarana yang baik dapat berdampak positif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.

2.6.3.1 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

Proyeksi pertumbuhan penduduk Kabupaten Bandung Barat tentu berimbang pada meningkatnya kebutuhan tempat tinggal dan perluasan lahan. Proyeksi kebutuhan tempat tinggal menggunakan asumsi rata-rata setiap rumah ditempati 5 (lima) jiwa yakni ayah, ibu, dan 3 anak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam SNI 03-1733-2004 tentang cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan.

Tabel 2. 64 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045

Uraian	Proyeksi Tahun				
	2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	1,907.82	2,020.29	2,121.80	2,207.78	2,277.82
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (unit)	381,565	404,059	424,359	441,555	455,564

Sumber : Analisis Data, 2024

Kebutuhan akan tempat tinggal terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka diperkirakan pada tahun 2045, ketika jumlah penduduk mencapai 2.277.820 jiwa, kebutuhan rumah tinggal mencapai 455.564 unit. Perlu adanya respon akan peningkatan kebutuhan tempat tinggal masyarakat dengan pelaksanaan program yang memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan perumahan. Pemenuhan kebutuhan rumah juga merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah kekurangan perumahan (*backlog*) dan pertumbuhan kawasan kumuh.

Kebutuhan tempat tinggal juga harus diimbangi dengan peningkatan fasilitas dasar yang sehat dan produktif dari aspek kebutuhan air bersih, sanitasi, sistem drainase, jalan lingkungan, persampahan, dan ruang komunal yang nyaman.

2.6.3.2 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

Proyeksi kebutuhan air bersih/minum ini diperhitungkan berdasarkan kebutuhan air per kapita, pertumbuhan dan pengembangan penduduk, serta pengklasifikasian jenis kebutuhan. Air bersih secara luas dibutuhkan untuk kebutuhan sanitasi, pertanian, dan kegiatan industri. Proyeksi kebutuhan air bersih membantu memproyeksikan tren kebutuhan air yang meningkat selaras dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan daerah. Proyeksi kebutuhan air bersih memperhatikan standar yang ditetapkan dalam SNI 6728.1-2015 tentang Penyusunan Neraca Spasial Sumber Daya Alam.

Tabel 2. 65 Standar Kebutuhan Air Bersih

Air Bersih	Jumlah Jiwa Penduduk	Kebutuhan air Bersih (L/O/H)
Semi Urban	3.000 - 20.000	60 - 90
Kota Kecil	20.000-100.000	90 - 110
Kota Sedang	100.000 - 500.000	110 - 125
Kota Besar	500.000-1.000.000	125 - 150
Motropolitan	>1.000.000	150 - 200

Sumber: SNI: 6728.1-2015 tentang Penyusunan Neraca Spasial Sumber Daya Alam

Kebutuhan air bersih yang terus meningkat perlu direspon dengan peningkatan pelayanan air bersih, menjaga kualitas air, dan melindungi daya dukung sumber daya air. Ketersediaan sumber air baku tergantung oleh kapasitas daya dukung sumberdaya air. Perlindungan kawasan sstem hidrologis menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan daya dukung sumberdaya air di Kabupaten Bandung Barat. Pemanfaatan air juga perlu dikontrol dengan konsep keberlanjutan supaya tidak terjadi eksplorasi air secara berlebihan dan berujung pada kerusakan sistem hidrologis.

Tabel 2. 66 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 s/d 2045

No	KECAMATAN	TAHUN 2025		TAHUN 2030		TAHUN 2035		TAHUN 2040		TAHUN 2045	
		Jml Penduduk (Ribu jiwa)	Jumlah Pemenuhan air Bersih (M3/hari)	Jml Penduduk (Ribu jiwa)	Jumlah Pemenuhan air Bersih (M3/hari)	Jml Penduduk (Ribu jiwa)	Jumlah Pemenuhan air Bersih (M3/hari)	Jml Penduduk (Ribu jiwa)	Jumlah Pemenuhan air Bersih (M3/hari)	Jml Penduduk (Ribu jiwa)	Jumlah Pemenuhan air Bersih (M3/hari)
1	Batujajar	115.52	12,707	122.07	13,428	128.05	14,085	133.06	14,636	136.68	15,035
2	Cihampelas	146.15	16,076	157.81	17,359	168.26	18,509	177.44	19,518	185.14	20,366
3	Cikalang Wetan	135.06	14,857	142.33	15,656	148.75	16,362	153.91	16,930	158.42	17,426
4	Cililin	103.86	11,424	110.74	12,181	117.12	12,884	122.65	13,491	127.35	14,009
5	Cipatat	151.10	16,621	158.88	17,476	165.56	18,211	171.35	18,848	176.12	19,373
6	Cipendeuy	93.37	8,403	99.30	8,937	104.61	11,507	109.06	11,997	113.05	12,436
7	Cipongkor	107.72	11,850	113.66	12,503	118.94	13,084	123.20	13,552	127.04	13,974
8	Cisarua	84.21	7,578	89.32	8,038	93.52	8,416	97.36	8,763	100.06	11,006
9	Gununghalu	84.06	7,565	89.20	8,028	93.74	8,437	97.56	8,781	100.94	11,103
10	Lembang	207.97	22,876	220.61	24,268	231.56	25,471	241.10	26,520	248.05	27,285
11	Ngamprah	184.30	20,273	191.11	21,022	197.39	21,713	202.80	22,308	206.37	22,701
12	Padalarang	193.89	21,328	201.67	22,184	209.30	23,023	215.58	23,714	219.61	24,157
13	Parongpong	117.21	12,893	124.48	13,693	130.93	14,403	136.29	14,991	140.77	15,485
14	Rongga	65.67	5,910	71.73	6,455	77.17	6,946	81.98	7,378	86.30	7,767
15	Saguling	38.28	3,445	42.67	3,841	47.07	4,236	50.84	4,575	54.49	4,904
16	Sindangkerta	79.47	7,152	84.73	7,625	89.83	8,084	93.62	8,425	97.43	8,769
KABUPATEN BANDUNG BARAT		1,907.82	200,959	2,020.29	212,693	2,121.80	225,371	2,207.78	234,428	2,277.82	245,795

Sumber: Analisis Data, 2024

2.6.3.3 Proyeksi Kebutuhan Energi/Listrik

Energi listrik mendukung berlangsungnya berbagai kegiatan baik untuk keperluan domestik, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, maupun industri. Proyeksi kebutuhan energi listrik membantu dalam memperkirakan pasokan energi listrik yang diperlukan hasil dari dampak pertumbuhan penduduk. Proyeksi kebutuhan energi listrik mengacu pada standar Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur kelistrikan, perlu dilakukan perhitungan dan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi/kelistrikan. Hal ini penting untuk memastikan ketersediaan energi listrik yang memadai bagi masyarakat.

Perhitungan proyeksi kebutuhan energi/kelistrikan perlu memperhatikan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, jumlah rumah tangga, dan tingkat konsumsi energi listrik per kapita. Peningkatan kebutuhan listrik menandakan semakin besarnya sumber daya yang dibutuhkan sebagai pembangkit energi listrik di Kabupaten Bandung Barat. Diharapkan di masa depan, kebutuhan Listrik dipasok oleh sumber energi bersih dan ramah lingkungan. Konsumsi energi Listrik daerah juga perlu dikontrol dengan inovasi pembangunan yang mengedepankan efisiensi penggunaan energi untuk menghemat cadangan pasokan energi daerah.

Tabel 2. 67 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 s/d 2045

No	KECAMATAN	TAHUN 2025		TAHUN 2030		TAHUN 2035		TAHUN 2040		TAHUN 2045	
		Jml Penduduk (Ribu jiwa)	MWh								
1	Batujajar	115.52	161,725.2	122.07	170,898.0	128.05	179,268.6	133.06	186,282.6	136.68	191,353.4
2	Cihampelas	146.15	204,607.2	157.81	220,928.4	168.26	235,565.4	177.44	248,409.0	185.14	259,197.4
3	Cikalong Wetan	135.06	189,084.0	142.33	199,257.8	148.75	208,243.0	153.91	215,474.0	158.42	221,790.8
4	Cililin	103.86	145,397.0	110.74	155,031.8	117.12	163,972.2	122.65	171,708.6	127.35	178,291.4
5	Cipatat	151.10	211,544.2	158.88	222,427.8	165.56	231,782.6	171.35	239,885.8	176.12	246,570.8
6	Cipendey	93.37	130,719.4	99.30	139,014.4	104.61	146,458.2	109.06	152,684.0	113.05	158,271.4
7	Cipongkor	107.72	150,813.6	113.66	159,128.2	118.94	166,518.8	123.20	172,480.0	127.04	177,850.4
8	Cisarua	84.21	117,887.0	89.32	125,042.4	93.52	130,922.4	97.36	136,306.8	100.06	140,081.2
9	Gununghalu	84.06	117,678.4	89.20	124,877.2	93.74	131,241.6	97.56	136,589.6	100.94	141,309.0
10	Lembang	207.97	291,152.4	220.61	308,859.6	231.56	324,182.6	241.10	337,533.0	248.05	347,263.0
11	Ngamprah	184.30	258,025.6	191.11	267,554.0	197.39	276,348.8	202.80	283,921.4	206.37	288,923.6
12	Padalarang	193.89	271,441.8	201.67	282,336.6	209.30	293,015.8	215.58	301,814.8	219.61	307,448.4

No	KECAMATAN	TAHUN 2025		TAHUN 2030		TAHUN 2035		TAHUN 2040		TAHUN 2045	
		Jml Penduduk (Ribu jiwa)	MWh	Jml Penduduk (Ribu jiwa)	MWh	Jml Penduduk (Ribu jiwa)	MWh	Jml Penduduk (Ribu jiwa)	MWh	Jml Penduduk (Ribu jiwa)	MWh
13	Parongpong	117.21	164,088.4	124.48	174,276.2	130.93	183,306.2	136.29	190,799.0	140.77	197,083.6
14	Rongga	65.67	91,931.0	71.73	100,417.8	77.17	108,042.2	81.98	114,767.8	86.30	120,821.4
15	Saguling	38.28	53,596.2	42.67	59,742.2	47.07	65,891.0	50.84	71,169.0	54.49	76,288.8
16	Sindangkerta	79.47	111,259.4	84.73	118,616.4	89.83	125,755.0	93.62	131,061.0	97.43	136,399.2
KABUPATEN BANDUNG BARAT		1,907.82	2,670,950.8	2,020.29	2,828,408.8	2,121.80	2,970,514	2,207.78	3,090,886.4	2,277.82	3,188,943.8

Sumber: Analisis Data, 2024

2.6.3.4 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Dalam menghadapi proyeksi pertumbuhan penduduk, perencanaan infrastruktur persampahan menjadi sangat penting. Timbulan sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat memberikan gambaran buruk terhadap wajah suatu kawasan, selain itu juga dapat menurunkan kualitas lingkungan, mengurangi kenyamanan, dan dapat menjadi media penularan penyakit. Permasalahan sampah seharusnya dapat dikelola dengan baik dengan melibatkan lintas sektor, karena permasalahan sampah melibatkannya dari hulu sampai hilir, dari masyarakat hingga ke pemerintah yang bertanggung jawab. Proyeksi terkait timbulan sampah di Kabupaten Bandung Barat perlu dilakukan sebagai basis data perencanaan jangka panjang tentang pengelolaan persampahan yang tepat.

Tabel 2. 68 Standar Acuan Timbulan Sampah

Klasifikasi Kota	Jumlah Penduduk	Volume (L/Org/hari)	Berat (KG/Org/hari)
Kota Kecil	<100.000	2,75 - 3,00	0,60 – 0,75
Kota Sedang	100.000-500.000		
Kota Besar	500.000-1.000.000	3,00 - 3,60	0,65 – 0,80
Kota Metropolitan	>1.000.000		

Sumber: SNI 8632-2018 tentang Tata Cara Perencanaan Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan

Proyeksi timbulan sampah di Kabupaten Bandung Barat menggunakan standar acuan SNI 8632-2018 tentang Tata Cara Perencanaan Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan. Proyeksi timbulan sampah menggunakan dasar hasil proyeksi jumlah penduduk dengan asumsi bahwa Kabupaten Bandung Barat merupakan Kota Metropolitan karena pada data dasar tahun 2020 jumlah penduduk mencapai >1.000.000 atau 1.782.191 jiwa sehingga setiap penduduk menghasilkan sampah kurang lebih 3-3,6 L/hari.

Tabel 2. 69 Proyeksi Volume Timbulan Sampah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045

No	KECAMATAN	Tahun 2025		Tahun 2030		Tahun 2035		Tahun 2040		Tahun 2045	
		Volume (Liter/hari)	Berat (Ton/hari)								
1	Batuujajar	346.554	86,64	366.210	91,55	384.147	96,04	399.177	99,79	410.043	102,51
2	Cihampelas	438.444	109,61	473.418	118,35	504.783	126,20	532.305	133,08	555.423	138,86
3	Cikalang Wetan	405.180	101,30	426.981	106,75	446.235	111,56	461.730	115,43	475.266	118,82
4	Cililin	311.565	77,89	332.211	83,05	351.369	87,84	367.947	91,99	382.053	95,51
5	Cipatat	453.309	113,33	476.631	119,16	496.677	124,17	514.041	128,51	528.366	132,09
6	Cipendeuy	256.770	56,02	273.064	59,58	313.839	78,46	327.180	81,80	339.153	84,79
7	Cipongkor	323.172	80,79	340.989	85,25	356.826	89,21	369.600	92,40	381.108	95,28
8	Cisarua	231.564	50,52	245.619	53,59	257.169	56,11	267.746	58,42	300.174	75,04
9	Gununghalu	231.154	50,43	245.295	53,52	257.796	56,25	268.301	58,54	302.805	75,70
10	Lembang	623.898	155,97	661.842	165,46	694.677	173,67	723.285	180,82	744.135	186,03
11	Ngamprah	552.912	138,23	573.330	143,33	592.176	148,04	608.403	152,10	619.122	154,78
12	Padalarang	581.661	145,42	605.007	151,25	627.891	156,97	646.746	161,69	658.818	164,70
13	Parongpong	351.618	87,90	373.449	93,36	392.799	98,20	408.855	102,21	422.322	105,58
14	Rongga	180.579	39,40	197.249	43,04	212.226	46,30	225.437	49,19	237.328	51,78
15	Saguling	105.278	22,97	117.351	25,60	129.429	28,24	139.796	30,50	149.853	32,70
16	Sindangkerta	218.545	47,68	232.997	50,84	247.019	53,90	257.441	56,17	267.927	58,46
Kabupaten Bandung Barat		5.612.203	1.364,11	5.941.642	1.443,68	6.265.057	1.531,15	6.517.990	1.592,63	6.773.896	1.672,63

Sumber: Analisis Data, 2024

Hasil proyeksi penduduk beserta timbulan sampah yang mungkin dihasilkan pada tahun 2025 hingga 2045, diketahui bahwa Kecamatan Lembang merupakan kecamatan dengan produksi sampah yang paling banyak. Terlepas dari jumlah penduduk yang paling banyak di Kab. Bandung Barat, Kecamatan lembang juga merupakan kawasan kunjungan pariwisata. Proyeksi timbulan sampah pada tabel di atas merupakan hasil sampah domestik, sehingga jika ditambahkan timbulan sampah hasil dari pariwisata akan lebih banyak lagi timbulan sampah yang dihasilkan. Potensi timbulan sampah domestik Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2025 mencapai 1,364,11 Ton/hari sedangkan pada tahun 2045 mencapai 1.672,63 Ton/hari. Jika melihat kapasitas TPAS Regional Sarimukti saat ini, hanya dapat menampung 500-628 Ton/hari sampah terolah dari seluruh wilayah Bandung Raya, tidak hanya melayani Kab. Bandung Barat saja. Sehingga, kapasitas TPA kedepannya sudah tidak dapat lagi menampung timbulan sampah yang dihasilkan.

Tabel 2. 70 Standar Kebutuhan Prasarana Persampahan

Lingkup Prasarana	Prasarana			Keterangan	
	Sarana Pelengkap	Status	Dimensi		
Rumah (5 jiwa)	Tong sampah	Pribadi			
RW (2500 jiwa)	Gerobak sampah	TPS	2 m ³	Jarak bebas TPS dengan lingkungan hunian minimal 30m	Gerobak mengangkut 3x seminggu
	Bak sampah kecil		6 m ³		
Kelurahan (30.000 jiwa)	Gerobak sampah	TPS	2 m ³		
	Bak sampah besar		12 m ³		
Kecamatan (120.000 jiwa)	Mobil sampah	TPS/ TPA Lokal	-		
	Bak sampah besar		25 m ³		
Kota (>480.000 jiwa)	Bak sampah besar	TPA			
	Tempat daur ulang sampah				

Sumber: SNI 19-2454-2002 tentang Tata cara teknik operasional pengolahan sampah perkotaan

Standar kebutuhan Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPAS) per-jumlah penduduk sesuai dengan SNI 19-2454-2002 adalah 1 (satu) unit TPA untuk lebih dari 480.000 penduduk. Namun, terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi jika akan membuka TPA baru, dari daya tampung yang memerlukan lahan cukup luas, sampai dengan jarak lokasi TPA dengan permukiman yang tidak boleh terlalu dekat.

Sehingga, skenario yang lebih memungkinkan untuk dilakukan yakni memaksimalkan adanya TPS di setiap kecamatan yang melakukan pemilahan, sehingga meminimalisir penimbunan sampah ke TPA. Jika dilihat dari proyeksi penduduk per kecamatan, rata-rata penduduk per Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat sebesar 128.309 jiwa, sehingga cukup menyediakan satu TPS setiap kecamatan, namun harus dilengkapi dengan pemilahan di setiap TPS yang tersedia.

2.6.4 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Dalam upaya membentuk sumber daya manusia yang berkualitas salah satunya adalah dengan meningkatkan derajat kesehatan hidup masyarakat dengan menjamin hak yang sama untuk semua penduduk dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan. Untuk memenuhi akses pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat yang diproyeksi bertambah setiap tahunnya, diperlukan rencana proyeksi kebutuhan infrastruktur kesehatan.

Tabel 2. 71 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045

No	Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
1	Tempat Tidur RS (unit)	1.908	2.020	2.122	2.208	2.278
2	Puskesmas/Pustu (unit)	64	67	71	74	76
3	Posyandu (unit)	1.526	1.616	1.697	1.766	1.822
4	BKIA/Klinik Bersalin (unit)	64	67	71	74	76
5	Apotik/Rumah Obat (unit)	64	67	71	74	76
6	Tempat Praktek Dokter	382	404	424	442	456
7	Dokter (orang)	1.908	2.020	2.122	2.208	2.278
8	Perawat (orang)	4.579	4.849	5.092	5.299	5.467

Sumber: Analisis Data, 2024

a. Rumah Sakit

Rasio antara jumlah daya tampung rumah sakit dengan jumlah penduduk sebesar 1:1000 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Kondisi saat ini Kabupaten Bandung Barat memiliki Rumah Sakit Kelas D Pratama sebanyak 5 unit rumah sakit yaitu RSUD Lembang, RSUD Cililin, RSUD Cikalongwetan, RS. Cahaya Kawaluyaan dan RS. Penambahan fasilitas

kesehatan sangat diperlukan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2025 jumlah tempat tidur rumah sakit yang dibutuhkan mencapai 1.908 unit. Kebutuhan tempat tidur rumah sakit diproyeksikan terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Hingga pada tahun 2.045 dibutuhkan sekitar 2.278 unit. Penambahan fasilitas ini sangat penting untuk memastikan kualitas layanan rumah sakit terutama untuk layanan rawat inap.

b. Puskesmas

Kondisi saat ini 32 puskesmas masih sangat ideal untuk melayani penduduk Kab. Bandung Barat. Namun perhitungan kebutuhan Puskesmas perlu memperhatikan pertumbuhan dan sebaran penduduk berdasarkan kecamatan. Jika merujuk pada proyeksi pertumbuhan penduduk, dibutuhkan sekitar 64 puskesmas/pustu pada tahun 2025. Jumlah puskesmas/pustu diproyeksikan terus mengalami peningkatan dan dibutuhkan sekitar 76 puskesmas/pustu pada akhir periode. Hasil proyeksi ini mempertimbangkan hasil proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat dan standar rasio puskesmas/pustu yakni 1:30.000 jumlah penduduk serta setiap kecamatan minimal harus memiliki satu puskesmas.

c. Posyandu

Proyeksi mengenai kebutuhan posyandu dilakukan dengan mempertimbangkan hasil proyeksi jumlah penduduk dan SNI 03-1733-2004 Rasio Posyandu 1:1.250 penduduk. Jumlah kebutuhan posyandu diproyeksikan terus meningkat selama kurun waktu 2025-2045. Pada tahun 2025 jumlah posyandu yang dibutuhkan mencapai 1.526 unit. Hingga pada tahun 2045, kebutuhan posyandu diprediksi mencapai 1.822 unit

d. BKIA/Klinik Bersalin

Proyeksi BKIA (Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak)/ klinik bersalin didasarkan pada hasil proyeksi jumlah penduduk dan SNI 03-1733-2004 Rasio BKIA/Klinik Bersalin 1:30.000 penduduk. Dalam kurun waktu 2025-2045 kebutuhan klinik bersalin terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2025 jumlah kebutuhan

klinik bersalin mencapai 64 unit dan terus meningkat hingga pada tahun 2045 mencapai 76 unit.

e. Apotik/Rumah Obat

Proyeksi jumlah apotik/rumah obat dilakukan dengan merujuk data hasil proyeksi jumlah penduduk dan SNI 03-1733-2004 Rasio Apotik/Rumah Obat 1:30.000 penduduk. Pada tahun 2025, jumlah apotik/rumah obat yang dibutuhkan mencapai 64 unit. Kebutuhan apotik/rumah obat diproyeksi terus meningkat mencapai 74 unit pada tahun 2045.

f. Tempat Praktek Dokter

Tempat praktek dokter diproyeksi dengan mempertimbangkan proyeksi jumlah penduduk dan SNI 03-1733-2004 Rasio Tempat Praktek Dokter 1:5.000 penduduk. Pada tahun 2025, kebutuhan jumlah tempat praktek dokter mencapai 382 unit dan diproyeksi terus meningkat mencapai 456 unit pada tahun 2045.

g. Dokter

Kebutuhan jumlah dokter diproyeksi dengan mempertimbangkan hasil proyeksi jumlah penduduk dan standar rasio 1 dokter untuk 1.000 penduduk. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah dokter yang dibutuhkan pada tahun 2025 mencapai 1.908 orang dan diproyeksi terus meningkat hingga tahun 2045 mencapai 2.278 orang.

h. Perawat

Proyeksi mengenai kebutuhan jumlah perawat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil proyeksi jumlah penduduk dan standar rasio jumlah perawat yakni 2,4 perawat untuk 1.000 penduduk. Kebutuhan jumlah perawat diproyeksi mencapai 4.579 orang pada tahun 2025 dan terus meningkat hingga tahun 2045 mencapai 5.467 orang.

2.6.5 Proyeksi Kebutuhan Guru dan Fasilitas Pendidikan

Proyeksi jumlah murid menurut jenjang pendidikan didasarkan pada hasil proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2025-2045 dengan asumsi Angka Partisipasi Kasar mencapai 100 persen.

Jumlah murid pada jenjang TK didasarkan pada proyeksi jumlah penduduk usia 4 hingga 6 tahun pada tahun berkenaan; jumlah murid pada jenjang SD didasarkan pada proyeksi jumlah penduduk pada usia 7 hingga 12 tahun; dan jumlah murid pada jenjang SMP didasarkan pada proyeksi jumlah penduduk usia 13 hingga 15 tahun.

Tabel 2. 72 Proyeksi Jumlah Murid Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	Proyeksi 2025			Proyeksi 2030			Proyeksi 2035			Proyeksi 2040			Proyeksi 2045		
		TK (Usia 4-6 tahun)	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	TK (Usia 4- 6 tahun)	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	TK (Usia 4- 6 tahun)	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	TK (Usia 4-6 tahun)	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	TK (Usia 4-6 tahun)	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat
1	Batujajar	5.560	10.987	5.503	5.677	11.558	5.333	5.566	11.827	5.541	5.516	12.507	5.442	5.386	12.898	5.363
2	Cihampelas	7.778	14.642	6.916	8.096	15.740	6.736	8.082	16.363	7.041	8.112	17.546	6.951	8.011	18.301	6.882
3	Cikalang Wetan	6.636	12.938	6.351	6.811	13.719	6.046	6.713	14.161	6.163	6.661	15.081	5.944	6.512	15.661	5.740
4	Cililin	5.126	9.802	5.191	5.175	10.226	5.415	5.012	10.356	6.013	4.917	10.880	6.269	4.749	11.139	6.543
5	Cipatat	7.493	14.217	7.230	7.571	14.693	6.919	7.371	14.787	7.106	7.252	15.445	6.893	7.038	15.751	6.719
6	Cipendeuy	4.362	8.576	4.306	4.379	9.084	4.196	4.233	9.382	4.371	4.133	9.987	4.309	3.982	10.371	4.255
7	Cipongkor	6.193	10.972	5.340	6.439	11.392	5.457	6.409	11.419	5.981	6.415	11.938	6.153	6.309	12.149	6.360
8	Cisarua	3.832	7.576	3.774	3.751	7.918	3.815	3.551	7.997	4.069	3.406	8.430	4.149	3.236	8.603	4.190
9	Gununghalu	4.051	7.375	3.665	4.355	7.905	3.568	4.451	8.170	3.732	4.543	8.748	3.681	4.545	9.103	3.651
10	Lembang	9.596	18.895	9.458	9.874	19.956	9.162	9.767	20.304	9.420	9.730	21.540	9.266	9.561	22.110	9.055
11	Ngamprah	7.785	15.739	8.544	7.471	15.729	8.002	6.942	15.434	8.017	6.575	15.734	7.597	6.168	15.724	7.223
12	Padalarang	8.407	16.940	9.784	7.821	16.667	9.980	7.007	16.089	10.841	6.426	16.178	11.106	5.820	15.940	11.413
13	Parongpong	5.409	10.529	5.299	5.460	10.982	5.269	5.300	11.118	5.623	5.223	11.668	5.661	5.072	11.938	5.726
14	Rongga	3.474	5.851	3.019	3.836	6.210	3.205	3.935	6.235	3.647	4.077	6.615	3.859	4.073	6.743	4.107
15	Saguling	1.853	3.541	1.817	1.909	3.867	1.976	1.879	4.074	2.264	1.865	4.414	2.428	1.818	4.642	2.591
16	Sindangkerta	4.126	7.592	3.822	4.412	8.202	3.977	4.480	8.533	4.410	4.553	9.179	4.588	4.533	9.584	4.777
Kabupaten Bandung Barat		91.681	176.172	90.019	93.037	183.848	89.056	90.698	186.249	94.239	89.404	195.890	94.296	86.813	200.657	94.595

Sumber: Analisis Data, 2024

Proyeksi jumlah murid pada level SD dan SMP cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu 2025 hingga 2045. Adapun jumlah murid TK diproyeksi cenderung mengalami penurunan. Proyeksi pada tahun 2025 menunjukkan lonjakan jumlah murid TK yang cukup besar dari kondisi eksisting 20.843 orang pada tahun 2020 menjadi 91.681 orang. Hal ini disebabkan oleh asumsi Angka Partisipasi Kasar yang digunakan adalah 100 persen. Lonjakan jumlah murid TK pada tahun 2025 ini dapat mengindikasikan belum optimalnya partisipasi sekolah pada jenjang TK. Berdasarkan tren proyeksi, terdapat peningkatan pada tahun 2030 sebesar 1,48 persen dibandingkan dengan hasil proyeksi pada tahun 2025. Adapun pada tahun 2035, 2040, dan 2045 terjadi tren penurunan. Jika dilihat berdasarkan sebaran wilayah, jumlah murid paling banyak terdapat di Kecamatan Lembang dan Padalarang.

Tabel 2. 73 Proyeksi Jumlah Kebutuhan Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	Proyeksi 2025			Proyeksi 2030			Proyeksi 2035			Proyeksi 2040			Proyeksi 2045		
		TK (Usia 4-6 tahun)	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat												
1	Batujajar	371	392	172	378	413	167	371	422	173	368	447	170	359	461	168
2	Cihampelas	519	523	216	540	562	211	539	584	220	541	627	217	534	654	215
3	Cikalang Wetan	442	462	198	454	490	189	448	506	193	444	539	186	434	559	179
4	Cililin	342	350	162	345	365	169	334	370	188	328	389	196	317	398	204
5	Cipatat	500	508	226	505	525	216	491	528	222	483	552	215	469	563	210
6	Cipendeuy	291	306	135	292	324	131	282	335	137	276	357	135	265	370	133
7	Cipongkor	413	392	167	429	407	171	427	408	187	428	426	192	421	434	199
8	Cisarua	255	271	118	250	283	119	237	286	127	227	301	130	216	307	131
9	Gununghalu	270	263	115	290	282	112	297	292	117	303	312	115	303	325	114
10	Lembang	640	675	296	658	713	286	651	725	294	649	769	290	637	790	283
11	Ngamprah	519	562	267	498	562	250	463	551	251	438	562	237	411	562	226
12	Padalarang	560	605	306	521	595	312	467	575	339	428	578	347	388	569	357
13	Parongpong	361	376	166	364	392	165	353	397	176	348	417	177	338	426	179
14	Rongga	232	209	94	256	222	100	262	223	114	272	236	121	272	241	128
15	Saguling	124	126	57	127	138	62	125	146	71	124	158	76	121	166	81
16	Sindangkerta	275	271	119	294	293	124	299	305	138	304	328	143	302	342	149
Kabupaten Bandung Barat		6.112	6.292	2.813	6.202	6.566	2.783	6.047	6.652	2.945	5.960	6.996	2.947	5.788	7.166	2.956

Sumber: Analisis Data, 2024

Hasil proyeksi jumlah murid selanjutnya digunakan sebagai basis data untuk memproyeksi jumlah kebutuhan guru berdasarkan jenjang pendidikan. Lebih dari itu, proyeksi kebutuhan guru juga didasarkan pada rasio guru murid dalam Permendikbud Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, 1:15 peserta didik untuk jenjang PAUD/TK; 1:28 peserta didik untuk jenjang SD/Madrasah Ibtidaiyah; dan 1:32 peserta didik SMP/ Madrasah Tsanawiyah. Kebutuhan guru paling banyak terdapat pada jenjang TK/PAUD dan SD. Kecamatan Lembang dan Padalarang memiliki kebutuhan guru paling banyak jika dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Meskipun demikian, sebaran kebutuhan guru masih perlu untuk ditampalkan dengan sebaran eksisting satuan pendidikan.

Tabel 2. 74 Proyeksi Jumlah Kebutuhan Gedung Sekolah di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045

Jenjang Pendidikan	Proyeksi 2025	Proyeksi 2030	Proyeksi 2035	Proyeksi 2040	Proyeksi 2045
TK (Usia 4-6 tahun)	1.020	1.035	1.009	993	965
SD/ Sederajat	1.049	1.096	1.110	1.165	1.193
SMP/ Sederajat	312	312	328	328	328

Sumber: Analisis Data, 2024

Proyeksi kebutuhan jumlah gedung sekolah dilakukan dengan merujuk pada proyeksi jumlah murid serta ketentuan yang dimuat dalam Permendikbud Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Beberapa ketentuan dan asumsi yang digunakan dalam proyeksi ini antara lain:

1. Setiap satu sekolah TK/PAUD dapat terdiri dari 1 (satu) sampai dengan 16 rombongan belajar. Asumsi yang digunakan adalah setiap satu sekolah TK diasumsikan terdiri dari 6 rombongan belajar.
2. Setiap satu sekolah SD/Madrasah Ibtidaiyah dapat terdiri dari 1 (satu) sampai dengan 24 rombongan belajar. Asumsi yang digunakan adalah setiap satu sekolah SD diasumsikan terdiri dari 6 rombongan belajar.

3. Setiap satu sekolah SMP/Madrasah Tsanawiyah dapat terdiri dari 3 (tiga) sampai dengan 33 rombongan belajar. Asumsi yang digunakan adalah setiap satu sekolah SMP diasumsikan terdiri dari 9 rombongan belajar.

Proyeksi kebutuhan jumlah gedung sekolah selaras dengan tren jumlah murid yakni terjadi tren peningkatan pada jenjang SD dan SMP serta tren menurun pada jenjang TK/PAUD. Namun demikian proyeksi jumlah kebutuhan gedung sekolah perlu dianalisis lebih lanjut dengan memperhatikan jarak serta kondisi gedung sekolah eksisting. Peningkatan kebutuhan jumlah gedung sekolah berdasarkan hasil proyeksi ini tidak selalu harus direspon dengan pembangunan gedung sekolah baru namun juga dapat direspon dengan menambah jumlah ruang kelas atau penyesuaian rombongan belajar.

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pertumbuhan dan pembangunan di setiap wilayah tidak terjadi secara bersamaan, tetapi setiap wilayah memiliki kecepatan dan intensitas masing-masing berdasarkan potensial yang ada. Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah dilatarbelakangi oleh berbagai faktor seperti pertambahan jumlah penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan kegiatan ekonomi, perkembangan atau perluasan jaringan komunikasi dan transportasi serta faktor lainnya. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non fisik, sebagai wadah kegiatan masyarakat di dalamnya.

Pusat pertumbuhan merupakan wilayah dengan pertumbuhan yang lebih pesat jika dibandingkan wilayah lain di sekitarnya dan menjadi pusat berbagai kegiatan ekonomi. Pusat pertumbuhan berfungsi sebagai pusat pembangunan yang mempengaruhi perkembangan wilayah di sekitarnya sehingga membantu pemerataan pembangunan. Pusat pertumbuhan memiliki hubungan fungsional dengan wilayah-wilayah di sekitarnya.

Tentunya banyak banget faktor yang mempengaruhi terbentuknya sebuah pusat pertumbuhan di suatu wilayah, di antaranya karena faktor geografis, ekonomi, sosial dan fasilitas penunjang berupa jalan raya, jaringan internet, komunikasi, bahan bakar, jaringan listrik, rumah sakit, keamanan, dan sarana kebersihan. Identifikasi pusat pertumbuhan wilayah menjadi informasi penting untuk mengetahui pesatnya pertumbuhan suatu wilayah serta pengaruhnya terhadap wilayah di sekitarnya. Lebih dari itu, manfaat pusat pertumbuhan di suatu wilayah dari segi budaya adalah terjadinya akulturasi budaya antara penduduk pendatang dan penduduk lokal serta antar penduduk pendatang sendiri. Adapun tujuan dari pengembangan pusat pertumbuhan wilayah adalah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah dan meningkatkan kualitas hidup penduduk di wilayah tersebut.

2.7.1 Kebijakan Pembangunan Kewilayah

Dinamika pembangunan di Kabupaten Bandung Barat yang berkembang cukup pesat sejak legalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2009 – 2029 yang telah diubah menjadi RTRW Kab. Bandung Barat tahun 2024-2044, diantaranya di bidang industri, permukiman, perdagangan-jasa dan kebutuhan infrastruktur wilayah. Di samping itu, pesatnya perkembangan pembangunan yang terjadi perlu diiringi dengan penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai dan mempertahankan kawasan lindung lainnya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Demikian halnya, perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan sektoral tingkat nasional maupun regional (Provinsi Jawa Barat) juga dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan yang ada di daerah. Kebijakan pembangunan kewilayah Kabupaten Bandung Barat mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung, RTRW Provinsi Jawa Barat dan RTRW Nasional. Tujuan penataan ruang Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024-2044 adalah mewujudkan daerah sebagai Kabupaten Agroindustri dan Wisata Ramah Lingkungan untuk mendukung perkembangan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya.

Tujuan ini selanjutnya dijabarkan melalui kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang dan pola ruang, rencana pengembangan kawasan strategis. Kebijakan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bandung Barat menurut RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044, meliputi:

Tabel 2. 75 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kab. Bandung Barat 2024-2044

Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
Penetapan sistem pusat permukiman sesuai fungsi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan dengan pengembangan pusat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung serta fungsi kegiatan dominannya	Meningkatkan peran daerah sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Bandung Raya sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional, dan regional
	Meningkatkan peran Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di kawasan perkotaan sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan
	Meningkatkan peran Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di kawasan perdesaan sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal yang menghubungkan desa sentra produksi dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) perkotaan
	Meningkatkan peran Pusat Pelayanan Kawasan sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, dengan memantapkan fungsi pusat pelayanan kawasan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di WP, melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung
	Meningkatkan peran Pusat Pelayanan Lingkungan sebagai kawasan perdesaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala desa
Mendorong terlaksananya peran WP dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk	Menetapkan 4 (empat) WP untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan optimalisasi fungsi wilayah
	Mengoptimalkan fungsi setiap WP agar terjadi sinergitas pembangunan
	Mengarahkan pengembangan wilayah sesuai potensi dan kendala di setiap WP
	Memantapkan fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan untuk mendukung pertumbuhan

Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
	<p>perekonomian di setiap WP, melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung perkembangan perekonomian daerah</p>
	<p>Meningkatkan ketersediaan jaringan prasarana wilayah untuk mendukung mobilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar di setiap WP</p>
Penataan dan pengembangan jaringan prasarana	<p>Mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan serta kualitas jaringan prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan antar WP</p> <p>Mengembangkan sistem angkutan umum massal</p> <p>Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan di setiap WP</p>
	<p>Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air berbasis daerah aliran sungai untuk menunjang kegiatan perkotaan, industri, dan pertanian</p> <p>Meningkatkan sistem pengelolaan dan pemrosesan sampah di kabupaten, sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk, dan perkembangan kegiatan perkotaan</p>
	<p>Meningkatkan pelayanan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk serta mengurangi mobilitas dan migrasi ke pusat kegiatan di Pusat Kegiatan Nasional (PKN)</p>
Perwujudan, pemeliharaan kelestarian dan pencegahan kerusakan kawasan lindung	<p>Mengendalikan alih fungsi kawasan hutan</p> <p>merehabilitasi kawasan lindung yang mengalami penurunan fungsi lindung</p> <p>Menyediakan pemenuhan RTH di kawasan perkotaan, paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas seluruh Kawasan perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat</p>
Perwujudan keterpaduan kawasan budi daya	<p>Mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya</p>

Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
	<p>Mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <p>Mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan</p> <p>Mengembangkan potensi kecamatan untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi</p> <p>Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya air yang bernilai ekonomi tinggi di waduk/danau untuk meningkatkan perekonomian</p>
Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya sesuai daya dukung dan daya tampung	<p>Membatasi pengembangan lahan terbangun di daerah bagian utara</p> <p>Mengendalikan air larian kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan untuk mencegah erosi</p> <p>Mengendalikan pembangunan pada lahan yang melampaui daya dukung dan daya tampung</p> <p>Mengendalikan kegiatan pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan</p>
Pengendalian perkembangan Kawasan perkotaan di wilayah utara untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan	<p>Mengendalikan pemanfaatan ruang di daerah bagian utara</p> <p>Mendorong pengembangan permukiman vertikal di kawasan padat penduduk</p> <p>Mengendalikan pertumbuhan permukiman skala besar di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah, Lembang, dan Batujajar</p>
Mengembangkan kawasan permukiman di wilayah selatan dengan tidak melebihi daya dukung dan daya tampung	<p>Mengembangkan kawasan permukiman yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendukungnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan penduduknya dengan tidak melebihi daya dukung dan daya tampung ruang yang ada</p> <p>Mempertahankan kawasan non terbangun di sekitar kawasan permukiman dan menjaga fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya</p> <p>Membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di Kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan</p>

Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
	potensi kerugian akibat bencana
Pengembangan pusat-pusat kegiatan agroindustri	Mengembangkan pusat kegiatan agroindustri yang berpusat di Kecamatan Lembang Mengembangkan pusat kegiatan agroindustri yang berpusat di Kecamatan Cililin.
Pengembangan kawasan wisata yang ramah lingkungan	Mengembangkan kawasan wisata yang terletak di jalur utara Mengembangkan kawasan wisata yang terletak di jalur selatan Mengembangkan Kawasan wisata yang terletak di jalur barat
Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara	Mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun Turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan
Pengembangan KSK sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi	Mengembangkan kegiatan ekonomi yang ada di dalam dan sekitar KSK Menata kawasan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi lokal dan masuknya investasi Mengembangkan kawasan tematik
Pengembangan KSK sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi	Menata kegiatan yang ada di dalam dan sekitar KSK Mengendalikan alih fungsi lahan Mengembangkan fungsi kawasan sebagai kawasan wisata
Pengembangan KSK sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	Mengembangkan kegiatan pertanian yang ada di dalam dan sekitar KSK Mengembangkan pusat agobisnis Mengendalikan alih fungsi lahan lindung dan pertanian

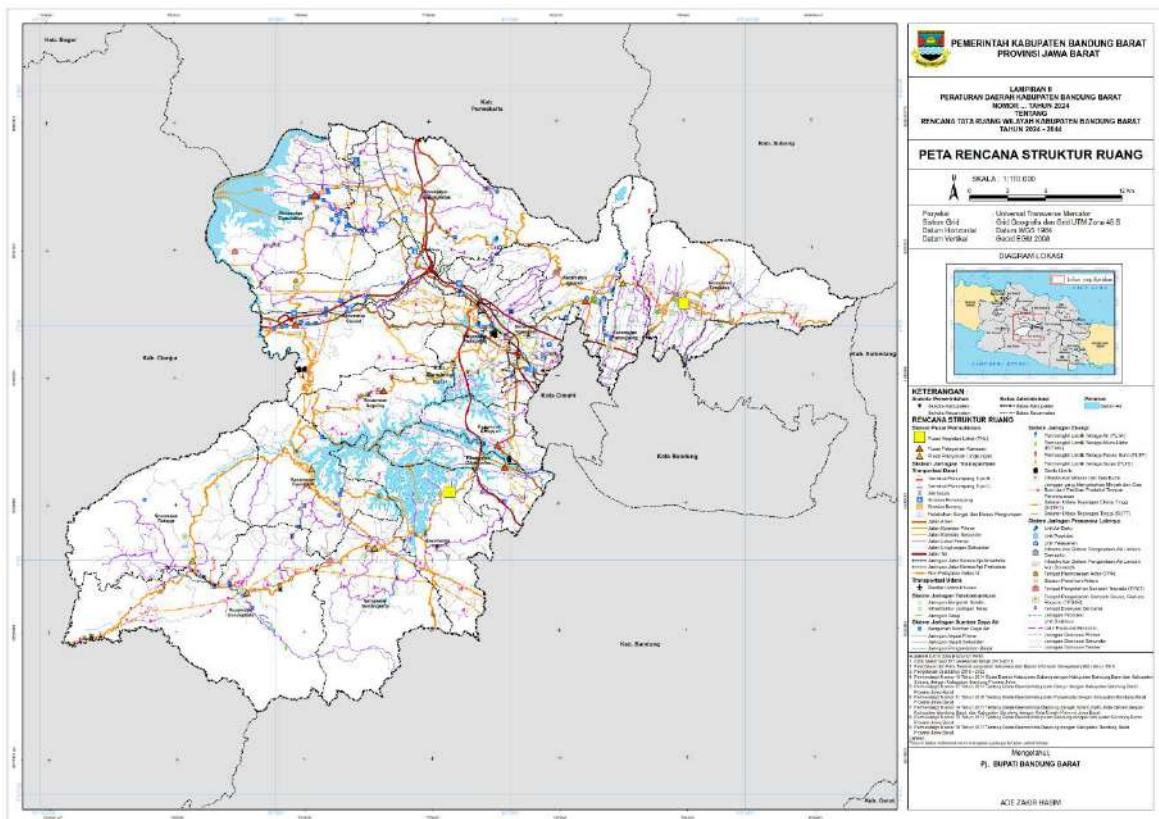
Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
	Mengembangkan fungsi kawasan sebagai kawasan wisata
Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan kawasan budi daya	Menetapkan ketentuan umum zonasi dan ketentuan khusus sebagai acuan pemberian KKPR untuk menjaga keadilan dan kepentingan umum
	Menetapkan penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku UKM
	Menerapkan penilaian perwujudan RTR daerah
	Menetapkan ketentuan pemberian insentif dan disinsentif serta perangkat pembangunan lainnya untuk perwujudan RTRW
	Menetapkan arahan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran RTRW, penegakan sanksi pada pelaksanaan pembangunan yang melanggar KKPR yang diberikan
	Menjalankan penyelesaian sengketa penataan ruang dan konflik pemanfaatan ruang yang berkeadilan

Sumber: RTRW KBB Tahun 2024-2044

2.7.2 Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang Kabupaten Bandung Barat dikembangkan untuk mengoptimalkan potensi masing-masing wilayah sesuai dengan peran dan fungsi wilayahnya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan antara wilayah satu terhadap wilayah lainnya. Sistem pemenuhan kebutuhan ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan menciptakan perkembangan ekonomi yang pesat. Rencana struktur ruang Kabupaten Bandung Barat merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten, yang tersusun atas pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain berdasarkan peran dan fungsinya serta saling terhubung satu sama lainnya oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten, meliputi sistem pusat permukiman, sistem prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air yang mengintegrasikan dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Gambar 2. 36 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Bandung Barat



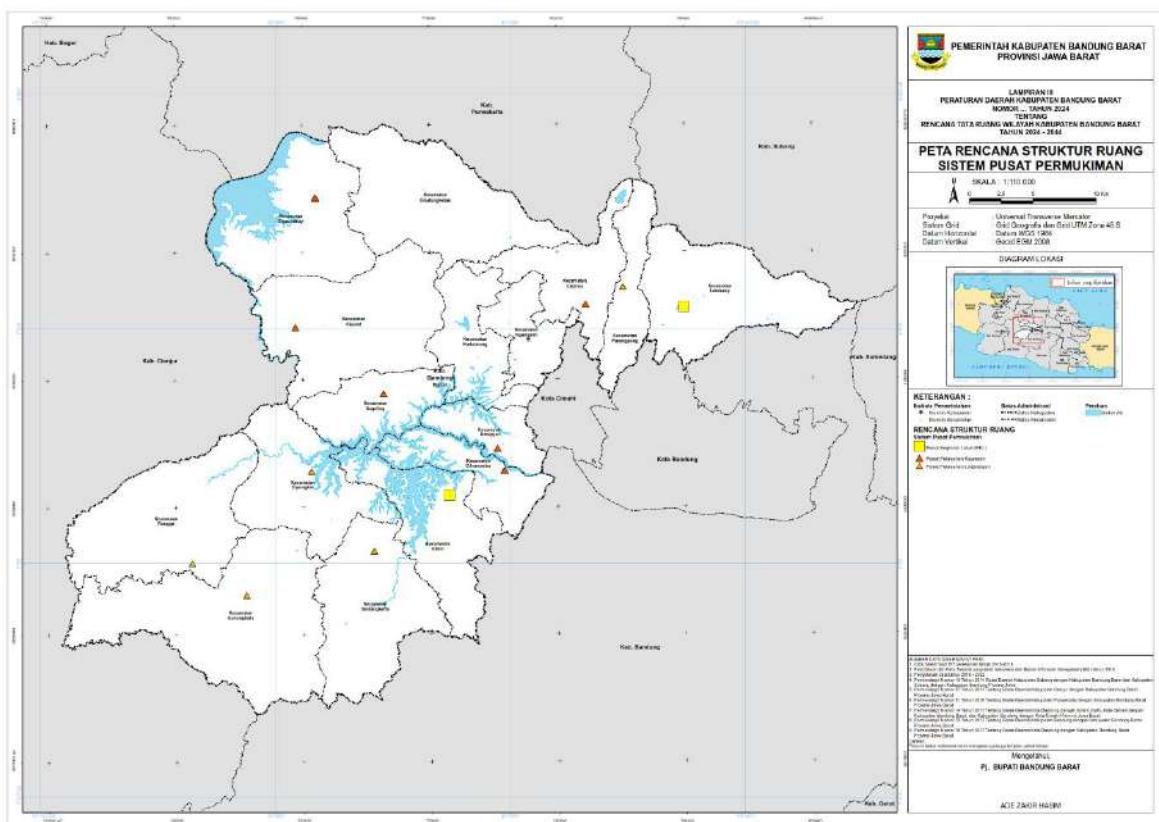
Sumber: RTRW KBB Tahun 2024-2044

Berdasarkan karakteristik serta fungsinya, rencana sistem pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Bandung Barat dapat dibedakan menjadi dua rencana pengembangan, yaitu rencana pengembangan sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.

2.7.2.1 Sistem Pusat Permukiman

Rencana sistem pusat permukiman di Kabupaten Bandung Barat terdiri atas Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan pusat lainnya. Rencana sistem perkotaan yang akan diterapkan di Kabupaten Bandung Barat dilakukan berdasarkan rencana hierarki kota. Titik simpul (kota-kota) berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan pusat-pusat pelayanan. Sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/ atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten.

Gambar 2. 37 Peta Sistem Pusat Permukiman di Kabupaten Bandung Barat



Sumber: RTRW KBB Tahun 2024-2044

1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional
 - Ditandai dengan adanya bandar udara skala pelayanan primer/ sekunder/ tersier, stasiun skala besar, dan terminal tipe A
 - Pusat Kegiatan Nasional Bandung Raya yang menjadikan Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satunya meliputi Kecamatan Padalarang, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Cikalongwetan, sebagian Kawasan Perkotaan Batujajar, sebagian Kawasan Perkotaan Cihampelas, sebagian Kawasan Perkotaan Cililin, sebagian Kawasan Perkotaan Cipatat, sebagian Kawasan Perkotaan Cipeundeuy, dan sebagian Kawasan Perkotaan Lembang.

2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

- Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan
- Fungsi pengembangan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, industri, perekonomian untuk skala regional, pendidikan, kesehatan, peribadatan
- PKL terletak di Kawasan Perkotaan Cililin yang berada di Kecamatan Cililin dan Kawasan Perkotaan Lembang yang berada di Kecamatan Lembang.

3) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

- Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, meliputi: Batujajar, Cihampelas, Cipatat, Cipeundeuy, Cisarua, dan Saguling.
- Fungsi pengembangan sebagai kawasan pusat pelayanan skala antar kecamatan yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, perekonomian untuk skala lokal
- Selain itu juga berfungsi sebagai DPP (Desa Pusat Pertumbuhan) yang melayani kawasan perdesaan atau perkotaan yang berpotensi meningkatkan kegiatan produksi dan sektor ekonomi lainnya di desa tersebut maupun desa sekitarnya,
- Didukung kelengkapan sarana minimum seperti: pasar, dan sub terminal

4) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

- Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala desa, meliputi: Cipongkar, Gununghalu, Parongpong, Rongga, Sindangkerta.
- Selain itu juga berfungsi sebagai DPP (Desa Pusat Pertumbuhan) yang melayani kawasan perdesaan atau perkotaan yang berpotensi meningkatkan kegiatan produksi dan sektor ekonomi lainnya di desa tersebut maupun desa sekitarnya, dengan didukung kelengkapan sarana minimum seperti: pasar, dan sub terminal.

Tabel 2. 76 Indikasi Program RTRW Perwujudan Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Bandung Barat

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
I	Perwujudan Rencana Struktur Ruang							
I.A	Perwujudan Sistem Pusat Permukiman							
I.A.a	Penyusunan, Penetapan RDTR dan Peraturan Zonasi	Kecamatan Ngamprah						
		Kecamatan Padalarang						
		Kecamatan Cipeundeuy						
		Kecamatan Cikalongwetan						
		Kecamatan Lembang						
		Kecamatan Cililin						
		Kecamatan Saguling						
		Kecamatan Batujajar						
		Kecamatan Cihampelas						
		Kecamatan Cisarua						
		Kecamatan Cipatat						
		Kecamatan Parongpong						
		Kecamatan Gununghalu						
		Kecamatan Sindangkerta						
		Kecamatan Rongga						
		Kecamatan Cipongkor						
I.A.b	Pemetaan dan penegasan batas wilayah dan batas desa	Kabupaten Bandung Barat						
I.A.c	Penyusunan dokumen insentif dan disinsentif	Kabupaten Bandung Barat						

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
I.A.d	Penyusunan dokumen aturan intensitas ruang	Kabupaten Bandung Barat						
I.A.e	Penyusunan dokumen pengendalian ruang	Kabupaten Bandung Barat						
I.A.f	Penyusunan dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR)	Kabupaten Bandung Barat						
I.A.1	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)							
I.A.1.2	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat perdagangan dan jasa skala regional	Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah						
		Kawasan Perkotaan Batujajar						
		Kawasan Perkotaan Cihampelas						
		Kawasan Perkotaan Cikalongwetan						
		Kawasan Perkotaan Cipatat						
I.A.1.3	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan industri	Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah						
		Kawasan Perkotaan Cihampelas						
		Kawasan Perkotaan Batujajar						
I.A.1.4	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional	Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah						
		Kawasan Perkotaan Batujajar						
		Kawasan Perkotaan Cihampelas						
		Kawasan Perkotaan Lembang						

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Kawasan Perkotaan Cipatat						
		Kawasan Perkotaan Cikalongwetan						
		Kawasan Perkotaan Cipeundeuy						
		Kawasan Perkotaan Cililin						
I.A.1.5	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat pemerintahan	Kawasan Perkotaan Padalarang- Ngamprah						
I.A.1.6	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara	Kawasan Perkotaan Padalarang- Ngamprah						
		Kawasan Perkotaan Batujajar						
		Kawasan Perkotaan Lembang						
I.A.1.7	Pengembangan, peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pertanian	Kawasan Perkotaan Padalarang- Ngamprah						
		Kawasan Perkotaan Lembang						
		Kawasan Perkotaan Cililin						
		Kawasan Perkotaan Cikalongwetan						
I.A.1.8	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pariwisata	Kawasan Perkotaan Lembang						
		Kawasan Perkotaan Padalarang- Ngamprah						
		Kawasan Perkotaan Cipatat						
		Kawasan Perkotaan Cihampelas						
		Kawasan Perkotaan Cililin						
		Kawasan Perkotaan Cikalongwetan						

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Kawasan Perkotaan Cipeundeuy						
I.A.1.9	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat pelayanan pendidikan tinggi berbasis riset dan pendidikan tinggi	Kawasan Perkotaan Cikalongwetan						
I.A.1.10	pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kesehatan skala regional, dan Rumah Sakit Tipe B	Kawasan Perkotaan Cikalongwetan						
I.A.1.11	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pertemuan, pameran, sosial, kebudayaan, dan kesenian	Kawasan Perkotaan Padalarang- Ngamprah						
		Kecamatan Cikalongwetan						
I.A.1.12	Penyusunan RTBL dan <i>Detailed Engineering Design</i> (DED) Kawasan Sekitar Pusat Pemerintahan	Kawasan Perkotaan Padalarang- Ngamprah						
I.A.1.13	Penyusunan RTBL dan <i>Detailed Engineering Design</i> (DED) Kawasan Sekitar Stasiun Kereta Api Padalarang	Kawasan Perkotaan Padalarang- Ngamprah						
I.A.1.14	Pengembangan Hunian (penyediaan lahan, pembangunan rusun, hunian	Kawasan Perkotaan Padalarang- Ngamprah						
		Kawasan Perkotaan Batujajar						

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
	vertikal dan penyediaan prasarana sarana utilitas)	Kawasan Perkotaan Cihampelas						
		Kawasan Perkotaan Cipeundeuy						
		Kawasan Perkotaan Cikalongwetan						
I.A.1.15	Pembangunan Kawasan Olahraga dan Kepemudaan Terpadu	Kawasan Perkotaan Cipeundeuy						
		Kawasan Perkotaan Cikalongwetan						
I.A.1.16	Peningkatan pelayanan pengelolaan sampah dan penyediaan TPST/ TPS3R/ SPA	Kawasan Perkotaan Padalarang- Ngamprah						
		Kawasan Perkotaan Lembang						
		Kawasan Perkotaan Cililin						
		Kawasan Perkotaan Cipatat						
		Kawasan Perkotaan Cikalongwetan						
		Kawasan Perkotaan Cipeundeuy						
I.A.1.17	Peningkatan pelayanan pengelolaan sampah dan penyediaan TPA	Kawasan Perkotaan Cipatat						
		Kawasan Perkotaan Cipeundeuy						
I.A.1.18	Pengembangan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun	1. Kawasan Perkotaan Padalarang- Ngamprah, 2. Kawasan Perkotaan Cipatat, 3. Kawasan Perkotaan Cikalongwetan, 4. Kawasan Perkotaan Cipeundeuy						

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
I.A.1.19	Peningkatan Cakupan Sistem Pelayanan Air Limbah	1. Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah 2. Kawasan Perkotaan Lembang 3. Kawasan Perkotaan Cililin 4. Kawasan Perkotaan Cihampelas 5. Kawasan Perkotaan Batujajar 6. Kawasan Perkotaan Cikalongwetan 7. Kawasan Perkotaan Cipeundeuy						
I.A.1.20	Peningkatan Cakupan Sistem Pelayanan Air Bersih	1. Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah 2. Kawasan Perkotaan Lembang 3. Kawasan Perkotaan Cililin 4. Kawasan Perkotaan Cihampelas 5. Kawasan Perkotaan Batujajar 6. Kawasan Perkotaan Cikalongwetan 7. Kawasan Perkotaan Cipeundeuy						

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
I.A.1.21	Penyediaan RTH, Taman, Alun-alun, Hutan Kota	1. Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah 2. Kawasan Perkotaan Lembang 3. Kawasan Perkotaan Cililin 4. Kawasan Perkotaan Cihampelas 5. Kawasan Perkotaan Batujajar 6. Kawasan Perkotaan Cikalongwetan 7. Kawasan Perkotaan Cipeundeuy						
I.A.1.22	Pembangunan Mall Pelayanan Publik	1. Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah 2. Kawasan Perkotaan Cikalongwetan/ Kawasan Perkotaan Cipeundeuy						
I.A.2	Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)							
I.A.2.1	Peningkatan Cakupan Pelayanan sarana Prasarana Pendidikan : 1. Pembangunan Unit Sekolah Baru untuk jenjang	1. Kecamatan Cililin 2. Kecamatan Lembang						

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<p>pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, tinggi, dan vokasi</p> <p>2. Pembangunan Ruang kelas untuk jenjang pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, tinggi, dan vokasi</p>							
I.A.2.2	Pengembangan dan Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan							
I.A.2.3	<p>Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi:</p> <p>1. Terminal agribisnis</p> <p>2. Pasar</p> <p>3. Jasa keuangan</p> <p>4. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana sosial budaya</p> <p>5. Sarana Peribadatan</p> <p>6. Lapangan olahraga/ruang publik</p> <p>7. Tempat atraksi budaya</p> <p>8. Alun-alun</p>							

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I		II			
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
I.A.2.4	Peningkatan infrastruktur dasar permukiman: 1. Drainase 2. Jalan Lingkungan 3. Fasilitas TPST 4. SPAM Ibu Kota Kecamatan 5. SPALD komunal 6. RTH 7. Hidran Umum							
I.A.2.5	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi: 1. Peningkatan akses Jalan dari PKL ke kecamatan sekitarnya 2. Penyediaan Terminal Penumpang Tipe C dan sarana angkutan umum							
I.A.2.6	RTBL Alun-alun Lembang dan sekitarnya	Kecamatan Lembang						
I.A.2.7	Pengembangan Alun-alun Lembang	Kecamatan Lembang						
I.A.2.8	RTBL Alun-alun Cililin dan sekitarnya	Kecamatan Cililin						
I.A.2.9	Pengembangan Alun-alun Cililin	Kecamatan Cililin						
I.A.2.10	Peningkatan fasilitas agrobisnis	1. Kecamatan Cililin 2. Kecamatan Lembang						
I.A.2.11	Pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan serta							

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
	fasilitas penunjang Kawasan pemerintahan							
I.A.2.12	peningkatan sarana dan prasarana transportasi							
I.A.2.13	pengembangan angkutan umum massal berbasis rel dan Jalan							
I.A.2.14	penataan, pembebasan lahan dan pembangunan RTH							
I.A.3	Pusat Pelayanan Kawasan							
1.2.3.1	Peningkatan cakupan sarana prasarana pendidikan	1. Kecamatan Batujajar 2. Kecamatan Cihampelas 3. Kecamatan Cipatat 4. Kecamatan Cipeundeuy 5. Kecamatan Cisarua 6. Kecamatan Saguling						
1.2.3.2	Peningkatan cakupan sarana prasarana kesehatan							
1.2.3.3	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi							
1.2.3.4	peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana olahraga							
1.2.3.5	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana sosial dan budaya							
1.2.3.6	Peningkatan infrastruktur dasar permukiman							

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.2.3.7	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi							
1.2.3.8	Pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan serta fasilitas penunjang Kawasan Pemerintahan							
1.2.3.9	Pembebasan, pembangunan dan penataan Lahan RTH	1. Kecamatan Cihampelas 2. Kecamatan Saguling						
		1. Kecamatan Batujajar 2. Kecamatan Cipatat						
		1. Kecamatan Cisarua 2. Kecamatan Cipeundeuy						
1.2.3.10	Pengembangan Ruang Terbuka Non Hijau	1. Kecamatan Cihampelas 2. Kecamatan Saguling						
		1. Kecamatan Batujajar 2. Kecamatan Cipatat						
		1. Kecamatan Cisarua 2. Kecamatan Cipeundeuy						
1.2.3.11	Pengembangan pusat distribusi pertanian hortikultura, peternakan, dan perkebunan	1. Kecamatan Cisarua, 2. Kecamatan Cipatat, 3. Kecamatan Cipeundeuy						

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.2.3.12	Pembangunan dan penataan balai rehabilitasi sosial bina karya	Kecamatan Cisarua						
1.2.3.13	Pengembangan sentra wisata	Kecamatan Cisarua						
		1. Kecamatan Cihampelas						
		2. Kecamatan Cipatat						
1.2.3.14	Pengembangan Pariwisata dan Rekreasi	3. Kecamatan Saguling						
		1. Kecamatan Batujajar						
		2. Kecamatan Cipeundeuy						
		Kecamatan Cisarua						
1.2.3.15	peningkatan pelayanan pengelolaan sampah dan penyediaan TPS/TPST/TPS3R	Kecamatan Cipatat						
		Kecamatan Saguling						
		Kecamatan Cipeundeuy						
		1. Kecamatan Cisarua						
1.2.3.16	Penataan Kawasan sentra industri ekstraktif dan perikanan	2. Kecamatan Cihampelas						
		3. Kecamatan Batujajar						
		1. Kecamatan Saguling						
		2. Kecamatan Cipatat						
		3. Kecamatan Cipeundeuy						
		Kecamatan Cipatat						
1.2.3.17	Penataan Kawasan sentra industri	Kecamatan Cipeundeuy						
1.2.3.18	Pembangunan Gd. pemerintahan instansi vertikal	Kecamatan Cipatat						

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.2.3.19	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	Kecamatan Batujajar						
		Kecamatan Cihampelas						
		Kecamatan Cipatat						
		Kecamatan Cipeundeuy						
I.A.4	Pusat Pelayanan Lingkungan							
I.A.4.1	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	1. Kecamatan Sindangkerta 2. Kecamatan Cipongkor 3. Kecamatan Gununghalu 4. Kecamatan Rongga 5. Kecamatan Parongpong						
I.A.4.2	Peningkatan cakupan sarana prasarana pendidikan	1. Kecamatan Sindangkerta 2. Kecamatan Cipongkor 3. Kecamatan Gununghalu 4. Kecamatan Rongga 5. Kecamatan Parongpong						
I.A.4.3	Peningkatan cakupan sarana prasarana kesehatan							
I.A.4.4	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi							
I.A.4.5	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana sosial dan budaya							
I.A.4.6	Peningkatan infrastruktur dasar permukiman							
I.A.4.7	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi							

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
I.A.4.8	Pembebasan dan Penataan Lahan RTH	1. Kecamatan Rongga						
		2. Kecamatan Gununghalu						
		1. Kecamatan Cipongkor						
I.A.4.9	Penataan Kawasan Permukiman Perdesaan	2. Kecamatan Sindangkerta						
		Kecamatan Parongpong						
		1. Kecamatan Sindangkerta						
I.A.4.10	Pengembangan kegiatan industri pengolahan hasil perkebunan, pertanian, dan perikanan	2. Kecamatan Cipongkor						
		3. Kecamatan Gununghalu						
		4. Kecamatan Rongga						
I.A.4.11	Pengembangan sentra pertanian, pariwisata dan konservasi pertanian	5. Kecamatan Parongpong						
		1. Kecamatan Sindangkerta						
		2. Kecamatan Cipongkor						
I.A.4.12	Pengembangan sentra pertanian, pariwisata dan konservasi pertanian	3. Kecamatan Gununghalu						
		4. Kecamatan Rongga						
		5. Kecamatan Parongpong						

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
I.A.4.12	Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan	1. Kecamatan Cipongkor 2. Kecamatan Sindangkerta						
I.A.4.13	Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan	1. Kecamatan Sindangkerta 2. Kecamatan Gununghalu						
I.A.4.14	Pengembangan Pusat Pendidikan Terpadu	Kecamatan Rongga						
I.A.4.15	Pengembangan sentra wisata	Kecamatan Parongpong						
I.A.4.16	Penataan Kawasan Upper Cisokan	Kecamatan Rongga						
I.A.4.17	peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana olahraga	1. Kecamatan Sindangkerta 2. Kecamatan Cipongkor 3. Kecamatan Gununghalu 4. Kecamatan Rongga 5. Kecamatan Parongpong						
I.A.4.18	penyediaan prasarana dan sarana desa							
I.A.4.19	pengembangan sentra agribisnis							
I.A.4.20	Pengembangan dan penataan potensi wisata							

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044

2.7.2.2 Sistem Jaringan Prasarana

Sistem jaringan prasarana di Kabupaten Bandung Barat direncanakan meliputi Sistem Jaringan Transportasi, Sistem Jaringan Energi Sistem Jaringan Telekomunikasi, Sistem Jaringan Sumber Daya Air, dan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.

Tabel 2. 77 Indikasi Program RTRW Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Kabupaten Bandung Barat

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						
			Tahap						
			I	II	2024	2025	2026	2027	
I	Perwujudan Rencana Struktur Ruang								
I.B	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi								
I.B.a	Penyusunan Rencana Induk Transportasi	Kabupaten Bandung Barat							
I.B.b	Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan	Kabupaten Bandung Barat							
I.B.c	Penyusunan Rencana Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kabupaten Bandung Barat							
I.B.d	Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan	Kabupaten Bandung Barat							
I.B.e	Penyusunan Rencana Induk Angkutan Penyeberangan Sungai dan Danau	Kabupaten Bandung Barat							
I.B.f	Penyusunan dokumen leger Jalan	Kabupaten Bandung Barat							
I.B.1	Sistem Jaringan Jalan								
1.B.1.1	Program pembangunan, penggantian, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan berkala Jalan Arteri Primer	1. Bts. Kota Padalarang - Bts. Kota Bandung; 2. Cisomang – Bts. Kota Padalarang; 3. Citarum - Rajamandala - Bts. Kota Padalarang; 4. Eks Toll Rajamandala; 5. Jln. Raya Padalarang; 6. Jln. Raya Purwakarta (Padalarang); 7. Jln. Raya Rajamandala (Rajamandala); 8. Batujajar – Soreang; dan 9. Cimareme – Batujajar.							

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.B.1.2	Program pembangunan, penggantian, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan berkala Jalan Kolektor Primer-2	1. Bts. Kota Bandung – Lembang; 2. Cimahi - Cisarua – Lembang; 3. Jl. Grand Hotel; 4. Jl. Panorama; 5. Jl. Ry. Lembang; 6. Lembang - Bts. Subang; 7. Padalarang - Sp. Cisarua; 8. Rajamandala - Jbt. Citarum Lama; 9. Raya Lembang; 10. Sp. Orion – Cihaliwung; 11. Subang – Bts. Kab. Bandung; 12. Jl. Setiabudi.						
1.B.1.3	Program pembangunan, penggantian, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan berkala Jalan Kolektor Primer-3	1. Cihampelas – Gununghalu; 2. Cililin – Sindangkerta; 3. Cisarua- Lembang; 4. Lembang – Maribaya; 5. Rajamandala - Cipeundeuy – Cikalongweta; 6. Tanjungsari – Lembang; 7. Cibiru - Lembang						
1.B.1.4	Program pembangunan, penggantian, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan berkala Jalan Kolektor Primer-4	1. Baranangsiang – Saguling; 2. Batujajar (Jati) – Saguling; 3. Bunijaya - Rongga; 4. Cijenuk – Sarinagen;						

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
		5. Cileuleuy – Pasirmanggu; 6. Cipeundeuy- Pakuwon; 7. Cireundeu – Nagrak; 8. Ciririp - Bangsaya - Buninagara (Bts.Ciwidey); 9. Pasirmanggu – Cipamalayan; 10. Purabaya – Gantungan; 11. Purabaya - Jati (Batujajar); 12. Purabaya – Rancabali; 13. Rajamandala – Cipanas; 14. Rancapang gung – Cijenuk; 15. Rongga – Cipari; 16. Sarinagen – Baranangsiang 17. Ciburuy – Cikamuning.						
1.B.1.5	Program pembangunan, penggantian, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan berkala Jalan Kolektor Sekunder	1. Gedung Lima; 2. Lingkar Kotabaru – Cipatat; 3. Mekarsari – Cilame; 4. Samsat – Sumur Bor – Cijamil; 5. Kotabaru Parahyangan 6. Lingkar Batujajar Timur – Selacau 1. Cikalongwetan – Cipeundeuy 2. Mandalasari – Kanangasari (Cikalongweta)						

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.B.1.6	Program pembangunan, penggantian, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan berkala Jalan Lokal Primer	Seluruh Kecamatan						
1.B.1.7	Program pembangunan, penggantian, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan berkala Jalan Lingkungan	Seluruh Kecamatan						
1.B.1.8	Pengembangan Jalan eksisting (pelebaran/peningkatan kelas ruas Jalan)	1. Cihampelas – Gununghalu; 2. Gununghalu – Sukanagara; 3. Tanjungsari – Lembang;						
1.B.1.9	Pembangunan Simpang Susun Tidak Sebidang	1. Rajamandala – Cipeundeuy – Cikalongwetan; 2. Cimareme - Situ Ciburuy						
1.B.1.10	Peningkatan Jalur Vertikal Tengah Utara	Bandung – Lembang – Subang – Pamanukan						
1.B.1.11	Peningkatan Jalan strategis: 1) Jalan lingkar di wilayah perkotaan; 2) Jembatan di perbatasan antar kabupaten/kota; dan 3) Pengembangan ruas Jalan pendukung pariwisata dan sentra pertanian	Seluruh Kecamatan						
1.B.1.12	Pemeliharaan Jalan tol	1. Cikampek – Padalarang 2. Padalarang – Cileunyi						
1.B.1.13	Rencana Pembangunan Jalan tol baru	1. Ciranjang – Padalarang; 2. Lingkar Selatan Bandung.						

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1. Cipularang – Lembang; 2. Lembang - Cileunyi;						
1.B.1.14	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Kecamatan Padalarang						
1.B.1.15	Penataan Terminal Penumpang Tipe C	Kec. Padalarang						
		Kecamatan Cililin						
		Kec. Cisarua						
		Kec. Lembang						
		Kec. Parongpong						
		Kec. Sindangkerta						
1.B.1.16	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Kec. Cipeundeuy						
		Kec. Cipongkor						
		Kec. Gununghalu						
		Kec. Batujajar						
		Kecamatan Cikalangwetan						
		Kec. Cihampelas						
		Kec. Cipatat						
		Kec. Ngamprah						
		Kec. Rongga						
		Kec. Saguling						
1.B.1.17	Pengembangan Angkutan Massal (lembang -stasiun padalarang, Lembang – ledeng)	1. Kecamatan Padalarang 2. Kecamatan Lembang						
1.B.1.18	Pengembangan <i>Bus Rapid Transit</i> (BRT) (alun-alun kota bandung - padalarang. Lembang - Ledeng)	1. Kecamatan Padalarang 2. Kecamatan Lembang						
1.B.1.19	Pembangunan Simpang Susun Tidak Sebidang	1. Persimpangan Jalan Tagog 2. Persimpangan Jalan Cimareme						
1.B.1.20	Peningkatan dan pemeliharaan jembatan	Seluruh Kecamatan						
1.B.1.21	Pengembangan sistem angkutan umum penumpang di pedesaan	Kabupaten Bandung Barat						
1.B.1.22	Pengembangan sistem angkutan umum penumpang di perkotaan	Kabupaten Bandung Barat						

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.B.1.23	Pembangunan Shelter <i>Bus Rapid Transit</i> (BRT)	Kecamatan Padalarang 1. Kec. Ngamprah 2. Kecamatan Batujajar 3. Kecamatan Cihampelas 4. Kecamatan Saguling 5. Kecamatan Cipatat						
1.B.1.24	Pengembangan sistem angkutan barang	Kabupaten Bandung Barat						
1.B.1.25	Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan	Kabupaten Bandung Barat						
1.B.1.26	Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan Jalan	Seluruh Kecamatan						
1.B.1.27	Laboratorium Pengujian Jalan	Kecamatan Padalarang						
I.B.2	Sistem Jaringan Kereta Api							
I.B.2.1	Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	1. Jakarta – Padalarang 2. Kereta Cepat Jakarta – Bandung						
I.B.2.2	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	<i>Shortcut</i> Cipatat - Cilame						
I.B.2.3	Reaktivasi Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	Bogor – Yogyakarta; Cikudapateuh – Ciwidey						
I.B.2.4	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan	1. Leuwipanjang – Walini 2. Babakan Siliwangi – Lembang – Maribaya						
I.B.2.5	Peningkatan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan	Jakarta – Padalarang; Bogor – Yogyakarta						

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
I.B.2.6	Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Stasiun penumpang	1. Stasiun Cikadongdong di Kecamatan Cikalongwtn; 2. Stasiun Cilame di Kecamatan Padalarang; 3. Stasiun Cipatat di Kecamatan Cipatat; 4. Stasiun Gadobang kong di Kecamatan Ngamprah; 5. Stasiun Maswati di Kecamatan Cikalongwtn; 6. Stasiun Padalarang di Kecamatan Padalarang; 7. Stasiun Rajamandala di Kecamatan Cipatat; 8. Stasiun Rendeh di Kecamatan Cikalongwtn 9. Stasiun Sasaksaat di Kecamatan Cipatat; 10. Stasiun Tagog Apu di Kecamatan Padalarang; dan 11. Stasiun Walini di Kecamatan Cikalongwtn						
I.B.2.7	Pengembangan stasiun penumpang angkutan umum massal berbasis rel	Kabupaten Bandung Barat						
I.B.2.9	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung operasionalisasi dan	Kabupaten Bandung Barat						

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
	keselamatan perkeretaapian (prasarana sarana kuning, Operasionalisasi hijau/ persinyalan)							
I.B.2.10	Pengembangan Stasiun Barang	Stasiun Rendeh di Kecamatan Cikalongwetan						
I.B.3	Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan							
I.B.3.1	Pengembangan Alur-Pelayaran Kelas III Waduk Cirata	Waduk Cirata di Kecamatan Cipeundeuy						
		Waduk Saguling di: 1. Kecamatan Batujajar; 2. Kecamatan Cihampelas; 3. Kecamatan Cililin; 4. Kecamatan Cipongkor; dan 5. Kecamatan Saguling.						
I.B.3.2	Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan di waduk	1. Dermaga Bongas di Kecamatan Cililin; 2. Dermaga Bunder di Kecamatan Cihampelas; 3. Dermaga Cangkorah di Kecamatan Batujajar; 4. Dermaga Cililin di Kecamatan Cililin, 5. Dermaga Cisentul di Kecamatan Cipeundeuy;						

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
		6. Dermaga Gamblok di Kecamatan Batuajjar; 7. Dermaga Girimukti di Kecamatan Saguling; 8. Dermaga Maroko di Kecamatan Cihampelas; 9. Dermaga Pasirgeulis 1 di Kecamatan Cipeundeuy; 10. Dermaga Pasirgeulis 2 di Kecamatan Cipeundeuy.						
I.B.4	Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus							
I.B.4.1	Pengembangan dan Pemeliharaan Bandar Udara Khusus	Pangkalan Udara Suparlan di Kec. Batuajjar						
I.C	Perwujudan Sistem Jaringan Energi							
I.C.1	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi							
I.C.1.1	Pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi- Tempat Penyimpanan	Kecamatan Padalarang Kecamatan Ngamprah						
I.C.1.2	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi berupa Depo BBM Darat Padalarang	Kecamatan Padalarang						
I.C.1.3	Pembangunan jaringan gas perkotaan dan rumah tangga	Kabupaten Bandung Barat						

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
I.C.1.4	Pembangunan fasilitas penyimpanan dan pengolahan minyak dan gas bumi (Kilang, Storage/Depot, LNG, Terminal, LNG Plant, LPG Plant, SPPBE, SPBG, SPBU, SPBE, SPBN)	Kabupaten Bandung Barat						
I.C.1.5	Pembangunan Pipanisasi Bahan Bakar minyak	Kabupaten Bandung Barat						
I.C.2	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan							
I.C.2.1	pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	1. PLTA Cirata di Kecamatan Cipeundeuy; 2. PLTA Saguling di Kecamatan Cipatat; dan 3. PLTA <i>Pump Storage Upper</i> Cisokan di Kecamatan Rongga.						
I.C.2.2	pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	1. PLTMH Cidadap di Kecamatan Gununghalu 2. PLTMH Gununghalu di Kecamatan Gununghalu						
I.C.2.3	pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	1. PLTS di Waduk Cirata di Kecamatan Cipeundeuy; 2. PLTS di Waduk Saguling di Kecamatan Saguling						
I.C.2.4	pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	PLTP Tangkuban Parahu di Kecamatan Parongpong						

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
I.C.2.5	Pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	1. SUTET Cianjur – Padalarang; 2. SUTET Cirata-Saguling 1; 3. SUTET Bandung Selatan 1; 4. SUTET Bandung Selatan 2; 5. SUTET Saguling – Cibinong 7; 6. SUTET Saguling – PLTA Saguling; dan 7. SUTET Tasikmalaya – Depok.						
I.C.2.6	Pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	1. SUTT Cigereleng – Cianjur 2. SUTT Cigereleng – Lagadar 3. SUTT Dago Pakar – Bandung Utara 4. SUTT Padalarang Baru – Bandung Utara 5. SUTT Padalarang Baru – Cirata 6. SUTT Padalarang Baru – GIS Cibabat 7. SUTT Padalarang Baru – Jatiluhur 8. SUTT Padalarang Baru – Lagadar 9. SUTT Patuha – Lagadar; 10. SUTT PLTS JABAR IV - Rajamandala						

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
I.C.2.7	Pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan Gardu Listrik	1. Gardu induk Lagadar di Kecamatan Batujajar; 2. Gardu induk Lagadar - Padalarang Baru 1 di Kecamatan Padalarang; 3. Gardu induk Padalarang Baru – Cibabat di Kecamatan Padalarang; 4. Gardu induk Padalarang Baru di Kecamatan Padalarang; 5. Gardu induk Padalarang Baru Cirata 1 di Kecamatan Padalarang; 6. Gardu induk Padalarang Baru - jatiluhur 1 di Kecamatan Padalarang; 7. Gardu induk Padalarang Baru <i>Bay Transformer</i> 4 di Kecamatan Padalarang; 8. <i>Gas insulated switchgear</i> tegangan ekstra tinggi di Kecamatan Cipatat; dan 9. Gardu induk tegangan ekstra tinggi PLTA Saguling di Kecamatan Cipatat.						

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
I.C.2.8	Pengembangan pembangkit listrik baru ramah lingkungan	Seluruh Kecamatan						
I.C.2.9	Penyediaan sambungan baru	Seluruh Kecamatan						
I.C.2.10	pembangunan jaringan pemancar listrik	Seluruh Kecamatan						
I.C.2.11	Pembangunan sistem jaringan kabel listrik bawah tanah	Seluruh Kecamatan						
I.C.2.12	Pengembangan Desa Mandiri Energi	Seluruh Kecamatan						
I.D	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi							
I.D.1	Infrastruktur jaringan tetap							
1.D.1.1	Pemeliharaan infrastruktur jaringan tetap	1. Kecamatan Batujajar; 2. Kecamatan Cililin; 3. Kecamatan Cipatat; 4. Kecamatan Cisarua; 5. Kecamatan Lembang; dan 6. Kecamatan Padalarang.						
1.D.1.2	Pengembangan infrastruktur jaringan tetap							
1.D.1.3	Pemantapan infrastruktur jaringan tetap							
I.D.2	Jaringan Tetap							
I.D.1.1	Pengembangan Jaringan Tetap	1. Kecamatan Batujajar; 2. Kecamatan Cihampelas; 3. Kecamatan Cikalongwetan; 4. Kecamatan Cililin; 5. Kecamatan Cipatat; 6. Kecamatan Cipeundeuy; 7. Kecamatan Cisarua; 8. Kecamatan Gununghalu; 9. Kecamatan Lembang;						
I.D.1.2	Pengembangan jaringan kabel serat optik							
I.D.1.3	Pembangunan jaringan kabel terpadu dengan pembangunan jaringan prasarana lainnya							
I.D.1.4	Pengembangan dan peningkatan infrastruktur komunikasi berbasis digital							

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
		10. Kecamatan Ngamprah; 11. Kecamatan Padalarang; 12. Kecamatan Parongpong; dan 13. Kecamatan Sindangkerta.						
I.D.1.5	Pemantapan Jaringan Tetap di Kawasan pemerintahan	Kecamatan Ngamprah						
I.D.3	Jaringan Bergerak							
I.D.2.1	Pengembangan Jaringan Bergerak Seluler	Seluruh Kecamatan						
I.D.2.2	Penyusunan regulasi dan rencana penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama (<i>cell-plan</i>)							
I.D.2.3	Pengembangan jaringan satelit dalam penanganan area <i>blankspot</i>							
I.D.2.4	Pengembangan cakupan dan kualitas layanan melalui pengaturan lokasi dan ketentuan teknis layanan jaringan nirkabel							
I.D.2.5	Penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama							
I.E	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air							
I.E.1	Sistem Jaringan Irigasi							
I.E.1.1	Penyempurnaan database Jaringan Irigasi (e-PAKSI)	Kabupaten Bandung Barat						
I.E.1.2	Pemeliharaan, Rehabilitasi, Pemanfaatan, Operasi dan Pemeliharaan	1. Kecamatan Cihampelas; 2. Kecamatan Cikalongwetan;						

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Jaringan Irigasi Primer	3. Kecamatan Cililin; 4. Kecamatan Cipatat; 5. Kecamatan Cipeundeuy; 6. Kecamatan Cipongkor; 7. Kecamatan Cisarua; 8. Kecamatan Gununhalu; 9. Kecamatan Ngamprah; 10. Kecamatan Padalarang; 11. Kecamatan Parongpong 12. Kecamatan Rongga						
I.E.1.4	Pemeliharaan, Rehabilitasi, Pemanfaatan, Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder	1. Kecamatan Cikalangwtn; 2. Kecamatan Cipatat; 3. Kecamatan Cipeundeuy; 4. Kecamatan Cipongkor; 5. Kecamatan Cisarua; 6. Kecamatan Gununhalu; 7. Kecamatan Ngamprah; 8. Kecamatan Padalarang; 9. Kecamatan Parongpong; dan 10. Kecamatan Rongga.						
I.E.1.6	Operasi-pemeliharaan dan rehabilitasi Daerah Irigasi lintas kab./kota	1. D.I Cijanggel 2. D.I Bongkok 3. D.I Lagadar 4. D.I Leuwi Kuya						
I.E.1.7	Pembangunan Irigasi Air Tanah (baru, konjungsi, Indikator Kinerja Kegiatan)	Kabupaten Bandung Barat						

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
I.E.1.8	Modernisasi irigasi Pembuatan Irigasi Tetes,Pipa, Curah/ Sprinkler dan lainnya Penerapan Metode <i>Sistem of Rice Intensification (SRI)</i> Diversifikasi irigasi sebagai sumber air baku alternatif untuk air bersih dan kebutuhan lainnya	Kabupaten Bandung Barat						
I.E.2	Sistem Pengendalian Banjir							
I.E.2.1	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan Jaringan Pengendalian Banjir	1. Sungai Cimahi 2. Sungai Citarum						
I.E.2.2	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan Jaringan Pengendalian Banjir berupa waduk	1. Waduk Saguling, 2. Waduk Cisokan 3. Waduk Cirata						
I.E.2.3	Pembuatan infrastruk. pendukung pengendalian banjir run-off (Pembuatan sumur resapan, biopori, sumur imbahan, sumur injeksi air tanah dalam, ground water tank, rain water harvesting,)	Seluruh Kecamatan						
I.E.2.4	Pembuatan bangunan pengendali banjir (Pembuatan bendungan, tanggul, perbaikan tebing sungai, <i>revetment</i> , <i>groundsill</i> , <i>check dam</i> , krib, pengarah arus, jeti, <i>breakwater</i> , bendung gerak, rumah pompa, kolam detensi, kolam retensi, polder, <i>long storage</i> , <i>dry dam</i> , <i>retarding basin</i> , <i>floodway</i> , terowongan)	Seluruh Kecamatan						

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
I.E.2.5	Normalisasi, restorasi, pengendalian, dan pemeliharaan sungai	Wilayah Sungai Citarum						
I.E.2.6	Normalisasi dan revitalisasi situ, embung, waduk, dan penampung air lainnya sebagai peningkatan kapasitas tampung dalam menahan air banjir	Seluruh situ/ waduk/ embung/ daerah irigasi						
I.E.2.7	Pembangunan dan pemeliharaan bangunan pengendali sedimen Cek dam, sabo dam, terasering, sediment trap, sengkedan, dam penahan, gully plug, teras gulud/bangku, parit buntu, kolam tampung sedimen, kegiatan vegetatif/ (RTRHL)	Wilayah Sungai Citarum						
I.E.2.8	Penanganan Sampah dan limbah di Sungai, embung, danau, dan Situ Pembuatan sarana dan prasarana penyaring dan penahan sampah Pengelolaan sampah dan limbah di sungai, embung, danau, dan situ di seluruh sumber air	Wilayah Sungai Citarum						
I.E.1.23	Penanganan darurat pada saat bencana alam dan pemulihan infrastruktur sumber daya air pasca bencana	Seluruh Kecamatan						
I.E.1.25	Rehabilitasi dan pembuatan penampung air	Seluruh Kecamatan						
I.E.1.26	Instalasi unit pompa air dan perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan	Seluruh Kecamatan						

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
I.E.1.27	Pengembangan sumber air dan sistem irigasi alternatif lainnya	Seluruh Kecamatan						
I.E.1.28	Konservasi tanah dan air di lahan pertanian (terasering, rorak, guludan, dan lain-lain)	Seluruh Kecamatan						
I.E.1.29	Penggunaan teknologi yang sesuai di lahan kering	Seluruh Kecamatan						
I.E.1.30	Pengendalian Daya Rusak Air	Wilayah Sungai Citarum						
I.E.1.31	Pelestarian Sumber daya air secara vegetatif	Wilayah Sungai Citarum						
I.E.1.32	Pelestarian Cakupan Air Tanah (CAT)	1. CAT Lembang 2. CAT Batujajar 3. CAT Ciater 4. CAT Cibuni						
I.E.1.33	Pengamanan, pemeliharaan dan pemanfaatan mata air	Seluruh Kecamatan						
I.E.1.34	Penyusunan sistem informasi jaringan sumber daya air	Seluruh situ/ waduk/ embung/ daerah irigasi						
I.E.1.35	Perlindungan Jaringan sumber daya air	Wilayah Sungai Citarum						
I.E.1.36	Pemeliharaan sungai	Wilayah Sungai Citarum						
I.E.1.37	Konservasi Sumber Daya Air	Wilayah Sungai Citarum						
I.E.1.38	Pendayagunaan SDA	Kabupaten Bandung Barat						
I.E.3	Bangunan Sumber Daya Air							
I.E.3.1	Pemeliharaan, Rehabilitasi, Pemanfaatan, Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air	1. Kecamatan Cikalangwtn; 2. Kecamatan Cipatat; 3. Kecamatan Cipeundeuy; 4. Kecamatan Cisarua; 5. Kecamatan Cipongkor; 6. Kecamatan Gununghalu;						

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
		7. Kecamatan Ngamprah; 8. Kecamatan Padalarang; 9. Kecamatan Parongpong; 10. Kecamatan Rongga; dan 11. Kecamatan Saguling.						
I.E.3.2	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan situ	Situ Ciburuy, dan Situ Lembang						
I.E.3.3	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan waduk	Waduk Saguling, Waduk Cirata, dan Waduk Cisokan						
I.E.3.4	Pengamanan, konservasi, serta operasi dan pemeliharaan situ	Situ Umar, Situ Ciburuy, dan Situ Lembang;						
I.E.3.5	Penataan dan revitalisasi situ	Situ Umar, Situ Ciburuy, Situ Saguling, dan Situ Lembang;						
I.E.3.6	Operasi dan Pemeliharaan bendungan/waduk	Waduk Cirata; Waduk Saguling						
I.E.3.7	Pembangunan bendungan/waduk serta pemanfaatan waduk sebagai sumber air untuk irigasi, energi, pengendali banjir, sumber air baku, dan pariwisata.	Waduk Cimeta; Waduk Cilame						
I.E.3.8	Pembangunan dan pemanfaatan sumber air baku sebagai sumber air bersih untuk SPAM	Interbasin Sinumbra; Pompa Saguling, Cilembang						
I.F	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya							
I.F.1	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)							
	Penyusunan Rencana Induk Sistem	Kabupaten Bandung Barat						

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Penyediaan Air Minum (RISPAM)							
1.F.1.1	Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	1. Kecamatan Cikalongwetan 2. Kecamatan Cisarua						
1.F.1.2	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan Unit Produksi	1. Kecamatan Cililin 2. Kecamatan Cikalongwetan 3. Kecamatan Cisarua						
1.F.1.3	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan Unit Pelayanan	1. Kecamatan Cikalongwetan 2. Kecamatan Cisarua; 3. Kecamatan Ngamprah 4. Kecamatan Padalarang						
1.F.1.4	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan Produksi	1. Kecamatan Cikalongwetan; 2. Kecamatan Cisarua.						
1.F.1.5	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan Unit Distribusi	1. Kecamatan Batujajar 2. Kecamatan Cikalongwetan 3. Kecamatan Cililin 4. Kecamatan Cisarua 5. Kecamatan Ngamprah 6. Kecamatan Padalarang 7. Kecamatan Parongpong						
1.F.1.6	Pembangunan <i>ofttaker Reservoir</i> Air Bersih Sistem Penyediaan Air Minum Metropolitan Bandung Raya Wilayah Barat (SPAM SINUMBRA)	Kecamatan Cihampelas						

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.F.1.7	Peningkatan pelayanan sambungan rumah	Seluruh Kecamatan						
1.F.1.8	Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan SPAM	Seluruh Kecamatan						
1.F.1.9	Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan SPAM Regional	Kecamatan Batujajar, dan Kecamatan Cihampelas						
1.F.1.10	Penyediaan SPAM berbasis masyarakat	Seluruh Kecamatan						
I.F.2	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)							
I.F.2.1	Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL)	Kabupaten Bandung Barat						
I.F.2.2	Program pembangunan dan pengelolaan Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah Domestik	IPLT Sarimukti Kecamatan Cipatat						
I.F.2.3	Program Pengembangan, peningkatan, dan Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	1. IPAL Batujajar 2. IPAL Cipeundeuy 3. IPAL Holis 4. IPAL Padalarang						
I.F.2.4	Pengembangan SPAL Domestik terintegrasi dengan Kawasan Peruntukan Industri	1. Kecamatan Batujajar 2. Kecamatan Cihampelas 3. Kecamatan Cikalongwetan 4. Kecamatan Cipatat 5. Kecamatan Cipeundeuy 6. Kecamatan Ngamprah 7. Kecamatan Padalarang						
I.F.2.5	Peningkatan pengolahan dan pengendalian limbah padat dan sampah dari sumbernya	Seluruh Kecamatan						

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
I.F.2.6	Penggunaan teknologi yang sesuai dan pengelolaan limbah yang berasal dari sumber domestik	Seluruh Kecamatan						
I.F.2.7	Penerapan regulasi kewajiban penyediaan limbah industri	1. Kecamatan Batujajar 2. Kecamatan Cihampelas 3. Kecamatan Cikalongwetan 4. Kecamatan Cipatat 5. Kecamatan Cipeundeuy 6. Kecamatan Ngamprah 7. Kecamatan Padalarang						
I.F.2.8	Penyediaan MCK	Seluruh Kecamatan						
I.F.2.9	Pengolahan limbah menjadi biogas	1. Kecamatan Lembang 2. Kecamatan Ngamprah 3. Kecamatan Cisarua 4. Kecamatan Parongpong						
I.F.2.10	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Kabupaten Bandung Barat						
I.F.3	Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan							
I.F.3.1	Penyusunan/Revisi Masterplan Persampahan	Kabupaten Bandung Barat						
I.F.3.2	Optimalisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti	Kecamatan Cipatat						
I.F.3.3	Program kerjasama penggunaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional	Kabupaten Bandung Barat						
I.F.3.4	Penataan dan Pengelolaan Persampahan Pasca Operasional	Kecamatan Cipatat						

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
I.F.3.5	Pembangunan, pemeliharaan,dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	WP Lembang WP Cikalangwtn WP Padalarang- Ngamprah WP Cililin						
I.F.3.6	Pembangunan, pemeliharaan,dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)	Seluruh Kecamatan						
I.F.3.7	Pembangunan, pemeliharaan,dan pengembangan Stasiun Peralihan Antara (SPA)	Kecamatan Cikalangwetan Kecamatan Cipatat						
I.F.3.8	Pengembangan Bank Sampah	Kabupaten Bandung Barat						
I.F.3.9	Pengolahan gas metana menjadi biogas di TPA dengan memanfaatkan sampah yang pada proses pembusukannya dapat menghasilkan gas metana	Kabupaten Bandung Barat						
II.F.4	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana							
II.F.4.1	Penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB)	Kabupaten Bandung Barat						
II.F.4.2	Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)	Kabupaten Bandung Barat						
II.F.4.3	Pengembangan, Pemasangan Rambu, dan Penataan Jalur Evakuasi Bencana banjir	1. Kecamatan Batujajar 2. Kecamatan Cipatat 3. Kecamatan Cisarua 4. Kecamatan Gununghalu 5. Kecamatan Lembang 6. Kecamatan Ngamprah						

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
		7. Kecamatan Padalarang 8. Kecamatan Parongpong 9. Kecamatan Rongga.						
II.F.4.4	Pengembangan, Pemasangan Rambu, dan Penataan Jalur Evakuasi Bencana banjir bandang	1. Kecamatan Cikalongwetan 2. Kecamatan Gununghalu 3. Kecamatan Cipongkor 4. Kecamatan Rongga						
II.F.4.5	Pengembangan, Pemasangan Rambu, dan Penataan Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi	1. Kecamatan Cisarua 2. Kecamatan Lembang 3. Kecamatan Parongpong						
II.F.4.6	Pengembangan, Pemasangan Rambu, dan Penataan Jalur Evakuasi Bencana Kebakaran hutan dan lahan	1. Kecamatan Cikalongwtn 2. Kecamatan Cililin 3. Kecamatan Cipatat 4. Kecamatan Cipeundeuy 5. Kecamatan Cisarua 6. Kecamatan Lembang 7. Kecamatan Parongpong 8. Kecamatan Saguling						
II.F.4.7	Pengembangan, Pemasangan Rambu, dan Penataan Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api	1. Kecamatan Lembang 2. Kecamatan Parongpong						
II.F.4.8	Pengembangan, Pemasangan Rambu, dan Penataan Jalur Evakuasi Bencana letusan sesar aktif	1. Kecamatan Lembang 2. Kecamatan Cisarua 3. Kecamatan Parongpong						

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.F.4.9	Pengembangan, Pemasangan Rambu, dan Penataan Jalur Evakuasi Bencana tanah longsor	1. Kecamatan Cikalongwetan 2. Kecamatan Cililin 3. Kecamatan Cipatat 4. Kecamatan Cipongkor 5. Kecamatan Gununghalu 6. Kecamatan Lembang 7. Kecamatan Ngamprah 8. Kecamatan Saguling 9. Kecamatan Sindangkerta						
II.F.4.10	Pengembangan, Pemasangan Rambu, dan Penataan Jalur Evakuasi Bencana kekeringan	1. Kecamatan Cikalongwetan 2. Kecamatan Cipatat 3. Kecamatan Cipeundeuy 4. Kecamatan Cipongkor 5. Kecamatan Gununghalu 6. Kecamatan Padalarang 7. Kecamatan Rongga 8. Kecamatan Saguling 9. Kecamatan Sindangkerta						
II.F.4.11	Penyediaan Tempat Evakuasi Bencana banjir	1. Kecamatan Batujajar 2. Kecamatan Cikalongwetan 3. Kecamatan Cipatat 4. Kecamatan Cisarua 5. Kecamatan Lembang 6. Kecamatan Ngamprah						

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
		7. Kecamatan Padalarang 8. Kecamatan Parongpong 9. Kecamatan Rongga						
II.F.4.12	Penyediaan Tempat Evakuasi Bencana banjir bandang	1. Kecamatan Cikalongwetan 2. Kecamatan Gununghalu 3. Kecamatan Rongga						
II.F.4.13	Penyediaan Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi	1. Kecamatan Cisarua 2. Kecamatan Lembang 3. Kecamatan Parongpong						
II.F.4.14	Penyediaan Tempat Evakuasi Bencana kebakaran hutan dan lahan	1. Kecamatan Cikalongwetan 2. Kecamatan Cililin 3. Kecamatan Cipatat 4. Kecamatan Cipeundeuy 5. Kecamatan Cisarua 6. Kecamatan Lembang 7. Kecamatan Parongpong 8. Kecamatan Saguling						
II.F.4.15	Penyediaan Tempat Evakuasi Bencana letusan gunung api	1. Kecamatan Lembang 2. Kecamatan Parongpong						
II.F.4.16	Penyediaan Tempat Evakuasi Bencana letusan sesar aktif	1. Kecamatan Cisarua 2. Kecamatan Lembang 3. Kecamatan Parongpong						
II.F.4.17	Penyediaan Tempat Evakuasi Bencana tanah longsor	1. Kecamatan Cikalongwetan 2. Kecamatan Cililin						

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
		3. Kecamatan Cipatat 4. Kecamatan Cipongkor 5. Kecamatan Gununghalu 6. Kecamatan Lembang 7. Kecamatan Ngamprah 8. Kecamatan Saguling 9. Kecamatan Sindangkerta						
II.F.4.18	Penyediaan Tempat Evakuasi Bencana kekeringan	1. Kecamatan Cikalongwetan 2. Kecamatan Cipatat 3. Kecamatan Cipeundeuy 4. Kecamatan Cipongkor 5. Kecamatan Gununghalu 6. Kecamatan Rongga 7. Kecamatan Sindangkerta						
II.F.4.19	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Kabupaten Bandung Barat						
II.F.4.20	Peningkatan kapasitas adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim	Kabupaten Bandung Barat						
II.F.4.21	Pengembangan Kabupaten Bandung Barat Berbudaya Tangguh Bencana (<i>Resilience Culture Regency and Resilience Center</i>)	Kabupaten Bandung Barat						
II.F.4.22	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Kabupaten Bandung Barat						
II.F.4.23	Penyediaan hunian sementara dan relokasi	Kabupaten Bandung Barat						

No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.F.4.24	Penanganan darurat daerah terdampak dan terancam bencana	Kabupaten Bandung Barat						
I.F.5	Sistem Jaringan Drainase							
I.F.5.1	Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase	Kawasan Perkotaan Padalarang - Ngamprah						
		Kabupaten Bandung Barat						
I.F.5.2	Pembangunan, Peningkatan, dan Rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung Jaringan Drainase Primer	1. Kecamatan Cikalongwetan; 2. Kecamatan Cipatat; 3. Kecamatan Ngamprah; 4. Kecamatan Padalarang						
I.F.5.3	Pembangunan, Peningkatan, dan Rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung Jaringan Drainase Sekunder	1. Kecamatan Batujajar; 2. Kecamatan Cihampelas; 3. Kecamatan Cililin; 4. Kecamatan Gununghalu; 5. Kecamatan Lembang; 6. Kecamatan Ngamprah; 7. Kecamatan Padalarang; 8. Kecamatan Sindangkerta.						
I.F.5.4	Pembangunan, Peningkatan, dan Rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung Jaringan Drainase Tersier	Seluruh Kecamatan						
I.F.5.5	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai	Seluruh Kecamatan						
I.F.5.6	Penataan jaringan drainase utama	Seluruh Kecamatan						

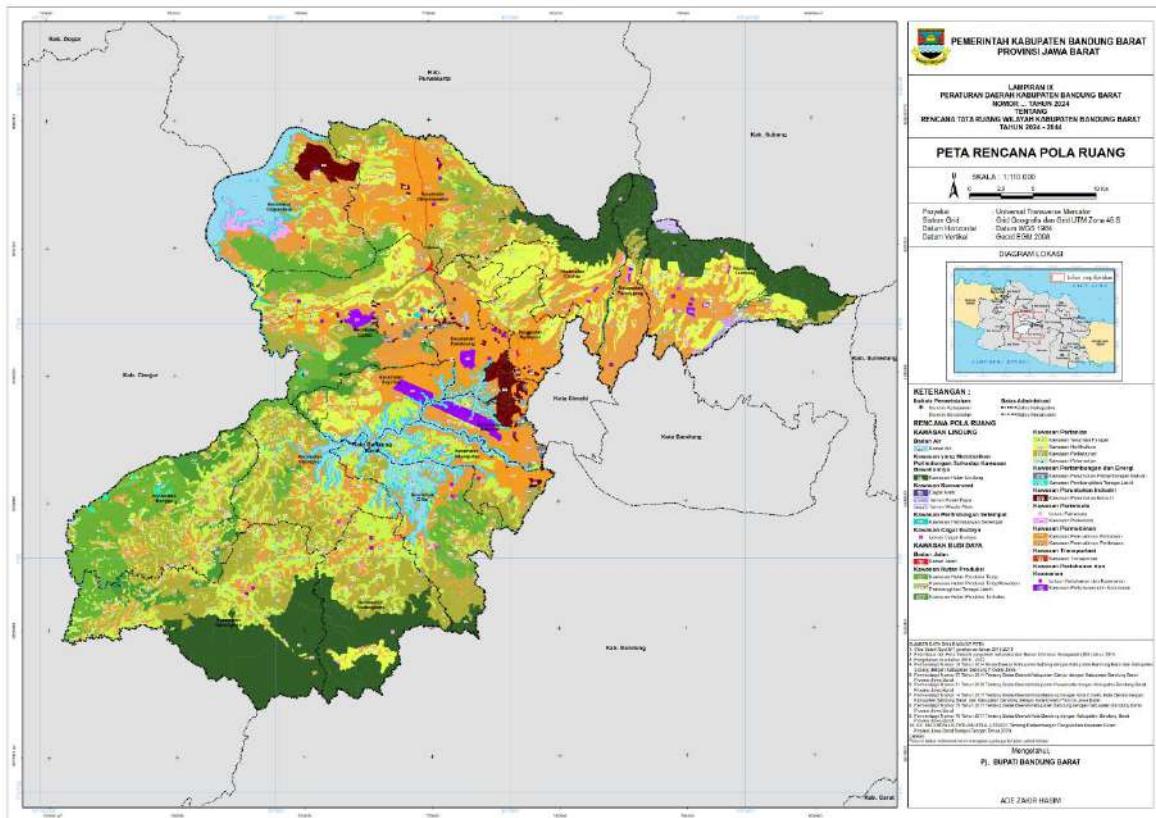
No.	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
	perkotaan dan drainase permukiman							
I.F.5.7	Peningkatan fungsi jaringan irigasi dan drainase di lahan kering	Seluruh Kecamatan						

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044

2.7.3 Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat dirumuskan berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten; dan kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan. Secara umum, rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat berdasarkan fungsi utamanya, meliputi:

Gambar 2. 38 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bandung Barat



Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044

2.7.3.1 Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

Penetapan kawasan lindung dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara berbagai kegiatan dalam pembangunan dengan fungsi-fungsi ruang yang ada agar diperoleh pemanfaatan kawasan yang optimal sesuai dengan daya dukungnya. Kawasan Lindung di Kabupaten Bandung Barat meliputi:

Tabel 2. 78 Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Bandung Barat

Jenis Kawasan Lindung	Lokasi
Badan air	Kecamatan Batujajar Kecamatan Cihampelas Kecamatan Cikalangwetan Kecamatan Cililin Kecamatan Cipatat Kecamatan Cipeundeuy Kecamatan Cipongkor Kecamatan Lembang Kecamatan Ngamprah Kecamatan Padalarang Kecamatan Rongga Kecamatan Saguling Kecamatan Sindangkerta
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, yakni berupa kawasan hutan lindung seluas 18.103 ha	Kecamatan Cikalangwetan Kecamatan Cililin Kecamatan Cipatat Kecamatan Cisarua Kecamatan Gununghalu Kecamatan Lembang Kecamatan Padalarang Kecamatan Parongpong Kecamatan Rongga Kecamatan Sindangkerta
Kawasan perlindungan setempat yang terdiri dari sempadan sungai, sempadan sekitar waduk/danau/situ, dan kawasan perlindungan setempat lainnya seluas 2.548 ha.	Kecamatan Batujajar; Kecamatan Cihampelas; Kecamatan Cikalangwetan; Kecamatan Cililin; Kecamatan Cipatat; Kecamatan Cipeundeuy; Kecamatan Cipongkor; Kecamatan Gununghalu; Kecamatan Ngamprah; Kecamatan Padalarang; Kecamatan Rongga; Kecamatan Saguling; dan Kecamatan Sindangkerta.

Jenis Kawasan Lindung	Lokasi
Kawasan konservasi yang meliputi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam	<p>1. Kawasan Suaka Alam, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cagar Alam Junghuhn di Kecamatan Lembang - Cagar Alam Gunung Tangkuban Parahu meliputi wilayah Kecamatan Lembang dan Kecamatan Parongpong - Cagar Alam Burangrang meliputi Kecamatan Parongpong dan Kecamatan Cisarua. <p>2. Kawasan pelestarian alam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taman Hutan Raya berupa Taman Hutan Raya Ir. H. Juanda terletak di Kecamatan Lembang - Taman Wisata Alam berupa Taman Wisata Alam Kawah Gunung Tangkuban Parahu meliputi Kecamatan Lembang dan Kecamatan Parongpong
Kawasan cagar budaya	<p>Teropong Bintang Bosscha di Kecamatan Lembang;</p> <p>Monumen/Makam Franz Wilhelm Junghuhn di Kecamatan Lembang;</p> <p>Stasiun Kereta Api Padalarang di Kecamatan Padalarang;</p> <p>Pabrik Kertas Padalarang di Kecamatan Padalarang;</p> <p>Situs Cagar Budaya Gua Pawon di Kecamatan Cipatat;</p> <p>Kampung Budaya Gua Pawon, terletak di Kecamatan Cipatat;</p> <p>Gua Terusan Air Sanghyang Tikoro di Kecamatan Cipatat;</p> <p>Situs Batu Mukapayung di Kecamatan Cililin;</p> <p>Situs Mundinglaya di Kecamatan Cililin;</p> <p>Gedung Pemancar Radio (<i>Telefunken/NIROM</i>) di Kecamatan Cililin; dan</p> <p>Makam Tiga Waliulloh di Kecamatan Cipongkor</p>

Sumber: RTRW KBB Tahun 2024-2044

2.7.3.2 Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan Budidaya merupakan kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan dengan penggunaan lahan tertentu sebagai bagian dari kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kawasan budidaya yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat adalah:

Tabel 2. 79 Perwujudan Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Bandung Barat

No	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
2024	2025	2026	2027	2028	2029			
II	Perwujudan Pola Ruang							
II.B	Perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya							
II.B.1	Perwujudan Badan Jalan							
II.B.1.1	Pemeliharaan rutin dan berkala Badan Jalan	1. Kecamatan Cikalangwetan; 2. Kecamatan Cipatat; 3. Kecamatan Ngamprah 4. Kecamatan Padalarang						
II.B.1.2	Pemantapan Jalur hijau Jalan							
II.B.2	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi							
II.B.2.1	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap							
II.B.2.1.1	Pengembangan, Rehabilitasi, dan Revitalisasi fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap	1. Kecamatan Cihampelas; 2. Kecamatan Cikalangwetan; 3. Kecamatan Cililin;						
II.B.2.1.2	Pengembangan dan							

No	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Penyediaan Komoditas Hasil Hutan Produksi Tetap untuk Kebutuhan Industri	4. Kecamatan Cipatat; 5. Kecamatan Cipeundeuy; 6. Kecamatan Cipongkor; 7. Kecamatan Cisarua;						
II.B.2.1.3	Pengelolaan Hutan Produksi Tetap Berbasis Masyarakat	8. Kecamatan Gununghalu; 9. Kecamatan Padalarang; 10. Kecamatan Parongpong;						
II.B.2.1.4	Pengembangan Perangkat Incentif dan Disinsentif untuk Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Tetap	11. Kecamatan Rongga; dan 12. Kecamatan Saguling						
II.B.2.1.5	Pengembangan Secara Terbatas dan Selektif bagi Kegiatan Wisata dan Ilmu Pengetahuan di Dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap							
II.B.2.1.6	Penyelesaian penguasaan tanah pada Kawasan Hutan Produksi Tetap							
II.B.2.1.7	Program Kehutanan Sosial pada Kawasan Hutan Produksi Tetap							
II.B.2.2	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas							
II.B.2.2.1	Pengembangan, Rehabilitasi, dan Revitalisasi fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas	1. Kecamatan Cililin; 2. Kecamatan Cipatat; 3. Kecamatan Cipongkor;						
II.B.2.2.2	Pengembangan dan Penyediaan Komoditas Hasil Hutan Produksi Terbatas untuk	4. Kecamatan Cisarua; 5. Kecamatan Gununghalu;						

No	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Kebutuhan Industri	6. Kecamatan Padalarang 7. Kecamatan Parongpong; 8. Kecamatan Rongga 9. Kecamatan Saguling; 10. Kecamatan Sindangkerta						
II.B.2.2.3	Pengelolaan Hutan Produksi Terbatas Berbasis Masyarakat							
II.B.2.2.4	Pengembangan Perangkat Incentif & Disinsentif untuk Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Terbatas							
II.B.2.2.5	Pengembangan Secara Terbatas dan Selektif bagi Kegiatan Wisata dan Ilmu Pengetahuan di Dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas							
II.B.2.2.6	Penyelesaian penguasaan tanah pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas							
II.B.2.2.7	Program Kehutanan Sosial pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas							
II.B.3	Perwujudan Kawasan Pertanian							
II.B.3.a	penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pertanian	Kabupaten Bandung Barat						
II.B.3.b	penyusunan Rencana Induk Pembangunan Peternakan dan Perikanan	Kabupaten Bandung Barat						
II.B.3.1	Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan							
II.B.3.1.1	Pengembangan, Rehabilitasi, dan Revitalisasi fungsi	1. Kecamatan Batujajar;						

No	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Kawasan Tanaman Pangan beririgasi	2. Kecamatan Cihampelas; 3. Kecamatan Cikalongwetan; 4. Kecamatan Cililin; 5. Kecamatan Cipatat; 6. Kecamatan Cipeundeuy;						
II.B.3.1.2	Mempertahankan luas Kawasan tanaman pangan beririgasi teknis	7. Kecamatan Cipongkor; 8. Kecamatan Cisarua; 9. Kecamatan Gununhalu;						
II.B.3.1.3	Peningkatan ketahanan pangan daerah	10. Kecamatan Ngamprah; 11. Kecamatan Padalarang;						
II.B.3.1.4	Pengembangan Desa Mandiri benih tanaman pangan (Pengembangan Petani Produsen Benih Tanaman Pangan (P3BTP))	12. Kecamatan Parongpong; 13. Kecamatan Rongga; 14. Kecamatan Saguling;						
II.B.3.1.5	Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan Organik	15. Kecamatan Sindangkerta.						
II.B.3.1.6	Pengembangan Pupuk Organik							
II.B.3.1.7	Pengembangan komoditas Akabi (Aneka kacang dan ubi)							
II.B.3.1.8	Pengembangan Kawasan komoditas serealia							
II.B.3.1.9	Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan							
II.B.3.1.10	Peningkatan produktivitas melalui pola intensifikasi, diversifikasi, dan pola tanam yang sesuai dengan kondisi tanah dan perubahan iklim							
II.B.3.1.11	pengembangan jaringan prasarana							

No	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
	sumber daya air yang mampu menjamin ketersediaan air							
II.B.3.1.12	peningkatan kesejahteraan petani dan pemanfaatan lahan yang lestari							
II.B.3.1.13	peningkatan fungsi sawah beririgasi teknis							
II.B.3.1.14	Penggunaan teknologi yang sesuai dan pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas pertanian							
II.B.3.1.15	Program Penyuluhan Pertanian pada Kawasan Tanaman Pangan							
II.B.3.1.16	Program inventarisasi lahan sawah produktif pada Kawasan Tanaman Pangan							
II.B.3.1.17	Pengembangan sarana pengeringan hasil pertanian pada Kawasan Tanaman Pangan							
II.B.3.1.18	Pengembangan gudang penyimpanan hasil pertanian pada Kawasan Tanaman Pangan							
II.B.3.1.19	Pencetakan Lahan Sawah Baru							
II.B.3.1.20	Pemantapan Fungsi Kawasan Pertanian melalui Inventarisasi LP2B	1. Kecamatan Batujajar; 2. Kecamatan Cihampelas;						

No	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.3.1.21	Pemantapan Fungsi Kawasan Pertanian melalui pengembangan Perangkat Insentif dan Disinsentif bagi LP2B	3. Kecamatan Cikalongwetan; 4. Kecamatan Cililin; 5. Kecamatan Cipatat; 6. Kecamatan Cipeundeuy; 7. Kecamatan Cipongkor; 8. Kecamatan Cisarua; 9. Kecamatan Gununghalu; 10. Kecamatan Ngamprah; 11. Kecamatan Padalarang; 12. Kecamatan Parongpong; 13. Kecamatan Rongga; 14. Kecamatan Saguling; 15. Kecamatan Sindangkerta.						
II.B.3.1.22	Rehabilitasi Lahan Kritis pada Kawasan Tanaman Pangan	Kabupaten Bandung Barat						
II.B.3.1.23	Penyediaan dan pengembangan sarana dan Prasarana Pertanian tanaman pangan	Kabupaten Bandung Barat						
II.B.3.1.24	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan	1. Kecamatan Batujajar; 2. Kecamatan Cihampelas; 3. Kecamatan Cikalongwetan; 4. Kecamatan						

No	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Berkelanjutan	Cililin; 5. Kecamatan Cipatat; 6. Kecamatan Cipeundeuy; 7. Kecamatan Cipongkor; 8. Kecamatan Cisarua; 9. Kecamatan Gununghalu; 10. Kecamatan Ngamprah; 11. Kecamatan Padalarang; 12. Kecamatan Parongpong; 13. Kecamatan Rongga; 14. Kecamatan Saguling; dan 15. Kecamatan Sindangkerta.						
II.B.3.1.25	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian tanaman pangan	Kabupaten Bandung Barat						
II.B.3.1.26	Pemantapan Kawasan sentra Komoditas Agribisnis unggulan	Kabupaten Bandung Barat						
II.B.3.1.27	Pemantapan Kawasan <i>Integrated Farming System</i> (IFS)	Kabupaten Bandung Barat						
II.B.3.1.28	Pengembangan Kawasan agroindustri	Kabupaten Bandung Barat						
II.B.3.1.29	Pengembangan kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan	Kabupaten Bandung Barat						
II.B.3.2	Perwujudan Kawasan Hortikultura							

No	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.3.2.1	Pengelolaan dan mengembangkan sumber daya hortikultura secara optimal	1. Kecamatan Cikalangwetan 2. Kecamatan Cililin 3. Kecamatan Cipatat 4. Kecamatan Cipeundeuy 5. Kecamatan Cisarua 6. Kecamatan Lembang 7. Kecamatan Ngamprah 8. Kecamatan Padalarang 9. Kecamatan Parongpong 10. Kecamatan Saguling 11. Kecamatan Sindangkerta						
II.B.3.2.2	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas hortikultura							
II.B.3.2.3	Peningkatan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa hortikultura.							
II.B.3.2.4	Pengembangan Komoditas Hortikultura Organik							
II.B.3.2.5	Pengembangan Pupuk Organik							
II.B.3.2.6	Peningkatan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat							
II.B.3.2.7	Pengembangan inovasi teknologi konservasi lahan berbasis tanaman hortikultura							
II.B.3.2.8	Penerapan teknologi budidaya tanaman hortikultura berkelanjutan							
II.B.3.2.9	Penggunaan teknologi yang sesuai dan pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas pertanian							
II.B.3.2.10	Program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian pada							

No	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Kawasan Hortikultura							
II.B.3.2.11	Pengembangan Kawasan agroindustri pada Kawasan Hortikultura							
II.B.3.2.14	Rehabilitasi Lahan Kritis pada Kawasan Hortikultura	Kabupaten Bandung Barat						
II.B.3.2.15	pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian hortikultura	1. Kecamatan Cikalongwetan 2. Kecamatan Cililin 3. Kecamatan Cipatat 4. Kecamatan Cipeundeuy 5. Kecamatan Cisarua 6. Kecamatan Lembang 7. Kecamatan Ngamprah 8. Kecamatan Padalarang 9. Kecamatan Parongpong 10. Kecamatan Saguling 11. Kecamatan Sindangkerta						
II.B.3.2.16	Inventarisasi Kawasan agropolitan	Kabupaten Bandung Barat						
II.B.3.2.17	Pembangunan & pemantapan Kawasan agropolitan	Kabupaten Bandung Barat						
II.B.3.2.18	Pemantapan Kawasan IFS (<i>Integrated Farming System</i>)	Kabupaten Bandung Barat						
II.B.3.2.19	Pengembangan kegiatan pengolahan hasil hortikultura	1. Kecamatan Cikalongwetan						

No	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
		2. Kecamatan Cililin 3. Kecamatan Cipatat 4. Kecamatan Cipeundeuy 5. Kecamatan Cisarua 6. Kecamatan Lembang 7. Kecamatan Ngamprah 8. Kecamatan Padalarang 9. Kecamatan Parongpong 10. Kecamatan Saguling 11. Kecamatan Sindangkerta						
II.B.3.3	Perwujudan Kawasan Perkebunan							
II.B.3.3.1	Peningkatan Pembangunan Lintas Sektor dan Subsektor, Serta Kegiatan Ekonomi Sekitarnya	Seluruh Kecamatan						
II.B.3.3.2	Pengembangan Kawasan perkebunan berbasis korporasi							
II.B.3.3.3	Pengembangan desa komoditas perkebunan organik							
II.B.3.3.4	Pembangunan subterminal agribisnis komoditas perkebunan							
II.B.3.3.5	Pengembangan benih komoditas perkebunan							

No	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.3.3.6	Peningkatan Keterkaitan Sektor Hulu Dan Hilir Perkebunan Yang Dapat Menstimulasi Pengembangan Ekonomi Wilayah							
II.B.3.3.7	Peningkatan Nilai tambah produk perkebunan							
II.B.3.3.8	Peningkatan Keberlanjutan Ekosistem Di Wilayah Sekitarnya terutama yang Berfungsi Lindung							
II.B.3.3.9	Pengembangan Sistem Informasi Perkebunan							
II.B.3.3.10	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan Unggulan Komoditas Perkebunan							
II.B.3.3.11	Penggunaan teknologi yang sesuai dan pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas pertanian							
II.B.3.3.12	Pengembangan Agro <i>Techno Park</i> dan <i>Science Technopark</i>							
II.B.3.3.13	Pengembangan dan penataan Kawasan peternakan unggulan							
II.B.3.3.14	Rehabilitasi Lahan Kritis pada Kawasan Perkebunan							
II.B.3.4	Perwujudan Kawasan Peternakan							

No	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.3.4.1	Pengembangan peternakan sapi perah dan sapi potong							
II.B.3.4.2	Pengembangan peternakan ayam, domba dan kerbau							
II.B.3.4.3	Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana Kawasan Peternakan;	1. Kecamatan Cikalongwetan 2. Kecamatan Cisarua 3. Kecamatan Gununghalu 4. Kecamatan Lembang 5. Kecamatan Parongpong 6. Kecamatan Rongga, dan 7. Kecamatan Saguling						
II.B.3.4.4	Penataan dan pengelolaan Kawasan Peternakan;							
II.B.3.4.5	Intensifikasi budi daya peternakan;							
II.B.3.4.6	Pembangunan dan pemantapan Kawasan Peternakan							
II.B.3.4.7	Peningkatan produksi peternakan yang memenuhi standar jaminan kesehatan ternak, mutu dan keamanan pangan;							
II.B.3.4.8	Penyediaan sistem pendataan dan informasi Kawasan Peternakan.							
II.B.3.4.9	Pengembangan Kawasan Perikanan	Seluruh Kecamatan						
II.B.3.4.10	Pengembangan perikanan budidaya sawah bersama ikan (minapadi)	1. Kecamatan Cipatat 2. Kecamatan Padalarang 3. Kecamatan Cipeundeuy						
II.B.3.4.11	Pengembangan sentra pembibitan ikan	Kecamatan Cipeundeuy						

No	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.3.4.12	Penyusunan rencana induk pengembangan sektor perikanan	Kabupaten Bandung Barat						
II.B.3.4.13	Pengelolaan pembudidayaan ikan	Seluruh Kecamatan						
II.B.3.4.14	Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Seluruh Kecamatan						
II.B.3.4.15	Penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah	Seluruh Kecamatan						
II.B.3.4.16	Pengembangan sentra komoditas unggulan perikanan	Seluruh Kecamatan						
II.B.3.4.17	Peningkatan produksi ikan	Seluruh Kecamatan						
II.B.3.4.18	Peningkatan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja dalam bidang peternakan dan perikanan	Seluruh Kecamatan						
II.B.3.4.19	Peningkatan pengelolaan dan pelestarian sumber daya perikanan	Seluruh Kecamatan						
II.B.3.4.20	Peningkatan produksi perikanan yang memenuhi standar jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan	Seluruh Kecamatan						
II.B.3.4.21	Peningkatan Konsumsi Ikan	Seluruh Kecamatan						
II.B.4	Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi							

No	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.4.1	Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan							
II.B.4.1.1	Evaluasi perizinan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	<p>1. Kecamatan Batujajar; 2. Kecamatan Cihampelas; 3. Kecamatan Cipatat; 4. Kecamatan Cipeundeuy 5. Kecamatan Padalarang 6. Kecamatan Saguling.</p>						
II.B.4.1.2	Pengendalian pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan							
II.B.4.1.3	Evaluasi pemenuhan penataan lingkungan pada Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan							
II.B.4.1.4	Pengawasan terhadap reklamasi Kawasan pasca tambang pada Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan							
II.B.4.1.5	Pengendalian pemanfaatan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan secara lestari, baik untuk pertambangan skala besar maupun skala kecil							
II.B.4.1.6	Identifikasi kerusakan lingkungan akibat Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan							

No	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.4.1.6	Pengendalian pengelolaan tambang	Seluruh Kecamatan						
II.B.4.1.6	Pengelolaan Kawasan pertambangan berwawasan lingkungan berkelanjutan	Seluruh Kecamatan						
II.B.4.1.6	Pembangunan instalasi pengolahan dan pemurnian hasil tambang	Seluruh Kecamatan						
II.B.4.1.6	Pengembangan Kawasan industri pertambangan	Seluruh Kecamatan						
II.B.4.1.6	Peningkatan pendapatan dan perekonomian Daerah	Seluruh Kecamatan						
II.B.4.1.6	Peningkatan kesejahteraan Masyarakat sekitar Kawasan	Seluruh Kecamatan						
II.B.4.1.6	Peningkatan nilai tambah barang tambang untuk ekspor	Seluruh Kecamatan						
II.B.4.1.6	Peningkatan penerapan penambangan yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja	Seluruh Kecamatan						
II.B.4.1.6	Peningkatan penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan	Seluruh Kecamatan						
II.B.4.1.6	Peningkatan keberlanjutan ekosistem di sekitar Kawasan	Seluruh Kecamatan						

No	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.4.1.6	Pemetaan Kawasan potensial pertambangan dan migas	Seluruh Kecamatan						
II.B.4.2	Pengembangan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik							
II.B.4.2.1	Pembangunan, peningkatan, pengembangan, pengamanan, dan pemeliharaan Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik	Kecamatan Cipatat Kecamatan Rongga						
II.B.4.2.2	Pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik							
II.B.5	Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri							
II.B.5.1	Penyusunan Masterplan dan delineasi lokasi Kawasan Industri Kecil dan Menengah (KIKM) dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) pada Kawasan Peruntukan Industri	Seluruh Kecamatan						
II.B.5.2	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Seluruh Kecamatan						
II.B.5.3	Penataan Kawasan Industri	Seluruh Kecamatan						
II.B.5.4	Penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Industri	Seluruh Kecamatan						

No	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.5.5	Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Industri	Seluruh Kecamatan						
II.B.5.6	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan Industri	Seluruh Kecamatan						
II.B.5.7	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Seluruh Kecamatan						
II.B.5.8	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Seluruh Kecamatan						
II.B.5.9	koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta Masyarakat	Seluruh Kecamatan						
II.B.5.10	Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	Seluruh Kecamatan						
II.B.5.11	Relokasi Kawasan industri	Seluruh Kecamatan						
II.B.5.12	Program pengendalian izin usaha industri	Seluruh Kecamatan						
II.B.5.13	Penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan	Seluruh Kecamatan						

No	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.5.14	Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan Peruntukan Industri	1. Kecamatan Batujajar; 2. Kecamatan Cihampelas; 3. Kecamatan Cikalongwetan; 4. Kecamatan Cipatat; 5. Kecamatan Cipeundeuy; 6. Kecamatan Ngamprah; dan 7. Kecamatan Padalarang.						
II.B.5.15	Optimalisasi KPI yang telah ditetapkan							
II.B.5.16	pengembangan industri yang berteknologi tinggi, ramah lingkungan, dan membangkitkan kegiatan ekonomi							
II.B.5.17	pengembangan industri yang menerapkan manajemen mutu dan kendali mutu							
II.B.5.18	pengembangan industri kecil dan menengah yang ramah lingkungan, hemat lahan dan dapat menyerap tenaga kerja lokal							
II.B.5.19	Sosialisasi dan Pemetaan pemenuhan Standar Industri Hijau							
II.B.5.20	Pembangunan Jalan antar Kawasan peruntukan industri							
II.B.5.21	Pengembangan Kawasan Industri Kecil dan Menengah (KIKM) dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) pada Kawasan Peruntukan Industri							

No	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.5.22	Pembangunan infrastruktur Kawasan Industri Kecil dan Menengah (KIKM) dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) pada Kawasan Peruntukan Industri							
II.B.5.23	Pembangunan Kawasan Industri Kecil dan Menengah (KIKM) dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) pada Kawasan Peruntukan Industri							
II.B.5.24	Penguatan Kawasan Industri Kecil dan Menengah (KIKM) dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) pada Kawasan Peruntukan Industri							
II.B.6	Perwujudan Kawasan Pariwisata							
II.B.6.1	Penyusunan masterplan atau rencana induk pariwisata kabupaten	Kabupaten Bandung Barat						
II.B.6.2	Peningkatan daya tarik destinasi wisata	Seluruh Kecamatan						
II.B.6.3	Pengelolaan daya tarik wisata	Seluruh Kecamatan						
II.B.6.4	Pengelolaan Kawasan strategis pariwisata	Seluruh Kecamatan						
II.B.6.5	Pengelolaan destinasi pariwisata	Seluruh Kecamatan						
II.B.6.6	Penetapan tanda daftar usaha pariwisata;	Seluruh Kecamatan						

No	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.6.7	Pemasaran daya tarik pariwisata, destinasi dan Kawasan strategis pariwisata dalam dan luar negeri	Seluruh Kecamatan						
II.B.6.8	Penyediaan prasarana (zona kreatif atau ruang kreatif atau Kabupaten kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif Daerah	Seluruh Kecamatan						
II.B.6.9	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;	Seluruh Kecamatan						
II.B.6.10	Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Seluruh Kecamatan						
II.B.6.11	Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Seluruh Kecamatan						
II.B.6.12	Pengembangan pusat budaya	Seluruh Kecamatan						
II.B.6.13	Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan peruntukan kegiatan pariwisata buatan serta desa wisata	Lokasi Wisata yang berada di 1. Jalur utara, 2. Jalur Selatan, dan 3. Jalur barat.						
II.B.6.14	Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi	Lokasi Wisata yang berada di 1. Jalur utara, 2. Jalur Selatan						

No	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya	3. Jalur barat.						
II.B.6.15	Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan peruntukan kegiatan pariwisata alam	Lokasi Wisata yang berada di Jalur utara, 2. Jalur Selatan, dan 3. Jalur barat.						
II.B.6.16	Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan peruntukan kegiatan pariwisata buatan	Lokasi Wisata yang berada di 1. Jalur utara, 2. Jalur Selatan, dan 3. Jalur barat.						
II.B.6.17	Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan peruntukan kegiatan pariwisata budaya	Lokasi Wisata yang berada di 1. Jalur utara, 2. Jalur Selatan, dan 3. Jalur barat.						
II.B.6.18	Identifikasi potensi wisata Bandung Barat	Lokasi Wisata yang berada di 1. Jalur utara 2. Jalur Selatan 3. Jalur barat:						
II.B.6.19	Identifikasi infrastruktur pendukung pariwisata berskala internasional, nasional	Seluruh Kecamatan						
II.B.6.20	Peningkatan kualitas Jalan menuju daya tarik wisata Provinsi di Kawasan Strategis Pariwisata dan	Seluruh Kecamatan						

No	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten							
II.B.6.21	Peningkatan kualitas jaringan internet di destinasi wisata	Seluruh Kecamatan						
II.B.6.22	Pengembangan pariwisata berbasis ketahanan dan mitigasi (Manajemen Krisis Kepariwisataan)	Seluruh Kecamatan						
II.B.6.23	Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan <i>creative center</i> /pusat ekonomi kreatif	1. Kecamatan Cikalongwetan 2. Kecamatan Cipeundeuy 3. Kec. Ngamprah 4. Kecamatan Padalarang						
II.B.6.24	Pengembangan Geopark	Kecamatan Cipatat						
II.B.6.25	Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	Seluruh Kecamatan						
II.B.7	Perwujudan Kawasan Permukiman							
II.B.7.a	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Bandung Barat						
II.B.7.b	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh (termasuk penyusunan DED)	Kabupaten Bandung Barat						
II.B.7.c	Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau	Kabupaten Bandung Barat						

No	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.7.1	Kawasan Permukiman Perkotaan							
II.B.7.1.1	Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan (semua Kawasan permukiman perkotaan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Batujajar; 2. Kecamatan Cihampelas; 3. Kecamatan Cikalongwtan; 4. Kecamatan Cililin; 5. Kecamatan Cipatat; 6. Kecamatan Cipeundeuy; 7. Kecamatan Cisarua; 8. Kecamatan Lembang; 9. Kecamatan Ngamprah; 10. Kecamatan Padalarang; dan 11. Kecamatan Saguling. 						
II.B.7.1.2	Penyediaan tanah untuk perumahan dan Kawasan permukiman melalui optimalisasi aset tanah milik Pemerintah Provinsi/Kabupaten, Tanah Negara yang dimohonkan dan pengadaan tanah (semua Kawasan permukiman perkotaan)							
II.B.7.1.3	Pengembangan Kawasan perdagangan							
II.B.7.1.4	Pencadangan tanah untuk kebutuhan pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman							
II.B.7.1.5	Perbaikan, dan pengembangan rumah tidak layak huni (semua Kawasan perkotaan)							
II.B.7.1.6	Pengembangan Prasarana dan Sarana							

No	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman							
II.B.7.1.7	Peningkatan teknologi perumahan							
II.B.7.1.8	Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Kesehatan sesuai standar dan skala pelayanan							
II.B.7.1.9	Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana							
II.B.7.1.10	Pengembangan Kawasan siap bangun secara kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat							
II.B.7.1.11	Penataan dan peningkatan sarana dan pelayanan dasar permukiman perkotaan							
II.B.7.1.12	Penyediaan RTH di Kawasan Permukiman Perkotaan							
II.B.7.1.13	Penyediaan Ruang Terbuka Publik							
II.B.7.1.14	Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU)							
II.B.7.1.15	Pengelolaan Keanekaragaman hayati							
II.B.7.1.16	Pengembangan RTH Keanekaragaman hayati	Kec. Padalarang Kec. Ngamprah						
II.B.7.1.17	Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi	Seluruh Kecamatan						

No	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.7.1.18	Pengembangan hunian vertikal	Kecamatan Padalarang						
		Kecamatan Cikalongwetan Kecamatan Cihampelas, Kecamatan Cipatat						
II.B.7.1.19	Pengembangan hunian vertikal pendukung Kawasan industri	Kecamatan Batujajar Kecamatan Padalarang						
II.B.7.1.20	Pembangunan rumah khusus/tematik	Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batujajar, Kecamatan ngamprah						
II.B.7.1.21	Penataan Kawasan/Permukiman Kumuh Berdasarkan SK Kumuh	Seluruh Kecamatan Perkotaan						
II.B.7.1.22	program pengembangan perumahan	Seluruh Kecamatan						
II.B.7.1.23	program Kawasan permukiman	Seluruh Kecamatan						
II.B.7.1.24	pprogram peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan permukiman	Seluruh Kecamatan						
II.B.7.1.25	program penataan bangunan gedung;	Seluruh Kecamatan						
II.B.7.1.26	program penataan bangunan dan lingkungannya	Seluruh Kecamatan						

No	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.7.1.27	program pengelolaan pendidikan	Seluruh Kecamatan						
II.B.7.1.28	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat	Seluruh Kecamatan						
II.B.7.1.29	pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Seluruh Kecamatan						
II.B.7.1.30	penyediaan sarana distribusi perdagangan	Seluruh Kecamatan						
II.B.7.1.31	pengadaan dan pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Seluruh Kecamatan						
II.B.7.1.32	pengadaan dan pemeliharaan atau rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Seluruh Kecamatan						
II.B.7.1.33	pengadaan dan pemeliharaan atau rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Seluruh Kecamatan						
II.B.7.1.34	pengembangan rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	Seluruh Kecamatan						
II.B.7.1.35	pengembangan perumahan tahan gempa pada Kawasan rawan bencana	Seluruh Kecamatan						

No	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.7.1.36	penataan dan pengembangan pasar rakyat	Seluruh Kecamatan						
II.B.7.1.37	pengendalian pembangunan pusat perbelanjaan dan toko swalayan	Seluruh Kecamatan						
II.B.7.1.38	penanganan rehabilitasi pasca bencana	Seluruh Kecamatan						
II.B.7.2	Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan							
II.B.7.2.1	Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan	Seluruh Kecamatan						
II.B.7.2.2	Penyediaan tanah untuk perumahan dan Kawasan permukiman melalui optimalisasi aset tanah milik Pemprov/ Kab., Tanah Negara yang dimohonkan dan pengadaan tanah							
II.B.7.2.3	Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi							
II.B.7.2.4	Pengembangan Kawasan perdagangan							
II.B.7.2.5	Pencadangan tanah untuk kebutuhan pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman							

No	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.7.2.7	Perbaikan rumah tidak layak huni							
II.B.7.2.8	Penataan Kawasan/Permukiman Kumuh berdasarkan hasil kajian							
II.B.7.2.9	Pengembangan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman							
II.B.7.2.10	Peningkatan teknologi perumahan							
II.B.7.2.11	Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Kesehatan sesuai standar dan skala pelayanan							
II.B.7.2.12	Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana							
II.B.7.2.13	Penyediaan perumahan perdesaan melalui bantuan pemerintah dan pembangunan perumahan swadaya							
II.B.7.2.14	Penyediaan RTH							
II.B.7.2.15	Penyediaan Ruang Terbuka Publik	Seluruh Kecamatan						
II.B.7.2.16	Pembangunan rumah khusus/tematik	Seluruh Kecamatan						
II.B.7.1.17	Penataan permukiman tematik : desa budaya, desa wisata, desa tematik peternakan.	Seluruh Kecamatan						
II.B.7.1.18	program pengembangan perumahan	Seluruh Kecamatan						

No	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.7.1.19	program Kawasan Permukiman Perdesaan	Seluruh Kecamatan						
II.B.7.1.20	program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh	Seluruh Kecamatan						
II.B.7.1.21	program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum	Seluruh Kecamatan						
II.B.7.1.22	program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan permukiman	Seluruh Kecamatan						
II.B.7.1.23	program penataan bangunan gedung	Seluruh Kecamatan						
II.B.7.1.24	program penataan bangunan dan lingkungannya	Seluruh Kecamatan						
II.B.7.1.25	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat	Seluruh Kecamatan						
II.B.7.1.26	pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Seluruh Kecamatan						
II.B.7.1.27	pengadaan dan pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Seluruh Kecamatan						
II.B.7.1.28	pengadaan dan pemeliharaan atau rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Seluruh Kecamatan						

No	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.7.1.29	pengembangan rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	Seluruh Kecamatan						
II.B.7.1.30	pengembangan perumahan tahan gempa pada Kawasan rawan bencana	Seluruh Kecamatan						
II.B.7.1.31	penataan dan pengembangan pasar rakyat	Seluruh Kecamatan						
II.B.7.1.32	pengendalian pembangunan pusat perbelanjaan dan toko swalayan	Seluruh Kecamatan						
II.B.7.1.33	penanganan rehabilitasi pasca bencana	Seluruh Kecamatan						
II.B.8	Perwujudan Kawasan Transportasi							
II.B.8.1	Pembangunan Kawasan Transportasi	Kecamatan Cikalongwetan						
II.B.8.2	Penataan dan peningkatan kualitas Kawasan transportasi							
II.B.8.3	Pengendalian Kawasan transportasi							
II.B.9	Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan							
II.B.9.1	penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	1. Kecamatan Batujajar; 2. Kecamatan Cipatat; 3. Kecamatan Cisarua;						
II.B.9.2	pengembangan sapsas dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan							

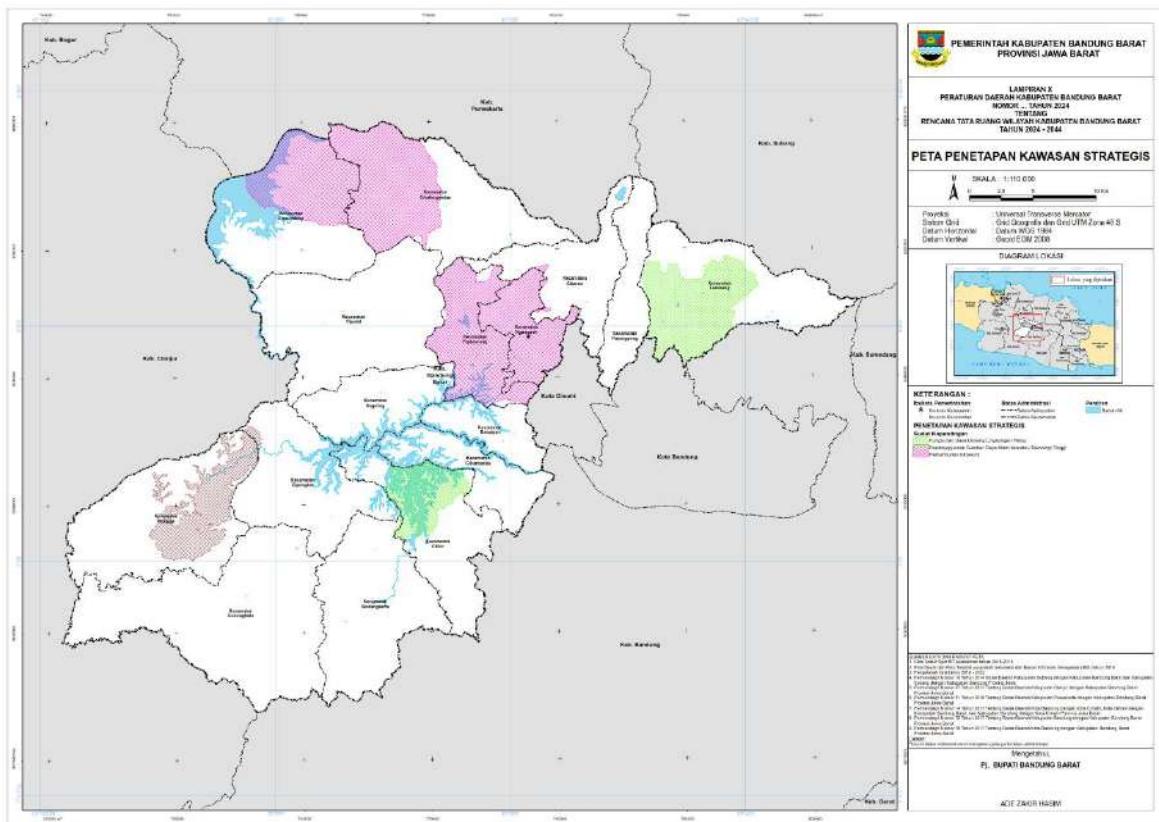
No	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.9.3	Pengoptimalan fungsi Kawasan pertahanan dan keamanan yang ada	4. Kecamatan Lembang; 5. Kecamatan Ngamprah;						
II.B.9.4	Pengamanan Kawasan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan yang baru sesuai dengan rencana tata ruang Kawasan pertahanan keamanan	6. Kecamatan Padalarang; 7. Kecamatan Parongpong; 8. Kecamatan Saguling						

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044

2.7.4 Pengembangan Kawasan Strategis

Kawasan Strategis Kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan dalam lingkup kabupaten. Pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Bandung Barat dimaksudkan untuk mempercepat terbentuknya struktur dan pola pemanfaatan ruang sesuai dengan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat. Kebijakan pembangunan kewilayahan dalam rangka menciptakan suatu rentang kendali yang proporsional dan mencapai hasil yang optimal dalam pembangunan setiap wilayah dilakukan melalui Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Kabupaten Bandung Barat.

Gambar 2. 39 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Bandung Barat



Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044

Tabel 2. 80 Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten Bandung Barat

No	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I		II			
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
III	Perwujudan Kawasan Strategis							
III.A	Kawasan Strategis Nasional							
III.A.1	Pengembangan Kawasan Strategis Nasional	KSN Perkotaan Cekungan Bandung; KSN Terpong Bintang Bosscha						
III.A.2	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional							
III.B	Kawasan Strategis Provinsi							
III.B.1	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang	KSP Kawasan Bandung Urata (KBU)						

No	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
III.B.2	Peningkatan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang							
III.B.3	Monitoring dan evaluasi							
III.B.4	Fasilitasi kerjasama antar Pemerintah Daerah							
III.B.5	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria Pengendalian Pemanfaatan Ruang							
III.B.6	Rehabilitasi Kawasan hutan, Kawasan imbuhan/resapan air dan lahan kritis di hulu DAS kritis dan sangat kritis di Cekungan Air Tanah Bandung-Soreang							
III.B.7	Normalisasi dan rehabilitasi saluran-saluran pembuangan akhir Wilayah Sungai Citarum							
III.C	Kawasan Strategis Kabupaten							
III.C.1	Pertumbuhan Ekonomi							
III.C.1.1	Penyusunan Masterplan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	Kecamatan Cisarua Kecamatan Ngamprah Kecamatan Padalarang						
III.C.1.2	Peningkatan Produktivitas Kawasan							

No	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
III.C.1.3	Pengembangan sarana, prasarana dan utilitas Kawasan	Kecamatan Cikalongwetan						
III.C.1.4	Pengembangan Kegiatan Pariwisata							
III.C.1.5	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis							
	Penataan Kawasan pusat pemerintahan							
	Penataan Kawasan sekitar Stasiun Kereta Api Padalarang							
	Penataan RTH di sekitar waduk Saguling							
	Penataan Pusat Kota Padalarang							
III.C.1.6	Penyusunan Rencana Penataan Kawasan atau Masterplan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi							
III.C.1.7	Peningkatan Produktivitas Kawasan							
III.C.1.8	Pengembangan sarana, prasarana dan utilitas Kawasan							
III.C.1.9	Pengembangan Kegiatan Pariwisata							
III.C.1.10	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis							
III.C.1.11	Penyusunan Rencana Penataan	Kecamatan Cipeundeuy						

No	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Kawasan atau Masterplan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi							
III.C.1.12	Peningkatan Produktivitas Kawasan	Kecamatan Cipongkor Kecamatan Rongga						
III.C.1.13	Pengembangan Sapras dan utilitas Kawasan							
III.C.1.14	Pengembangan Kegiatan Industri							
III.C.1.15	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis							
III.C.2	Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi							
III.C.2.1	Penyusunan Masterplan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi							
III.C.2.2	Peningkatan Produktivitas Kawasan	Kecamatan Cipongkor Kecamatan Rongga						
III.C.2.3	perlindungan dan pelestarian Kawasan							
III.C.2.4	Pengembangan sarana, prasarana dan utilitas Kawasan							
III.C.2.5	Pengembangan Kegiatan Pariwisata							
III.C.2.6	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis							

No	Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			Tahap					
			I	II				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
III.C.3	Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup							
III.C.3.1	Penyusunan Rencana Penataan Kawasan atau Masterplan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan	Kecamatan Cililin Kecamatan Lembang Kecamatan Sindangkerta						
III.C.3.2	Perlindungan dan pelestarian Kawasan							
III.C.3.3	Pengembangan sarana, prasarana dan utilitas Kawasan							
III.C.3.4	Pengembangan Agrbisnis							
III.C.3.5	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis							

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044

2.7.5 Kebijakan Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Provinsi Jawa Barat dan Nasional

Dalam rencana struktur ruang RTRW Provinsi Jawa Barat 2022-2042 tertuang bahwa Kabupaten Bandung Barat merupakan bagian dari rencana pengembangan sistem perkotaan Pusat Kegiatan Nasional – Provinsi (PKNp), yaitu kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki skala internasional, nasional atau beberapa provinsi. Kabupaten Bandung Barat merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Bandung Raya. Fasilitas minimum yang harus dimiliki Kabupaten Bandung Barat sebagai PKNp adalah pusat bisnis kegiatan utama yang akan dikembangkan dengan skala internasional maupun nasional dan akan diusulkan menjadi Pusat Kegiatan Nasional.

Penetapan Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dimana Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu bagiannya, didasari oleh perkembangan kegiatan perkotaan yang sangat pesat, terutama pada sektor industri, perdagangan dan jasa, serta pendidikan tinggi. Salah satu indikasi pesatnya perkembangan tersebut adalah tingginya alih fungsi lahan menuju kawasan perkotaan dan tingginya tingkat urbanisasi. Oleh karena itu, pengendalian pertumbuhan di Kawasan Perkotaan Bandung Raya menjadi salah satu amanat yang harus dipenuhi oleh wilayah-wilayah di dalamnya. Salah tujuannya untuk mengurangi kecendrungan alih fungsi lahan yang menerus di kawasan perkotaan, mengingat target jumlah kawasan lindung yang ditargetkan Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 45%. Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara (KBU) Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat

2.7.5.1 Kawasan Perkotaan Bandung Raya

Dalam Rencana Struktur Ruang Dokumen RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 juga ditetapkan sistem perkotaan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, yang di dalamnya juga terdapat beberapa wilayah yang berada di Kabupaten Bandung Barat, yaitu Kecamatan Padalarang sebagai Kota Hierarki II serta Kecamatan Cililin, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Cisarua, dan Kecamatan Lembang sebagai Kota Hierarki III. Sistem perkotaan tersebut dapat disimak pada tabel Tabel berikut.

Tabel 2. 81 Sistem Perkotaan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya

PKN	Kota Hierarki I	Kota Hierarki II	Kota Hierarki III
Kawasan Perkotaan Bandung Raya	Kota Bandung		
	Kab. Bandung	Soreang	Ciwidey, Banjaran, Majalaya, Ciparay, Cicalengka, Rancaekek, Cilengkrang
	Kabupaten Bandung Barat	Padalarang	Cililin, Ngamprah Cisarua, Lembang
	Kota Cimahi		
	Kab. Sumedang		Tanjungsari

Sumber: RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029

2.7.5.2 Kawasan Bandung Utara (KBU)

Kawasan Bandung Utara ditetapkan sebagai kawasan strategis Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam RTRW Provinsi Jawa Barat tahun 2022-2042. Saat ini, pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara tidak terkendali sehingga mengancam keberlangsungan fungsi konservasi kawasan daerah sebagai daerah tangkapan air. Kawasan Bandung Utara atau yang disingkat KBU, memiliki peranan penting dalam menjamin keberlanjutan kehidupan dan keseimbangan lingkungan hidup di Cekungan Bandung. Kawasan Bandung Utara merupakan Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat yang dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029. Penataan ruang pada kawasan ini diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara regional dan dalam berbagai aspek.

Kawasan Bandung Utara sebagai kawasan strategis provinsi berperan sebagai kawasan lindung tangkapan air harus dimanfaatkan sebagaimana fungsinya. Fungsi hidrologis Kawasan Bandung Utara berperan untuk menjamin kepentingan pembangunan keberlanjutan. Perda Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2016 ini dijadikan pedoman peraturan zonasi KSP, evaluasi RTRW, penerbitan izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah, dan pemberian hak atas penggunaan tanah dalam konteks Kawasan Bandung Utara.

Secara administratif, Kawasan Bandung Utara meliputi sebagian Kabupaten Bandung, seluruh Kota Bandung dan Kota Cimahi, dan sebagian Kabupaten Bandung Barat. Kawasan Bandung Utara yang termasuk ke dalam daerah Kabupaten Bandung Barat yang tercantum dalam pasal 11 poin (4) adalah:

1. Sebagian daerah Kecamatan Cikalongwetan
2. Kecamatan Cisarua
3. Kecamatan Lembang
4. Sebagian Kecamatan Ngamprah
5. Sebagian Kecamatan Padalarang
6. Kecamatan Parongpong

Berdasarkan pola ruang, Kawasan Bandung Utara terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Daerah kawasan lindung Kawasan Bandung Utara yang masuk kedalam wilayah Kab Bandung Barat yang tercantum dalam pasal 14 adalah:

1. Kawasan pelestarian alam: sebagian Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda serta Taman Wisata Alam Tangkuban Perahu
2. Kawasan suaka alam: Cagar Alam Tangkuban Perahu
3. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan: Observatorium Bosscha
4. Kawasan rawan bencana alam geologi: Sesar Lembang

2.7.5.3 Proyek Strategis Nasional dan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional terdapat 225 proyek strategis diantaranya Proyek Strategis Nasional yang berada di wilayah Kab. Bandung Barat antara lain:

1. Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
2. Kawasan TOD Walini.
3. PLTA Upper Cisokan 260 MW.

Wilayah Kabupaten Bandung Barat termasuk ke dalam salah satu daerah yang berada di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, terdapat arahan kebijakan yang diamanatkan pada Kabupaten Bandung Barat dalam menukseskan pembangunan Provinsi Jawa Barat, dengan demikian pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu menyelaraskan amanat tersebut ke dalam RPJPD, yang mencakup beberapa sektor, antara lain sektor jalan & jembatan, transportasi, kawasan, perumahan, bendungan & irigasi, air bersih & sanitasi, serta beberapa sektor lainnya yang berada di lingkup wilayah Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

- a. Jalan arteri, mencakup
 - Citarum - Rajamandala - Bts. Kota Padalarang (Kabupaten Bandung Barat);
 - Jalan Raya Padalarang (Padalarang – Kabupaten Bandung Barat);

- Eks Toll Rajamandala (Kabupaten Bandung Barat);
 - Jalan Raya Rajamandala (Rajamandala - Kabupaten Bandung Barat);
 - Bts. Kota Padalarang - Bts. Kota Bandung (Kabupaten Bandung Barat);
 - Jalan Raya Padalarang (Padalarang – Kabupaten Bandung Barat);
- b. Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
- Sp. Orion-Cihaliwung (Kabupaten Bandung Barat);
 - Padalarang (Sp.3 Stasion)-Sp. Cisarua (Kabupaten Bandung Barat);
- c. Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)
- Cihampelas-Gununghalu (Kabupaten Bandung Barat)
- d. Jalan tol
- Cikampek-Purwakarta-Padalarang (JW26);
 - Padaleunyi/Padalarang-Cileunyi (JW27);
 - Ciranjang-Padalarang (JW25) (rencana);
 - Cipularang-Lembang (JW65) (rencana);
 - Bandung Utara Toll Road (JW66.1) (rencana);
- e. Jalur KA, mencakup:
- Cikampek-Padalarang
 - Jakarta–Bandung (Kereta api cepat);
 - Cipatat-Sasaksaat-Cilame (rencana);
 - Kereta api perkotaan Leuwi Panjang–Cimahi–Padalarang–Walini (rencana);
 - Kereta api perkotaan Babakan Siliwangi-Lembang-Maribaya (rencana)
- f. Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, mencakup
- Waduk Saguling,
 - Waduk Cirata,
- g. Transportasi Udara
- Lapangan Udara Suparlan
- h. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Jaringan gas perkotaan
 - Depo Bahan Bakar Minyak Darat Padalarang

- i. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
 - Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Waduk Cirata, Waduk Saguling
 - Pembangkit Listrik Tenaga Air Cisokan,
 - Pembangkit Listrik Tenaga Air Saguling,
 - Pembangkit Listrik Tenaga Air Cirata, dan
 - Pembangkit Listrik Tenaga Air Rajamandala
 - Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Tangkuban Perahu
- j. Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota
 - WS Citarum
- k. Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - DI Cijanggel di Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi
 - DI Bongkok di Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi
 - DI Bongkok di Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi
- l. Sumber air berupa air permukaan pada situ
 - Situ Ciburuy di Kecamatan Padalarang dan
 - Situ Lembang di Kecamatan Parongpong
- m. Jaringan pengendalian banjir
 - Sungai Cipunagara (Daerah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi)
- n. Sistem jaringan persampahan
 - TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat isu-isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung Barat. Isu-isu strategis yang dihasilkan merupakan hasil analisis tabulasi silang terhadap isu-isu strategis di tingkat internasional, nasional, regional dan lokal, serta hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2005-2025. Berikut adalah permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis Kabupaten Bandung Barat.

3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Perumusan permasalahan pembangunan jangka panjang daerah di Kabupaten Bandung Barat dilakukan dengan menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan berkelanjutan menyerukan upaya bersama (kolaborasi) guna membangun masa depan yang inklusif, berkelanjutan dan tangguh untuk manusia dan planet.

Agar pembangunan berkelanjutan dapat dicapai, penting untuk menyelaraskan tiga elemen inti: pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial dan perlindungan lingkungan hidup (Bappenas, 2023). Pembangunan berkelanjutan juga harus memperhatikan aspek tata kelola pemerintahan sebagai pendukung. Elemen-elemen ini saling terkait dan semuanya amat penting untuk kesejahteraan diri individu dan masyarakat.

Permasalahan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung Barat tahun 2025-2045 dirumuskan menggunakan metode analisis akar penyebab atau *root cause analysis* (RCA). Analisis akar masalah dipetakan dengan mengadopsi konsep analisis kebijakan publik yang disampaikan William Dunn. Menurut Dunn (2019) kebijakan publik harus dimulai dengan pemetaan atau strukturisasi masalah. Masalah tersebut memiliki tiga tingkatan yang berbeda, yaitu masalah meta (*meta problem*), masalah substantif (*substantive problem*) dan masalah formal (*formal problem*). Meta masalah adalah masalah di tingkat makro, masalah substantif adalah masalah di tingkat meso, sedangkan masalah formal adalah masalah di tingkat mikro. Strukturisasi masalah pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung Barat hanya akan menggunakan struktur level makro dan meso, karena struktur masalah level mikro tidak terlalu bermanfaat secara aksiologis dalam perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung Barat.

Berbagai konsep dan metode tersebut digunakan sebagai acuan untuk menentukan permasalahan pembangunan melalui riset untuk pemetaan masalah jangka panjang Kabupaten Bandung Barat. Deskripsi pemetaan permasalahan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung Barat dapat dicermati sebagai berikut:

3.1.1 Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Permasalahan pembangunan jangka panjang dalam rumpun pembangunan sumber daya manusia yang dihadapi oleh Kabupaten Bandung Barat adalah kualitas sumber daya manusia yang berkarakter. Permasalahan ini berhubungan dengan beberapa faktor penentu seperti akses dan kualitas pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan dan pembangunan serta perlindungan sosial yang belum optimal. Pemetaan mengenai permasalahan pembangunan jangka panjang dalam bidang sumber daya manusia dapat dicermati di dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1 Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia

No	Permasalahan Pembangunan	Penyebab
1	Pemenuhan akses dan kualitas layanan pendidikan	Masih perlu ditingkatkannya kualifikasi dan kompetensi guru
		Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang layanan pendidikan yang berkualitas masih belum merata
		Masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan
		Belum optimalnya penguatan pendidikan karakter pada anak
		Belum optimalnya peran keluarga dalam pembentukan karakter anak
		Pembangunan dan perlindungan sosial belum optimal
2	Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata	Akses layanan kesehatan yang berkualitas masih belum merata
		Belum optimalnya pelayanan kesehatan terhadap ibu dan bayi
		Jumlah tenaga medis dan non medis masih belum sesuai standar
		Belum optimalnya gerakan PHBS
3	Perlindungan sosial yang adaptif	Masih adanya pernikahan dini
		Pemberdayaan dan bantuan sosial masih belum tepat sasaran
		Cakupan perlindungan sosial bagi individu dan/atau kelompok rentan masih perlu ditingkatkan

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kab. Bandung Barat, 2024

3.1.2 Permasalahan Pembangunan Ekonomi

Permasalahan pembangunan jangka panjang dalam rumpun pembangunan ekonomi yang dihadapi oleh Kabupaten Bandung Barat adalah perihal pembangunan ekonomi inklusif. Permasalahan ini berhubungan dengan beberapa faktor yang memengaruhi kondisi ekonomi daerah secara umum seperti pertumbuhan dan perkembangan ekonomi belum optimal, penurunan kemiskinan dan pemerataan pendapatan belum optimal, dan perluasan akses dan kesempatan belum optimal. Pemetaan tentang permasalahan pembangunan jangka panjang dalam bidang ekonomi yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat tersebut dapat dicermati di dalam tabel berikut.

Tabel 3. 2 Permasalahan Pembangunan Ekonomi

No	Permasalahan Pembangunan	Penyebab
1	Pembangunan ekonomi inklusif	Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi belum optimal
		Penurunan kemiskinan dan pemerataan pendapatan belum optimal
		Perluasan akses dan kesempatan belum optimal

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kab. Bandung Barat, 2024

3.1.3 Permasalahan Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan

Permasalahan pembangunan jangka panjang dalam rumpun tata kelola pemerintahan yang dihadapi oleh Kabupaten Bandung Barat yaitu penerapan reformasi birokrasi yang belum optimal. Permasalahan dalam bidang tata kelola ini sendiri berhubungan dengan dua faktor penentu diantaranya adalah belum optimalnya sistem manajemen kinerja serta belum optimalnya penerapan SPBE. Deskripsi lebih detail tentang permasalahan pembangunan jangka panjang bidang tata kelola pemerintahan tersebut dapat dicermati di dalam tabel berikut:

Tabel 3. 3 Permasalahan Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan

No	Permasalahan Pembangunan	Penyebab
1	Penerapan reformasi birokrasi belum optimal	Belum optimalnya sistem manajemen kinerja
		Belum optimalnya penerapan SPBE

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kab. Bandung Barat, 2024

3.1.4 Permasalahan Pembangunan Lingkungan Hidup

Permasalahan pembangunan jangka panjang di bidang lingkungan hidup yang dihadapi oleh Kabupaten Bandung Barat yaitu kualitas lingkungan hidup dan pemerataan infrastruktur wilayah belum optimal. Permasalahan dalam bidang lingkungan hidup teridentifikasi berhubungan dengan beberapa penentu, diantaranya yaitu belum optimalnya pengelolaan sampah dari hulu dan hilir, pengelolaan dan konservasi sumber daya air belum optimal, degradasi daerah tangkapan air, belum optimalnya inovasi dan dukungan teknologi dalam manajemen sumber daya air, dan banyaknya lahan kritis yang belum terkelola. Permasalahan pembangunan jangka panjang daerah di bidang lingkungan hidup dapat dicermati di dalam tabel berikut:

Tabel 3. 4 Permasalahan Pembangunan Lingkungan Hidup

No	Permasalahan Pembangunan	Penyebab
1	Kualitas lingkungan hidup dan pemerataan infrastruktur wilayah belum optimal	Belum optimalnya pengelolaan sampah dari hulu dan hilir
		Pengelolaan dan konservasi sumber daya air belum optimal
		Degradasi daerah tangkapan air
		Belum optimalnya inovasi dan dukungan teknologi dalam manajemen sumber daya air
		Belum optimalnya upaya penurunan emisi GRK
		Belum optimalnya upaya adaptasi perubahan iklim
		Banyaknya lahan kritis yang belum terkelola

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kab. Bandung Barat, 2024

3.1.5 Permasalahan Pembangunan Aspek Dukungan Infrastruktur

Permasalahan pembangunan jangka panjang di bidang aspek dukungan infrastruktur yang dihadapi oleh Kabupaten Bandung Barat yaitu kualitas lingkungan hidup dan pemerataan infrastruktur wilayah belum optimal. Permasalahan dalam bidang dukungan infrastruktur ini berhubungan dengan beberapa faktor penentu, diantaranya belum meratanya layanan infrastruktur dasar, masih rendahnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat pertumbuhan, belum optimalnya pengelolaan sanitasi dan air limbah, belum optimalnya antisipasi mitigasi bencana, serta belum meratanya layanan akses terhadap air minum layak dan aman. Permasalahan pembangunan jangka panjang dalam bidang dukungan infrastruktur dapat dicermati di dalam tabel yang disajikan di bawah sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Permasalahan Pembangunan Aspek Dukungan Infrastruktur

No	Permasalahan Pembangunan	Penyebab
1	Kualitas lingkungan hidup dan pemerataan infrastruktur wilayah belum optimal	Belum meratanya layanan infrastruktur dasar
		Masih rendahnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat pertumbuhan
		Belum optimalnya pengelolaan sanitasi dan air limbah
		Belum optimalnya antisipasi mitigasi bencana
		Belum meratanya layanan akses terhadap air minum layak dan aman

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kab. Bandung Barat, 2024

3.2 Isu Nasional

Isu-isu yang berada di level nasional juga perlu menjadi perhatian dalam perumusan isu strategis daerah. Beberapa isu jangka panjang pada level nasional sendiri dapat dicermati dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. RPJPN memiliki rumusan visi Indonesia Emas 2045, NKRI Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. NKRI merujuk kepada negara kepulauan yang memiliki ketangguhan secara ekonomi, politik, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim di Dunia.

Berikut merupakan beberapa isu jangka panjang pada level nasional yang tercantum dalam dokumen RPJPN 2025-2045:

1. Produktivitas rendah;
2. IPTEKIN dan riset lemah;
3. Deindustrialisasi dini dan produktivitas pertanian rendah;
4. Pariwisata di bawah potensinya;
5. Ekonomi laut belum optimal;
6. Kontribusi UMKM dan koperasi kecil;
7. Infrastruktur dan literasi digital rendah;
8. Pembangunan belum berkelanjutan;
9. Integrasi domestik terbatas;
10. Kualitas SDM yang masih rendah;
11. Tata kelola pemerintahan belum optimal;
12. Kepastian dan penegakan hukum masih lemah;
13. Demokratisasi belum optimal;
14. Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa.

Diketahui bahwa terdapat 14 (empat belas) isu strategis jangka panjang pada level nasional. Penyelesaian keempat belas isu strategis ini menjadi kunci bagi perwujudan visi Indonesia Emas 2045. Berikut merupakan uraian perihal empat belas isu strategis nasional:

3.2.1 Produktivitas Rendah

Kondisi produktivitas yang rendah dicerminkan melalui rata-rata produktivitas yang diukur melalui Total Factor Productivity (TFP) Indonesia yang tumbuh negatif dalam kurun waktu 2005-2019 sebesar 0,66. Capaian ini cukup relatif tertinggal jika dibandingkan negara-negara lain seperti Kore Selatan pada posisi menuju negara maju dalam kurun waktu 1971-1995 dengan capaian sebesar 1,61 dan juga Tiongkok selama kurun waktu 2005-2019 dengan capaian sebesar 1,60.

Kondisi rendahnya produktivitas ini diidentifikasi disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah: kualitas SDM yang cukup jauh tertinggal khususnya pada SDM perempuan, produktivitas sektor ekonomi rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal, dan kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Produktivitas yang rendah ini berimplikasi kepada pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat dan penurunan pertumbuhan ekonomi potensial secara umum.

3.2.2 IPTEKIN dan riset lemah

Isu jangka panjang pada level nasional selanjutnya adalah IPTEKIN dan riset masih lemah. Kondisi ini tercermin dari jumlah peneliti riset dan inovasi per satu juta penduduk di Indonesia pada tahun 2019 (388 peneliti per satu juta penduduk) masih cukup rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Thailand (1.790), Singapura (7.287), dan Korea Selatan (8.408). Jumlah paten yang diajukan di Indonesia pada tahun 2021 juga masih jauh tertinggal dari negara-negara lain, dengan angka paten yang diajukan di Indonesia sebesar 1.445 paten, Malaysia dengan 1.863 paten, Singapura dengan angka paten sebesar 9.766 paten, dan Korea Selatan dengan pengajuan paten sebesar 267.527 paten. Dari aspek H-Indeks, Indonesia masih relatif tertinggal juga dengan negara-negara lain dengan skor 284, dengan negara-negara lain berada di atas Indonesia seperti Malaysia (415), Singapura (697), dan Korea Selatan (810). Selain beberapa hal yang sudah disampaikan, kondisi lemahnya IPTEKIN dan riset ini juga tercermin dari masih lemahnya kerja sama lembaga riset dan industri, masih terbatasnya lembaga riset domestik dan internasional, serta masih belum berkembangnya kesadaran ilmiah.

3.2.3 Deindustrialisasi dini dan produktivitas pertanian rendah

Isu jangka panjang selanjutnya adalah deindustrialisasi dini dan produktivitas pertanian rendah. Deindustrialisasi dini ini dicerminkan dengan menurunnya kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB, dimana pada tahun 2005 kontribusi sektor manufaktur sebesar 27,41 persen menjadi hanya 18,34 persen pada tahun 2022.

Beberapa hal yang menyebabkan kontribusi manufaktur terhadap PDB terus menurun diantaranya adalah terjadinya pelemahan sektor manufaktur, rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem industri di luar Jawa, dan terjadi ekonomi biaya tinggi yang disebabkan oleh biaya logistik dan tingkat suku bunga. Produktivitas sektor pertanian juga diidentifikasi menurun dari angka Rp41,5 juta per pekerja pada tahun 2010 menjadi hanya Rp22,9 juta per pekerja pada tahun 2022, dimana hal ini disebabkan oleh lambatnya regenerasi petani, kurangnya tingkat keterampilan petani dan nelayan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, belum adanya standar proses, masih lemahnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum, serta semakin berkurangnya daya dukung lahan.

3.2.4 Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata

Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata menjadi salah satu isu strategis jangka panjang pada level nasional dalam RPJPN 2025-2045. Masih belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas, dan amenitas, serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan cenderung masih cukup rendah. Perubahan preferensi pasar dan disrupti terkait dengan aspek digitalisasi dan kebencanaan juga teridentifikasi cukup berpengaruh terhadap kondisi belum optimalnya pemanfaatan pariwisata. Selain belum optimalnya pemanfaatan potensi sektor pariwisata, sektor ekonomi kreatif juga tercatat masih belum optimal dikarenakan kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai serta transformasi digital yang belum merata, inovasi dan pengembangan produk masih rendah, ekosistem untuk mendukung komersialisasi belum terbentuk, dan akses ke pasar internasional juga masih terbatas.

3.2.5 Ekonomi laut belum optimal

Isu nasional selanjutnya dalam RPJPN 2025-2045 adalah perekonomian dari ekonomi laut yang belum optimal. Indonesia sendiri memiliki potensi ekonomi laut yang tinggi namun potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal demi penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Hal ini dicerminkan dari kontribusi PDB Kemaritiman yang masih berada di angka 7,60 persen. Beberapa hal yang membuat pemanfaatan ekonomi biru masih belum optimal diantaranya adalah rendahnya pemanfaatan sumber daya laut, belum berkembangnya pemanfaatan *Sea Lines of Communication* (SloC) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), belum optimalnya pengelolaan Wilayah pengelolaan Perikanan (WPP) dan pengembangan budaya perikanan, belum berkembangnya diversifikasi industri dan *emerging sector* lain yang memanfaatkan sumber daya dan kekayaan laut dalam menciptakan nilai tambah ekonomi, serta masih terbatasnya pengembangan riset dan teknologi kelautan. Beberapa tantangan dalam optimalisasi sektor kelautan diantaranya adalah rendahnya penanganan sampah plastik, tingginya kegiatan *illegal unreported and unregulated fishing* (IUUF), serta belum optimalnya tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut. Konektivitas jalur laut dan penyeberangan juga menjadi isu penting perihal kelautan di Indonesia yang memengaruhi konektivitas domestik maupun global.

3.2.6 Kontribusi UMKM dan koperasi kecil

Masih rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi terhadap penciptaan nilai tambah ekonomi merupakan salah satu permasalahan yang ada di level nasional. Kondisi cukup tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor ini dengan kontribusi terhadap perekonomian yang terlatif rendah membuat kondisi ini menjadi cukup kontradiktif. Proporsi UMKM di Indonesia mencapai 99,99 persen dari total pelaku usaha serta dapat menyerap tenaga kerja mencapai 96,92 persen pada tahun 2019, namun dengan kontribusi ekonomi terhadap PDB sebesar 60,51 persen pada tahun 2019 serta proporsi volume usaha koperasi terhadap PDB hanya 1,07 persen.

Beberapa tantangan dalam sektor ini diantaranya adalah sebagian besar tenaga kerja dalam UMKM merupakan pekerja berkeahlian rendah, banyak usaha yang bergerak di sektor dengan nilai tambah rendah, rendahnya penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha, rendahnya kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi, dan rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil.

3.2.7 Infrastruktur dan literasi digital rendah

Isu selanjutnya pada level nasional adalah infrastruktur dan literasi digital yang masih rendah. Beberapa permasalahan dari sisi penawaran dalam hal ini adalah kesiapan infrastruktur TIK meliputi kapabilitas dan kapasitas infrastruktur TIK berupa penetrasi jaringan, keterbatasan manajemen spektrum, keterbatasan kapasitas *data center*, dan rendahnya penerapan kebijakan TIK. Dari aspek permintaan juga terdapat beberapa masalah yang dihadapi diantaranya adalah rendahnya adopsi teknologi, penerapan teknologi untuk hal yang tidak produktif, konten lokal yang belum memadai, dan daya beli yang masih rendah terhadap perangkat telekomunikasi maupun internet.

Beberapa permasalahan lain dalam aspek infrastruktur dan literasi digital diantaranya adalah permasalahan mengenai talenta digital, riset dan inovasi, dan keamanan siber yang belum memadai serta ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi dan produk luar negeri. Berbagai keterbatasan tersebut menyebabkan cakupan jangkauan jaringan 4G juga belum merata, dengan jumlah pengguna internet hanya sebesar 62,1 persen dari total populasi pada tahun 2021, masih berada di belakang negara-negara lain seperti Malaysia dengan angka 96,8 persen dan Thailand sebesar 85,3 persen.

3.2.8 Pembangunan belum berkelanjutan

Permasalahan selanjutnya dalam isu level nasional adalah proses pembangunan yang selama ini dilakukan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip yang berkelanjutan. Demi menjaga daya tampung dan daya dukung lingkungan diperlukan penerapan ekonomi hijau secara menyeluruh.

Pencemaran air, udara, dan tanah juga terus terjadi akibat dari pembangunan yang tidak berkelanjutan. Hal ini menyebabkan ketahanan ekologi mengalami tantangan berupa tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. Dari aspek energi juga masih terjadi permasalahan akses yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah serta masih rendahnya penggunaan energi baru terbarukan (EBT). Beberapa tantangan dalam penerapan ekonomi hijau diantaranya adalah penggunaan energi fosil yang masih tinggi dalam kebutuhan sehari-hari, dimana hal ini dicerminkan dengan porsi dari energi fosil terhadap produksi listrik sebesar 87,1 persen pada tahun 2021 dan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 1.317 GtCO₂eq pada tahun 2021 yang berasal dari pembangkit listrik serta operasional dari moda transportasi. Timbulan sampah B3 juga terus mengalami peningkatan hingga 74 juta ton pada tahun 2022. Persoalan lingkungan ini juga diperparah dengan kondisi masih tingginya permasalahan pertanahan dan terbatasnya Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) yang tersedia, rendahnya produktivitas perkotaan, serta tingginya risiko bencana dan lemahnya tata kelola kebencanaan.

3.2.9 Integrasi domestik masih terbatas

Isu pada level nasional selanjutnya adalah integrasi domestik yang masih rendah antar wilayah yang ada di Indonesia. Kondisi ini digambarkan oleh masih terkonsentrasi pusat-pusat pertumbuhan di Pulau Jawa yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian sebesar 57,8 persen dari total PDB Indonesia pada tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan belum terintegrasi sepenuhnya yang menyebabkan biaya logistik tinggi, masih banyaknya regulasi yang menghambat, serta kuantitas dan kualitas SDM yang belum merata antar wilayah. Isu ini juga mencakup tantangan mengenai peran perkotaan yang dinilai masih cukup rendah terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Kondisi ini digambarkan oleh tingkat elastisitas pertumbuhan penduduk perkotaan terhadap pertumbuhan PDB per kapita perkotaan di Indonesia yang hanya mencapai 1,4, yang berarti bahwa pertumbuhan 1 persen penduduk menaikkan pertumbuhan PDB per kapita perkotaan sebesar 1,4 persen. Hal ini masih jauh dari negara lain misalkan Tiongkok yang memiliki elastisitas hingga 3,00. Tingkat urbanisasi di Indonesia juga masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Tiongkok, dengan capaian sebesar selama 10 tahun terakhir sebesar 0,67 persen per tahun sementara Tiongkok sebesar 1,21 persen. Beberapa penyebab permasalahan ini diantaranya adalah terbatasnya keterhubungan antar perkotaan, ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan, kapasitas pengelolaan perkotaan masih terbatas, dan kualitas lingkungan perkotaan semakin menurun.

3.2.10 Kualitas SDM yang masih rendah

Permasalahan selanjutnya yang terjadi di level nasional adalah kualitas SDM yang masih relatif rendah. Dari aspek kesehatan, pembangunan dalam aspek kesehatan dihadapkan pada tren transisi demografi yang diiringi perpindahan penduduk, urbanisasi, dan transisi epidemogi serta perilaku hidup yang tidak sehat. Beberapa permasalahan yang ada dalam aspek kesehatan adalah peningkatan beban penyakit menular dan tidak menular, kesehatan jiwa, kesehatan penduduk lansia, akses pangan yang tidak terjangkau dan pola konsumsi tidak sehat.

Dalam aspek pendidikan, hal ini digambarkan oleh rata-rata nilai PISA siswa Indonesia dalam seluruh aspek seperti membaca, matematika, dan sains yang berada di angka 382,00 yang masih jauh tertinggal dengan siswa dari negara-negara di dalam OECD yang memiliki rata-rata sebesar 488,33. Kondisi ini diperparah dengan sarana pendidikan yang belum merata, dimana masih ada 302 kecamatan yang belum memiliki SMP/MTs maupun 727 kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK/MA.

Kuantitas, kualitas, dan distribusi guru juga masih mengalami keterbatasan, dengan hanya 50 persen guru yang telah memiliki sertifikat pendidik pada semua jenjang pendidikan, sera lembaga pendidikan formal yang berkualitas juga masih terbatas dengan masih ada 42 persen lembaga pendidikan nonformal terakreditasi C atau belum terakreditasi. Daya saing perguruan tinggi juga dinilai masih rendah, dimana baru lima perguruan tinggi yang masuk dalam peringkat 500 teratas dalam urutan perguruan tinggi di Dunia. Kondisi ini juga digambarkan dengan rasio sitasi yang masih rendah dengan angka 0,39 pada tahun 2021. Kualifikasi pendidikan penduduk yang masih rendah ini berpengaruh kepada pasar tenaga kerja, dimana penyerapan tenaga kerja di bidang keahlian menengah dan tinggi hanya sebesar 40,49 persen.

Kondisi belum memadainya kualitas SDM ini juga belum ditopang oleh perlindungan sosial yang memadai. Perlindungan sosial yang ada perlu mengantisipasi peningkatan jumlah penduduk lansia yang memerlukan perlindungan sosial yang menyeluruh. Hal ini mencakup tantangan dalam penyelenggaraan bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan. Data mengenai perlindungan sosial juga perlu pemutakhiran dan masih terfragmentasi, sehingga diperlukan tata kelola yang mampu menciptakan perlindungan sosial yang lebih efektif dan akuntabel.

Dalam aspek budaya, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan. Permasalahan tersebut diantaranya adalah penerapan Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa yang menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, serta kearifan lokal dan budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan dari masyarakat.

3.2.11 Tata kelola pemerintahan belum optimal

Tata kelola pemerintahan yang masih belum optimal menjadi permasalahan selanjutnya dalam isu di level nasional.

Belum optimalnya tata kelola pemerintahan ini digambarkan dengan beberapa kondisi diantaranya adalah keadaan regulasi yang berlebih (*hyper regulation*), kualitas regulasi yang rendah yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi baik di level pusat maupun daerah, kelembagaan instansi publik yang masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif, proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif, belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata, rentannya posisi ASN terhadap intervensi politik, belum meratanya kualitas pelayanan publik, penerapan transformasi digital yang masih menghadapi tantangan, persoalan integritas partai politik, partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan proses demokratisasi belum optimal, dan prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan.

Permasalahan mengenai konsistensi dalam aspek perencanaan dan penganggaran juga masih terjadi, serta konsistensi antara perencanaan di level nasional, kementerian/lembaga, dan daerah juga masih belum optimal. Kapasitas pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan juga menjadi satu isu penting dalam aspek tata kelola yang perlu dihadapi ke depan.

3.2.12 Kepastian dan penegakan hukum masih lemah

Kondisi permasalahan selanjutnya adalah kepastian dan penegakan hukum yang masih lemah. Hal ini menyebabkan sistem hukum yang ada belum mampu mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, dengan berbagai persoalan seperti pemulihan aset tindak pidana belum optimal, potensi pelanggaran HAM yang masih tinggi, pengawasan institusi penegak hukum baik internal maupun eksternal masih lemah, budaya hukum masyarakat, dan profesi hukum masih rendah merupakan beberapa isu yang perlu ditangani. Penegakan hukum juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan keamanan nasional seperti keamanan dan pelanggaran hukum di laut dan wilayah perbatasan negara, lemahnya keamanan siber, dan meningkatnya jenis kejahatan baru dengan menggunakan teknologi tinggi.

3.2.13 Demokratisasi belum optimal

Isu selanjutnya adalah proses demokratisasi yang belum optimal. Isu dalam aspek politik ini meliputi berbagai permasalahan yang masih terjadi dalam penyelenggaraan sistem demokrasi di Indonesia, diantaranya adalah keterbatasan penerapan demokrasi dalam hal-hal yang sifatnya prosedural seperti teknis kepemiluan dan hubungan formal kelembagaan, terjadinya politik uang, kurangnya kapasitas dan akuntabilitas lembaga demokrasi, kurang transparannya penggunaan dana publik, belum optimalnya sistem pemilu, belum terjaminnya kemerdekaan pers dan kebebasan sipil, meningkatnya perilaku diskriminatif dan intoleran, serta kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap sistem demokrasi yang masih perlu ditingkatkan.

3.2.14 Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa

Isu selanjutnya adalah kesenjangan yang masih cukup tinggi antara Pulau Jawa dengan wilayah lain di luar Pulau Jawa. Kesenjangan ini digambarkan melalui kontribusi Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang berada di angka 20,6 persen pada tahun 2022. Kontribusi Pulau Jawa terhadap perekonomian nasional pada tahun 2022 mencapai hingga 57,8 persen. Tingginya kondisi ketimpangan wilayah ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah masih kurang dan meratanya ketersediaan SDM yang berkualitas, belum memadainya ketersediaan infrastruktur khususnya di wilayah-wilayah tertinggal di wilayah timur Indonesia, terbatasnya anggaran pemerintah daerah dan belum optimalnya pemanfaatan anggaran, rendahnya minat investasi di luar Pulau Jawa.

3.3 Isu Regional

Perumusan isu strategis daerah juga perlu memerhatikan isu-isu yang berada di level regional, dalam hal ini adalah permasalahan-permasalahan yang menjadi isu di Provinsi Jawa Barat. Penyajian isu regional ini bertujuan untuk memerhatikan isu-isu apa saja yang menjadi isu regional di Jawa Barat secara umum, sehingga perumusan dari isu daerah Kabupaten Bandung Barat dapat lebih kontekstual dan sinergis dengan isu regional.

Berikut merupakan uraian dari isu regional yang spesifik merujuk kepada isu kewilayahan Pulau Jawa dan isu regional yang spesifik merujuk kepada Provinsi Jawa Barat:

3.3.1 Isu Pengembangan Wilayah Pulau Jawa

Pulau Jawa adalah wilayah memiliki banyak potensi baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia di berbagai sektor dan merupakan pulau yang memiliki tingkat kemajuan pembangunan yang tertinggi jika dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Meskipun demikian, terdapat beberapa permasalahan jangka panjang yang terjadi di Pulau Jawa yang memerlukan intervensi dari seluruh pihak. Berikut merupakan isu pengembangan wilayah di Pulau Jawa seperti yang tercantum dalam RPJPN 2025-2045 dari beberapa aspek yang ada:

Tabel 3. 6 Isu Pengembangan Wilayah Pulau Jawa

No	Aspek	Isu dan Potensi Kewilayahan
1	Ekonomi	<p>Padatnya jumlah penduduk dan terkonsentrasi pengembangan industri di pesisir utara Wilayah Jawa</p> <p>Wilayah Metropolitan (WM) di Pulau Jawa seperti WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, dan WM Surabaya masih menghadapi berbagai masalah seperti banjir, kemacetan, dan permukiman kumuh.</p>
2	Sosial	<p>Masih terbatasnya akses pendidikan pada daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau</p> <p>Tingginya PTM dan besarnya jumlah penduduk yang mengalami <i>stunting</i> dan insidensi TB</p> <p>Pelayanan kesehatan lansia menjadi tantangan dengan tingginya penduduk lansia di Pulau Jawa</p> <p>Kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri dan dunia usaha</p> <p>Beberapa wilayah di Pulau Jawa masih memiliki capaian penurunan kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang masih belum optimal</p>
3	Sarana dan Prasarana	Produksi tenaga listrik di Wilayah Jawa masih didominasi oleh sumber energi fosil dengan bauran pembangkit listrik terbarukan relatif rendah

No	Aspek	Isu dan Potensi Kewilayahan
		Pemanfaatan infrastruktur TIK di Wilayah Jawa belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan kegiatan sektor produktif
		Wilayah Jawa masih menghadapi permasalahan terutama kelangkaan air dan potensi banjir di berbagai wilayah
		Kebutuhan rumah tangga di Wilayah Jawa terhadap hunian yang layak dan terjangkau juga masih belum dapat terpenuhi
4	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Isu yang terkait dengan desentralisasi dan otonomi daerah adalah penegakan hukum, pengelolaan eksternalitas antarwilayah, dan partisipasi masyarakat
		Kapasitas fiskal di Jawa sudah tinggi, terutama di wilayah Barat dan Timur
5	Sosial Budaya dan Ekologi	Permasalahan lingkungan utamanya meliputi banjir rob yang terjadi pada pesisir utara Wilayah Jawa serta pencemaran udara dan air
		Wilayah Jawa masih dihadapkan pada kondisi rawan bencana alam

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

Beberapa isu pengembangan wilayah ini perlu menjadi perhatian dalam proses pembangunan jangka panjang di Kabupaten Bandung Barat, khususnya yang berkaitan erat dengan aspek kewilayahan di Kabupaten Bandung Barat. Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan posisi Kabupaten Bandung Barat sebagai wilayah yang termasuk sebagai daerah aglomerasi dari Wilayah Metropolitan Kota Bandung maupun permasalahan-permasalahan lain dalam isu pengembangan wilayah Pulau Jawa yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat perlu menjadi perhatian dalam perumusan isu strategis daerah Kabupaten Bandung Barat.

3.3.2 Isu Provinsi Jawa Barat

Isu regional selanjutnya yang perlu menjadi perhatian dalam perumusan isu strategis daerah Kabupaten Bandung Barat adalah isu-isu yang menjadi permasalahan di level provinsi, dalam hal ini adalah isu jangka panjang dari Provinsi Jawa Barat. Perujukan isu strategis Provinsi Jawa Barat ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antar level perencanaan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Berikut merupakan uraian mengenai isu strategis yang termuat dalam RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045:

1. ***Green dan Blue Economy* serta Pembangunan Inklusif**

Isu strategis ini memfokuskan pada pembangunan perekonomian kerakyatan dalam bentuk transformasi pembangunan perekonomian yang diarahkan kepada sektor-sektor perekonomian yang berbasis pada kekuatan sumber daya manusia demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kokoh berarti pembangunan ekonomi kerakyatan yang memfokuskan pada pembangunan struktur ekonomi yang berfokus kepada industri berbasis potensi bahan baku lokal dengan keterkaitan yang erat antara sektor industri besar dengan industri kecil menengah, UMKM, berbasis SDM dan SDA lokal, serta memiliki ketangguhan atau resiliensi terhadap berbagai tantangan yang bersifat internal maupun eksternal. Daya saing memiliki arti pembangunan ekonomi yang berdaya saing melalui keunggulan sektor-sektor produksi dan SDM pelaku usaha yang adaptif melalui perkembangan teknologi, memiliki produktivitas yang tinggi serta memiliki produk yang berkualitas yang dapat menembus pasar domestik hingga mancanegara. Berkelanjutan berarti bahwa pembangunan ekonomi mencakup pergeseran praktik-praktik perekonomian yang lebih bersih dengan pengutamaan terhadap *green economy* dan *blue economy*.

2. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Proyeksi kependudukan dari provinsi Jawa Barat hingga tahun 2045 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat akan tetap menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, dengan jumlah penduduk usia produktif terbesar. Tren tersebut juga diiringi dengan peningkatan dari rasio ketergantungan dan jumlah penduduk usia lanjut. Kondisi-kondisi ini merupakan tantangan bagi Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan sumber daya manusia kedepannya agar dapat menjadi modal pembangunan yang kuat. Upaya optimalisasi potensi sumber daya manusia menjadi diperlukan dalam bentuk perbaikan kualitas kehidupan, penyiapan sumber daya manusia yang produktif, serta pelayanan sosial bagi penduduk lanjut usia dalam rangka penyediaan pelayanan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Tantangan yang ada ke depan adalah penciptaan kondisi sosial budaya yang inklusif dengan tetap memerhatikan karakter budaya dan sosial yang ada.

3. Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar

Ketimpangan infrastruktur antara wilayah utara dan wilayah selatan dari Provinsi Jawa Barat masih menjadi isu utama dalam aspek infrastruktur. Isu ini berpengaruh terhadap ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan akses layanan sosial bagi masyarakat dari kedua wilayah tersebut. Oleh karenanya, percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Jawa Barat bagian selatan yang meliputi infrastruktur jalan, sumber daya air dan irigasi, infrastruktur kesehatan, serta infrastruktur fasilitas pendidikan diperlukan untuk akselerasi pemerataan pembangunan di Jawa Barat. Dalam wilayah perkotaan juga diperlukan infrastruktur perkotaan yang memadai dan berkelanjutan untuk memastikan kondisi perkotaan yang nyaman.

4. Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Proses pembangunan yang dilakukan ke depan juga tetap perlu memerhatikan aspek keberlanjutan dalam pelaksanaannya.

Hal ini dilakukan untuk memastikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan yang ada dapat terjaga kedepannya. Penggunaan bahan baku yang lebih efisien serta terbarukan, mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya perekonomian merupakan langkah-langkah yang dapat meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari proses pembangunan. Inovasi teknologi yang lebih efisien dan kehidupan sosial budaya menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dalam meningkatkan pertumbuhan serta mewujudkan keberlanjutan secara bersamaan.

5. Keberlanjutan Penataan Ruang

Pertumbuhan penduduk yang diproyeksikan akan tetap tumbuh kedepannya akan mendorong pertumbuhan wilayah perkotaan yang berimplikasi terhadap meningkatnya kebutuhan saran dan prasarana perkotaan. Sarana dan prasarana perkotaan yang dimaksud diantaranya adalah kebutuhan atas tempat tinggal, energi, dan pangan. Kebutuhan ini memerlukan penataan ruang yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa kebutuhan penduduk dapat terpenuhi tanpa memberikan dampak yang negatif bagi lingkungan. Pemanfaatan ruang dan upaya pengendalian dalam penataan ruang tersebut menjadi tantangan ke depan untuk memastikan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang ada dapat terjaga.

6. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang besar. Kondisi ini menuntut pengelolaan daerah yang semakin kompleks ke depan. Tuntutan pelayanan publik yang meningkat berjalan seiring dengan regulasi yang ada sehingga aparatur birokrasi perlu bergerak secara cepat dan tepat dalam rangka pemenuhan pelayanan publik kepada masyarakat. Kolaborasi dan partisipasi menjadi dua aspek yang penting dalam rangka pengelolaan daerah kedepannya seiring dengan meningkatnya pendidikan masyarakat dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas kedepannya.

3.4 Isu Pembangunan Berkelanjutan (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD disusun untuk memberikan panduan agar prinsip pembangunan berkelanjutan dilakukan secara terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan jangka panjang Kabupaten Bandung Barat. KLHS RPJPD Kabupaten Bandung Barat disusun dengan mempertimbangkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem serta capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang kemudian ditemukan gap yang menjadi rumusan permasalahan dan isu strategis wilayah.

Berikut merupakan isu strategis KLHS RPJPD yang perlu diintegrasikan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang Kabupaten Bandung Barat berdasarkan hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

1. Masalah ketersediaan pangan yang disebabkan menurunnya luas lahan pertanian (sawah) serta keterbatasan penyediaan sarana prasarana pertanian
2. Terbatasnya daya beli masyarakat terhadap pangan
3. Masalah kesehatan dan gizi masyarakat yang disebabkan tidak meratanya distribusi tenaga kesehatan
4. Rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap air bersih dikarenakan permasalahan infrastruktur penyedia air bersih yang terbatas.

Rumusan isu pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada daftar panjang isu berdasarkan pilar pembangunan berkelanjutan yang kemudian didiskusikan dalam *focus group discussion* yang melibatkan beberapa stakeholder terkait kemudian menentukan daftar pendek isu pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:

1. Kurang meratanya pelayanan kesehatan
2. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan
3. Masalah ketahanan pangan
4. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sumber pencemar industri dan domestik yang berdampak pada pencemaran air

5. Masalah sumber daya air akibat rendahnya daya dukung air sehingga menyebabkan belum tercapainya akses pelayanan air bersih
6. Meningkatnya timbulan sampah
7. Alih fungsi lahan yang berdampak pada berkurangnya lahan tanaman pangan
8. Kebencanaan terutama terjadinya bencana longsor di beberapa wilayah perbukitan
9. Kurangnya anggaran untuk SDM pelayanan
10. Masalah kemiskinan yang masih tinggi
11. Masalah kualitas SDM yang ditandai dengan Indeks Pembangunan Manusia yang relatif rendah.

Analisis lanjutan terkait penentuan isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bandung Barat dengan mempertimbangkan 6 muatan KLHS, kondisi umum daerah, dan penjaringan isu, maka disimpulkan beberapa isu berikut yang diangkat, diantaranya:

1. Kesehatan (pelayanan kesehatan belum merata)
2. Ketahanan pangan/ alih fungsi lahan (alih fungsi lahan berdampak terhadap berkurangnya lahan tanaman pangan)
3. Pencemaran lingkungan (tingginya pencemaran air yang disebabkan oleh sumber pencemar Industri, domestik)
4. Sumber daya air (belum tercapainya akses pelayanan air bersih, dan rendahnya daya dukung air)
5. Persampahan (meningkatnya timbulan sampah)
6. Kebencanaan (terjadinya bencana longsor di beberapa wilayah perbukitan yaitu KBU dan KBS)
7. Masalah kemiskinan (masih tingginya kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat)
8. Kualitas Sumber Daya Manusia (Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bandung Barat relatif rendah)

Kriteria lainnya dalam menentukan isu prioritas adalah dengan mengidentifikasi hubungan silang (*crosscutting*) antara TPB dengan indikator lingkungan hidup yang terdiri dari sembilan (9) indicator, sehingga akan menghasilkan nilai atau skor. Semakin besar nilainya maka hubungan atau pengaruh antara TPB dengan indikator lingkungan semakin kuat, semakin kecil nilai/skor maka akan semakin kecil hubungannya. Masing masing TPB dengan indicator selanjutnya dijumlahkan, maka hasilnya semakin besar nilai penjumlahan dari *crosscutting* maka semakin tinggi isu strategis yang diprioritaskannya dengan dilakukan melalui rangking. Adapun indikator lingkungan yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Daya dukung dan daya tampung
2. Perkiraan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup
3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem *
4. Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam
5. Status mutu dan ketersediaan SDA
6. Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
7. Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
8. Tingkat dan status jumlah penduduk miskin
9. Resiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat

3.5 Isu Strategis Daerah

Perumusan isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung Barat disusun dengan menggunakan metode tabulasi silang (*crosstab*) yang dikombinasikan dengan konsep *dynamic governance*. Konsep *dynamic governance* digunakan agar isu strategis Kabupaten Bandung Barat yang dirumuskan menjadi isu strategis yang adaptif dan dinamis sesuai dengan isu di berbagai tingkatan, baik di tingkat internasional, nasional, regional dan lokal. Konsep *dynamic governance* menyatakan bahwa sebuah perencanaan harus dibangun dengan tiga perspektif, yaitu:

- memiliki pandangan ke depan (*think ahead*),
- memperhatikan sekitar (*think across*)
- memperhitungkan capaian atau hasil evaluasi perencanaan jangka panjang pada periode sebelumnya (*think again*).

Isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung Barat juga disusun berdasarkan instrumen yang digunakan sebagai dimensi pembangunan berkelanjutan. Dimensi pembangunan berkelanjutan tersebut antara lain adalah 1) dimensi sumber daya manusia (*people*), 2) dimensi kesejahteraan (*prosperity*), 3) dimensi lingkungan (*planet*) yang di dalamnya juga terdapat infrastruktur kewilayahan dan 4) dimensi tata Kelola pemerintahan (*management*). Isu strategis RPJPD Kab. Bandung Barat tahun 2025-2045 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Tabulasi Silang Isu Strategis Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045

No	Dimensi Konsep Pembangunan Berkelanjutan	<i>Think Ahead</i>		<i>Think Across</i>			<i>Think Again</i>	Isu Strategis RPJPD Kab. Bandung Barat 2025-2045		
		Isu Internasional (Megatren Roland Berger 2050)	Isu KLHS RPJPD 2025-2045	Isu Nasional (Megatren 2045 RPJPN)	Isu Provinsi (RPJPD Prov Jawa Barat)	Evaluasi RPJPD KBB 2005-2025				
1	People	People & society		Makin Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kualitas dan daya saing SDM			Percepatan Peningkatan Kualitas SDM yang Berkarakter, sehat, cerdas dan Inklusif		
		Health & care		Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa						
2	Planet	Environment & Resources		Pembangunan Belum Berkelaanjutan	Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan			Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Berkualitas & Urgensi Mitigasi Bencana		
		Technology & Innovation		IPTEKIN dan Riset Lemah	Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar			Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di seluruh wilayah yang Berkelaanjutan		
				Minimnya Infrastruktur dan Rendahnya Literasi Digital						
				Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa	Keberlanjutan penataan ruang					
3	Prosperity	Economic & Business		Produktivitas Rendah	Green dan blue economy serta			Produktivitas berbasis sektor		

No	Dimensi Konsep Pembangunan Berkelanjutan	Think Ahead	Think Across			Think Again	Isu Strategis RPJPD Kab. Bandung Barat 2025-2045
			Isu Internasional (Megatren Roland Berger 2050)	Isu KLHS RPJPD 2025-2045	Isu Nasional (Megatren 2045 RPJPN)	Isu Provinsi (RPJPD Prov Jawa Barat)	Evaluasi RPJPD KBB 2005-2025
					<p>Deindustrialisasi Dini dan Rendahnya Produktivitas Sektor Pertanian</p> <p>Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata</p> <p>Rendahnya Kontribusi UMKM dan Koperasi pada Perekonomian</p> <p>Integrasi Domestik Terbatas</p> <p>Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa</p> <p>Ekonomi Biru Belum Optimal</p>	<p>pembangunan inklusif</p>	<p>unggulan</p> <p>Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan</p>
4	Management	Politics & Governance			<p>Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal</p> <p>Kepastian dan Penegakan Hukum Masih Lemah</p> <p>Demokratisasi belum optimal</p> <p>Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa</p>	<p>Kualitas tata kelola pemerintahan</p>	<p>Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, kolaboratif dan inovatif</p>

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kab. Bandung Barat, 2024

Setelah melihat beberapa isu strategis yang berada di level lainnya, dirumuskan isu strategis jangka panjang Kabupaten Bandung Barat yang dapat

dikategorisasikan ke dalam empat kategori besar yang disusun dengan memperhatikan dimensi konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu *people, prosperity, planet* dan *management*, maka dirumuskan Isu strategis Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

1. Percepatan Peningkatan Kualitas SDM yang Berkarakter, Sehat, Cerdas dan Inklusif

Isu strategis peningkatan kualitas SDM yang berkarakter, sehat, cerdas dan inklusif didasarkan pada beberapa hal di antaranya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara umum, capaian IPM Kabupaten Bandung Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, capaian tersebut masih di bawah rata-rata IPM di wilayah Bandung Raya. Pada tahun 2023, IPM Kabupaten Bandung Barat berada pada angka 69,61, Kabupaten Bandung 73,74, Kota Bandung 83,04, dan Kota Cimahi 79,46, (BPS, Jawa Barat). Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas SDM di Kabupaten Bandung Barat masih perlu ditingkatkan.

Faktor yang mempengaruhi kualitas SDM diantaranya capaian pembangunan pendidikan dan kesehatan. Pada aspek pendidikan, capaian rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Bandung Barat sebesar 8,22 atau setara kelas 2 SMP dan harapan lama sekolah (HLS) 11,89 setara kelas 2 SMA. Adapun kendala dalam pembangunan pendidikan diantaranya belum optimalnya akses terhadap pendidikan dasar, menengah dan tinggi, serta belum optimalnya layanan pendidikan yang berkualitas. Pada aspek kesehatan, angka harapan hidup (AHH) Kabupaten Bandung Barat 72,79. Capaian tersebut selisih 0,73 dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat (73,52). Adapun kendala dalam pembangunan kesehatan yakni belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang merata.

Selain peningkatan aspek pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas SDM juga diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif yakni ramah terhadap semua kelompok, termasuk kelompok rentan seperti anak, perempuan,

disabilitas, lansia, dan pemuda. Adapun kendala dalam mewujudkan lingkungan yang inklusif diantaranya pemberdayaan, bantuan sosial, serta cakupan perlindungan sosial bagi individu/kelompok rentan masih perlu ditingkatkan. Disisi lain, peningkatakan perlindungan sosial juga diperlukan untuk merespon efek perubahan iklim dan potensi terjadinya bencana alam melalui sistem perlindungan sosial adaptif.

2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Berkualitas dan Urgensi Mitigasi Bencana

Ancaman bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bandung Barat terutama banjir, tanah longsor, dan kekeringan erat kaitannya dengan kondisi lingkungan hidup yang dipengaruhi juga dengan perubahan iklim. Pengelolaan sumber mata air untuk menjaga ketersediaan serta mendorong aksesibilitas masyarakat terhadap air bersih menjadi fokus penyediaan air baku wilayah. Degradasi lingkungan yang disebabkan alih fungsi lahan maupun lahan kritis yang tidak dikelola juga menjadi permasalahan lingkungan yang perlu diperhatikan. Perlu adanya pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia dengan bijak dan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan hidup. Upaya yang dapat dilakukan dengan pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL maupun dokumen lingkungan lainnya, yang berhubungan dengan pemberian izin lingkungan maupun pemanfaatan sumber daya alam, yang memiliki risiko (dampak) terhadap lingkungan perlu untuk semakin diperketat dan ditingkatkan pemanfaatannya. Oleh karena itu, kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta upaya preventif dan mitigasi terhadap bencana perlu dikaji, direncanakan dan diimplementasikan secara komprehensif, holistik dan periodik (bukan hanya secara parsial).

3. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di Seluruh Wilayah yang Berkelanjutan

Pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan menjadi isu strategis bagi Kabupaten Bandung Barat selama 20 tahun ke depan.

Pembangunan infrastruktur tersebut meliputi infrastruktur dasar *permukiman* seperti air minum, sanitasi, rumah layak huni, serta infrastruktur pendukung perekonomian seperti infrastruktur transportasi, air bersih, jaringan irigasi, telekomunikasi dan lain sebagainya.

Pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah dan mengurangi kesenjangan pembangunan desa-kota dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bandung Barat perlu memperhatikan prinsip-prinsip *green infrastructure* sebagai upaya untuk mendorong kelestarian lingkungan dan mengurangi risiko bencana di Kabupaten Bandung Barat.

4. Produktivitas Berbasis Sektor Unggulan

Produktivitas berbasis sektor unggulan memfokuskan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja sektor-sektor ekonomi yang dianggap sebagai sektor *unggulan*. Sektor unggulan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya saing suatu daerah. Peningkatan produktivitas pada sektor unggulan dapat membawa dampak positif pada perekonomian secara menyeluruh di daerah tersebut. Jika dilihat dari kontribusi masing-masing sektor lapangan usaha terhadap total PDRB, Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan sebesar 41,07%, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,43%), dan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (11,88%). Ketiga sektor tersebut dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan yang dapat terus didorong untuk menjadi penopang perekonomian di Kabupaten Bandung Barat.

Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa strategi untuk meningkatkan produktivitas berbasis sektor unggulan di Kabupaten Bandung Barat yaitu: 1) penggunaan inovasi dan teknologi terbaru dalam proses produksi yang memerlukan kerja sama antara pemerintah, perusahaan/swasta, dan lembaga penelitian/lembaga akademik, 2) meningkatkan keterampilan pekerja misalnya

melalui pelatihan atau pendidikan pengembangan keterampilan khusus agar dapat memudahkan pekerja beradaptasi dengan teknologi baru, 3) mendukung kegiatan riset dan pengembangan di sektor unggulan untuk menciptakan produk dan layanan baru yang lebih efisien dan inovatif, 4) memudahkan akses pelaku usaha terhadap sumber daya finansial (sumber permodalan) untuk investasi dalam pengembangan produksi, teknologi, dan ekspansi bisnis, 5) meningkatkan infrastruktur yang mendukung efisiensi dalam rantai pasok dan distribusi sektor unggulan, 6) menerapkan teknologi yang lebih efisien dalam penggunaan energi dapat membantu sektor unggulan mengurangi biaya produksi dan dampak lingkungan, 7) menciptakan regulasi yang kondusif (misalnya terkait investasi) dan memperbaiki prosedur birokrasi (misalnya terkait dengan perizinan usaha) untuk mempercepat proses bisnis, 8) mendorong ekspor produk dari sektor unggulan agar dapat meningkatkan skala produksi dan memperluas pasar, 9) mengupayakan pengelolaan SDA yang berkelanjutan untuk mencegah degradasi lingkungan dan memastikan kelangsungan produksi jangka panjang pada sektor unggulan.

5. Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan memastikan bahwa pembangunan ekonomi dapat menciptakan akses dan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan sekaligus memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan. Percepatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Bandung Barat perlu didorong untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Berikut beberapa strategi untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Bandung Barat: 1) meningkatkan investasi untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan keterampilan dalam rangka menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi, 2) meningkatkan akses pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk

kelompok rentan dan marginal, 3) optimalisasi pemberdayaan perempuan dengan memberikan akses lebih luas terhadap peluang pendidikan, pekerjaan, dan kepemilikan aset, 3) meningkatkan kualitas infrastruktur agar dapat memudahkan akses terhadap layanan (pendidikan dan kesehatan) dan peluang memperoleh pekerjaan untuk seluruh lapisan masyarakat, 4) mengembangkan sektor UMKM/IKM/Industri kreatif diantaranya melalui pemberdayaan ekonomi lokal dan kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM IKM/Industri kreatif agar dapat membantu melakukan transfer pengetahuan dan teknologi, meningkatkan keterampilan dalam menjalankan usaha, dan meningkatkan akses terhadap pasar/konsumen, 5) mengelola SDA secara berkelanjutan misalnya dengan melakukan diversifikasi jenis SDA yang diolah untuk mengurangi ketergantungan dengan SDA tertentu, 6) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi berbasis kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Kolaboratif dan Inovatif

Isu strategis bidang pemerintahan berkaitan dengan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, kolaboratif, dan inovatif. Tata Kelola pemerintahan yang baik merujuk pada penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Saat ini, kinerja tata Kelola belum berjalan optimal yang ditunjukkan dengan indeks reformasi birokrasi yang tidak memenuhi target disebabkan oleh akuntabilitas kinerja belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum baik.

Good governance juga mengedepankan hubungan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Oleh karena itu, tata Kelola yang kolaboratif dan inovatif menjadi isu penting juga. Kolaboratif berkaitan dengan kemitraan yang efektif antara pemerintah dengan non pemerintah (swasta dan masyarakat sipil). Kemitraan yang dibangun tidak hanya kemitraan semu, namun kemitraan bermakna yang ditandai dengan adanya keterlibatan aktif dari seluruh

stakeholders. Seluruh stakeholders memiliki posisi yang sama agar kontribusi yang diberikan oleh masing-masing stakeholders terhadap pembangunan daerah lebih optimal.

Inovasi berkaitan dengan respons terhadap perkembangan zaman yang pesat dan cepat, salah satunya perkembangan TIK. Perkembangan tersebut berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin beragam sehingga dibutuhkan ide dan kreativitas dari aparatur. Inovasi hadir dari ide atau gagasan kreativitas dalam merespons berbagai kondisi yang hadapi. Inovasi mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberi nilai tambah terhadap pembangunan daerah. Oleh karena itu, pengembangan inovasi pertama-tama harus diarahkan untuk meningkatkan ekosistem inovasi hingga menjadikan inovasi sebagai budaya kerja pemerintah.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

Bab ini memuat visi dan misi Pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2025 hingga 2045. Visi dan misi disusun secara teknokratik dengan memperhatikan isu-isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung Barat. Visi adalah rumusan yang mencerminkan kondisi jangka panjang yang ingin dicapai, sedang misi adalah cara atau upaya jangka panjang yang harus dijalankan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan jangka panjang tersebut. Berikut adalah visi dan misi dari Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 hingga 2045.

4.1 Visi Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Visi harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi Masyarakat Kabupaten Bandung Barat dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar bagi semua elemen atau semua pelaku (*stakeholders*) dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal pada masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi diciptakan melampaui realitas sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Berikut perumusan visi RPJPD Kabupaten Bandung Barat 2025-2045

Tabel 4. 1 Perumusan Visi RPJPD Kabupaten Bandung Barat

Isu Strategis	Pokok-pokok Visi	Visi
Percepatan Peningkatan Kualitas SDM yang Berkarakter, sehat, cerdas dan Inklusif	Maju	Bandung Barat Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan
Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Sejahtera, Berkelanjutan	
Produktivitas berbasis sektor unggulan	Sejahtera	
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Berkualitas & Urgensi Mitigasi Bencana	Berkelanjutan	
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di seluruh wilayah yang Berkelanjutan	Maju, Berkelanjutan	
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, kolaboratif dan inovatif	Maju	

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kab. Bandung Barat, 2024

Visi Kabupaten Bandung Barat 2025-2045 juga disusun berdasarkan visi jangka panjang nasional yang tercantum dalam RPJPN, yaitu Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan serta visi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat, yaitu Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan:

Bandung Barat Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung Barat tahun 2025-2045 memiliki beberapa pokok visi, diantaranya adalah sejahtera, maju, dan berkelanjutan. Penjelasan pokok-pokok visi jangka panjang Kabupaten Bandung Barat tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Penjelasan Pokok-pokok Visi RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Bandung Barat Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan	Sejahtera	Bandung Barat memiliki masyarakat yang sejahtera dengan dukungan pembangunan ekonomi mandiri berbasis sektor unggulan serta lingkungan hidup yang lestari
	Maju	Bandung Barat menjadi daerah maju dan terdepan di bidang sumber daya manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan spiritual serta maju di bidang ekonomi dengan dukungan pembangunan lingkungan hidup, infrastruktur kewilayahan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
	Berkelanjutan	Bandung Barat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter religius. Perekonomian yang inklusif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik.

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kab. Bandung Barat, 2024

Sejahtera berarti bahwa Kabupaten Bandung Barat memiliki masyarakat yang sejahtera dengan dukungan pertumbuhan ekonomi mandiri berbasis sektor unggulan serta lingkungan hidup yang lestari. Kabupaten Bandung Barat harus memiliki pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dalam artian bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun juga pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Kunci dari pokok visi ini adalah peningkatan produktivitas daerah dan pemerataan ekonomi untuk semua.

Maju berarti bahwa Kabupaten Bandung Barat menjadi daerah maju dan terdepan di bidang sumber daya manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan spiritual serta maju di bidang ekonomi dengan dukungan pembangunan lingkungan hidup, infrastruktur kewilayahan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berkelanjutan berarti bahwa Kabupaten Bandung Barat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter religius. Perekonomian yang inklusif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik.

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung Barat dirumuskan dalam rangka mendukung visi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Oleh karena itu visi jangka panjang Kabupaten Bandung Barat disusun dengan memerhatikan visi dari level provinsi dan nasional. Sehingga, penyelarasan visi dilakukan dalam perumusan visi jangka panjang Kabupaten Bandung Barat secara umum untuk memastikan setiap kata kunci visi memiliki sinergitas antar satu sama lain. Berikut merupakan penyelarasan visi dari Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia secara umum:

Tabel 4. 3 Persandingan Visi Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia

Visi RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045	Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045	Visi RPJPN Tahun 2025-2045
Bandung Barat Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan	Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan	Indonesia Emas 2045: NKRI yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan
Kata Kunci Visi		
Bandung Barat	Jawa Barat	NKRI
Sejahtera	Berdaya saing	Berkelanjutan (Pilar sumber daya manusia)
Maju	Termaju	Maju
Berkelanjutan	Berkelanjutan	Berkelanjutan
	Berkelanjutan	Berkelanjutan (Pilar lingkungan)

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kab. Bandung Barat, 2024

Selain pokok-pokok visi, RPJPD Kabupaten Bandung Barat juga memiliki sasaran visi yang memuat indikator kinerja yang dapat mengukur tingkat ketercapaian dari visi yang telah dirumuskan menjadi 5 (lima) sasaran visi disertai dengan targetnya, yaitu:

1. Kemiskinan menuju 0 persen dan ketimpangan berkurang
2. Pendapatan per kapita setara negara maju
3. Daya saing sumber daya manusia meningkat
4. Kepemimpinan dan pengaruh regional
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission

Tabel 4. 4 Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045

Kata Kunci Visi	Sasaran dan Indikator Visi	Baseline 2025	Target 2045
Sejahtera	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan		
	Tingkat kemiskinan (%)	9,05-9,99	0,14-0,91
	Rasio gini (Indeks)	0,366 – 0,373	0,340 – 0,363
	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota (%)	2,14	2,11
	Pertumbuhan ekonomi (%)	4,87-5,37	4,95-6,15
Maju	Peningkatan pendapatan per kapita		
	PDRB per kapita (Rp. Juta)	32,47-32,83	64,15-116,23
	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	41,20	42,00
	Daya saing sumber daya manusia meningkat		
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,62	76,48
	Kepemimpinan dan pengaruh regional		
	Indeks Reformasi Birokrasi	(BB) 74 - 80	(AA) 81 - 100
Berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	3,20-3,26	3,50 - 4,00
	Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>		
	Penurunan intensitas emisi GRK (Ton Co2eq/2010 IDR Miliar)	2,63	7,91
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	59,59	64,63

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kab. Bandung Barat, 2024

Sasaran visi yang telah dirumuskan mengacu pada sasaran visi nasional seperti yang tercantum dalam RPJPN 2025-2045 dalam rangka menuju visi Indonesia Emas 2045 dan diselaraskan dengan sasaran visi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam RPJPD Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2045.

Penyelarasan visi ini bertujuan untuk memastikan bahwa visi dari Kabupaten Bandung Barat dapat mendukung pencapaian visi jangka panjang pada level atasnya, baik pada level provinsi maupun nasional. Berikut Keselarasan sasaran visi Kabupaten Bandung Barat dengan sasaran visi RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan sasaran visi TPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045:

Tabel 4. 5 Penyelarasan Sasaran dan Indikator Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Bandung Barat, RPJPD Provinsi Jawa Barat, dan RPJPN Tahun 2025-2045

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD PROVINSI JAWA BARAT 2025-2045				RPJPD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	a. GNI Per Kapita (US\$)	5.500	30.300	Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	57,41 - 57,77	273,17 - 325,25	Peningkatan Pendapatan per kapita	PDRB per kapita ADHB (Juta Rupiah)	32,47- 32,83	64,15- 116,23
		b. Kontribusi PDB Maritim (%)	7,6	15		b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia	48,19	186,06		Kontribusi PDRB Industri pengolahan (%)		
		c. Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28		c. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	41,87 - 42,00	46,43 - 47,60			41,20	42,00
2	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	a. Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 - 7,0	0,5 - 0,8	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	5,85 - 6,46	0,09 - 0,59	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat kemiskinan (%)	9,05-9,99	0,14-0,91
		b. Rasio Gini (indeks)	0,379 - 0,382	0,377 - 0,320		b. Rasio gini (Indeks)	0,383 - 0,390	0,357 - 0,380		Rasio Gini (Indeks)	0,366- 0,373	0,340- 0,363
		c. Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5 (2022)	28,5		c. Kontribusi PDRB Provinsi	12,72	10,77		Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	2,14	2,11
						d. Pertumbuhan Ekonomi	4,96-5,37	5,07-6,27		Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,87-5,37	4,95-6,15
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia	Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Kepemimpinan daerah di dunia	Indeks Daya Saing Daerah (point)	3,87	5	Kepemimpinan dan pengaruh regional	Indeks Reformasi Birokrasi	74-80 (BB)	81-100 (AA)

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD PROVINSI JAWA BARAT 2025-2045				RPJPD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
	internasional meningkat				internasional meningkat					Indeks Daya Saing Daerah	3,20 - 3,26	3,50 - 4,00
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,54 (2022)	0,73	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0,55	0,72	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Pembangunan Manusia	70,62	76,48
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	a. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	6,61	75,84	Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan intensitas emisi GRK (Ton Co2eq/2010 IDR Milyar)	2,63	7,91
						b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,06	72,08		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59,59	64,63

Sumber: Hasil Penyelarasan RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPD Kab. Bandung Barat, diolah 2024

4.2 Misi Daerah

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi dalam dokumen perencanaan dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Berikut adalah misi RPJPD Kabupaten Bandung Barat tahun 2025-2045.

Tabel 4. 6 Rumusan Misi RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045

Isu Strategis	Visi	Misi	Penjelasan Misi
Percepatan Peningkatan Kualitas SDM yang Berkarakter, sehat, cerdas dan Inklusif	Bandung Barat Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Misi ini disusun untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bandung Barat. Misi ini juga disusun agar SDM Masyarakat Kabupaten Bandung Barat lebih berkarakter, cerdas sehat dan inklusif
		Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhhlak dan Berkarakter	Misi ini disusun untuk mewujudkan Masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang berakhhlak dan berkarakter dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan spiritual
Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Mandiri Berbasis Sektor Unggulan	Misi ini bertujuan untuk menguatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan nilai Inklusivitas. Misi ini juga disusun untuk mengembangkan city branding dan economic power house Kabupaten Bandung Barat pada masa yang akan datang.
Produktivitas berbasis sektor unggulan			

Isu Strategis	Visi	Misi	Penjelasan Misi
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, kolaboratif dan inovatif	Bandung Barat Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif	Misi ini disusun untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Kabupaten Bandung Barat agar semakin inovatif dan lincah terutama dalam merespons dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.
		Mewujudkan Kondusivitas dan Stabilitas Daerah	Misi ini disusun untuk meningkatkan kondusivitas dan stabilitas daerah dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bandung Barat yang aman dan terjaga
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di seluruh wilayah yang Berkelanjutan		Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah	Misi ini disusun untuk mewujudkan pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat
		Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar	Misi ini disusun untuk mewujudkan pelayanan sarana dan prasarana publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Berkualitas & Urgensi Mitigasi Bencana		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan	Misi ini disusun untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan wilayah yang tangguh bencana

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kab. Bandung Barat, 2024

Misi 1: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Misi 1 RPJPD Kabupaten Bandung Barat merupakan agenda pembangunan untuk mewujudkan misi transformasi sosial RPJPN. SDM merupakan objek sekaligus subyek yang akan menggerakkan pembangunan melalui berbagai ruang kolaborasi. SDM yang berkualitas dan berdaya saing ditopang oleh kondisi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai.

Kedua pelayanan tersebut merupakan pelayanan dasar yang harus dinikmati secara inklusif, merata dan berkualitas oleh seluruh masyarakat. Selain itu, upaya perlindungan sosial yang adaptif dapat dilakukan dengan peningkatan basis data terpadu bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, peningkatan jaminan perlindungan tenaga kerja, bantuan sosial yang lebih memberdayakan, serta peningkatan tenaga kesejahteraan sosial. Upaya perlindungan sosial juga bagian dari pelayanan dasar untuk memberikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak dasar khususnya pada kelompok rentan seperti anak, perempuan, lansia, disabilitas, pemuda, serta masyarakat kurang mampu.

Dari segi pendidikan, pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas, peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, peningkatan partisipasi pendidikan dasar, menengah dan tinggi, serta peningkatan kerja sama antar pelaku pendidikan. Dari segi kesehatan, upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu (terakreditasi), peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan, serta pengembangan digitalisasi pelayanan kesehatan dan sistem informasi kesehatan.

Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Mandiri Berbasis Sektor Unggulan

Misi ke 2 dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bandung Barat ini ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, pemerataan, penurunan kemiskinan dan perluasan akses masyarakat dalam berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat harus mampu mencerminkan sebuah proses transformasi ekonomi yang mandiri dengan mengedepankan sektor unggulan.

Transformasi ekonomi di Kabupaten Bandung Barat dimaknai sebagai sebuah proses transformasi untuk meningkatkan produktivitas perekonomian dengan mengubah struktur ekonomi dari *lower productivity* ke *higher productivity* atau dengan meningkatkan produktivitas di dalam sebuah sektor ekonomi (Bappenas, 2021). Transformasi ekonomi di Kabupaten Bandung Barat memiliki lima pilar, yaitu 1) pembangunan infrastruktur, 2) penguatan implementasi kebijakan pemerataan ekonomi, 3) minimalisasi ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek, 4) efisiensi pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan 5) konfigurasi investasi untuk mendukung pertumbuhan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2024).

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat harus terarah sesuai dengan konsep dan karakteristik lokal. Pembangunan sektor pariwisata dan pertanian harus mengedepankan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi. Peran dan kolaborasi multi-aktor sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi Kabupaten Bandung Barat, agar pembangunan ekonomi yang dijalankan dapat meningkatkan pertumbuhan, pemerataan, pengentasan kemiskinan dan perluasan akses bagi semua lapisan dan golongan masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

Misi 3: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Adaptif, dan Kolaboratif

Upaya meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang inovatif, adaptif, dan kolaboratif penting dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Tata Kelola yang inovatif merupakan tata Kelola yang mampu menciptakan berbagai terobosan-terobosan penting dalam pembangunan daerah. Terobosan-terobosan yang mampu mengakselerasi kesejahteraan dan pelayanan publik yang berkualitas. Terobosan ini muncul dari ide atau gagasan kreatif dari aparatur ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, prinsip adaptif penting juga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adaptif berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam merespons berbagai kondisi terutama perkembangan TIK yang sangat pesat dan berekses terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat. Tata Kelola yang inovatif dan adaptif juga perlu didukung oleh kolaborasi. Kolaboratif berkaitan dengan kemitraan antara pemerintah dengan non pemerintah atau dalam hal ini masyarakat dan swasta. Kemitraan yang dibangun harus seimbang sehingga peran masing-masing pihak lebih optimal. Paradigma pemerintahan saat ini mengedepankan kolaborasi daripada kompetisi karena proses pembangunan dan pelayanan publik tidak akan berhasil jika dilakukan hanya satu pihak saja tanpa adanya kerja sama. Oleh karena itu, kemitraan yang dibangun harus memastikan posisi masing-masing *stakeholders* setara dan aktif terlibat dalam proses pembangunan. Bukan kemitraan yang semu dimana ada satu pihak yang mendominasi pihak lain. Hal ini akan berdampak terhadap efektivitas pembangunan daerah. Dalam konteks ini, aparatur pemerintah daerah dituntut untuk lebih profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugas dan fungsi sehingga mampu mewujudkan tata Kelola yang inovatif, adaptif, dan kolaboratif.

Misi 4: Mewujudkan Kondusivitas dan Stabilitas Daerah

Misi keempat menyangkut perwujudan kondusivitas dan stabilitas daerah secara umum di Kabupaten Bandung Barat. Kondusivitas dan stabilitas masyarakat berperan penting bagi seluruh sektor, sebab keadaan daerah yang kondusif dan stabil menjadi salah satu prasyarat bagi optimalnya pelaksanaan pembangunan daerah ke depan.

Kondusivitas dan stabilitas daerah sendiri dipengaruhi oleh kondisi ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat yang ada di suatu wilayah. Penjagaan kondisi ketenteraman dan ketertiban menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan dalam rangka penciptaan kondisi daerah yang kondusif dan stabil. Hal ini dapat dicapai melalui penegakan peraturan daerah yang optimal, pengawasan yang baik dalam rangka terhadap aktivitas-aktivitas yang berpotensi melanggar hukum, resolusi konflik sosial yang cepat dan tepat, dan penyediaan sarana

prasarana penunjang layanan ketertiban serta didukung dengan menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan kepada publik dalam rangka peningkatan kepercayaan publik.

Kondisi stabilitas ekonomi makro dan kapasitas fiskal daerah juga merupakan hal yang disasar melalui misi ini. Stabilitas ekonomi daerah yang diukur melalui inflasi daerah diupayakan untuk dapat terjaga setiap tahunnya dalam rentang aman, dimana hal ini dapat dicapai melalui berbagai kebijakan multisektor yang menyasar ketersediaan dan distribusi barang jasa, khususnya bagi komoditas-komoditas yang tergolong kebutuhan pokok. Selain kondisi ekonomi makro, kapasitas fiskal daerah juga diupayakan untuk dapat optimal kedepannya melalui peningkatan kapasitas fiskal daerah dan peningkatan efektivitas dalam pemanfaatannya.

Perwujudan kondusivitas dan stabilitas daerah ini juga merupakan prasyarat yang penting dalam pembangunan daerah. Dalam pembangunan ekonomi, daerah yang memiliki kondusivitas dan stabilitas daerah yang baik dapat meningkatkan tingkat kepercayaan calon investor untuk menanamkan modal di wilayah tersebut. Dengan tidak adanya kondusivitas, suatu daerah akan dipandang sebagai daerah yang tidak aman oleh penanam modal untuk menanamkan modalnya. Kondusivitas dan stabilitas daerah juga menjadi prasyarat bagi pembangunan lain seperti sosial dan infrastruktur. Peristiwa konflik sosial dapat menjadi faktor penghambat bagi proses pembangunan seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan penyediaan layanan dasar lainnya.

Misi 5: Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak dan Berkarakter

Misi Misi mewujudkan masyarakat yang berakhlak dan berkarakter diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bandung Barat yang memiliki karakter dan budaya yang kuat dengan tetap memperhatikan tata kehidupan masyarakat yang religius dan mengedepankan nilai-nilai toleransi. SDM yang berkarakter diwujudkan melalui penanaman nilai-nilai yang ideal dalam setiap pembangunan seperti nilai religius, inklusivitas, dan kemanusiaan.

Nilai religius mencerminkan tata kehidupan dan perilaku yang berpedoman pada unsur pokok keagamaan seperti akidah, ibadah, dan akhlak. Nilai inklusivitas mengedepankan pengakuan terhadap keberagaman, sehingga meminimalisir perilaku diskriminatif dan ketidaksetaraan. Nilai kemanusiaan menjunjung tinggi perilaku yang adil dan tenggang rasa terhadap sesama manusia.

Misi 6: Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah

Infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata menjadi fondasi dalam pemenuhan pelayanan publik bagi masyarakat agar kesejahteraan masyarakat terus meningkat. Pembangunan infrastruktur bukan hanya tentang kualitas yang dapat meningkatkan kenyamanan tinggal, namun pemerataan pembangunan di kawasan perdesaan juga penting agar tidak terjadi ketimpangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Kondisi geografis Bandung Barat yang berbukit menjadi tantangan tersendiri untuk mewujudkan keterhubungan antar wilayah, sehingga perlu upaya lebih lanjut agar konektivitas dan aksesibilitas wilayah menjadi lebih berkualitas.

Perwujudan misi 6 terkait pemerataan pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, namun infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan perekonomian serta kemudahan aksesibilitas melalui pengembangan transportasi masal dan pembangunan jalan tol untuk mendukung program pembangunan pada misi 2. Pengembangan infrastruktur pariwisata berbasis keberlanjutan lingkungan atau *green tourism* menjadi fokus pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Bandung Barat yang didukung dengan kondisi sumber daya alam yang cocok dikembangkan menjadi destinasi wisata.

Misi 7: Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar

Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar sebagai pendukung kegiatan masyarakat, seperti sarpras pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi, perumahan, serta transportasi publik.

Pemenuhan kebutuhan sarpras untuk mendukung pelayanan publik diharapkan dapat terwujud sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik di Kabupaten Bandung Barat tentu saja tidak dapat dilaksanakan salah satu sektor saja, namun perlu adanya kolaborasi lintas sektor yang berkoordinasi untuk mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas dan berkelanjutan.

Perwujudan misi ini tidak terlepas dengan pelaksanaan misi 1 tentang kualitas SDM yang terukur dengan IPM serta misi 6 tentang pemerataan infrastruktur. Ketiga misi ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang digambarkan dengan SDM yang berkualitas dengan dilengkapi adanya sarana prasarana pelayanan publik yang merata di seluruh wilayah.

Misi 8: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan

Ancaman terhadap bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor masih menjadi tantangan yang perlu dihadapi Kabupaten Bandung Barat saat ini maupun kedepannya. Hal tersebut menjadi fokus pembangunan yang harus diwujudkan untuk mendukung kondisi wilayah yang tangguh terhadap bencana serta mencegah degradasi lingkungan agar kondisi lingkungan hidup yang berkualitas dapat diwujudkan. Pembangunan berkelanjutan menjadi prinsip yang harus dipegang semua sektor di Kabupaten Bandung Barat.

Kondisi lingkungan hidup menjadi penting untuk diperhatikan dalam perencanaan jangka panjang, mengingat fenomena bencana dan perubahan iklim tidak terlepas dari kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Bandung Barat.

Perwujudan wilayah yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim menjadi fokus dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan infrastruktur Bandung Barat. Infrastruktur berkelanjutan dan berkualitas yang mampu menunjang mitigasi kebencanaan menjadi prioritas pembangunan.

Tabel 4. 7 Persandingan Misi Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia

No	RPJPN Tahun 2025-2045		RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045	RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045
	Kelompok Agenda/Misi	Agenda/Misi	Misi	Misi
1	Transformasi Indonesia	Transformasi sosial	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
2		Transformasi ekonomi	Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Mandiri Berbasis Sektor Unggulan
3		Transformasi tata kelola	Menguatkan Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas, Akuntabel, dan Inovatif	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif
4	Landasan Transformasi	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Mewujudkan Provinsi yang Aman dan Tertib serta Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah	Mewujudkan kondusivitas dan stabilitas daerah
5		Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Mewujudkan Masyarakat Madani, Berbudaya, Maju, dan Peduli Lingkungan	Mewujudkan masyarakat yang berakhlak dan berkarakter
6	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang merata dan inklusif	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan aksesibilitas wilayah
7		Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan dasar
8		Kesinambungan pembangunan	Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan

Sumber: Hasil Penyelarasan RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPD Kab. Bandung Barat, diolah 2024

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Bab ini memuat arah kebijakan beserta sasaran pokok rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung Barat. Arah kebijakan bertujuan untuk memandu penyusunan tema rencana lima tahunan, sedangkan sasaran pokok bertujuan untuk menyusun indikator makro atau indikator kinerja kunci daerah di dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah yang menjadi ukuran bagi kinerja. Arah kebijakan dan sasaran pokok rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

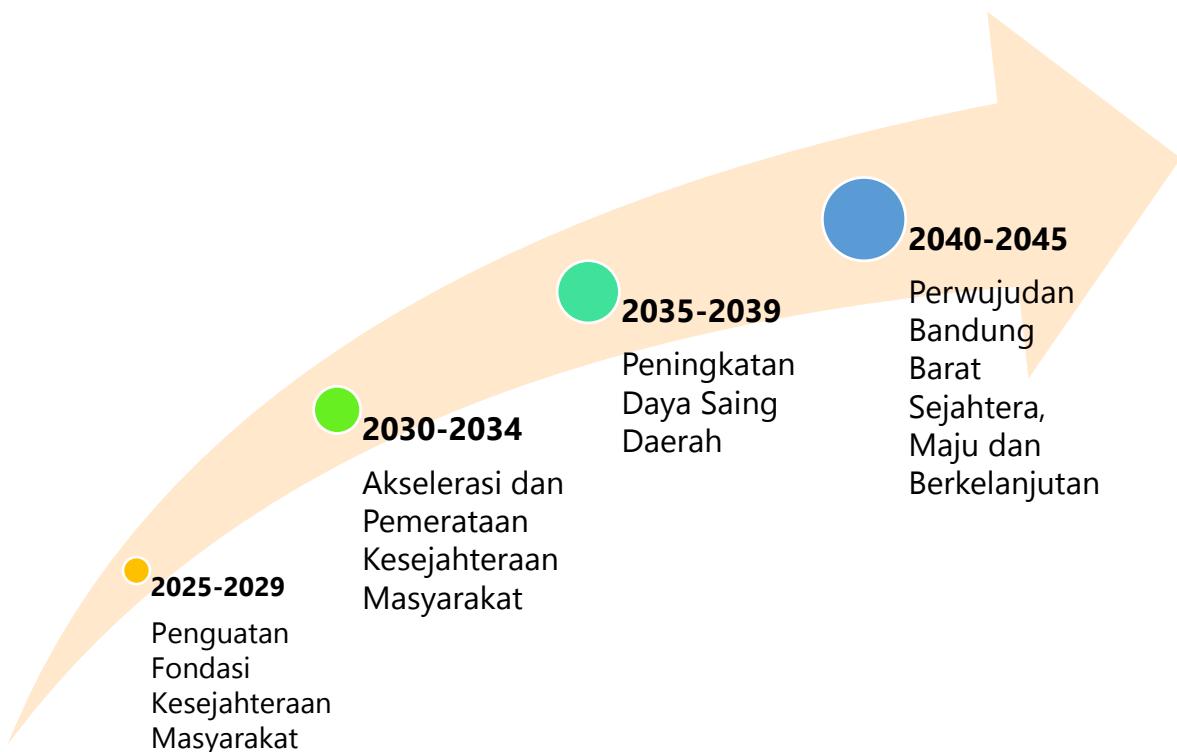
5.1 Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung Barat tahun 2025-2045 disusun sebagai acuan bagi penyusunan tema lima tahunan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah. Arah kebijakan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2025-2045 disusun dengan mengacu kepada arah kebijakan di dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dan arah kebijakan kewilayahan Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2045. Arah kebijakan ini juga disusun dengan mengacu pada tahapan pembangunan yang disampaikan oleh *Walt Whitman Rostow*.

Rostow menyampaikan bahwa tahapan pembangunan dapat dijalankan melalui beberapa tahapan, seperti *pre-condition to take off* (prasyarat lepas landas), *take-off* (lepas landas), *drive to maturity* (gerakan ke arah kedewasaan) dan *the age of high mass consumption* (konsumsi massal yang tinggi).

Tahapan pembangunan yang disampaikan Rostow tersebut tidak diadopsi secara langsung, namun disesuaikan dengan konteks dan cita-cita jangka panjang Kabupaten Bandung Barat ke depan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah (Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017). Berikut adalah arah kebijakan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2025-2045:

Gambar 5. 1 Tema Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045



Tabel 5. 1 Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045

Misi RPJPD Kabupaten Bandung Barat	Arah Kebijakan (Tema Pembangunan)			
	Periode I (2025-2029): Penguatan Fondasi Kesejahteraan Masyarakat	Periode II (2030-2034): Akselerasi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Periode III (2035-2039): Peningkatan Daya Saing Daerah	Periode IV (2040-2044): Perwujudan Bandung Barat, Sejahtera, maju dan Berkelanjutan
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar	Percepatan pembangunan sistem pelayanan dasar dan perlindungan sosial yang responsif dan adaptif	Penguatan SDM yang berdaya saing dan inklusif	Perwujudan SDM yang berdaya saing dan sejahtera
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Mandiri Berbasis Sektor Unggulan	Optimalisasi sumber daya ekonomi	Peningkatan produktivitas pertumbuhan sektor ekonomi unggulan dan potensial	Peningkatan daya saing pemasaran dan keterkaitan antar sektor ekonomi	Perwujudan ekonomi Bandung Barat yang inklusif dan berkelanjutan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif	Penguatan inovasi dan digitalisasi pelayanan publik, kelembagaan yang efektif, penerapan sistem merit dan peningkatan ekosistem inovasi	Pelayanan publik yang responsif, kelembagaan yang adaptif, dan ASN yang profesional serta peningkatan keberlanjutan inovasi	Tata kelola yang adaptif dan kolaboratif, serta birokrasi yang <i>agile</i> serta menjadikan inovasi sebagai budaya	Tata kelola pemerintahan yang inovatif, adaptif, kolaboratif, dan birokrasi yang berintegritas
Mewujudkan Kondusivitas dan Stabilitas Daerah	Peningkatan kondusivitas wilayah dan stabilitas ekonomi daerah	Penguatan kondusivitas wilayah dan stabilitas ekonomi daerah	Kondusivitas dan stabilitas ekonomi makro daerah terjaga	Terwujudnya kondusivitas dan stabilitas daerah
Mewujudkan masyarakat yang berakhhlak dan berkarakter	Penguatan fondasi pendidikan karakter dan kebudayaan	Percepatan pembangunan sistem pembentukan karakter dan pelestarian budaya	Penguatan daya saing masyarakat berlandaskan agama dan budaya	Perwujudan masyarakat KBB yang berakhhlak dan berkarakter

Misi RPJPD Kabupaten Bandung Barat	Arah Kebijakan (Tema Pembangunan)			
	Periode I (2025-2029): Penguatan Fondasi Kesejahteraan Masyarakat	Periode II (2030-2034): Akselerasi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Periode III (2035-2039): Peningkatan Daya Saing Daerah	Periode IV (2040-2044): Perwujudan Bandung Barat, Sejahtera, maju dan Berkelanjutan
Pemerataan pembangunan infrastruktur	Pemenuhan infrastruktur wilayah yang merata	Pemantapan kualitas infrastruktur wilayah yang merata	Pengembangan infrastruktur yang andal dan memperhatikan prinsip-prinsip infrastruktur hijau	Perwujudan infrastruktur andal dan berkelanjutan
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan dasar	Pemenuhan dan pemerataan kualitas sarana dan prasarana pelayanan dasar	Percepatan pembangunan sarana dan prasarana penunjang pelayanan dasar	Penguatan infrastruktur pelayanan dasar yang inklusif	Perwujudan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang merata dan berkualitas
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang Tangguh dan berkelanjutan	Penguatan manajemen sumber daya air, penguatan kelembagaan pengelolaan sampah, manajemen bencana dan perubahan iklim, pengelolaan lahan kritis dan degradasi lingkungan	Pengelolaan sampah berkelanjutan, akselerasi pengelolaan air berbasis hulu-hilir, inklusivitas adaptasi perubahan iklim dan bencana	Akselerasi pengelolaan sampah terpadu, pengelolaan dan pengendalian <i>run off</i> terintegrasi, integrasi adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana	Tercapainya ketahanan daerah dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kab. Bandung Barat, 2024

5.1.1 Arah Kebijakan Periode 2025-2029

Misi 1 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya

Saing

Arah kebijakan lima tahunan pertama pada bidang sumber daya manusia diarahkan untuk memperkuat fondasi transformasi sosial guna mewujudkan kesejahteraan. Arah kebijakan pada periode pertama perencanaan jangka panjang ini berkaitan dengan penguatan fondasi pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Penguatan fondasi transformasi sosial dilaksanakan dalam bentuk peningkatan ketersediaan dan pemerataan pada seluruh aspek yang mendukung upaya pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam memenuhi layanan dasar masyarakat. Secara lebih rinci, beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada periode pertama pembangunan jangka panjang adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan;
2. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan dasar dan rujukan;
3. Peningkatan kualitas layanan perlindungan sosial;
4. Peningkatan kebijakan yang inklusif bagi kelompok rentan;

Misi 2 Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Mandiri Berbasis Sektor Unggulan

Arah kebijakan periode pertama dalam misi 2 tentang meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis sektor unggulan diarahkan untuk memperkuat fondasi pembangunan ekonomi daerah. Fondasi ekonomi diperkuat dengan memperhatikan berbagai sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung Barat, terutama sumber daya ekonomi di sektor pariwisata dan pertanian. Berikut adalah arah kebijakan periode pertama untuk misi perekonomian Kabupaten Bandung Barat:

1. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi tenaga kerja;
3. Peningkatan kemudahan akses terhadap bantuan permodalan;

4. Pengembangan kewirausahaan;
5. Peningkatan kerja sama pemasaran.

Misi 3 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif

Periode ini merupakan periode penguatan tata Kelola pemerintahan dalam rangka mendukung pembangunan daerah. Fokus terhadap penguatan tata Kelola pemerintahan diarahkan untuk memperkuat tata Kelola berbasis digital, birokrasi yang efektif melalui penerapan sistem merit, dan peningkatan ekosistem inovasi. Adapun rincian arah kebijakan sebagai kerangka pencapaian implementasi, yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan inovasi dan digitalisasi pelayanan publik;
2. Kelembagaan yang efektif;
3. Peningkatan manajemen ASN melalui meritokrasi;
4. Peningkatan kualitas ASN;
5. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk turut serta dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
6. Peningkatan ekosistem inovasi.

Misi 4 Mewujudkan Kondusivitas dan Stabilitas Daerah

Pada periode ini, Misi 4 memiliki tiga arah kebijakan yang akan menyasar kepada penguatan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di daerah, serta upaya pengendalian ekonomi daerah melalui penjagaan kondisi inflasi daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Arah kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat fondasi daerah dalam hal kondusivitas dan stabilitas daerah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum daerah;
2. Pengendalian ekonomi daerah;
3. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Misi 5 Mewujudkan Masyarakat yang Berakhhlak dan Berkarakter

Penguatan fondasi untuk menciptakan masyarakat yang berakhhlak dan berkarakter di Kabupaten Bandung Barat diwujudkan dengan melakukan beberapa langkah kebijakan yang meliputi:

1. Memperkuat peran keluarga dalam pembentukan karakter;
2. Memperkuat peran tenaga pendidik dalam pembentukan karakter berlandaskan agama dan budaya;
3. Peningkatan peran lembaga keagamaan dan sosial kemasyarakatan guna memperkuat kondusivitas sosial dan pelestarian kebudayaan;
4. Peningkatan pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan penguatan kualitas keluarga;
5. Peningkatan pendampingan dan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan

Misi 6 Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah

Penguatan fondasi kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat diwujudkan pada misi keenam RPJPD Kabupaten Bandung Barat yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan infrastruktur wilayah. Infrastruktur wilayah yang merata menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Bandung Barat, sehingga pembangunan infrastruktur tidak hanya terfokus pada kawasan perkotaan namun juga mempertimbangkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah terutama kawasan perdesaan atau kawasan pinggiran. Selain sebagai perwujudan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur juga difokuskan untuk mendukung kegiatan perekonomian wilayah. Pemerataan dan pembangunan infrastruktur diwujudkan dengan beberapa arah kebijakan pada periode pertama sebagai berikut:

1. Peningkatan penyediaan infrastruktur transportasi masal, Jalan Tol dan logistik yang andal
2. Pengembangan infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan green tourism

3. Penyelesaian dokumen rencana tata ruang

Misi 7 Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar

Berbagai pembangunan sarana dan prasarana yang telah dilakukan pada periode sebelumnya perlu ditingkatkan pada periode ini. Oleh karena itu pelaksanaan Misi 7 dalam rangka Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar diarahkan pada perluasan akses sarana dan prasarana pelayanan dasar. Upaya ini dilakukan melalui arah kebijakan:

1. Perluasan akses terhadap rumah layak huni;
2. peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi;
3. Penataan kawasan kumuh;
4. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar.

Misi 8 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan

Sebagai upaya untuk mewujudkan Kabupaten Bandung Barat yang tangguh terhadap bencana serta searah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan perlu adanya perencanaan yang berwawasan lingkungan sehingga terwujud wilayah dengan lingkungan hidup yang berkualitas. Pada periode pertama pembangunan jangka panjang, upaya menjaga kualitas lingkungan hidup yang tangguh terhadap bencana diwujudkan dengan arah kebijakan pada periode pembangunan pertama sebagai berikut:

1. Penguatan manajemen sumber daya air
2. Penguatan kelembagaan pengelolaan sampah
3. Manajemen bencana, adaptasi perubahan iklim, dan penurunan intensitas emisi GRK
4. Pengelolaan lahan kritis dan degradasi lingkungan

5.1.2 Arah Kebijakan Periode 2030-2034

Misi 1 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Arah kebijakan pada periode pembangunan lima tahunan kedua pada bidang sumber daya manusia diarahkan untuk melakukan akselerasi transformasi sosial. Secara teknis, arah kebijakan ini merujuk pada upaya untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan sistem pelayanan dasar yang meliputi layanan pendidikan dan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing SDM Kabupaten Bandung Barat. Bentuk intervensi pemerintah dalam upaya akselerasi transformasi sosial yang inklusif dan adaptif secara lebih rinci diuraikan sebagai berikut.

1. Percepatan pembangunan dan pemerataan pendidikan yang berkualitas;
2. Percepatandan pemerataan layanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas;
3. Penguatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan;
4. Penguatan kapasitas tenaga kesehatan dan non kesehatan.
5. Penguatan kualitas layanan perlindungan sosial.

Misi 2 Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Mandiri Berbasis Sektor Unggulan

Arah kebijakan periode kedua dalam misi 2 tentang meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis sektor unggulan diarahkan untuk memperkuat akselerasi pembangunan ekonomi daerah. Akselerasi pembangunan ekonomi diperkuat dengan memperhatikan peningkatan produktivitas pembangunan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat di sektor ekonomi unggulan dan potensial khususnya sektor pertanian dan pariwisata. Berikut adalah arah kebijakan periode kedua untuk misi perekonomian Kabupaten Bandung Barat:

1. Peningkatan kapasitas produksi sektor-sektor ekonomi;
2. Peningkatan kualitas produk sektor ekonomi;

3. Hilirisasi produk pertanian;
4. Peningkatan kapasitas dan jaringan kerjasama pemasaran;
5. Optimalisasi ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN).

Misi 3 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif

Periode ini merupakan periode percepatan tata Kelola pemerintahan dalam rangka mendukung pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Fokus percepatan tata Kelola pemerintahan pada periode ini, yaitu birokrasi yang responsif dan tata kelola yang adaptif. Birokrasi yang responsif merupakan birokrasi yang dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tepat, sementara tata Kelola yang adaptif menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman terutama dalam merespons berbagai kebutuhan masyarakat. Adapun rincian arah kebijakan sebagai kerangka implementasi, yaitu sebagai berikut:

1. Pelayanan publik yang responsif;
2. Kelembagaan yang adaptif;
3. ASN yang profesional;
4. Penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah;
5. Peningkatan keberlanjutan inovasi.

Misi 4 Mewujudkan Kondusivitas dan Stabilitas Daerah

Pada periode ini, Misi 4 memiliki tiga arah kebijakan yang menyasar kepada upaya-upaya akseleratif dalam mewujudkan kondusivitas dan stabilitas daerah yang kokoh. Arah kebijakan pada periode ini berfokus pada penguatan dari landasan yang telah dibentuk pada periode sebelumnya. Penguatan ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dari keberadaan landasan yang telah dibentuk agar dapat menjadi modal pembangunan ke depan. Upaya-upaya akseleratif yang dimaksud dirincikan sebagai berikut:

1. Penguatan harmoni sosial;
2. Peningkatan stabilitas ekonomi makro; dan
3. Penguatan kontribusi PAD terhadap kapasitas fiskal daerah.

Misi 5 Mewujudkan Masyarakat yang Berakhhlak dan Berkarakter

Arah kebijakan pada periode pembangunan lima tahunan kedua pada bidang sosial dan masyarakat diarahkan untuk melakukan akselerasi dalam bidang ketahanan sosial dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Secara teknis, arah kebijakan ini merujuk pada upaya memperkuat perlindungan sosial secara lebih luas dan adaptif sebagai upaya untuk melindungi individu maupun kelompok dari kerentanan. Arah kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat karakter dan jati diri masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Bentuk intervensi pemerintah dalam upaya akselerasi ketahanan sosial yang inklusif dan adaptif secara lebih rinci diuraikan sebagai berikut.

1. Penguatan sistem pembentukan karakter dalam bidang pendidikan;
2. Perluasan cakupan perlindungan sosial yang komprehensif;
3. Peningkatan keberdayaan kelompok rentan;
4. Pengarusutamaan gender di berbagai bidang;
5. Peningkatan kehidupan beragama yang maslahat;
6. Pelestarian pokok-pokok pikiran budaya daerah ;
7. Peningkatan keberdayaan pemuda dan prestasi olahraga.

Misi 6 Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah

Akselerasi dimaknai untuk memperkokoh pembangunan yang telah dilakukan pada periode pertama. Pada periode kedua ini, infrastruktur yang dibangun diharapkan lebih inklusif, berkualitas, dan merata. Secara lebih rinci, berikut ini adalah arah kebijakan pada tahap kedua untuk misi enam:

1. Percepatan peningkatan penyediaan infrastruktur transportasi masal, jalan tol dan logistik yang andal;
2. Percepatan pengembangan infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan green *tourism*;
3. Percepatan penyelesaian dokumen rencana tata ruang.

Misi 7 Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar

Upaya perluasan akses sarana dan prasarana dasar yang telah dilakukan pada periode I diharapkan dapat segera dituntaskan pada periode II. Oleh karena itu, pelaksanaan Misi 7: Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar diarahkan pada percepatan perluasan akses dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan dasar. Upaya ini dilakukan melalui arah kebijakan:

1. Percepatan peningkatan akses terhadap rumah layak huni;
2. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan aman;
3. Optimalisasi peningkatan penataan kawasan kumuh;
4. Percepatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi; dan
5. Percepatan peningkatan penyediaan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi.

Misi 8 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan

Pada periode kedua pembangunan Kabupaten Bandung Barat, fokus peningkatan kualitas lingkungan hidup secara lebih lanjut perlu dilakukan. Pelibatan seluruh stakeholders dan peran aktif masyarakat menjadi fokus yang perlu dikembangkan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung Barat. Sistem manajemen pengelolaan air sebagai upaya mitigasi bencana perlu menjadi perhatian agar dampak terjadinya bencana tidak merugikan, namun ketersediaan air juga mencukupi untuk masyarakat. Secara lebih rinci, berikut ini adalah arah kebijakan pada tahap kedua untuk misi delapan:

1. Pengelolaan sampah berkelanjutan;
2. Akselerasi pengelolaan air berbasis hulu-hilir;
3. Inklusivitas adaptasi perubahan iklim, penurunan emisi GRK, dan mitigasi bencana.

5.1.3 Arah Kebijakan Periode 2035-2039

Misi 1 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Arah kebijakan pada periode pembangunan lima tahunan ketiga merupakan tahap lanjutan dari arah kebijakan yang dilakukan pada periode sebelumnya. Pada periode ketiga ini, arah kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bandung Barat diarahkan untuk meningkatkan kualitas daya saing daerah khususnya pada bidang sumber daya manusia. Beberapa upaya pada periode ini dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan generasi sumber daya manusia di Bandung Barat yang berkualitas dan berdaya saing. Arah kebijakan ini dirincikan sebagai berikut.

1. Penguatan ekosistem pendidikan yang berkualitas;
2. Penguatan mutu layanan kesehatan dasar dan rujukan;
3. Penguatan sistem pelayanan kesehatan;
4. Penguatan sistem perlindungan sosial.

Misi 2 Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Mandiri Berbasis Sektor Unggulan

Arah kebijakan pembangunan lima tahunan periode ketiga diarahkan untuk memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan daya saing pemasaran dan keterkaitan antar sektor ekonomi. Peningkatan daya saing pemasaran bertujuan untuk memperluas jaringan pemasaran terutama pada sektor industri pengolahan dan pertanian yang diproyeksikan menjadi penopang perekonomian di Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, juga untuk mendorong kerja sama antara sektor-sektor ekonomi untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Berikut rincian arah kebijakan Misi 2 pada periode ketiga:

1. Perluasan distribusi produk sektor potensial daerah;
2. Optimalisasi kemitraan dalam pengembangan sektor potensial;
3. Perwujudan ekonomi berbasis IKM/UMKM/Ekonomi kreatif;
4. Perwujudan serapan tenaga kerja tinggi;
5. Penguatan daya saing pariwisata.

Misi 3 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif

Pada periode ini fokus tata Kelola pemerintahan, yaitu mendukung daya saing Kabupaten Bandung Barat. Dalam konteks ini, tata Kelola yang diharapkan adalah tata kelola yang kolaboratif dan profesional, serta pelayanan publik yang adaptif. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan lebih kompetitif dalam mendukung pembangunan daerah yang berdaya saing. Adapun rincian arah kebijakan sebagai kerangka implementasi, yaitu sebagai berikut:

1. Tata kelola yang adaptif dan kolaboratif;
2. Birokrasi yang agile;
3. ASN yang profesional dan berintegritas;
4. Masyarakat lebih berdaya dan mandiri dalam mendukung pembangunan daerah;
5. Menjadikan inovasi sebagai budaya.

Misi 4 Mewujudkan Kondusivitas dan Stabilitas Daerah

Arah kebijakan dalam Misi 4 pada periode ini difokuskan kepada perwujudan kondisi-kondisi yang telah dihasilkan pada periode sebelum untuk terjaga. Terjaga dalam hal ini memiliki arti bahwa kondisi-kondisi yang dahulunya diupayakan pada periode-periode sebelumnya adalah kondisi yang saat periode ini sudah merupakan kondisi yang umumnya terjadi. Inflasi yang terjaga, konflik yang minim, dan pendapatan daerah yang dapat menopang daerah menjadi hal-hal yang diharapkan sudah dapat terwujud pada periode ini dan dapat senantiasa dipertahankan kedepannya. Berikut rincian arah kebijakan pada periode ketiga dalam Misi 4:

1. Kondusivitas wilayah yang terjaga;
2. Ekonomi makro yang stabil;
3. Kapasitas fiskal yang terjaga.

Misi 5 Mewujudkan Masyarakat yang Berakhhlak dan Berkarakter

Arah kebijakan pada periode pembangunan lima tahunan ketiga merupakan tahap lanjutan dari arah kebijakan yang dilakukan pada periode sebelumnya. Pada periode ketiga ini, arah kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bandung Barat diarahkan untuk meningkatkan kualitas daya saing daerah khususnya pada bidang sosial masyarakat. Beberapa upaya pada periode ini dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat yang memiliki karakter dan akhlak yang baik. Secara lebih operasional arah kebijakan ini dirincikan sebagai berikut.

1. Penguatan internalisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam pendidikan karakter masyarakat khususnya anak usia sekolah
2. Penguatan ketahanan dan inklusivitas sosial;
3. Pemajuan kebudayaan daerah dan masyarakat multikultur yang harmonis;
4. penguatan keberdayaan pemuda dan daya saing olahraga.

Misi 6 Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah

Perkembangan wilayah membutuhkan dukungan infrastruktur yang andal dan kokoh, sehingga pada tahap ketiga misi enam difokuskan untuk meningkatkan infrastruktur dalam mendukung daya saing daerah yang mengedepankan inklusi, inovasi, dan konsep pembangunan rendah karbon. Arah kebijakan misi tiga pada periode ketiga meliputi.

1. Pengembangan infrastruktur wilayah yang andal dan rendah karbon; dan
2. Penguatan infrastruktur peningkatan produktivitas pertanian dan green tourism melalui optimalisasi pemanfaatan IPTEKIN.

Misi 7 Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar

Pada periode ketiga, ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan dasar diharapkan dapat semakin merata. Hal ini kemudian perlu didukung dengan peningkatan inovasi yang dapat memudahkan akses dan pemanfaatan fasilitas dasar yang telah tersedia.

Pelaksanaan Misi 7: Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar pada periode ketiga akan didukung dengan beberapa arah kebijakan.

1. Pengembangan kawasan permukiman yang layak huni dan inklusif;
2. Pemantapan kualitas infrastruktur dasar permukiman yang inklusif dan inovatif;
3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan berorientasi peningkatan daya saing pendidikan; dan
4. Percepatan peningkatan penyediaan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan untuk mendukung layanan kesehatan yang berdaya saing.

Misi 8 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan

Pengelolaan lingkungan hidup pada periode diharapkan sudah menemukan alur yang stabil, hasil dari pengelolaan yang telah dimulai pada periode satu dan dua, Akselerasi dan peningkatan kolaborasi pengelolaan lingkungan, mitigasi bencana dan perubahan iklim, serta pengelolaan sampah sudah pada tahap lebih lanjut. Lebih rincinya arah kebijakan yang dilakukan pada periode ketiga dirinci sebagai berikut:

1. Akselerasi pengelolaan sampah terpadu;
2. Pengelolaan dan pengendalian *run off* terintegrasi;
3. Integrasi adaptasi perubahan iklim, penurunan emisi GRK, dan pengurangan risiko bencana.

5.1.4 Arah Kebijakan Periode 2040-2045

Misi 1 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Arah kebijakan pada periode pembangunan lima tahunan keempat diarahkan untuk memperkokoh kualitas pelayanan dasar dan perlindungan sosial secara menyeluruh dalam rangka perwujudan misi pada urusan sumber daya manusia yaitu "Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya

Saing". Pada tahap ini, kondisi SDM di Kabupaten Bandung Barat diharapkan sudah berada pada kondisi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Upaya untuk memperkokoh kondisi tersebut dapat dilakukan dengan melakukan penguatan pada beberapa aspek dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Secara lebih rinci arah kebijakan pada periode keempat meliputi.

1. Penguatan SDM yang unggul;
2. Pemantapan pelayanan kesehatan yang berketahtanan;
3. Transformasi perlindungan sosial yang komprehensif dan adaptif;
4. Perwujudan masyarakat yang berkebudayaan maju dan inklusif;
5. Perwujudan pemuda unggul dan olahraga yang berdaya saing.

Misi 2 Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Mandiri Berbasis Sektor Unggulan

Arah kebijakan pada pembangunan lima tahunan periode keempat diarahkan pada perwujudan ekonomi yang mandiri, inklusif dan berkelanjutan. Hal ini untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di seluruh sektor memberikan dampak positif terhadap aspek sosial dan lingkungan sekaligus memberikan manfaat bagi seluruh elemen masyarakat termasuk kelompok rentan dan marginal. Secara lebih rinci, berikut arah kebijakan pada periode ke-4:

1. Sumber penghidupan masyarakat berkelanjutan dan menyejahterakan. Hal ini memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang dapat memberikan peluang kerja yang layak dan memadai bagi seluruh masyarakat, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya perluasan akses lapangan kerja, peningkatan kapasitas pada angkatan kerja, dan dukungan untuk pengembangan usaha bagi IKM/UMKM/Ekonomi kreatif sektor unggulan dan potensial.
2. Perwujudan pariwisata dan pertanian berkelanjutan. Perwujudan pariwisata berkelanjutan berkaitan dengan pengembangan pariwisata dan pertanian yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan

lingkungan, sehingga sektor pariwisata dapat berkembang secara optimal tanpa mengesampingkan kearifan lokal dan budaya setempat. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya pemberdayaan komunitas wisata lokal (kelompok sadar wisata) di setiap destinasi wisata, pencegahan dan pengurangan dampak buruk wisata terhadap kerusakan lingkungan, peningkatan edukasi bagi wisatawan dan komunitas lokal tentang urgensi pariwisata berkelanjutan, penyediaan sertifikasi bagi destinasi wisata yang memenuhi kualifikasi pariwisata berkelanjutan, dan pengembangan infrastruktur pariwisata ramah lingkungan. Sementara itu, pertanian berkelanjutan merupakan implementasi dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang bertujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tani secara luas. Hal ini dilakukan melalui peningkatan produksi pertanian (kuantitas dan kualitas) dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Pembangunan pertanian dilakukan secara seimbang dan disesuaikan dengan daya dukung ekosistem, sehingga keberlanjutan produksi pertanian dapat dipertahankan dalam jangka panjang dengan menekan tingkat kerusakan lingkungan seminimal mungkin.

Misi 3 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif

Periode ini merupakan periode perwujudan dari tata Kelola yang inovatif, adaptif dan kolaboratif dalam rangka mendukung perwujudan visi Kabupaten Bandung Barat maju, Sejahtera, dan berkelanjutan. Selain itu, fokus tahapan keempat ini juga selaras dan mendukung agenda transformasi tata Kelola RPJPN. Adapun rincian arah kebijakan sebagai kerangka implementasi, yaitu:

1. Pemantapan tata kelola yang inovatif, adaptif, dan kolaboratif;
2. Pemantapan birokrasi yang profesional dan berintegritas.

Misi 4 Mewujudkan Kondusivitas dan Stabilitas Daerah

Periode keempat dalam Misi 4 memiliki arah kebijakan yang memiliki fokus kepada perwujudan dari kondisi-kondisi akhir yang dicapai, diantaranya kondusivitas sosial yang harmonis, stabilitas ekonomi daerah yang kokoh, dan kemandirian fiskal daerah. Berbagai pencapaian pada kondisi ini bermuara kepada perwujudan dari Misi 4 sendiri, yaitu "Mewujudkan Kondusivitas dan Stabilitas Daerah". Berbagai kondisi ini diharapkan telah terwujud pada periode ini dan memberikan dukungan bagi perwujudan agenda transformatif tata kelola serta agenda-agenda lain di berbagai sektor lainnya. Berikut merupakan rincian dari kondisi yang diharapkan telah dicapai pada periode ini:

1. Terwujudnya kondusivitas sosial yang harmonis;
2. Stabilitas ekonomi makro yang kokoh;
3. Kemandirian fiskal daerah.

Misi 5 Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak dan Berkarakter

Arah kebijakan pada periode pembangunan lima tahunan keempat diarahkan untuk memperkokoh kondisi masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang berakhlak dan berkarakter dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kehidupan yang harmonis. Hal tersebut dilakukan dalam rangka perwujudan misi pada urusan sosial masyarakat yaitu "Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak dan Berkarakter". Pada tahap ini, kondisi masyarakat di Kabupaten Bandung Barat diharapkan sudah berada pada kondisi dengan karakter agama dan budaya yang kuat serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan sosial yang baik. Upaya untuk memperkokoh kondisi tersebut dapat dilakukan dengan melakukan penguatan pada beberapa aspek dasar seperti pendidikan karakter berbasis agama dan budaya lokal serta aspek perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Secara lebih rinci arah kebijakan pada periode keempat meliputi.

1. Perwujudan masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang berakhlak dan berkarakter;
2. Perwujudan masyarakat yang berkebudayaan maju dan inklusif;

3. Perwujudan pemuda unggul dan olahraga yang berdaya saing.

Misi 6 Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah

Arah kebijakan pada tahap keempat diarahkan untuk mewujudkan daya saing daerah dengan dukungan infrastruktur andal dan berkelanjutan. Pembagunan infrastruktur diharapkan memberikan dampak positif pada seluruh aspek pembangunan daerah sehingga membentuk simpul ekonomi yang semakin mempercepat pencapaian visi misi daerah. Arah kebijakan pada periode ini adalah

1. Perwujudan infrastruktur wilayah yang andal dan berkelanjutan;
2. Perwujudan infrastruktur pendukung perekonomian yang berkualitas dan mendukung pengembangan ekonomi hijau.

Misi 7 Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar

Berbagai upaya pembangunan yang telah dilakukan pada tiga periode sebelumnya diharapkan dapat terus ditingkat dan dikelola dengan baik sehingga dapat mendukung perwujudan Bandung Barat sejahtera, maju dan berkelanjutan. Pada periode IV pelaksanaan Misi 7: Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar akan diarahkan pada:

1. Perwujudan kawasan permukiman layak huni dan inklusif;
2. Perwujudan layanan pendidikan dan kesehatan yang berdaya saing.

Misi 8 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan

Kondisi lingkungan hidup Kabupaten Bandung Barat yang berkualitas serta tangguh terhadap bencana serta mematuhi tujuan pembangunan berkelanjutan pada periode terakhir RPJPD, dirinci dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pengelolaan sampah ramah lingkungan Permasalahan sampah harus dapat ditangani secara berkelanjutan dan meningkatkan upaya ekonomi sirkuler yang dapat menguntungkan seluruh stakeholders di Kabupaten Bandung Barat. Integrasi dan kolaborasi pengelolaan sampah harus dapat diwujudkan untuk kondisi lingkungan yang lebih baik.

2. Tercapainya ketahanan daerah Ketahanan daerah Kabupaten Bandung Barat dapat terwujud dengan pengelolaan lingkungan hidup dan mengurangi risiko bencana yang mungkin terjadi. Histori kebencanaan hidrometeorologi yang sering terjadi seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor harus dapat diantisipasi dengan pengelolaan lingkungan yang terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan kolaborasi antar stakeholders.

5.2 Sasaran Pokok

Sasaran pokok pembangunan dirinci berdasarkan prioritas masing-masing misi pada setiap tahapan pembangunan. Sasaran pokok 5 (lima) tahunan per periode RPJMD merupakan target berdasarkan arah kebijakan pembangunan pada setiap periode lima tahunan yang ditentukan berdasarkan penahapan pembangunan. Oleh karenanya, arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada dasarnya merupakan fokus kebijakan lima tahunan yang memberi panduan pencapaian indikator kinerja sasaran pokok.

Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi Bandung Barat Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan. Sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045 dirumuskan dengan mengacu kepada Arah Pembangunan hasil penyelarasan dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, serta hasil penyelarasan Indikator Utama Pembangunan (IUP) dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat berserta Indikator dan Targetnya yang telah disesuaikan berdasarkan kewenangan dan karakteristik daerah Kabupaten Bandung Barat.

5.2.1 Arah Pembangunan Daerah

Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045 dirumuskan melalui penyelarasan terhadap koridor Arah Pembangunan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 serta sesuai kewenangan, karakteristik dan potensi wilayah. Hasil penyelarasan tersebut sebagimana dijelaskan pada tabel 5.2 terdapat 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045, yaitu:

1. Meningkatnya akses kesehatan yang berkualitas
2. Meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas
3. Perlindungan sosial yang adaptif terhadap kerentanan masyarakat
4. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi berbasis IPTEKIN
5. Ekonomi hijau berkelanjutan
6. Transformasi digital yang adaftif dan talenta digital
7. Integrasi ekonomi domestik dan global
8. Meratanya pembangunan di wilayah pinggiran, serta integrasi pembangunan desa dan perkotaan
9. Meningkatnya tata kelola kolaboratif, adaptif dan berintegritas
10. Meningkatnya kondusivitas wilayah
11. Stabilitas ekonomi daerah
12. Meningkatnya kerja sama strategis Regional
13. Beragama bermaslahat dan berkebudayaan maju
14. Masyarakat inklusif, setara gender dan keluarga yang berkualitas
15. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
16. Meningkatnya ketahanan air dan kemandirian pangan
17. Meningkatnya ketahanan bencana dan perubahan iklim

Tabel 5. 2 Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Bandung Barat, RPJPD Provinsi Jawa Barat, dan RPJPN Tahun 2025-2045

No	RPJPN 2025-2045		RPJPD PROVINSI JAWA BARAT 2025-2045		RPJPD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2025-2045	
	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
1	Transformasi Sosial	IE1. Kesehatan untuk Semua	Transformasi Sosial	Pelayanan Kesehatan prima untuk semua	Transformasi Sosial	Meningkatnya akses kesehatan yang berkualitas
2		IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata		Pendidikan berkualitas yang merata		Meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas
3		IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif		Ketahanan sosial masyarakat yang berbudaya maju		Perlindungan sosial yang adaptif terhadap kerentanan masyarakat
4	Transformasi Ekonomi	IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Transformasi Ekonomi	Peningkatan produktivitas ekonomi daerah.	Transformasi Ekonomi	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi berbasis IPTEKIN
5		IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau		Penerapan ekonomi hijau, biru dan digital.		Ekonomi hijau berkelanjutan
6		IE 6. Transformasi Digital		Pembangunan SDM berdaya saing		Transformasi digital yang adaptif dan talenta digital
7		IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global		Integrasi ekonomi domestik dan global
8		IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		Pembentukan pusat kegiatan wilayah yang mendukung klaster perekonomian di setiap wilayah pengembangan		Meratanya pembangunan di wilayah pinggiran, serta integrasi pembangunan desa dan perkotaan
9	Transformasi Tata Kelola	IE 9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Transformasi Tata Kelola	Peningkatan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	Transformasi Tata Kelola	Meningkatnya tata kelola kolaboratif, adaptif dan berintegritas

No	RPJPN 2025-2045		RPJPD PROVINSI JAWA BARAT 2025-2045		RPJPD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2025-2045	
	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
10	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	IE 10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Meningkatnya kondusivitas wilayah
11		IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro		Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah		Stabilitas ekonomi daerah
12		IE 12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan		Peningkatan kerjasama regional maupun internasional		Meningkatnya kerja sama strategis Regional
13	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Peningkatan kerukunan umat beragama	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Beragama bermaslahat dan berkebudayaan maju
14		IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender		Masyarakat inklusif, setara gender dan keluarga yang berkualitas
15		IE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas		Peningkatan kualitas lingkungan hidup		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
16		IE 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi		Meningkatnya ketahanan air dan kemandirian pangan
17		IE 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim		Meningkatnya ketahanan bencana dan perubahan iklim

5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Bandung Barat

Arah kebijakan trasnformasi Kabupaten Bandung Barat merupakan sinkronisasi dengan arah kebijakan transformasi RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPN. Arah kebijakan transformasi merupakan bentuk operasionalisasi dari arah kebijakan transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola dan landasan transformasi. Arah kebijakan transformasi dijalankan selama periode pembangunan jangka panjang yaitu tahun 2025-2045 sesuai dengan kerangka kerja yang telah dirumuskan di dalam arah kebijakan setiap periode. Dengan demikian, arah kebijakan transformasi berada dalam kerangka penguatan fondasi transformasi pada periode pertama, akselerasi transformasi pada periode kedua, peningkatan daya saing daerah pada periode ketiga dan perwujudan Bandung Barat sejahtera, maju dan berkelanjutan pada periode keempat.

Tabel 5. 3 Arah Kebijakan Transformatif RPJPD Kabupaten Bandung Barat 2025-2045

Transpormasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
Transformasi Sosial	Meningkatnya akses kesehatan yang berkualitas	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.
		Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.
		Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
		Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.
		Penyelenggaran pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.
		Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
		Percepatan penurunan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i> .
		Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
		Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.

Transpormasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
		<p>Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.</p> <p>Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.</p>
	Meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas	<p>Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).</p> <p>Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.</p> <p>Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.</p> <p>Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.</p> <p>Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.</p> <p>Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i>, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).</p> <p>Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).</p> <p>Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.</p> <p>Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.</p> <p>Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.</p> <p>Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.</p> <p>Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi.</p> <p>Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi.</p> <p>Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada</p>

Transpormasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
		<p>program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).</p> <p>Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.</p> <p>Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i>.</p> <p>Penguatan dan pengembangan pelatihan vokasi berbasis kondisi lokal, potensi dan keunggulan daerah serta meningkatkan kualitas instruktur.</p> <p>Penguatan dan pengembangan kurikulum pelatihan vokasi berbasis potensi dan keunggulan daerah dan meningkatkan keterkaitan dengan DUDIKA dan kewirausahaan.</p>
	<p>Perlindungan sosial yang adaptif terhadap kerentanan masyarakat</p>	<p>Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat</p> <p>Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah</p> <p>Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau <i>urban renewal</i> pada area yang telah mengalami <i>urban decay</i> dalam suatu kawasan perkotaan.</p>
<p>Transformasi Ekonomi</p>	<p>Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi berbasis IPTEKIN</p>	<p>Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i>, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).</p> <p>Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.</p> <p>Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.</p>

Transpormasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
		<p>Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.</p>
		<p>Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.</p>
		<p>Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.</p>
		<p>Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian</p>
		<p>Modernisasi sarana produksi perikanan dan peternakan</p>
		<p>Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan megapolitan/metropolitan (urban tourism).</p>
		<p>Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.</p>
		<p>Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.</p>
		<p>Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>
		<p>Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global</p>
		<p>Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan prosesbisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.</p>
		<p>Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan</p>

Transpormasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
		<p>terbarukan.</p> <p>Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.</p> <p>Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.</p> <p>Peningkatan produktivitas BUMD.</p> <p>Peningkatan kesempatan kerja atau penempatan tenaga kerja dalam rangka pelayanan ketenagakerjaan mencakup penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK), fasilitasi pencari kerja dengan pengguna kerja sehingga terjadinya penempatan tenaga kerja dan mendorong kesempatan kerja yang produktif serta mobilitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran dan pengangguran terbuka, baik di perdesaan maupun di perkotaan serta memenuhi kebutuhan pasar kerja baik secara nasional atau maupun internasional.</p>
	Ekonomi hijau berkelanjutan	<p>Pengembangan ekonomi hijau berbasis keunggulan wilayah</p> <p>Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.</p> <p>Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.</p> <p>Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon.</p> <p>Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi</p>

Transpormasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
		<p>untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.</p>
Transformasi digital yang adaftif dan talenta digital		<p>Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.</p>
		<p>Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Bandung.</p> <p>Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).</p>
Integrasi ekonomi domestik dan global		<p>Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)</p>

Transpormasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
		<p>Peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat), terutama pada ruas Cipatat-Padalarang.</p> <p>Elektrifikasi jalur KA dan peningkatan sarana/prasarana perkeretaapian, terutama untuk layanan perkeretaapian KA komuter di kawasan metropolitan Bandung.</p> <p>Pengembangan kereta api cepat (HST/High Speed Train) Jakarta-Bandung-Cirebon- Semarang-Surakarta-Surabaya.</p> <p>Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya.</p>
	Meratanya pembangunan di wilayah pinggiran, serta integrasi pembangunan desa dan perkotaan	<p>Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja</p>
		<p>Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.</p>
		<p>Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (global city), dan berketahanan, terutama pada metropolitan Bandung (megapolitan Jakarta-Bandung), serta kawasan perkotaan padalarang.</p>
		<p>Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)</p>
		<p>Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.</p>
		<p>Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan</p>

Transpormasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
		Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama metropolitan Bandung.
		Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.
		City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.
		Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.
Transformasi Tata Kelola	Meningkatnya tata kelola kolaboratif, adaptif dan berintegritas	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah
		Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
		Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
		Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
		Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Pemda Kab. Bandung Barat, menuju penyelenggaraan Pemda Bandung Barat yang profesional dan bebas korupsi.
		Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
		Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta,reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.
		Peningkatan kualitas dan pemantapan manajemen ASN berbasis nilai-nilai budaya lokal
		Pengembangan ekosistem inovasi dalam tata kelola pemerintahan
		Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
		Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW
		Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali

Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
		<p>kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan</p> <p>Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional</p> <p>Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.</p>
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Meningkatnya kondusivitas wilayah	<p>Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.</p> <p>Peningkatan keamanan dan penegakan hukum di daerah</p> <p>Pencegahan dan penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat</p> <p>Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat</p> <p>Penguatan integritas partai politik</p>
	Stabilitas ekonomi daerah	<p>Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.</p> <p>Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBUD dan blended finance.</p> <p>Penguatan pengendalian inflasi daerah.</p>
	Meningkatnya kerja sama strategis Regional	<p>Penguatan kerjasama strategis antar daerah</p> <p>Tindaklanjut kerjasama antar daerah</p>
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Beragama bermaslahat dan berkebudayaan maju	<p>Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.</p> <p>Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</p> <p>Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.</p>
	Masyarakat inklusif, setara gender dan keluarga yang berkualitas	<p>Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.</p> <p>Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.</p>

Transpormasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
		<p>Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.</p> <p>Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.</p> <p>Peningkatan sarana dan prasarana serta pembinaan keolahragaan</p>
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		<p>Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis.</p>
		<p>Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.</p>
		<p>Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.</p>
Meningkatnya ketahanan air dan kemandirian pangan		<p>Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atauketersediaan air.</p> <p>Penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan</p> <p>Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan</p>
		<p>Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian</p>
Meningkatnya ketahanan bencana dan perubahan iklim		<p>Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.</p>
		<p>Penegakan standar keandalan bangunan yang berketalahan bencana dan iklim.</p>
		<p>Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.</p>
		<p>Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.).</p>

Transpormasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
		<p>Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.</p> <p>Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas</p> <p>Percepatan pelaksanaan reforma agraria.</p>

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kab. Bandung Barat, 2024

5.2.3 Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Bandung Barat

Indikator Utama Pembangunan (IUP) Jawa Barat mengacu pada Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 yang terdiri dari 45 indikator. Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan (45 Indikator) RPJPD Prov. Jabar dan RPJPN 2025-2045, untuk selanjutnya Provinsi Jawa Barat menurunkan indikator dimaksud ke Kab/Kota dengan memastikan terdapat 6 (enam) indikator sasaran Visi dan 8 (delapan) indikator utama pembangunan yang digunakan dalam RPJPD Kab/Kota Tahun 2025-2045 yang harus sama dengan RPJPD Prov. Jabar dengan Target ditentukan oleh Provinsi Jawa Barat.

Indikator Utama Pembangunan (IUP) dan target Kabupaten Bandung Barat tahun 2025-2045 yang telah diselaraskan dengan RPJPN dan RPJPD Prov. Jabar ditetapkan untuk mengukur capaian arah pembangunan dan sasaran pokok pembangunan sebagai penjabaran visi dan misi RPJPD Kabupaten Bandung Barat tahun 2025-2045 yang dapat dilihat pada Tabel 5.4 dan Tabel 5.5 berikut:

Tabel 5. 4 Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Bandung Barat 2025-2045 hasil Penyelarasan dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPN Tahun 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045		No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045	
		Base line 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(5)	(8)	(9)
TRANSFORMASI SOSIAL										
IE1	Kesehatan untuk Semua			Pelayanan Kesehatan prima untuk semua				Meningkatnya akses kesehatan yang berkualitas		
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,4	80	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,29	80,78	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,09	78,28
2	Kesehatan Ibu dan Anak			Kesehatan Ibu dan Anak:				Kesehatan Ibu dan Anak:		
a.	Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	115	16	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	151	15	2	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (jumlah)	33	5
b.	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,5	5	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	19,0	5	3	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	22,00	5,79
3	Insidensi Turberkolis (per 100.000 penduduk)	274	76	Penanganan Tuberkulosis:			4	Penanganan Tuberkulosis:		
				a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%) [*]	95	95		a. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) (%)	91	98
				b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	88	98		b. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate) (%)	91	98
4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional (%)	98	99,5	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	95,52	99,5	5	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	88,80	99

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPN Tahun 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045		No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045	
		Base line 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(5)	(8)	(9)
IE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata			Pendidikan Berkualitas yang Merata				Meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas		
5	Hasil pembelajaran			Hasil pembelajaran				Hasil pembelajaran		
a.	Rata-rata nilai PISA			a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:						
	- Membaca	396	485	i) Literasi Membaca	25,93 – 33,33	70,37 – 74,07				
	- Matematika	404	490	ii) Numerasi	7,41 – 14,81	62,96 – 66,67				
	- Sains			b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:						
				i) Literasi Membaca	45,30 – 47,30	71,42 – 73,42				
				ii) Numerasi	34,83 – 36,83	63,01 – 65,01				
b.	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,46	12	c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 thn	9,52 – 9,53	12,05 – 12,09	6	Rata-Rata lama sekolah (tahun)	8,25	8,45

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPN Tahun 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045		No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045	
		Base line 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(5)	(8)	(9)
c.	Harapan lama sekolah	13,37	14,81	d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,87 – 12,88	14,24 – 14,29	7	Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,97	12,85
6	Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan tinggi (%)	33,94	60	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	9,64	9,64 – 14,50				
7	Presentasi pekerjaan lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja dibidang keahlian menengah tinggi (%)	61,87	75	Percentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	68,19	75				
IE3	Perlindungan sosial yang adaptif			Ketahanan sosial masyarakat yang berbudaya maju				Perlindungan sosial yang adaptif terhadap kerentanan masyarakat		
8	Tingkat kemiskinan (%)	6,0-7,0	0,5-0,8	Tingkat Kemiskinan (%)	5,85 – 6,46	0,09 - 0,59	8	Tingkat Kemiskinan (%)	9,05 - 9,99	0,14 - 0,91
9	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	44,1	99,5	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	39,77	80,04				
10	Persentasi penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	20	60	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	24	70				
TRANSFORMASI EKONOMI										
IE4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi			Peningkatan produktivitas ekonomi daerah				Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi berbasis IPTEKIN		

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPN Tahun 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045		No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045	
		Base line 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(5)	(8)	(9)
11	Rasio PDB industry pengolahan (%)	20,8	28	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	41,87 – 42,00	46,43 – 47,60	9	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	41,20	42,00
12	Pengembangan Pariwisata			Pengembangan Pariwisata				Pengembangan Pariwisata		
a.	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,5	8	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	3,15	5,36	10	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	5,60	8,20
b.	Devisa Pariwisata (Milliar US Dollar)	18	100	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Org)	536,6	1.341,50	11	Jumlah kunjungan wisatawan	6.192.891	7.560.661
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,9	110	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	22,81	18,69				
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD				Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
a.	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,3 (2019)	5	i) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	10,37	12,03				
				ii) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	5,62	9,52				
b.	Rasio kewirausahaan (%)	2,9	8	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,5	9,86	12	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,96	8,07
c.	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,1 (2021)	10	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,05	6,03	13	Pertumbuhan Koperasi Berkualitas (%)	29,75	100

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPN Tahun 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045		No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045	
		Base line 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(5)	(8)	(9)
d.	Return of Asset (ROA) BUMN (%)	3,4	5,6	Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	1,62	5,56				
15	Tingkat pengangguran terbuka (%)	5	4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,42 – 6,99	5,16 – 6,14	14	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,40 – 8,06	4,76 – 5,91
16	Tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan (%)	55,4	70	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	49,88	62,3				
17	Tingkat penguasaan IPTEK			Tingkat penguasaan IPTEK:				Tingkat penguasaan IPTEK		
a.	Pengeluaran iptek dan inovasi (% PDB)	0,28 (2020)	2,2-2,3	Indeks Inovasi Daerah	71,76	81,76	15	Indeks Inovasi Daerah	40 - 60	60,01 - 80
b.	Peringkat Index Inovasi Global (peringkat)	75 (2022)	30 besar							
IE5	Penerapan Ekonomi Hijau			Penerapan Ekonomi Hijau				Ekonomi hijau berkelanjutan		
18	Tingkat penerapan ekonomi hijau			Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau				Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
a.	Indeks ekonomi hijau (%)	70,8	90,65	a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	61,3	85,05	16	Indeks Ekonomi Hijau	64,05	83,06
b.	Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	20	70	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	23,4	67,91				
IE6	Transformasi Digital			Transformasi Digital				Transformasi digital yang adaftif dan talenta digital		
19	Indeks daya saing digital ditingkat global (peringkat)	51	20 besar	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi*	6,4	8	17	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi*	4,99	7,59
IE7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			Integrasi rantai pasok produksi dan				Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPN Tahun 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045		No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045	
		Base line 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(5)	(8)	(9)
				perdagangan domestik dan global						
20	Biaya logistic (% PDB)	16,9 (2019)	9	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi*	7,88	5				
21	Pembentukan modal tetap bruto (% PDB)	29,8	27,2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	24,72	21,07	18	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	21,33	22,18
22	Eksport barang dan jasa (% PDB)	26	40	Eksport Barang dan Jasa (% PDRB)	24,42	29,32	19	Eksport Barang dan Jasa (% PDRB)	2,44	5,58
IE8	Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			Pembentukan pusat kegiatan yang mendukung klaster perekonomian di setiap wilayah pengembangan				Meratanya pembangunan di wilayah pinggiran, serta integrasi pembangunan desa dan perkotaan		
23	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan			Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan				Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan		
a.	Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44,58	48,92	Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	WM Bandung 3,34%	WM Bandung 4,80%	20	Indeks Kesulitan Geografis	26,37	23,57
b.	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	64	100	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	56,95	100	21	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)	43,29	100
c.	Persentase Desa Mandiri (%)	7,83	26,23	Persentase Desa Mandiri (%)	12,26	35,51	22	Persentase Desa Mandiri (%)	12,12	27,27

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPN Tahun 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045		No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045	
		Base line 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(5)	(8)	(9)
TRANSFORMASI TATA KELOLA										
IE9	Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif			Peningkatan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif				Meningkatnya tata kelola kolaboratif, adaptif dan berintegritas		
24	Indeks materi hukum	0,25	0,49	Indeks Reformasi Hukum	90,7	100	23	Indeks Reformasi Birokrasi	74 – 80 (BB)	81 – 100 (AA)
25	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	2,34	5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,3	5	24	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,5 - 3,85	4,6 - 5
26	Indeks pelayanan publik	3,87	5	Indeks Pelayanan Publik	4,6	5	25	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	90
27	Anti Korupsi			Indeks Integritas Nasional	72,96	87,89	26	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP
a.	Indeks integritas nasional	71,94 (2022)	96,98							
b.	Indeks persepsi korupsi	34	60							
SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA				KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL, DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH						
IE10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial			Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas				Meningkatnya kondusivitas wilayah		
28	Indeks pembangunan hukum	0,6 (2021)	0,84	a. Presentase penegakan Hukum Perda	70	100				
				b. Presentase capaian pelaksanaan HAM	70	90				

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPN Tahun 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045		No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045	
		Base line 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(5)	(8)	(9)
29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	62,8 (2020)	80	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	51,78	69,16	27	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	73,705	100
30	Indeks demokrasi Indonesia	Sedang (60-80)	Tinggi (>80)	Indeks Demokrasi Indonesia	84,12 – 87,37 (Tinggi)	Tinggi				
IE11	Stabilitas Ekonomi Makro			Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah				Stabilitas ekonomi daerah		
31	Rasio pajak terhadap PDB (%)	10,0-12,0	18,0-20,0	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,58	4,6				
32	Tingkat inflasi (%)	2,5 ± 1	2,0 ± 1	Tingkat Inflasi (%)	3,3 – 3,8	1,1 – 3,2	28	Tingkat Inflasi (%)	4% + 1	4% + 1
33	Pendalaman/Intermediasi sektor keuangan			Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan						
a.	Aset perbankan/PDB (%)	66,9	200	a. Total dana pihak ketiga/PDRB (%)	25,31	78,10				
b.	Aset dana pensiun/PDB (%)	7,6	60	b. Aset dana pensiun PDB (%)	0,95	9,85				
c.	Aset asuransi/PDB (%)	9,1	20	c. Nilai traksaksi saham per kapita per prov (Rp.)	6.256. 296,31	121.148. 522,37				
d.	Kapitalisasi pasar modal/PDB (%)	57,8	120	d. Total Kredit PDRB (%)	23.773,8					
e.	Total kredit/PDB (%)	37,8	80-90							
34	Inklusi keuangan (%)	91	98	Inklusi Keuangan (%)	94,22	99,03	29	Persentase Peningkatan PAD	5,89	161,64

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPN Tahun 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045		No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045	
		Base line 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(5)	(8)	(9)
IE12	Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gentar Kawasan			Peningkatan Kerjasama Internasional dan Ketahanan Daerah				Meningkatnya kerja sama strategis Regional		
35	Asia Power Index (<i>Diplomatic Influence</i>)	60,4 (2023)	75,0-80,0	Efektivitas Kerjasama Internasional	90,91 (2023)	100	30	Persentase Kerjasama Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti (%)	65	90
36	Asia Power Index (<i>Military Capability</i>)	14,16 (2023)	45	Indeks Ketahanan Nasional Daerah Jawa Barat	3,022	4,5				
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI										
IE13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju			Peningkatan kerukunan umat beragama				Beragama bermaslahat dan berkebudayaan maju		
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,57*	68,15	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	56,70 - 56,73	65,99 - 66,28	31	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	16,22	63,57
							32	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	9,6	100
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	75,19*	84,2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,79 - 74,85	81,68 - 82,32	33	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	93,16	99,82
IE14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif			Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender				Masyarakat inklusif, setara gender dan keluarga yang berkualitas		
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	58,49 (2022)	80	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,92 - 70,95	75,81 - 76,05	34	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,6-71	80,6-81
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,459 (2025)	0,15	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,459 - 0,458	0,230 - 0,215	35	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	81,44	88,39
							36	Indeks Pembangunan Pemuda	43,85 - 45,00	45,01 – 50,00

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPN Tahun 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045		No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045	
		Base line 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(5)	(8)	(9)
IE15	Lingkungan Hidup Berkualitas			Peningkatan kualitas lingkungan hidup				Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,35 (2020)	0,7	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,557	0,741				
42	Kualitas Lingkungan Hidup			Kualitas Lingkungan Hidup				Kualitas Lingkungan Hidup		
a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,42 (2022)	76,12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,06	72,08	37	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59,59	64,63
b.	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	12,5	70	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10,49	85,00	38	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	5,94	77,44
c.	Timbulan sampah terolah difasilitasi pengolahan sampah (%)	15 (13% terdaur ulang)	90 (35% terdaur ulang)	Pengelolaan Sampah				Pengelolaan Sampah		
				- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	11,00	90	39	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	2,20	85,35
				- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	48,00	100	40	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	46,84	100
IE16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi				Meningkatnya ketahanan air dan kemandirian pangan		
43	Ketahanan energi, air, dan pangan			Ketahanan energi, air, dan pangan				Ketahanan energi, air, dan pangan		
a.	Ketahanan Energi			Ketahanan Energi				Ketahanan Energi		
	- Indeks ketahanan energi	6,61	8,24	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	1.404	2.670				

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPN Tahun 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045		No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045	
		Base line 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(5)	(8)	(9)
				- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp miliar)*	191	165				
b.	Prevalensi ketidak cukupan pangan (%)	6,2	2,1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	4,58	0,32	41	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	5,57	0,38
c.	Ketahanan air			Ketahanan Air				Ketahanan Air		
	- Kapasitas tampungan air per kapita (m3/kapita)	63,45	200	- Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	4,93	63,12	42	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	4,55	11,33
	- Akses rumah tangga perkotaan terhadap asir siap minum perpipaan (%)	39	100	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	34,74	100	43	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	27,48	100
IE17	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim				Meningkatnya ketahanan bencana dan perubahan iklim		
44	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB (%)	0,14	0,11	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	109,18	92,98 - 79,08	44	Indeks Ketahanan Daerah	0,5 (sedang)	0,7 (sedang)
45	Presentasi penurunan emisi GRK (%)			Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			45	Penurunan Emisi GRK		
a.	Kumulatif	28,12	51,51	a. Kumulatif	2,66	31,65		a. Kumulatif (Ton Co2eq)	256.969,37	2.579.482,89
b.	Tahunan	32,65	80,89	b. Tahunan	9,27	70,08				

Sumber: Hasil Penyelarasan RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPD Kab. Bandung Barat, diolah 2024

Tabel 5. 5 Perumusan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bandung Barat 2025-2045

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
Misi 1: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Meningkatnya akses kesehatan yang berkualitas	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	1. Usia Harapan Hidup Kesehatan Ibu dan Anak: 2. Jumlah Kematian Ibu (jumlah) 3. Prevalensi <i>stunting</i> (%)	75,09	78,28	Kesehatan yang berkualitas untuk semua
		Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.	2. Jumlah Kematian Ibu (jumlah)	33	5	
		Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	3. Prevalensi <i>stunting</i> (%)	22,00	5,79	
		Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	4. Penanganan Tuberkolosis a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>Treatment coverage</i>) b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	91	98	
		Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.	5. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	91	98	
		Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.		88,80	99	
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.				

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
		Percepatan penutusan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i> .				
		Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.				
		Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan				
		Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.				
		Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.				
	2. Meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	6. Rata-rata lama sekolah (RLS) - Tahun 7. Harapan lama sekolah (HLS) – Tahun	8,25	8,45	Pendidikan yang berkualitas dan Merata
	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.	11,97		12,85		

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
		Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.				
		Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.				
		Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.				
		Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).				

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
		<p>Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).</p> <p>Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.</p> <p>Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.</p> <p>Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.</p> <p>Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.</p> <p>Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi.</p>				

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
		<p>Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi.</p> <p>Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).</p> <p>Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.</p> <p>Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i>.</p>				
	3. Perlindungan sosial yang adaptif terhadap kerentanan Masyarakat	Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak,	8. Tingkat kemiskinan	9,05 - 9,99	0,14 – 0,91	Terwujudnya Perlindungan sosial yang adaptif

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
		<p>bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat</p> <p>Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah</p> <p>Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau <i>urban renewal</i> pada area yang telah mengalami <i>urban decay</i> dalam suatu kawasan perkotaan.</p>				
Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Mandiri	4. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).	9. Rasio PDRB Industri pengolahan (%) 10. Rasio PDRB penyediaan akomodasi, makan & minum	41,20 5,60	42,00 8,20	Peningkatan produktivitas ekonomi daerah

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
Berbasis Sektor Unggulan	berbasis IPTEKIN	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	11. Jumlah kunjungan wisatawan	6.192.891	7.560.661	
		Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	12. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,96	8,07	
		Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, & iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.	13. Pertumbuhan Koperasi Berkualitas (%)	29,75	100	
		Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.	14. Tingkat pengangguran terbuka (%)	7,40 – 8,06	4,76 – 5,91	
			15. Indeks inovasi daerah	40-60	60,01-80	

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.				
		Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian				
		Modernisasi sarana produksi perikanan.				
		Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan megapolitan/metropolitan (urban tourism).				
		Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.				

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
		<p>Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.</p> <p>Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global</p> <p>Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan prosesbisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.</p> <p>Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.</p>				

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
		<p>Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.</p> <p>Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.</p> <p>Peningkatan produktivitas BUMD.</p> <p>Peningkatan kesempatan kerja atau penempatan tenaga kerja dalam rangka pelayanan ketenagakerjaan mencakup penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK), fasilitasi pencari kerja dengan pengguna kerja sehingga terjadinya penempatan tenaga kerja dan mendorong kesempatan kerja yang produktif serta mobilitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran dan pengangguran terbuka, baik di perdesaan maupun di perkotaan serta memenuhi kebutuhan</p>				

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
		pasar kerja baik secara nasional atau maupun internasional				
	5. Ekonomi hijau berkelanjutan	Pengembangan ekonomi hijau berbasis keunggulan wilayah	16.Indeks Ekonomi Hijau Daerah	64,05	83,06	Penerapan Ekonomi hijau berkelanjutan

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
		<p>Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga</p>				

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
6. Transformasi digital yang adaftif dan talenta digital		dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.	17.Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi	4,99	7,59	Terwujudnya Transformasi digital yang adaftif dan meningkatnya talenta digital
		Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.				
		Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Bandung.				
		Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui				

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
		upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).				

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
7. Integrasi ekonomi domestik dan global		Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)	18. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	21,33	22,18	Meningkatnya Integrasi ekonomi domestik dan global
		Peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat), terutama pada ruas dan Cipatat-Padalarang.	19. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	2,44	5,58	
		Elektrifikasi jalur KA dan peningkatan sarana/prasarana perkeretaapian, terutama untuk layanan perkeretaapian KA komuter di kawasan metropolitan Bandung.				
		Pengembangan kereta api cepat (HST/High Speed Train) Jakarta-Bandung-Cirebon- Semarang-Surakarta-Surabaya.				

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
	8. Meratanya pembangunan di wilayah pinggiran, serta integrasi pembangunan desa dan perkotaan	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya.	Kota dan Desa Maju, Inklusif dan BerkelaJutan 20. Indeks Kesulitan Geografis 21. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelalaJutan (%) 22. Persentase Desa Mandiri (%)	26,37 43,29 12,12	23,57 100 27,27	Pemerataan pembangunan di wilayah pinggiran, serta integrasi pembangunan desa dan perkotaan
		Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja				
		Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.				
		Penguatan infrastruktur perkotaan dan pedesaan serta pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelalaJutan, bertaraf global, dan berketahanan, terutama pada metropolitan Bandung, serta kawasan perkotaan padalarang.				

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
		Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan dan pedesaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)				
		Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.				
		Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan dan pedesaan				
		Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama metropolitan Bandung.				

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
		<p>Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.</p> <p>City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.</p> <p>Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.</p>				
Misi 3: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif	9. Meningkatnya tata kelola kolaboratif, adaptif dan berintegritas	<p>Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah</p> <p>Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.</p> <p>Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.</p> <p>Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.</p>	<p>23. Indeks Reformasi Birokrasi</p> <p>24. Indeks SPBE</p> <p>25. Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p>26. Opini Laporan Keuangan</p>	<p>74 – 80 (BB)</p> <p>3,50 – 3,85</p> <p>83</p> <p>WTP</p>	<p>90 – 100 (AA)</p> <p>4,60 – 5,00</p> <p>90</p> <p>WTP</p>	Terwujudnya pemerintahan yang kolaboratif, adaptif dan berintegritas

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
		<p>Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Pemda KBB, menuju penyelenggaraan Pemda Bandung Barat yang profesional dan bebas korupsi</p> <p>Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital</p> <p>Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta,reward, dan punishment, melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.</p> <p>Peningkatan kualitas dan pemantapan manajemen ASN berbasis nilai-nilai budaya lokal</p> <p>Pengembangan ekosistem inovasi dalam tata kelola pemerintahan</p> <p>Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.</p> <p>Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW</p> <p>Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan</p>				

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
		pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.				
Misi 4: Mewujudkan Kondusivitas dan Stabilitas Daerah	10. Meningkatnya kondusivitas wilayah	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.	27. Indeks Penyelenggaraan Keterteraman dan Ketertiban Umum	73,705	100	Terwujudnya kondusivitas wilayah
		Peningkatan keamanan dan penegakan hukum didaerah				
		Pencegahan dan penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat				
		Penguatan peran pemerintah daerah dlm mewujudkan kehidupan demokrasi ygsehat				
		Penguatan integritas partai politik				
	11. Stabilitas ekonomi daerah	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif (antara lain pinjaman daerah, KPBUD,	28. Tingkat inflasi 29. Persentase peningkatan PAD	4±1 5,89	4±1 161,64	Terkendalinya Stabilitas ekonomi daerah

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
		CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan TKD, serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dng prioritas nasional.				
		Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.				
		Penguatan pengendalian inflasi daerah.				
	12. Meningkatnya kerja sama strategis Regional	Penguatan kerjasama strategis antar daerah dan Tindaklanjut kerjasama antar daerah	30. Persentase kerja sama pemerintah daerah yang ditindaklanjuti	65	90	Peningkatan kerja sama strategis regional
Misi 5: Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlaq dan Berkarakter	13. Beragama bermaslahat dan berkebutuhan maju	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berdasarkan kepada Pancasila.		16,22	63,57	Terwujudnya kerukunan umat beragama dan berkebudayaan maju
		Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		9,6	100	
		Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.		93,16	99,82	
	14. Masyarakat inklusif, setara	Peningkatan ketahanan keluarga & lingk pendukung berbasis kearifan lokal.	34. Indeks pembangunan kualitas keluarga	70,6-71	80,6-81	Meningkatkan Kualitas

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
	gender dan keluarga yang berkualitas	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	35. Indeks pembangunan gender (IPG) 36. Indeks Pembangunan Pemuda	81,44	88,39	keluarga dan kesetaraan gender serta masyarakat inklusif
		Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.		43,85 – 45,00	45,01 – 50,00	
		Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.				
		Peningkatan sarana dan prasarana serta pembinaan keolahragaan				
Misi 6: Meningkatkan Pemerataan & Infrastruktur	15. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis.	Kualitas Lingkungan Hidup: 37. Indeks Kualitas lingkungan Hidup 38. Rumah tangga dengan	59,59	64,63	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
		Peningkatan upaya pelestarian hutan		5,94	77,44	

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
Wilayah Misi 7: Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar Misi 8: Meningkatkan Kualitas Lingkungan hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan	16. Meningkatnya ketahanan air dan kemandirian pangan	lindung dan ekosistem alami.	askes sanitasi aman (%)			
		Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.	Pengelolaan sampah: 39. Timbulan sampah terolah di Fasilitas pengelolaan sampah 40. Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah	2,20	85,35	
		Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	Ketahanan Energi, Air & Pangan Ketahanan Pangan 41. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	5,57	0,38	Peningkatan ketahanan air dan kemandirian pangan
		Penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan	Ketahanan Air 42. Kapasitas air baku (m ³ /derik)	4,55	11,33	
		Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan	43. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	27,48	100	
		Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water				

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
		prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian				
	17. Meningkatnya ketahanan bencana dan perubahan iklim	<p>Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.</p> <p>Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.</p> <p>Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.</p> <p>Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.).</p>	44. Indeks Ketahanan Daerah 45. Penurunan emisi GRK a. Kumulatif (Ton Co2eq)	0,5 (sedang) 256.969,37	0,7 (sedang) 2.579.482,89	Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
		Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.				
		Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas				
		Percepatan pelaksanaan reforma agraria.				

Sumber: Hasil Penyelarasan RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPD Kab. Bandung Barat, diolah 2024

BAB VI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang memuat perencanaan dan cita-cita jangka panjang daerah selama (20) dua puluh tahun ke depan. Sebagai dokumen yang secara umum bersifat teknokratik, RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045 disusun melalui proses-proses teknokratik yang berbasis riset. Pendekatan partisipatif juga digunakan dalam perumusan dokumen RPJPD ini melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan elemen-elemen dari luar pemerintah, yaitu melalui forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Pengumpulan data bagi penyusunan dokumen ini dilakukan melalui observasi, *focus group discussion* (FGD), wawancara mendalam, penggalian data sekunder melalui laporan-laporan yang berisi data-data yang relevan untuk digunakan dalam rangka perencanaan jangka panjang. Sehingga, dokumen ini merupakan dokumen perencanaan yang dihasilkan dari proses riset yang telah dilakukan dalam memetakan permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung Barat selama kurun waktu dua puluh tahun ke depan.

Dokumen RPJPD ini secara umum telah memuat permasalahan pembangunan jangka panjang yang dialami oleh Kabupaten Bandung Barat secara umum beserta dengan perumusan isu strategis yang perlu direspon yang bersifat jangka panjang. Isu-isu strategis yang telah disusun tersebut menjadi landasan untuk merumuskan perencanaan jangka panjang selama dua puluh tahun ke depan dalam bentuk kondisi-kondisi yang ingin dicapai. Kondisi-kondisi yang ingin dicapai tersebut disusun dalam bentuk perencanaan kinerja yang disusun dengan menggunakan metode bagan alir atau *cascading*.

Penggunaan metode bagan alir ini bertujuan untuk memastikan perencanaan yang dilakukan memiliki hubungan yang logis antara pemetaan masalah yang telah dilakukan dengan perencanaan kinerja yang telah disusun, sehingga terdapat keterkaitan yang erat antara isu strategis, visi, misi, arah kebijakan, hingga sasaran pokok. Keberadaan dokumen RPJPD Kabupaten Bandung Barat ini menjadi pedoman bagi proses pembangunan ke depannya, sehingga harapannya dokumen RPJPD ini dapat bermanfaat bagi penciptaan kondisi daerah Kabupaten Bandung Barat yang lebih baik ke depannya. Oleh karena sifatnya yang jangka panjang, RPJPD ini menjadi pedoman dan panduan bagi penyusunan perencanaan jangka menengah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan jangka pendek atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP) Kabupaten Bandung Barat ke depannya. Keberadaan dokumen RPJPD ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat secara umum ke depannya.

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan yang telah dirumuskan, dibutuhkan kaidah pelaksanaan yang menjadi pedoman bagi seluruh pihak untuk memastikan pelaksanaan kebijakan dalam RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045 dapat dilaksanakan secara optimal. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. RPJPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah dokumen bersama yang dimiliki oleh seluruh pihak, baik itu pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Oleh karenanya, seluruh pihak yang ada berkewajiban untuk mendukung cita-cita yang telah dituangkan ke dalam dokumen RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045 melalui berbagai bentuk partisipasi seperti kebijakan, program, dan aktivitas yang dapat mendukung pencapaian cita-cita tersebut sesuai dengan kapasitas serta kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pihak;

2. Setiap Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk memedomani dokumen RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045 dalam merumuskan visi, misi, dan program prioritas dari masing-masing Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Seluruh perangkat daerah (PD) maupun unit organisasi di lingkup Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat memiliki kewajiban untuk memedomani dokumen RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045 dalam setiap perumusan kebijakan dan perencanaan satuan instansi dan organisasi;
4. Perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang perencanaan maupun unit organisasi lain yang ditugaskan melalui peraturan yang berlaku lainnya memiliki kewajiban untuk mengawal konsistensi antara dokumen RPJPD Kabupaten Bandung Barat tahun 2025-2045 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya;
5. Apabila dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah jangka panjang terdapat perubahan kondisi-kondisi yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan-tujuan perencanaan yang telah ditetapkan sehingga diperlukan penyesuaian rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045, maka perubahan RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045 dapat dilakukan dengan memedomani beberapa ketuntutan sebagai berikut:
 - a. Perubahan yang dilakukan hanya terbatas pada penyesuaian kebijakan, sasaran, indikator, dan target. Sehingga, visi dan misi yang merupakan pengejawantahan cita-cita daerah dalam jangka panjang tidak dapat dilakukan perubahan;
 - b. Perubahan yang dilakukan hanya pada penyesuaian isu strategis yang menyesuaikan dengan kondisi perubahan zaman;

- c. Jika dokumen perencanaan pembangunan yang dipedomani dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Bandung Barat tahun 2025-2045 memiliki perbedaan dalam hal periodisasinya dan/atau masa berlakunya berakhir lebih cepat atau lebih lambat dari masa berlaku RPJPD (seperti SDGs, RTRW, dan rencana sektoral lainnya) maka pemerintah daerah dapat menggunakan kebijakannya yang dianggap masih relevan dan penting sesuai kondisi daerah sebagai acuan dalam perumusan kebijakan atau perencanaan turunannya, tanpa harus melakukan perubahan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Bandung Barat tahun 2025-2045;
- d. Perubahan dokumen RPJPD harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.2 Pembiayaan Pembangunan

Pembiayaan Pembangunan daerah menjadi salah satu faktor kunci bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah jangka panjang yang telah dirumuskan melalui dokumen RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045. Sumber pembiayaan pembangunan daerah tidak hanya terbatas pada APBD Kabupaten Bandung Barat, melainkan juga dapat meliputi berbagai potensi pembiayaan lain dan pembiayaan alternatif yang dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan. Implikasinya, peningkatan inovasi pembiayaan harus dilakukan melalui perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan mekanisme pembiayaan baru yang berpotensi meningkatkan sumber pembiayaan, peningkataan kelembagaan pembiayaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses bisnis, dan optimalisasi peran sektor keruangan daerah.

6.3 Manajemen Risiko

Dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang dapat menjadi tantangan atau hambatan pemerintah daerah untuk mewujudkan visi, misi, sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bandung Barat 2025-2045. Langkah antisipatif dalam mengelola ketidakpastian menjadi satu hal yang perlu dilakukan. Hal ini dapat diwujudkan dengan merumuskan langkah-langkah manajemen risiko.

Manajemen risiko merupakan sebuah konsep yang menunjukkan proses sistematis dan terstruktur dengan adanya dukungan budaya sadar risiko dalam mengelola risiko organisasi pada tingkat yang wajar sehingga memberikan dampak yang positif terhadap pencapaian sasaran organisasi. Tujuan utama manajemen risiko adalah untuk mengelola risiko dalam rangka mendukung dan memastikan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan daerah, mengidentifikasi, menganalisa, dan mengendalikan risiko di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam melakukan manajemen risiko terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan yaitu identifikasi risiko, penilaian risiko dan mitigasi risiko. Upaya mitigasi risiko bertujuan untuk meminimalisir dampak yang akan diterima organisasi terhadap sebuah risiko.

Dalam melakukan mitigasi risiko terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan, salah satunya adalah penentuan strategi penanganan yang terdiri dari penerimaan terhadap risiko, transfer risiko, mengurangi risiko dan menghindari risiko. Manajemen risiko di Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan sebelum penyusunan RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045, yang penyusunannya mengikuti lima unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern.



Pemerintah Kabupaten
Bandung Barat

Rancangan Akhir
**Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Bandung Barat**

Tahun 2025 – 2045